



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

Laporan Akhir

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD Kabupaten Lamandau

2025-2029

Tahun Anggaran 2024





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi dasar pedoman pelaksanaan pembangunan dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan suatu wilayah. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan tersebut dengan ruang lingkup berisi kondisi umum wilayah, analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Perumusan Skenario, dan Rekomendasi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029. Besar harapan penyusun, dokumen ini dapat memberikan manfaat dan mendorong peningkatan kualitas RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 yang mendukung pembangunan berkelanjutan secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung serta jasa lingkungan hidup wilayah.

Lamandau, Agustus 2024
Pj Bupati Lamandau

Salim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Ruang lingkup.....	4
1.5. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD.....	5
BAB 2. DASAR TEORI.....	8
2.1. Sejarah Terbentuknya Wilayah Perencanaan.....	8
2.2. Perkembangan Aktivitas Wilayah	12
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	12
2.2.2 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.....	15
BAB 3. KONDISI UMUM DAERAH.....	25
3.1. Kondisi Geografis Dan Administratif.....	25
3.1.1. Batas Administratif.....	25
3.1.2. Batas Ekologis.....	27
3.2. Kondisi Fisik.....	30
3.2.1. Topografi	30
3.2.2. Hidrologi.....	31
3.2.3. Geologi dan Jenis Tanah	33
3.2.4. Penggunaan Lahan	35
3.3. Kondisi Lingkungan Hidup	37
3.3.1. Daya Dukung Dan Daya Tampung	37
3.3.2. Jasa Lingkungan Hidup	43
3.3.3. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	73
3.3.4. Indeks Kualitas Lingkungan	76
3.3.5. Keanekaragaman Hayati.....	88
3.3.6. Dampak Dan Risiko Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.....	122
3.3.7. Perubahan Iklim	128
3.4. Kondisi Kependudukan.....	135
3.4.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	135
3.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	135
3.4.3 Komposisi Penduduk.....	137
3.5. Kondisi Perekonomian.....	139
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi	139
3.5.2 PDRB Perkapita	141
3.5.3 Laju Inflasi	142
3.5.4 Rasio Gini	143
3.6. Kondisi Sosial Budaya	143
3.6.1 Kondisi Kesejahteraan Sosial	143
3.6.2 Kondisi Kesehatan	148
3.6.3 Kondisi Pendidikan	149

3.6.4 Kondisi Sosial Keagamaan	150
3.7. Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB	151
3.8. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB	153
BAB 4. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	161
4.1. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai Target Nasional	164
4.2. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Tercapai Target Nasional	175
4.3. Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai Target Nasional	183
4.4. Indikator TPB Yang Tidak/Belum Ada Data	186
4.5. Isu Strategis	193
BAB 5. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI	232
5.1. Analisis Proyeksi Capaian TPB	232
5.2. Analisis Capaian Indikator TPB pada OPD	236
5.2.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	236
5.2.2. Bappeda	237
5.2.3. BPBD	238
5.2.4. BPS	241
5.2.5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	242
5.2.6. Dinas Kesehatan	243
5.2.7. Dinas Ketahanan Pangan	249
5.2.8. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	250
5.2.9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	253
5.2.10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	254
5.2.11. Dinas Pariwisata	256
5.2.12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	257
5.2.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	261
5.2.14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	262
5.2.15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	262
5.2.16. Dinas Perhubungan	265
5.2.17. Dinas Pertanian dan Perikanan	266
5.2.18. Dinas Sosial	266
5.2.19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	268
5.2.20. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	270
5.2.21. Inspektorat	273
5.2.22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	273
5.2.23. Satpol PP/Satpoldam	274
5.2.24. Sekretariat Daerah	274
5.3. Analisis Capaian Indikator pada OPD berdasarkan Proporsi Anggaran	276
5.4. Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung	300
BAB 6. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI	312
6.1. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan	312
6.2. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk TPB yang Tidak Memiliki Data	353
6.3. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan	361
BAB 7. KESIMPULAN	368
DAFTAR PUSTAKA	370

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Lamandau 2018- 2023	18
Tabel 2-2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin di Kabupaten Lamandau Tahun 2019 – 2023.....	19
Tabel 2-3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 – 2023	19
Tabel 2-4 Persentase Penduduk berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau Tahun 2021 – 2023	21
Tabel 2-5 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Lamandau 2020-2023.....	23
Tabel 2-6 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2019 - 2023	23
Tabel 2-7 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lamandau 2019-2023	24
Tabel 3-1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau	26
Tabel 3-2 Batas Ekologis.....	28
Tabel 3-3 Luas Wilayah menurut Kemiringan di Kabupaten Lamandau	30
Tabel 3-4 Sungai di Kabupaten Lamandau	31
Tabel 3-5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lamandau	32
Tabel 3-6 Jenis Geologi di Kabupaten Lamandau	33
Tabel 3-7 Jenis Geologi di Kabupaten Lamandau	34
Tabel 3-8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamandau.....	35
Tabel 3-9 Data, Parameter dan Rumus Daya Dukung Wilayah untuk Pertanian	37
Tabel 3-10 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Lamandau	38
Tabel 3-11 Data, Parameter dan Rumus Daya Dukung Wilayah untuk Permukiman	39
Tabel 3-12 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Lamandau	40
Tabel 3-13 Daya Dukung Air di Kabupaten Lamandau	42
Tabel 3-14 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Lamandau	44
Tabel 3-15 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih Kabupaten Lamandau	45
Tabel 3-16 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat Kabupaten Lamandau	47
Tabel 3-17 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Bakar Kabupaten Lamandau	48
Tabel 3-18 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lamandau.....	50
Tabel 3-19 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Kabupaten Lamandau.....	51
Tabel 3-20 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lamandau...	53
Tabel 3-21 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Lamandau	54
Tabel 3-22 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lamandau	56
Tabel 3-23 Jasa Lingkungan Hidup Pengolahan dan Pengurai Limbah Kabupaten Lamandau	57
Tabel 3-24 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Lamandau	59
Tabel 3-25 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Lamandau	60
Tabel 3-26 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendali Hama Penyakit Kabupaten Lamandau	61
Tabel 3-27 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Lamandau	63
Tabel 3-28 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Lamandau.....	64
Tabel 3-29 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Estetika Alam Kabupaten Lamandau	66

Tabel 3-30 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Lamandau	68
Tabel 3-31 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lamandau	69
Tabel 3-32 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer Kabupaten Lamandau	70
Tabel 3-33 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas Kabupaten Lamandau	72
Tabel 3-34 Ekoregion Kabupaten Lamandau.....	74
Tabel 3-35 Rencana Kawasan Hutan Nasional di Kabupaten Lamandau	76
Tabel 3-36 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Lamandau	79
Tabel 3-37 Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) di Kabupaten Lamandau	81
Tabel 3-38 Daftar Pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kabupaten Lamandau	83
Tabel 3-39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	84
Tabel 3-40 Luasan Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Tengah	87
Tabel 3-41 Kawasan Hutan Kabupaten Lamandau	88
Tabel 3-42 Daftar Fauna dan Flora di Kabupaten Lamandau	91
Tabel 3-43 Luas Bahaya Banjir tiap Kecamatan.....	123
Tabel 3-44 Luas Bahaya Bencana Tanah Longsor tiap Kecamatan	125
Tabel 3-45 Luas Bahaya Bencana Kebakaran Tiap Kecamatan	126
Tabel 3-46 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim.....	128
Tabel 3-47 Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU NET SINK 2030	134
Tabel 3-48 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamandau.....	135
Tabel 3-49 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	136
Tabel 3-50 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2023.....	137
Tabel 3-51 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia	138
Tabel 3-52 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	139
Tabel 3-53 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tiap Sektor Kabupaten Lamandau	140
Tabel 3-54 Distribusi PDRB ADHK tiap Sektor Kabupaten Lamandau.....	141
Tabel 3-55 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	141
Tabel 3-56 Rasio Gini Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	143
Tabel 3-57 Perkembangan IPM di Kabupaten Lamandau Tahun 2021-2023.....	144
Tabel 3-58 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Lamandau	148
Tabel 3-59 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Lamandau	149
Tabel 3-60 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Lamandau	150
Tabel 3-61 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.....	151
Tabel 3-62 Peran Filantropi dan Bisnis	154
Tabel 3-63 Peran Organisasi Masyarakat dan Media dalam Pencapaian TPB Kabupaten Lamandau	158
Tabel 4-1 Indikator TPB yang Tidak Relevan dengan Kabupaten Lamandau	162
Tabel 4-2 Rangkuman Capaian TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2023.....	162
Tabel 4-3 Tujuan Dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	166
Tabel 4-4 Tujuan Dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	176
Tabel 4-5 Tujuan Dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	184
Tabel 4-6 Tujuan Dan Target TPB yang Tidak Ada Data.....	187

Tabel 4-7 Daftar Isu Panjang	193
Tabel 4-8 Persandingan Isu dan Muatan Pasal 9 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2016	199
Tabel 4-9 Persandingan Isu dan Muatan Pasal 9 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016	205
Tabel 4-10 Justifikasi Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas.....	208
Tabel 4-11 Persandingan Isu Paling Strategis Terhadap Isu Strategis KLHS RPJPD	211
Tabel 4-12 Fasilitas Perumahan	212
Tabel 4-13 Jumlah Kejadian Bencana	213
Tabel 4-14 Jumlah Korban dan Kerugian Bencana Banjir	213
Tabel 4-15 Indikator Bencana	214
Tabel 4-16 Persentase Sampah Tertangani	218
Tabel 4-17 Angka Partisipasi Murni.....	221
Tabel 4-18 Angka Partisipasi Murni.....	221
Tabel 4-19 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Lamandau	222
Tabel 4-20 Rasio Gini Kabupaten Lamandau	223
Tabel 4-21 Crossing Analysis Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	225
Tabel 5-1 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB di Tahun 2029	233
Tabel 5-2 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD di Tahun 2029	234
Tabel 5-3 Capaian Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	236
Tabel 5-4 Capaian Indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau ..	237
Tabel 5-5 Capaian Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	238
Tabel 5-6 Capaian Indikator Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau	242
Tabel 5-7 Capaian Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ..	243
Tabel 5-8 Capaian Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	244
Tabel 5-9 Capaian Indikator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	250
Tabel 5-10 Capaian Indikator Dinas Komunikasi Kabupaten Lamandau.....	250
Tabel 5-11 Capaian Indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau	253
Tabel 5-12 Capaian Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	254
Tabel 5-13 Capaian Indikator Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	256
Tabel 5-14 Capaian Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau	257
Tabel 5-15 Capaian Indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau.....	261
Tabel 5-16 Capaian Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	262
Tabel 5-17 Capaian Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.....	262
Tabel 5-18 Capaian Indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	265
Tabel 5-19 Capaian Indikator Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	266
Tabel 5-20 Capaian Indikator Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	267
Tabel 5-21 Capaian Indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	268
Tabel 5-22 Capaian Indikator DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.....	271
Tabel 5-23 Capaian Indikator Inspektorat Kabupaten Lamandau	273
Tabel 5-24 Capaian Indikator Kesbangpol Kabupaten Lamandau	274
Tabel 5-25 Capaian Indikator Satpol PP/Satpoldam Kabupaten Lamandau	274
Tabel 5-26 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.....	275
Tabel 5-27 Capaian Indikator OPD Berdasarkan Proporsi Anggaran	278
Tabel 5-28 Capaian Indikator OPD Berdasarkan Kelompok Urusan	279
Tabel 5-29 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Air di Kabupaten Lamandau	301

Tabel 5-30 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Lamandau Tahun 2044	303
Tabel 5-31 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Lamandau Tahun 2029	303
Tabel 5-32 Kondisi Kebencanaan Kabupaten Lamandau	305
Tabel 5-33 Penduduk Terdampak Bencana Banjir	305
Tabel 5-34 Persentase Sampah Tertangani Kabupaten Lamandau	306
Tabel 5-35 Proyeksi Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (P2)	306
Tabel 5-36 Proyeksi Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (R2)	307
Tabel 5-37 Proyeksi Jasa lingkungan hidup pemurnian air (R4)	307
Tabel 5-38 Proyeksi Jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah (R5)	307
Tabel 5-39 Proyeksi Jasa lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata (C2)	308
Tabel 5-40 Proyeksi Indeks Kualitas Air Kabupaten Lamandau	308
Tabel 5-41 Proyeksi Jasa lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer	308
Tabel 5-42 Proyeksi Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lamandau	309
Tabel 5-43 Proyeksi Jasa lingkungan Hidup Pengaturan Iklim	309
Tabel 5-44 Proyeksi Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lamandau	311
Tabel 6-1 Keterkaitan Skenario Dengan Upaya Tambahan Terhadap Muatan Lingkungan	314
Tabel 6-2 Rekomendasi Pencapaian TPB Dengan Upaya Tambahan	326
Tabel 6-3 Rekomendasi Pencapaian TPB Yang Tidak Ada Data	354
Tabel 6-4 Rekomendasi Pencapaian TPB Tanpa Upaya Tambahan	362

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamandau	16
Gambar 2-2 Grafik Angka Harapan hidup di Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2023	17
Gambar 3-1 Grafik Persentase Luas tiap Kecamatan di Kabupaten Lamandau	26
Gambar 3-2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Lamandau	27
Gambar 3-3 Peta Batas Ekologis Kabupaten Lamandau	28
Gambar 3-4 Grafik Distribusi Kemiringan di Kabupaten Lamandau	30
Gambar 3-5 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Lamandau	31
Gambar 3-6 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lamandau	33
Gambar 3-7 Peta Jenis Geologi di Kabupaten Lamandau	34
Gambar 3-8 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Lamandau	35
Gambar 3-9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamandau	36
Gambar 3-10 Peta Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Lamandau	39
Gambar 3-11 Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lamandau	41
Gambar 3-12 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lamandau	43
Gambar 3-13 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Lamandau	44
Gambar 3-14 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih Kabupaten Lamandau	46
Gambar 3-15 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat Kabupaten Lamandau	47
Gambar 3-16 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Bakar Kabupaten Lamandau	49
Gambar 3-17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lamandau	50
Gambar 3-18 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Kabupaten Lamandau	52
Gambar 3-19 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lamandau	53
Gambar 3-20 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Lamandau	55
Gambar 3-21 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lamandau	56
Gambar 3-22 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Pengurai Limbah Kabupaten Lamandau	58
Gambar 3-23 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Lamandau	59
Gambar 3-24 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Lamandau	61
Gambar 3-25 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendali Hama Penyakit Kabupaten Lamandau	62
Gambar 3-26 Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Lamandau	64
Gambar 3-27 Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Lamandau	65
Gambar 3-28 Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Estetika Alam Kabupaten Lamandau	67
Gambar 3-29 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Lamandau	68
Gambar 3-30 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lamandau	70
Gambar 3-31 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer Kabupaten Lamandau	71
Gambar 3-32 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas Kabupaten Lamandau	73
Gambar 3-33 Ekoregion Kabupaten Lamandau	74
Gambar 3-34 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011 – 2030 Kabupaten Lamandau	75
Gambar 3-35 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kabupaten Lamandau	78
Gambar 3-36 Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Kabupaten Lamandau	80
Gambar 3-37 Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kabupaten Lamandau	82
Gambar 3-38 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	85
Gambar 3-39 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	86
Gambar 3-40 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	87
Gambar 3-41 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lamandau	89
Gambar 3-42 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Lamandau	123
Gambar 3-43 Peta Kawasan Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Lamandau	124

Gambar 3-44 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamandau ...	124
Gambar 3-45 Peta Kawasan Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamandau	125
Gambar 3-46 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lamandau	126
Gambar 3-47 Peta Kawasan Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lamandau	127
Gambar 3-48 Kuadran Kerentanan Perubahan Iklim	128
Gambar 3-49 Peta Kerentanan Iklim.....	132
Gambar 3-50 Peta FOLU Net Sink	133
Gambar 3-51 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023.....	136
Gambar 3-52 Piramida Penduduk Tahun 2023	138
Gambar 3-53 Laju Inflasi Kota Sampit Tahun 2023.....	142
Gambar 3-54 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	145
Gambar 3-55 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023.....	146
Gambar 3-56 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	147
Gambar 3-57 Prevalensi Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.....	149
Gambar 4-1 Capaian TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2023	163
Gambar 4-2 Capaian Umum TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2023	164
Gambar 4-3 Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB	165
Gambar 4-4 Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB	175
Gambar 4-5 Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB.....	183
Gambar 4-6 Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB.....	186
Gambar 4-7 Distribusi Jasa Lingkungan Penyedia Air	211
Gambar 4-8 Kejadian Bencana Banjir pada Tahun 2024	213
Gambar 4-9 Alih Fungsi Lahan Kabupaten Lamandau	215
Gambar 4-10 Peta Alih Fungsi Lahan Kabupaten Lamandau.....	216
Gambar 4-11 Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas.....	217
Gambar 4-12 Tumpukan Sampah.....	218
Gambar 4-13 Jasa Lingkungan Pengelolaan dan Pengurai Limbah	219
Gambar 4-14 (a) Kondisi Jalan Rusak (b) Jaringan Drainase Tersumbat Semak dan Sampah	220
Gambar 4-15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamandau Tahun 2012-2023	222
Gambar 4-16 Capaian Indikator Tujuan Berkelanjutan	224
Gambar 4-17 Capaian Indikator Tujuan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	224
Gambar 5-1 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB di Tahun 2029	234
Gambar 5-2 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB di Tahun 2029 Berdasarkan OPD	235
Gambar 5-3 Distribusi Anggaran TPB di Tahun 2023 berdasarkan OPD.....	276
Gambar 5-4 Rekapitulasi Anggaran TPB di Tahun 2023 berdasarkan OPD	277
Gambar 5-5 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Lamandau Tahun 2029..	300
Gambar 5-6 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Lamandau Tahun 2044	302
Gambar 5-7 Proyeksi Perubahan Suhu Rata-Rata Udara Tahunan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005	310
Gambar 5-8 Proyeksi Perubahan Curah Hujan Periode Tahun 2020-2049	310
Gambar 6-1 Skenario Pencapaian TPB dengan Upaya Tambahan	313
Gambar 6-2 Skenario Pencapaian TPB Tanpa Upaya Tambahan	361



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan yang terus menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15), disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di samping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk menyelaraskan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di mana salah satu urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang lingkungan hidup adalah penyusunan KLHS untuk KRP kabupaten/kota. Selain itu, dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dijelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan. Dalam pasal 320 disebutkan bahwa dokumen KLHS menjadi salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan KLHS RPJMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak Kebijakan, Rencana atau Program terhadap lingkungan atau sebaliknya menelaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan, Rencana atau Program. Kesemuanya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program dimana output KLHS adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan suatu saran untuk kebijakan, rencana atau program tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggaraan KLHS.

Adanya amanat dari peraturan-perundangan disertai dengan dinamika kabupaten yang terus berkembang menjadikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lamandau ini wajib untuk diselenggarakan. Dalam pelaksanaan kajian ini perlu dianalisis daya dukung dan daya tampung baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menjadi dasar keterdukungan dan ketertampungan Kabupaten Lamandau dalam mengambil kebijakan/program. Secara sederhana daya dukung diartikan bahwa persediaan sumberdaya alam lebih besar dari kebutuhan. Sedang daya tampung diartikan sebagai kemampuan alam untuk menyerap buangan lebih besar dari apa yang dibuang. Dalam kehidupan manusia yang begitu kompleks dan dinamika tinggi kebutuhan dan apa yang dibuang. Terkait dengan hal ini, maka dalam kajian yang akan dilaksanakan, dilakukan pula kajian penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Lamandau. Dengan demikian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau diharapkan integrasi KLHS dapat menjadi pedoman bagi pengembangan Kabupaten Lamandau khususnya dan diharapkan dalam kaitan yang lebih luas, mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 - k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MenLHK-II/2016 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
 - l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.
 - n. Surat Menteri Dalam Negeri No 660.11.2/8754/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan RPJPD tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD;
 - o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - p. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- q. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000;
- r. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000;
- s. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perijinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II;
- t. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.54/MENLHK/PKTL/PLA.1.1/B/3/2024 tentang Percepatan Pelaksanaan KLHS RPJPD Dan KLHS RPJMD;
- u. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5513/Bangda dan 660/5512/Bangda tentang Kebijakan Pembuatan KLHS RPJPD/RPJMD untuk Daerah PILSER 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan "Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)" adalah untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD sebagai pencapaian target TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Tujuan utama Kegiatan "Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)" adalah.

- a. Analisis kondisi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola beserta identifikasi waktu capaian
- b. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan melalui skenario alternatif dan rekomendasi dalam upaya pencapaian target
- c. Pengintegrasian hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Lamandau

1.4. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Substansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijelaskan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - 1. Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan. dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis dan dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dengan mempertimbangkan
 - Karakteristik wilayah;
 - Tingkat pentingnya potensi dampak;
 - Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;

- Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.
2. Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
Analisis paling sedikit memuat kajian
 - Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman Hayati.
 3. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan Hasil analisis menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program berupa:
 1. Perubahan tujuan atau target;
 2. Perubahan strategi pencapaian target;
 3. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
 4. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
 5. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
 - c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program memuat:
 1. Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program
 2. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

1.5. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD

Tahapan Pembuatan

Tahapan pembuatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD, sebagaimana pasal 3 yang dalam pembuatannya meliputi mekanisme utama pembuatan KLHS RPJMD, yaitu :

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD
- b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - 1) Kondisi umum daerah antara lain meliputi gambaran umum Kabupaten Lamandau, kondisi data daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk jasa lingkungan yang signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan neraca sumber daya alam, kondisi geografis wilayah, data demografi wilayah, kondisi lingkungan termasuk di dalamnya adalah kondisi pengelolaan sampah dan limbah serta kondisi kebencanaan daerah. Selain itu juga ditambahkan serta kondisi keuangan daerah dengan rentang waktu utama apabila telah tersedia secara valid;
 - 2) Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan
Capaian indikator berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - 3) Pembagian peran antara stakeholder;
berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah
- c. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan
Berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 1. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
 2. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan:
 - pencapaian target tanpa upaya tambahan;
 - pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 - potensi, daya saing dan inovasi daerah;
 - daya dukung dan daya tampung daerah; dan
 - pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.
Penjaminan kualitas dibuktikan dengan:
 - 1) Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD
 - 2) Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD
 - 3) Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan
 - 4) Laporan KLHS RPJMD

Tahapan Pelaksanaan

Mendasari sebagaimana ketentuan di atas, tahapan pelaksanaan penyusunan adalah, sebagai berikut:

- a. Asistensi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kegiatan asistensi dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai sebagai langkah menyamakan persepsi penyusunan KLHS RPJMD antara Kabupaten dan Provinsi.
- b. Kegiatan Kick off meeting yaitu pemaparan bab pendahuluan laporan utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), pengumpulan data informasi serta menyusun skenario pelaksanaan konsultasi publik.
- c. Kegiatan pada konsultasi publik I yaitu membuat daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan. Konsultasi publik I melibatkan peserta penilaian dan evaluasi hasil konsultasi publik.
- d. Kegiatan pada konsultasi publik II yaitu menyepakati rekomendasi hasil penyusunan skenario. Konsultasi publik II melibatkan peserta penilaian dan evaluasi hasil konsultasi publik I



BAB II DASAR TEORI

2.1. Sejarah Terbentuknya Wilayah Perencanaan

Kabupaten Lamandau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Murung Jaya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan. yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Apabila dirunut dari sejarah terbentuk dapat terbagi menjadi tiga fase yakni Kecamatan Nanga Bulik Sebelum Masa Kemerdekaan, Kecamatan Nanga Bulik pada Masa Kemerdekaan.

Kecamatan Nanga Bulik Sebelum Era Kemerdekaan

Dahulu Nanga Bulik merupakan bagian dari kerajaan Kotawaringin. Nama Nanga Bulik merujuk kepada lokasi dari permukiman yang berada di muara atau nanga dari Sungai Bulik. Sebelum berkembang menjadi kecamatan, Nanga Bulik hanya berupa area permukiman atau dukuh yang terdiri dari 6 buah rumah dihuni oleh 10 keluarga.

Pada masa itu kondisi geografis dari Nanga Bulik dianggap strategis oleh Kesultanan Kotawaringin dan pemerintah Belanda baik dari lokasinya dan juga ketersediaan sumber

daya alam. Melihat potensi tersebut kesultanan Kotawaringin dan Pemerintah Belanda kemudian mengutus seorang pangeran untuk menjadi pasedor atau setingkat pembantu camat untuk menjadi pengendali kehidupan masyarakat setempat. Cakupan kekuasaan dari Pasedor meliputi 7 (tujuh) desa yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamandau, Bulik, Menthobi, Palikodan, Belantikan, Delang dan Batangkawa yang nantinya dikenal sebagai Kecamatan Bulik, Lamandau, dan Delang. Beberapa hal yang mendorong penempatan Pasedor di Nanga Bulik adalah:

- Nanga Bulik merupakan pintu gerbang perekonomian dari DAS Lamandau, Bulik, Menthobi, Palikodan, Belantikan, Delang dan Batangkawa. karena lokasinya yang dapat dijangkau oleh jalur sungai dan jalur darat
- Kekayaan sumber daya alam berupa hasil hutan, perkebunan, peternakan hingga pertambangan dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di tujuh desa tersebut
- Terdapat modal dasar berupa rasa kebersamaan dan tali persaudaraan yang kuat antar penduduk setempat terutama karena persamaan asal-usul dan adat yang serumpun terutama dari masyarakat pedalaman Bulik, Lamandau, dan Delang (BULANG).
- Menjadi sarana untuk mendekatkan kerajaan Kotawaringin dengan masyarakat pedalaman

Pada tahun 1920 melihat prospek yang cukup menjanjikan dari Nanga Bulik, Pemerintah kerajaan Kotawaringin meningkatkan kedudukan Nanga Bulik yang semula hanya pembantu kecamatan menjadi ONDER DISTRIK atau setingkat kecamatan. Kemudian pada tahun 1939 Onder Distrik Nanga Bulik diubah menjadi Kecamatan Nanga Bulik dengan cakupan area yang sama dengan Onder Distrik dan merupakan satu-satunya kecamatan di Kotawaringin saat itu.

Kecamatan Nanga Bulik pada Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan yakni pada masa orde lama Indonesia masih dalam fase penyesuaian kehidupan bernegara, dalam hal ini termasuk menyusun tata pemerintahannya. Tepatnya tahun 1952 Kawedanan Pangkalan Bun (dulu Kesultanan Kotawaringin) menata kembali Tata Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan membentuk 4 (empat) buah kecamatan di wilayah Kawedanan Pangkalan Bun, yakni:

- Kecamatan Kotawaringin Utara dengan ibukota Tapin Bini
- Kecamatan Kotawaringin Selatan dengan ibukota Pangkalan Bun
- Kecamatan Kotawaringin Barat dengan ibukota Sukamara
- Kecamatan Kotawaringin Timur dengan ibukota Nanga Bulik

Tahun 1960 Kawedanan Pangkalan Bun dimekarkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II atau Dati II Kabupaten Kotawaringin Barat. Bersamaan dengan itu Kecamatan Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi Kawedanan Sukamara dan Kecamatan Kotawaringin Selatan menjadi Kawedanan Pangkalan Bun. Kecamatan Kotawaringin Utara dan Kotawaringin Timur digabung menjadi Kawedanan Nanga Bulik meliputi 7 desa di Das Lamandau, Bulik, Menthobi, Palikodan, Belantikan, Delang dan Batangkawa.

Pada masa orde baru, terjadi penataan pemerintahan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satu implikasinya adalah adanya pembentukan daerah otonom sehingga daerah-daerah eks kawedanan ditingkatkan menjadi Wilayah

Administratif (pembantu bupati). Namun sayangnya Kawedanan Nanga Bulik tidak dijadikan sebagai Wilayah Pembantu Bupati pada saat itu.

Kemudian pada masa reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang salah bagian pokoknya adalah tentang pemekaran suatu daerah. Peraturan inilah yang kemudian menjadi gerbang pembentukan Kabupaten Lamandau. Di dalamnya mengatur mengenai mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran daerah yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Daerah yang akan dibentuk, dihapus, digabung, dan/atau dimekarkan diusulkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD kepada Pemerintah;
- b. Pemerintah menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain;
- c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyampaikan pertimbangan untuk penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah Otonom

Proses Terbentuknya Kabupaten Lamandau

Awal mula pembentukan Kabupaten Lamandau adalah dengan adanya pertemuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan seluruh camat dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat pada 10 November 1999 yang menyosialisasikan rencana Pemkab Kotawaringin Barat memekarkan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada pertemuan tersebut dibahas rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kedudukan daerah Pembantu Bupati Sukamara menjadi Kabupaten Sukamara dengan cakupan wilayah Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam dan termasuk didalamnya Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang. Menanggapi hal tersebut, utusan-utusan dari Kecamatan Bulik dan Kecamatan Delang mengambil sikap tidak bersedia menandatangani / menolak kebijakan yang disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut.

Tanggal 11 November 1999 utusan dari Masyarakat Bulik menyampaikan hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada tokoh masyarakat Nanga Bulik. Menyikapi hal tersebut, tokoh masyarakat Nanga Bulik mengambil langkah dan mempersatukan visi dan misi untuk membentuk kabupaten sendiri yakni Kabupaten Lamandau. Tanggal 20 November 1999 Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, yang berada di Nanga Bulik, serta para unsur Muspika Kecamatan Bulik melakukan musyawarah dan jajak pendapat dengan hasil 97,36% menginginkan terbentuknya Kabupaten Lamandau dengan Nanga Bulik sebagai ibukotanya.

Dilain sisi masyarakat pedalaman Kecamatan Nanga Bulik, Lamandau dan Delang yang berada di perantauan melakukan studi kualitatif dalam upaya mendukung pemekaran Kabupaten Lamandau. Studi ini dibicarakan dalam pertemuan Kerukunan Tamuai Kotawaringin Barat di Palangkaraya pada 7 November 1999. Tanggal 10 November atas prakarsa Drs. Nahson Taway, diadakan pertemuan di Pangkalan Bun dengan mengundang tokoh masyarakat dari Kecamatan Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang dengan hasil Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Gubernur Kalimantan Tengah, agar wilayah bekas Kewedanaan Bulik (Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang) disatukan menjadi sebuah Kabupaten baru dengan lampiran studi kualitatif yang telah ditulis sebelumnya. Surat usulan tersebut ditandatangani oleh 8 (delapan) orang atas nama masyarakat pedalaman yakni:

1. CS. Phaing
2. Drs. Nahson Taway
3. Drs. Don F. Ringkin
4. Harigano Ringkas
5. Musringin
6. Sama Dj. Mamud
7. Helkia Penyang
8. Tommy Hermal Ibrahim

Pada tanggal 17 November 1999, Drs. Iba Tahan, MS, Inte Sartono, SH, Markos Dj. Mamud, S.Hut, Charles Rakam, S.Pd, melakukan ekspose melalui SKH Kalteng Pos untuk menjelaskan keinginan masyarakat Pedalaman Kotawaringin Barat menyatukan Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang dalam Kabupaten Lamandau. (SKH Kalteng Pos tanggal 18 November 1999, halaman 2).

Pada tanggal 4 Desember 1999 melalui juru bicara yaitu bapak H. Muchlisin pada Kunjungan Pejabat Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. Matlim Alang menyampaikan pernyataan sikap yang intinya menyatakan menolak bergabung dengan Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara hasil pemekaran serta mendukung sepenuhnya rencana Pembentukan Kabupaten Lamandau yang terdiri dari Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang.

Pada tanggal 6 Januari 2000 ketika kunjungan pejabat Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Bapak Rapiudin Hamarung, masyarakat Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang kembali menyampaikan pernyataan sikap secara tegas agar ketiga Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi Kabupaten Lamandau.

Tanggal 8 Juli 2000 atas prakarsa dari Forum Komunikasi Masyarakat Pedalaman Bulik, Lamandau dan Delang (FKMP-BULANG) dilaksanakan Musyawarah Besar Masyarakat Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang di Nanga Bulik, dalam rangka menyamakan Visi dan Misi pembentukan Kabupaten Lamandau (P3KL) setelah dilakukan Pemilihan Secara Demokratis maka terpilihlah Bapak Mozes Pause, SH sebagai Ketua Umum dan Bapak Tommy Hermal Ibrahim sebagai sekretaris umum.

Kemudian melalui Rapat Kerja P3KL maka disusunlah proposal Rencana Pembentukan Kabupaten Lamandau sebagai bahan ekspose di depan Independen Labsos Fisip UI di Hotel Wisata Jakarta tanggal 15 Oktober 2001.

Pada saat ekspose tersebut selain Bupati dan Ketua DPRD Kotawaringin Barat turut hadir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bapak San Marwan dan Bapak Ir. Kemal Naseri. Kemudian dari Kabupaten Kotawaringin Barat turut hadir Bapak Drs. Daud Juanda (Ass I Kabupaten Kotawaringin Barat) dan Bapak Drs. Wahyudi, M.Si. Sedangkan Utusan dari P3KL yaitu Bapak Mozes Pause, SH, Bapak Tommy Hermal Ibrahim, Bapak Andreas Nahan, S.IP, Bapak H. Arsyadi Madiyah, Bapak Drs. Frans Evendi.

Kemudian hasil Ekspose di Jakarta tersebut disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang pada tanggal 5 Februari 2002 di Nanga Bulik. Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dihadiri oleh P3KL terdiri dari:

1. Drs. Iba Tahan, MS
2. H. Arsyadi Madiyah
3. Idara Y. Kunum
4. H. Burhan
5. Ibramsyah Ambram

6. Darmawi Juwahir
7. Syubandi, HM.
8. Vincentius Huang
9. Drs. Frans Evendi
10. Imanuel Gerzon
11. Luyen, K
12. Evendi Buhing

Acara pelantikan Bapak Drs. Regol Cikar sebagai Pejabat Bupati Lamandau oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri di depan sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada tanggal 8 Juli 2002.

Tanggal 12 Juli 2002, aktivitas Kantor Bupati yang beralamat di jalan Tjilik Riwut No. 10 Nanga Bulik (eks Kantor Camat Bulik) mulai dibuka dengan jumlah personil pelaksana sebanyak 5 (lima) orang atas dasar instruksi Pejabat Bupati Lamandau. Adapun kelima orang tersebut adalah:

1. Andreas Nahan, S.IP
2. Ganti P. Kanisa, SSTP
3. H. Arsyadi Madiyah
4. Abdul Rasyid. S
5. Cahyano

Sebagai ungkapan rasa syukur atas Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 3 Agustus 2002 masyarakat Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang melaksanakan Acara Syukuran atas terbentuknya Kabupaten Lamandau yang dipusatkan di Bundaran Bukit Hibul yang merupakan Rencana Areal Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Bapak Drs. Nahson Taway), Biro Tata Praja Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati Kotawaringin Barat.

Dalam acara syukuran tersebut dilakukan Peletakan Prasasti Kabupaten Lamandau oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, atas nama Menteri Dalam Negeri, sekaligus penyerahan Hibah Lahan Perkantoran dari Masyarakat Nanga bulik oleh Bapak Muchtar Dhani, dkk atas nama masyarakat Nanga Bulik.

2.2. Perkembangan Aktivitas Wilayah

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten yang terbilang cukup baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih berusia kurang lebih 22 tahun. Setelah terbentuk tahun 2002 pada tahun 2009 disahkanlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan visi, misi dan sasaran sebagai berikut.

Visi

“Kabupaten Lamandau yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Budaya”

- **Maju**, berarti suatu kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Kabupaten Lamandau yang maju adalah harapan yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat dan pemerintah secara bersama-sama, kemajuan di berbagai bidang kehidupan mulai dari ekonomi hingga bidang sosial kemasyarakatan.

- **Mandiri**, berarti eksistensi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kabupaten Lamandau dapat mewujudkan kehidupan yang sejajar dan berdiri sederajat dengan daerah-daerah lain. Salah satu tiang penyangga kemandirian adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengolah potensi sumber daya alam yang dimiliki, tersedianya pribadi-pribadi yang berdaya tahan dan berdaya saing tinggi.
- **Sejahtera**, berarti terpenuhinya kebutuhan hidup. Di masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Lamandau diharapkan akan mengalami kecukupan hidup baik sandang, pangan, dan papan hingga kebutuhan lainnya.

Salah satu dasar kuat untuk membangun Kabupaten Lamandau ke depan adalah kebudayaan daerah sendiri. Kebudayaan yang dijadikan landasan pembangunan itu meliputi sistem nilai-nilai yang bersumber dari agama dan keyakinan masyarakat setempat, kearifan lokal, adat istiadat, hingga karakter dan jati diri yang dimiliki.

Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 tersebut maka akan ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
Adalah membangun karakter dan jati diri masyarakat yang kuat yaitu terbentuk pribadi yang taat menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, berbudi pekerti luhur, mempunyai toleransi tinggi, memiliki kesetiakawanan sosial, dan gemar bergotong royong.
- Mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**
Adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kemudahan akses layanan kesehatan, serta peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.**
Adalah mempercepat pembangunan daerah dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur transportasi, energi dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lainnya.
- Mewujudkan masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera.**
Adalah meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, dan terbukanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- Mewujudkan tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih**
Adalah meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

f. Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari

Adalah melaksanakan pembangunan dengan tetap keseimbangan alam dan tata guna lahan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. terprogram dan berkelanjutan, memberikan keindahan dan kenyamanan hidup, serta kelestarian lingkungan.

Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau, maka pembangunan Kabupaten Lamandau diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

- a. Mewujudkan masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandai:
 1. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
 2. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dalam menjalankan peribadatan.
 3. Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, budaya gotong royong, dan saling menghormati antar anggota masyarakat.
 4. Berkembangnya budaya produktif dalam kehidupan bermasyarakat.
 5. Terpelihara nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan.
 6. Terciptanya masyarakat yang mandiri dalam proses pembangunan.
- b. Mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai:
 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat.
 2. Terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung tuntasnya program pendidikan dasar dan lanjutan.
 3. Terciptanya pemerataan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 5. Makin meningkatnya keberdayaan dan partisipasi kaum perempuan, anak dan remaja dalam pembangunan.
- c. Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.
 1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah.
 2. Terbentuknya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang terintegrasi antara Kabupaten Lamandau dengan wilayah sekitarnya.
 3. Terpenuhi pasokan energi secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Kabupaten Lamandau dan sekitarnya.
 4. Tersedianya fasilitas lembaga ekonomi yang memadai sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Lamandau dan sekitarnya.
- d. Mewujudkan masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera.
 1. Meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan kestabilan politik dan keamanan di Kabupaten Lamandau.
 3. Meningkatnya pembangunan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

4. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.
 5. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis pada sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri manufaktur yang handal meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
 6. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat Kabupaten Lamandau secara riil melalui pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi.
 7. Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya angka pengangguran. Meningkatnya pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat di seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau.
- e. Mewujudkan tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih
1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di Lamandau yang bertanggungjawab pada tugas dan fungsinya.
 2. Meningkatnya kualitas layanan birokrasi yang mudah, murah dan berkualitas.
 3. Memperkuat peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat pemuka masyarakat dan partai politik dalam proses perumusan, pembuatan dan pengambilan keputusan atas kebijakan atau peraturan daerah.
 4. Menciptakan kerangka kehidupan demokratis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga perkembangan masyarakat tetap bisa dipertahankan dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan potensi dan kemampuan dasarnya.
 5. Menciptakan dan memperkuat pembangunan hukum yang mampu mengayomi, menjamin kepastian dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
- f. Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 2. Terwujudnya fungsi tata guna lahan yang dapat mendukung pengembangan wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 3. Terpeliharanya keanekaragaman sumber daya alam untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Lamandau yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2.2.2 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat

Apabila dalam sub bab sebelumnya telah dibahas rencana pembangunan jangka panjang yang merupakan langkah pembangunan di Kabupaten Lamandau. Maka selanjutnya akan dibahas mengenai kesejahteraan masyarakat yang merupakan capaian dari pembangunan. Terdapat beberapa aspek yang dapat menggambarkan perkembangan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

A. Kesehatan

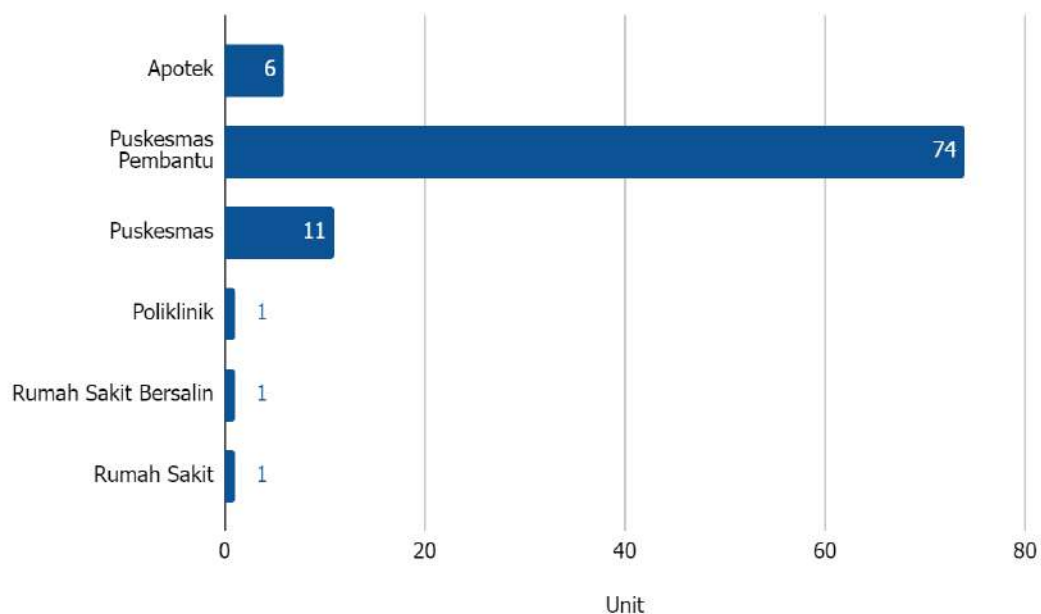
Kesehatan merupakan salah satu indikator esensial dalam mengindikasikan kualitas pembangunan. Indikator untuk menilai kesehatan penduduk dalam suatu daerah dapat dimulai sejak dalam kandungan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), saat kanak-kanak berupa Angka Kematian Balita (AKABA) serta kesehatan individu semasa hidup yang dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH).

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka

akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa Indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran.

1. Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan penduduk berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. diantaranya pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terdistribusi merata ke seluruh wilayah, pembangunan fasilitas kesehatan serta penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat.



Gambar 2-1 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamandau

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2023

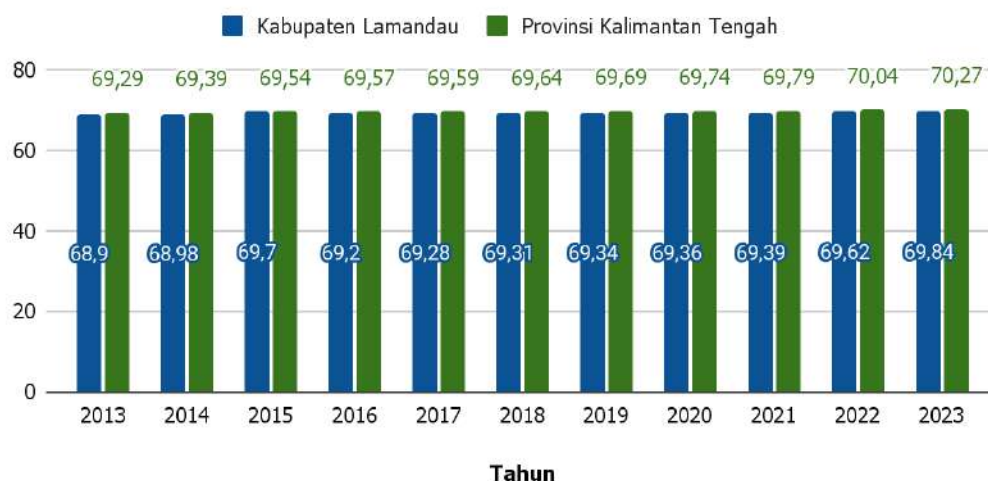
Grafik di atas menunjukkan bahwa jenis fasilitas Kesehatan Yang paling banyak yaitu puskesmas pembantu sebanyak 74 unit. Kemudian disusul oleh puskesmas sebanyak 11 unit. Sedangkan fasilitas yang jumlahnya paling sedikit yaitu rumah sakit bersalin dan rumah sakit umum sebanyak 1 unit yang berada di Kabupaten Lamandau.

2. Derajat dan status Kesehatan penduduk

Anak-anak merupakan cerminan masa depan suatu bangsa. Generasi yang sehat secara fisik dan mental merupakan aset bagi pembangunan bangsa. Dari merekalah yang nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa depan. Memastikan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak merupakan fokus utama dalam pembangunan di setiap negara. Kesehatan anak, khususnya bayi perlu diperhatikan karena mereka sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit menular dan kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan kematian. Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting untuk melihat status kesehatan penduduk dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan penduduk. AKB merupakan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Semakin tinggi nilai AKB semakin rendah mutu kesehatan daerah. Bayi, khususnya yang baru lahir, mempunyai risiko kematian yang tinggi. Menurut data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka kematian bayi.

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1994 angka kematian bayi di Kalimantan Tengah sebesar 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup, SDKI 1997 sebesar 55 kematian per 1.000 kelahiran hidup, serta terakhir tahun 2017 dari hasil SDKI 2017 menjadi 25 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk Angka Kematian Balita (AKABA) di Kalimantan Tengah, hasil SDKI pada tahun 1994 menunjukkan bahwa angka kematian balita sebesar 38 kematian per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun pada SDKI 1997 menjadi 67 kematian per 1.000 kelahiran hidup, serta terakhir tahun 2017 dari hasil SDKI 2017 menjadi 37 kematian per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 2-2 Grafik Angka Harapan hidup di Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2023

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau, 2023

Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamandau telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan hidup pada tahun 2013 tercatat 68,90 tahun kemudian tahun 2023 menjadi 69,84 tahun. Meskipun begitu, angka ini setiap tahunnya masih di bawah Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah, yang berarti bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamandau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Pendidikan

Indikator kesejahteraan selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri individu, Harapannya dengan pemberian pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup individu dalam suatu daerah. Pendidikan juga diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu pendidikan juga tertuang dalam tujuan nomor empat dari 17 tujuan SDGs yakni pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata

serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Beberapa indikator yang dapat menilai mutu pendidikan dalam suatu daerah di antaranya Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah.

1. Angka Melek Huruf

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya. Membaca merupakan salah satu pintu dalam mendapatkan pendidikan. Kemampuan membaca adalah dasar dari pendidikan yang baik. Dengan kemampuan membaca penduduk dapat mengakses lebih banyak informasi dan pengetahuan. Ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor kunci dalam pembangunan daerah.

Tabel 2-1 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Lamandau 2018- 2023

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15+ Tahun	99,46	99,45	99,07	97,71	99,36	99,11

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2023 masih ada sekitar 0,89 persen penduduk Kabupaten Lamandau usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 0 hingga 1 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya,

peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP). Indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian program wajib belajar 9 tahun adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar.

Tabel 2-2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin di Kabupaten Lamandau Tahun 2019 – 2023

Ijazah tertinggi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Punya Ijazah SD	9,09	10,92	14	6,29	8,81
SD/ MI Sederajat	39,87	38,7	32,84	35,81	34,42
SMP/ MTs Sederajat	20,24	18,73	22,75	22,98	24,62
SMA/ MA/ SMK ke atas	20,96	22,05	17,69	23,35	20,92
Diploma I/II	0,34	0,47	0,56	0,67	11,19
Akademi/DIII	1,71	2,26	1,95	1,28	
Diploma IV/S1/S2/S3	7,79	6,86	10,2	9,62	
Ijazah SMP ke Atas	51,04	50,37	53,16	57,9	56,77

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023

3. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari (SDGs) adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2-3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 – 2023

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7-12 Tahun	99,79	99,16	99,07	99,44	98,28
13-15 Tahun	97,24	97,06	96,9	97,41	97,23
16-18 Tahun	71,29	71,67	71,31	70,17	70,31

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 tahun bila dibandingkan dengan tahun 2019. Namun APS pada kelompok umur 7-12 sebesar 98,28 persen menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga penduduk Kabupaten Lamandau usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah sudah cukup jarang. APS pada kelompok usia 17-12 tahun masih cukup besar bila

dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 2,77 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Bahkan pada kelompok umur 16-18 tahun, persentase penduduk Kabupaten Lamandau yang belum mengenyam pendidikan mencapai 29,69 persen.

C. Ketenagakerjaan

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas dan berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 mencapai 53.325 jiwa meningkat 8.090 jiwa dari tahun 2022 yang berjumlah 45.235 orang. Dari angkatan kerja ini, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 sejumlah 51.552 jiwa meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 43.694 orang, sedangkan sisanya merupakan pengangguran terbuka (3,32%). TPAK Kabupaten Lamandau tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 70,30% pada tahun 2022 menjadi 69,01% pada tahun 2023.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi tiga sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta

bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan). Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023, di Kabupaten Lamandau secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menurun yaitu dari 46,22% persen pada tahun 2022 menjadi 43,19%. Selain itu, penduduk yang bekerja pada sektor jasa mengalami peningkatan dari 46,51% pada tahun 2022 menjadi 44,71% pada tahun 2023. Di sisi lain, kondisi sektor industri/ manufaktur terjadi peningkatan signifikan dari 7,27% pada tahun 2022 menjadi 12,10% pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja bergeser secara perlahan ke sektor sekunder berupa industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi) pada tahun 2023. Data-data tersebut secara ringkas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2-4 Persentase Penduduk berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau Tahun 2021 – 2023

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan)	52,32	46,22	43,19
Industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi)	12,2	7,27	12,1
Jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa)	35,49	46,51	44,71

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau, 2023

D. Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok

penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rata-rata per kapita dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan rata-rata pengeluaran per kapita bukan makanan pada kelompok pengeluaran barang dan jasa, pakaian, dan lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita pada pengeluaran barang dan jasa menurun menjadi Rp 175.094,-. Rata-rata pengeluaran per kapita pakaian dan lainnya menurun menjadi Rp 40.958,- dan Rp 85.808,- di tahun 2022. Sementara itu, terdapat peningkatan pada rata-rata pengeluaran per kapita perumahan menjadi Rp 547.052,-. Untuk pengeluaran per kapita pada pengeluaran barang tahan lama terjadi peningkatan menjadi Rp 124.886,-. Jika peningkatan pada kelompok pengeluaran perumahan tersebut dirinci seperti sewa rumah, listrik, air, gas dan kebutuhan perumahan lainnya, memberikan arti bahwa penduduk masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Di sisi lain, peningkatan pada kelompok pengeluaran barang tahan lama menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan pada penduduk Kabupaten Lamandau untuk berinvestasi pada barang yang memiliki nilai guna tinggi dalam jangka waktu yang lama.

E. Perumahan dan Lingkungan

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No. 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas, rumah yang berlantai bukan tanah mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, 100,00 persen pada tahun 2020 dan 2023 menjadi 99,25. Pada tahun 2023 hampir semua rumah tangga Kabupaten Lamandau memiliki rumah dengan lantai bukan tanah. Secara umum dari tahun 2020 hingga tahun 2023, sangat sedikit

rumah yang berlantaikan tanah di Kabupaten Lamandau, yaitu kurang dari satu persen.

Tabel 2-5 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Lamandau 2020-2023

Persentase Indikator Kualitas Perumahan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai Bukan Tanah	100	100	99,66	99,25
Atas beton, genteng, sirap, seng, asbes	99,38	98,64	87,28	98,91
Dinding terluas tembok dan kayu	100	97,8	100	98,52
Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita >10 m ²	78,97	87,33	87,18	92,28

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023

2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Persentase rumah tangga di Kabupaten Lamandau yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum meningkat sebesar 6,12 persen atau tercatat 51,64 persen pada tahun 2023. Pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan 4,76 persen di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 49,03 persen. Sementara itu, untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih pada tahun 2023 sebesar 75,21 persen, turun 0,83 persen dibandingkan tahun 2022.

Tabel 2-6 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2019 - 2023

Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber air minum utama air kemasan, air isi ulang dan ledeng	45,7	50,46	49,03	45,55	51,64
Memiliki akses air minum bersih	75,52	77,95	67,26	76,04	75,21
Jamban sendiri	83,38	86,03	86,33	80,63	88,39
Jamban sendiri dengan tangki septik	76,14	82,34	76,34	75,97	74,37
Sumber penerangan listrik	97,06	96,88	95,48	94,53	94,64

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023

F. Kemiskinan dan Ketimpangan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan selama periode 2019-2023, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 430.656,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp 634,710,-.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 mengalami peningkatan secara umum selama periode 2019-2021, di mana nilai tahun 2019 sebesar 0,22 dan tahun 2021 menjadi 0,56. Akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,33. P1 yang meningkat menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2019, nilai P2 meningkat secara signifikan yaitu 0,11 poin di tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,07. P2 meningkat berarti kemiskinan di Kabupaten Lamandau semakin parah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan pada tahun 2023. Di samping itu, nilai P1 dan P2 Kabupaten Lamandau selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dalam empat tahun terakhir. Nilai P1 dan P2 tahun 2023 berturut-turut 0,33 dan 0,07.

Tabel 2-7 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Lamandau 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan	430,656	479,514	539,744	588,591	634,710
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,22	0,36	0,56	0,37	0,33
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,03	0,09	0,11	0,06	0,07

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023



BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1. Kondisi Geografis Dan Administratif

3.1.1. Batas Administratif

Secara astronomis, Kabupaten Lamandau terletak antara 1°19' Lintang Selatan dan 3°36' Lintang Selatan dan antara 110°25' Bujur Timur dan 112°50' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lamandau sebesar 7.680,84 km² atau 5% dari Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Kabupaten Lamandau berjarak 519 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya dan Berjarak 166 km dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Batas wilayah Kabupaten Lamandau secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan sebagian dengan Kabupaten Sukamara
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, sebagian dengan Kabupaten Seruyan

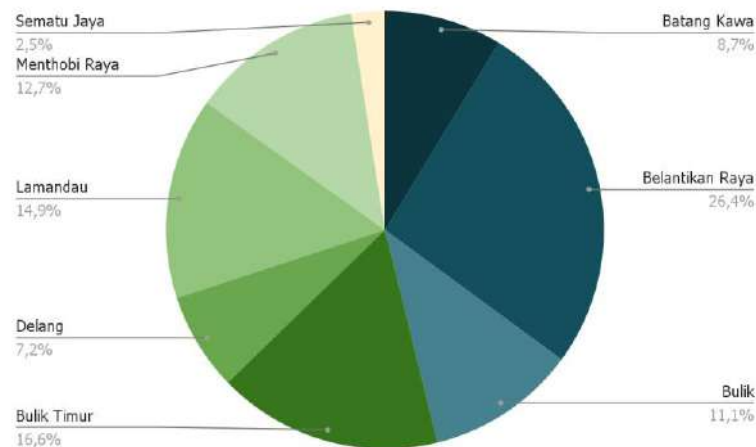
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat

Tabel 3-1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Luas (ha)
(1)	(2)	(3)
1	Batang Kawa	66.870,13
2	Belantikan Raya	202.503,09
3	Bulik	85.121,85
4	Bulik Timur	127.341,34
5	Delang	55.568,09
6	Lamandau	114.382,13
7	Menthobi Raya	97.258,37
8	Sematu Jaya	19.039,37
Luas Kabupaten Lamandau		768.084,30

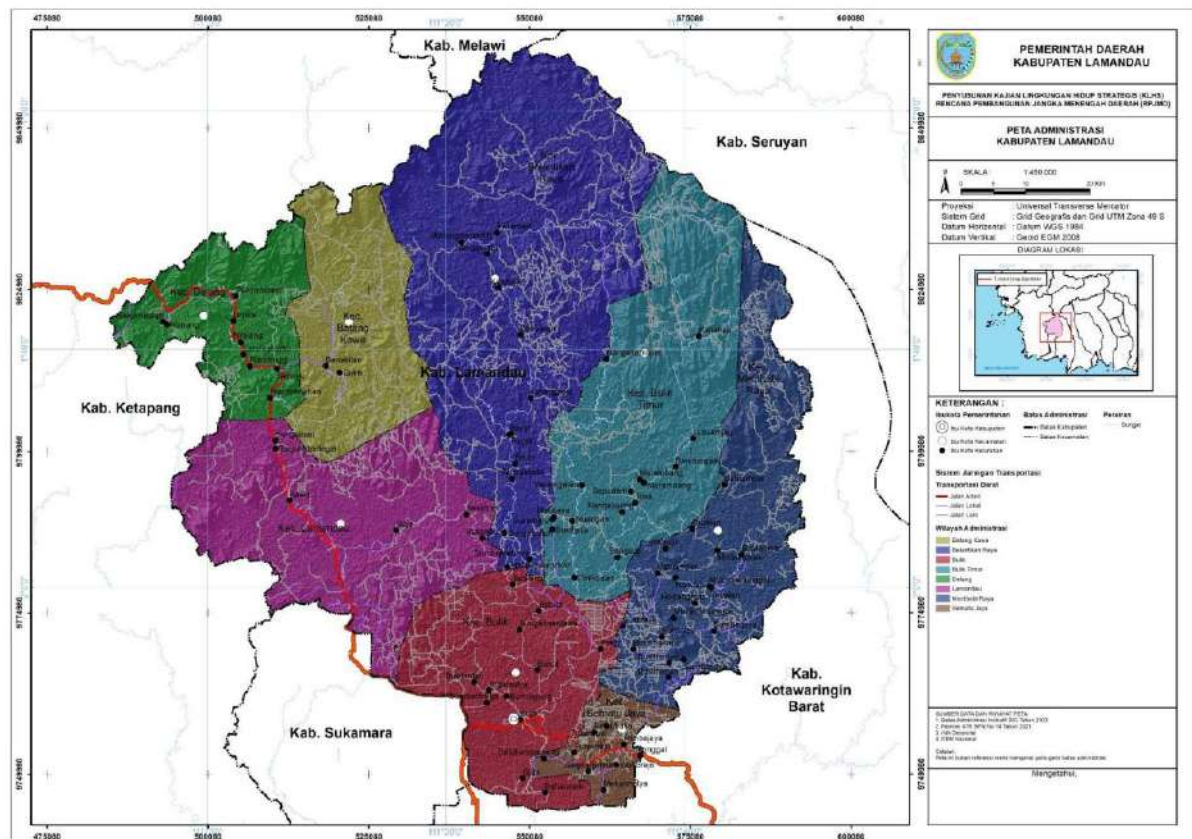
Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

Apabila ditinjau dari luasan tiap kecamatan, kecamatan dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Belantikan Raya dengan luas 202.503,09 ha atau sebesar 26,36% dari total luasan Kabupaten Lamandau. Sedangkan untuk kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan luasan 19.039,37 ha atau sebesar 2,5% dari luasan wilayah Kabupaten Lamandau.



Gambar 3-1 Grafik Persentase Luas tiap Kecamatan di Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

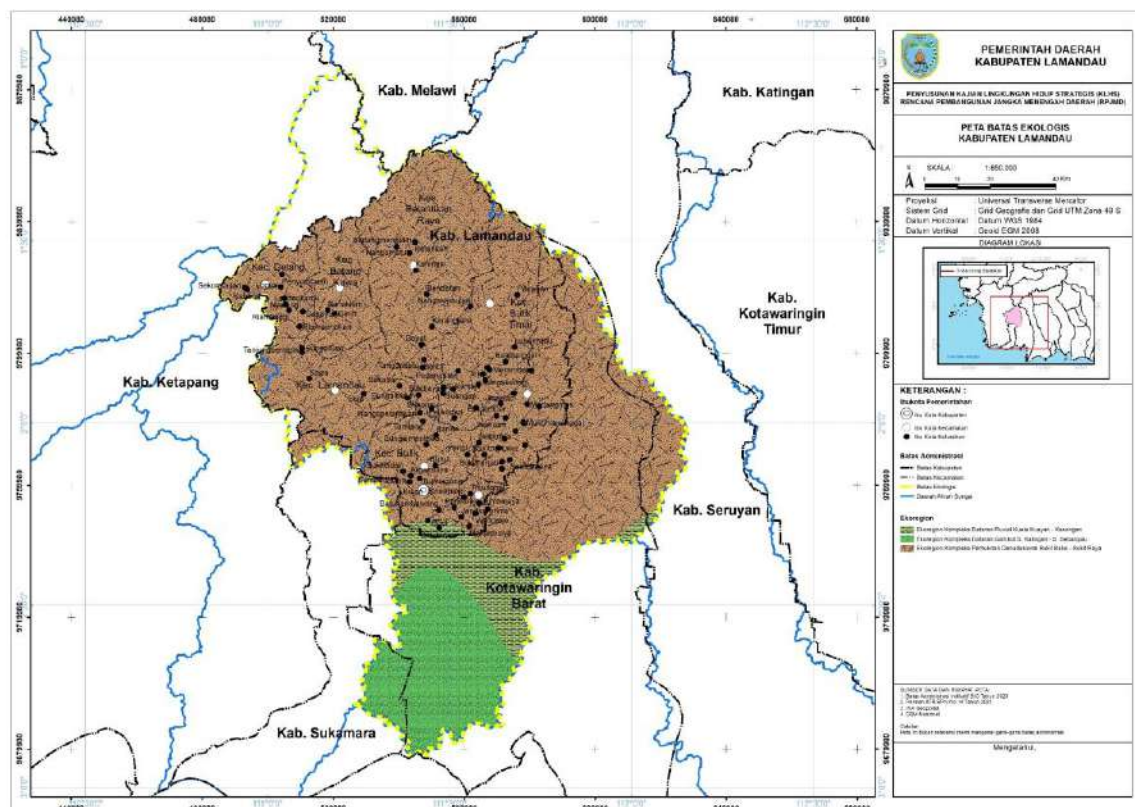


Gambar 3-2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.1.2. Batas Ekologis

Lingkup KLHS juga memasukkan wilayah Ekologis dalam mengkaji dan melakukan analisis kondisi lingkungan hidup terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah ekologis ini didasari atas data Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Cekungan Air Tanah (CAT) serta bentanglahan



Gambar 3-3 Peta Batas Ekologis Kabupaten Lamandau

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air, udara), di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Apabila dilihat dari peta di atas bahwa keseluruhan Kabupaten Lamandau berada pada satu batas ekologis yang sama. Hal ini akan berimplikasi pada suatu aktivitas pada titik tertentu dapat berdampak pada bagian lain di Kabupaten Lamandau. Tidak hanya pada Kabupaten Lamandau saja dampak yang dihasilkan juga akan mempengaruhi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya, apabila terdapat kegiatan pada kabupaten lain pada satu batas ekologis maka dampak juga akan terasa di Kabupaten Lamandau. Luasan Kabupaten yang berada dalam satu batas ekologis dengan Kabupaten Lamandau tersaji sebagai berikut,

Tabel 3-2 Batas Ekologis

Kabupaten	Kecamatan	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Kuala Kuayan - Kasongan	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Katingan - S. Sebangau	Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Bukit Baka - Bukit Raya	Total (Ha)
Kotawaringin Barat	Arut Selatan	48.814,10	88.437,02	53.296,19	190.547,31
	Arut Utara	3.037,92		166.519,53	169.557,46
	Kotawaringin Lama	27.570,67	53.113,16	58,36	80.742,19
	Kumai		136,38		136,38
	Pangkalan Banteng	1.040,32			1.040,32
	Pangkalan Lada	6.991,36		6.197,57	13.188,94

Kabupaten	Kecamatan	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Kuala Kuayan - Kasongan	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Katingan - S. Sebangau	Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Bukit Baka - Bukit Raya	Total (Ha)
Kotawaringin Barat Total		87.454,37	141.686,56	22.6071,65	455.212,59
Lamandau	Batang Kawa			66.870,14	66.870,14
	Belantikan Raya			202.503,09	202.503,09
	Bulik	5.804,99		74.461,34	80.266,34
	Bulik Timur			127.341,52	127.341,52
	Delang			55.568,08	55.568,08
	Lamandau			114.392,70	114.392,70
	Menthobi Raya			97.258,18	97.258,18
	Sematu Jaya	201,87		18.837,50	19.039,37
Lamandau Total		6.006,86		757.232,56	763.239,43
Seruyan	Batu Ampar	5,31		671,81	677,12
	Seruyan Tengah	1370,56		40.038,81	41.409,37
	Suling Tambun			2.283,90	2.283,90
	Seruyan Total	1.375,88		42.994,52	44.370,39
Sukamara	Pantai Lunci		4.528,63		4528,63
	Permata Kecubung	224,96		21898,74	22123,70
	Sukamara	16,12	24.043,10		24059,22
Sukamara Total		241,08	28.571,73	21.898,74	50.711,55
Total Keseluruhan		95.078,19	170.258,29	1.048.197,47	1.313.533,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

3.2. Kondisi Fisik

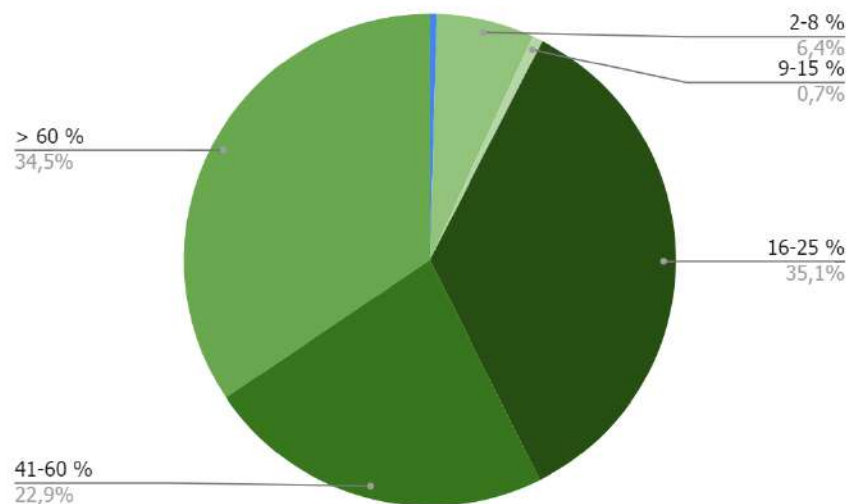
3.2.1. Topografi

Kabupaten Lamandau memiliki kemiringan yang bervariasi mulai dari datar yakni <2% hingga sangat curam yakni >60%. Kondisi kelerengan dari Kabupaten Lamandau disajikan pada tabel berikut

Tabel 3-3 Luas Wilayah menurut Kemiringan di Kabupaten Lamandau

No	Kemiringan	Luas (ha)
(1)	(2)	(3)
1	< 2 % (Datar)	3.470,77
2	2-8 % (Sangat Landai)	49.236,00
3	9-15 % (Landai)	5.327,92
4	16-25 % (Agak Curam)	269.406,64
5	41-60 % (Sangat Curam)	175.963,47
6	> 60 % (Jurang)	264.679,57
Kabupaten Lamandau		768.084,36

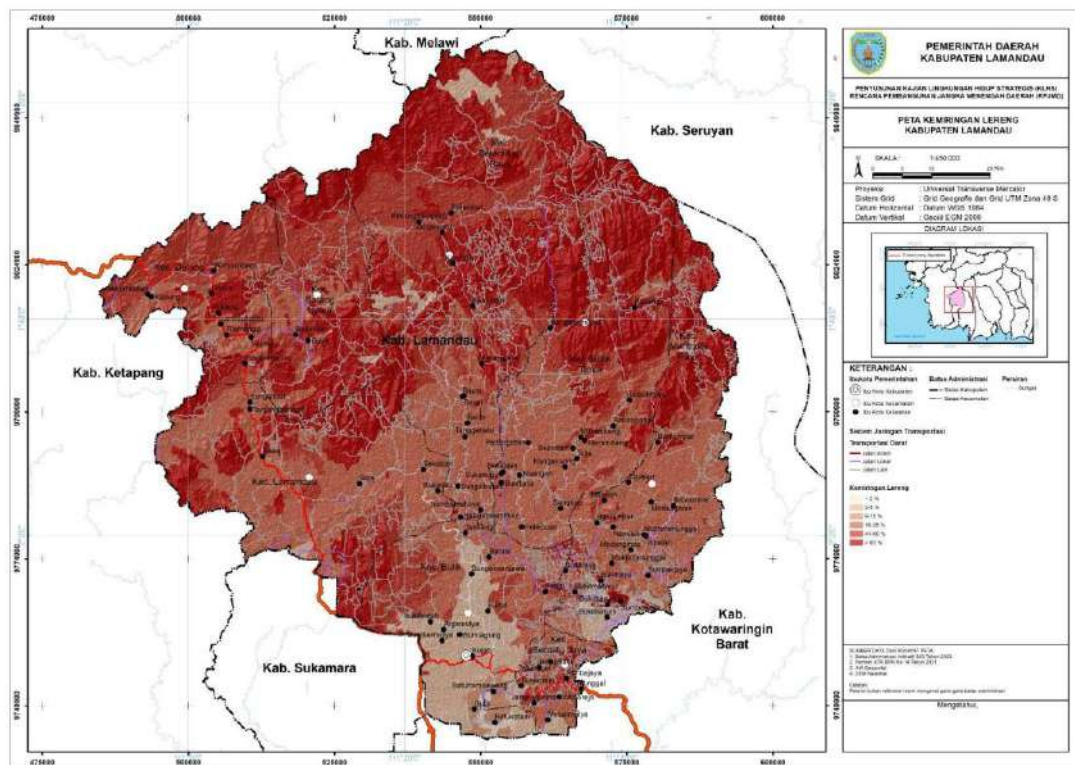
Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau



Gambar 3-4 Grafik Distribusi Kemiringan di Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

Apabila dilihat dari persentase tiap kelas kemiringan, distribusi terbesar berada di kelas kemiringan 16-25% yakni sebesar 35,1% dari total luasan wilayah dan kelas kemiringan >60% dengan distribusi 34,5% dari luas Kabupaten Lamandau.



Gambar 3-5 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.2.2. Hidrologi

3.2.2.1 Pola Aliran Sungai

Beberapa faktor yang mempengaruhi pola aliran sungai adalah topografi, morfologi, dan kondisi geologi dari daerah tersebut. Sehingga sebelum membahas mengenai pola aliran sungai perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai beberapa aspek tersebut. Sifat fisik batuan Kabupaten Lamandau tersusun oleh batuan beku baik plutonik dan vulkanik tua yang menembus batuan metamorf. Oleh sebab itu, batuan di daerah tersebut bersifat keras dan impermeabel dan berpengaruh pada limpasan air permukaan yang kemudian menjadi sungai-sungai permukaan. Di samping itu, Kabupaten Lamandau juga memiliki berbagai struktur sesar dan kekar. Kondisi tersebut menjadikan sungai-sungai utama yang mengalir di cekungan-cekungan (basin) antara lain adalah Sungai Kenambai, Sungai Palikodan, Sungai Bulik, dan Sungai Lamandau. Karakteristik dari sungai di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut.

Tabel 3-4 Sungai di Kabupaten Lamandau

Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat dilayari (km)	Rata-rata	
			Kedalaman (m)	Lebar (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sungai Bulik	45	45	5	30
Sungai Lamandau	65	65	6	65
Sungai Belantikan	52	52	4	23
Sungai Matu	21	21	3,5	8
Sungai Batangkawa	65	65	6	25

Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat dilayari (km)	Rata-rata	
			Kedalaman (m)	Lebar (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sungai Delang	57	40	5	18
Sungai Kungkung	20		2	4

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

Apabila dilakukan pengamatan dari citra terlihat beberapa tipe pola aliran sungai di Kabupaten Lamandau. Beberapa pola alirannya yakni Deranged, Pola Paralel, dan Pola Dendritik. Pola Deranged merupakan pola yang tidak teratur dengan aliran sungai pendek mendominasi. Pola deranged sering ditemui di anak-anak sungai (tributaries) yang mengalir ke sungai-sungai utama. Pola ini dapat dijumpai hampir di seluruh Wilayah Lamandau. Pola kedua adalah pola paralel-rektangular dengan bentuk anak sungai utama hampir sejajar dan mengalir ke sungai utama serta arah anak sungai yang tegak lurus satu sama lain. Pola ini berkembang pada daerah yang secara kuat dikontrol oleh struktur pada lereng-lereng seperti di blok punggungan sesar, pegunungan/perbukitan antiklinal, dan sesar-sesar yang sejajar. Pola ini dapat ditemui di sisi utara Kabupaten Lamandau yakni pada Kecamatan Bulik Timur, Menthobi Raya, dan Belantikan Raya.

Pola yang terakhir adalah pola dendritik. Pola ini menyerupai sistem akar pada tumbuhan dan dapat ditemui pada dataran dengan baruan yang seragam dan homogen. Di Kabupaten Lamandau pola ini dapat ditemui pada bagian selatan yakni di Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya.

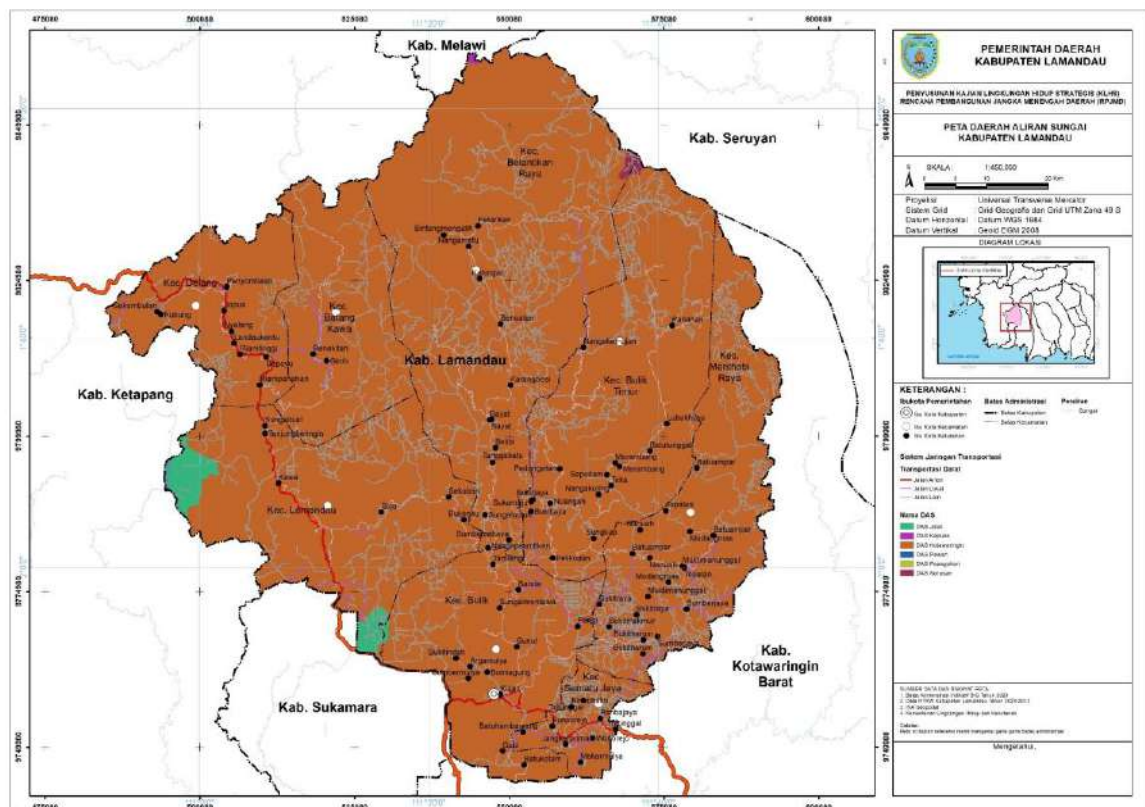
3.2.2.2 Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Lamandau terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS terbesar adalah DAS Lamandau dan DAS Batangkawa dengan luasan masing-masing mencapai 13.000 ha atau seluas 20% dari total keseluruhan Kabupaten Lamandau. Sedangkan untuk DAS terkecil adalah DAS Kungkung yang melingkupi 4.000 ha atau 6% dari total luas Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lamandau

Kecamatan	Nama DAS					
	Jelai	Kapuas	Kotawaringin	Pawan	Pesaguan	Seruyan
Batang Kawa			67.375,16			
Belantikan Raya		309,62	202.877,51			831,15
Bulik	347,55		82.606,47			
Bulik Timur			127.850,86			465,98
Delang	153,64		55.740,14	22,21	71,09	
Lamandau	8.510,72		109.625,72			
Menthobi Raya			98.011,03			10,65
Sematu Jaya			19.196,22			
Lamandau	9.011,92	309,62	763.283,11	22,21	71,09	1307,78

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau



Gambar 3-6 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lamandau
Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.2.3. Geologi dan Jenis Tanah

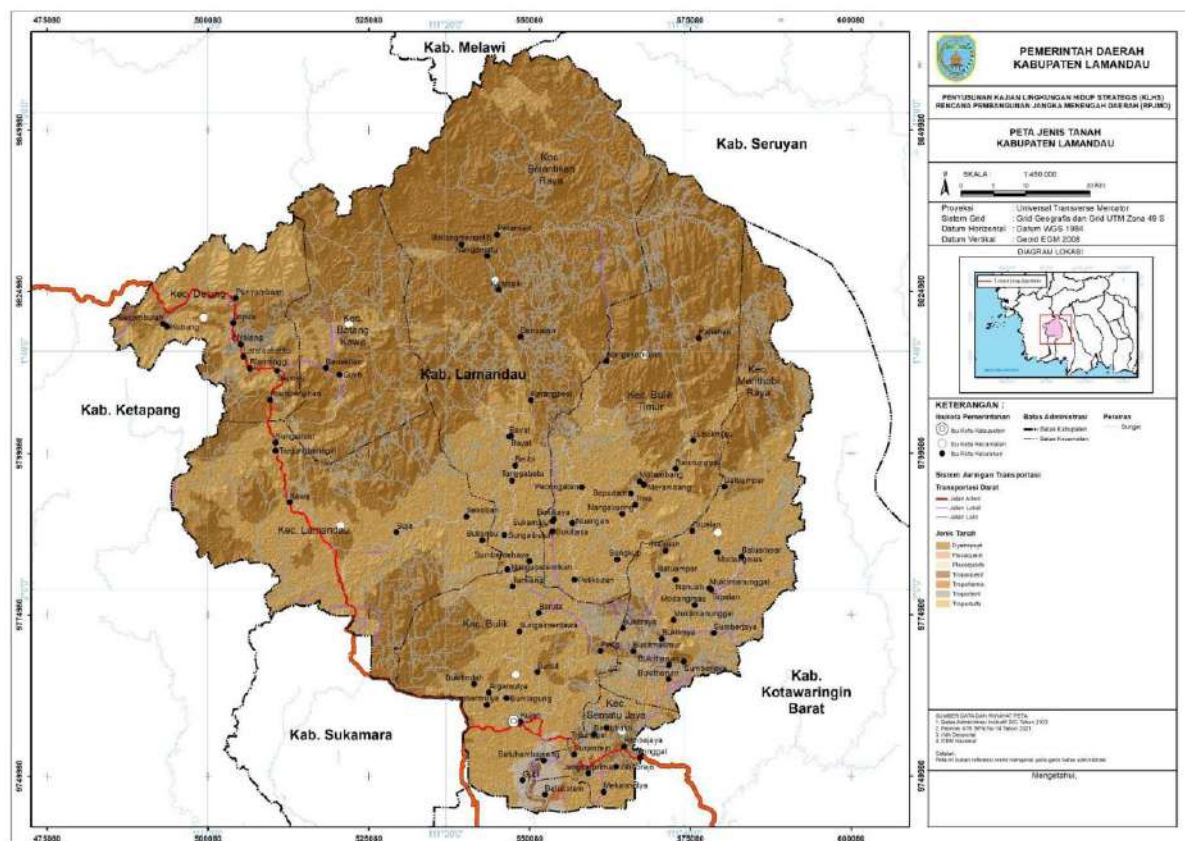
3.2.3.1 Jenis Geologi

Kabupaten Lamandau terdiri dari 7 jenis geologi yakni batuan GA berapi, batuan gunungapi, batuan terobosan sintang, endapan rawa, formasi dahor, granit sukadana, dan tonalit sepauk. Jenis geologi yang mendominasi adalah jenis Granit Sukadana dengan luas 341.928,18 ha atau sebesar 44,52%. Sedangkan untuk luasan terkecil adalah jenis Batuan Terobosan Sintang atau sebesar 0,01% dari luasan Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-6 Jenis Geologi di Kabupaten Lamandau

Jenis Geologi	Luas (ha)	Persentase
(1)	(2)	(2)
Tonalit Sepauk	187.399,44	24,40%
Granit Sukadana	341.928,18	44,52%
Formasi Dahor	692,48	0,09%
Endapan Rawa	15.331,9	2,00%
Batuan Terobosan Sintang	89,28	0,01%
Batuan Gunungapi	167.135,42	21,76%
Batuan GA Berapi	55.507,66	7,23%

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau



Gambar 3-8 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.2.4. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari penggunaan lahannya, terdapat 14 penggunaan lahan di Kabupaten Lamandau, yakni transmigrasi, tanah terbuka, pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, pertambangan, perkebunan, pemukiman, hutan tanaman, hutan rawa sekunder, hutan lahan kering sekunder, hutan lahan kering primer, belukar rawa, belukar, dan badan air.

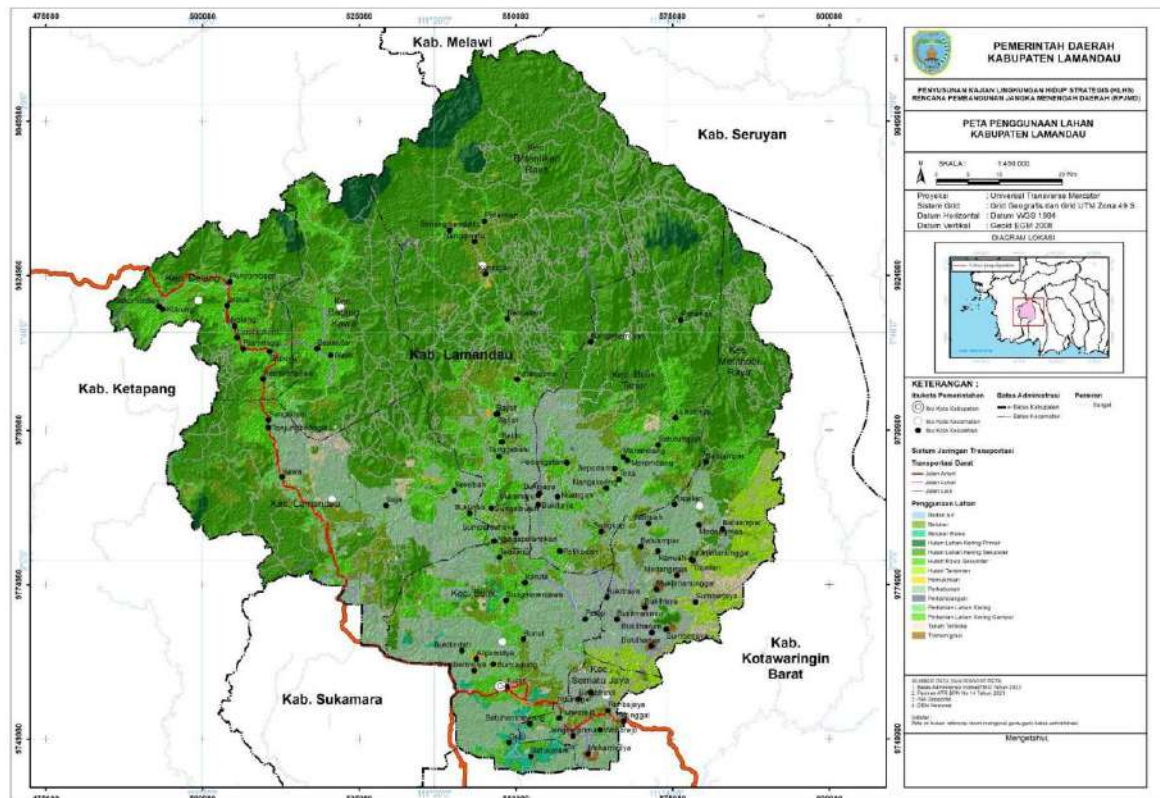
Penggunaan lahan terbesar adalah hutan lahan kering sekunder dengan luas mencapai 368.285, 97 ha atau 47,95%, sedangkan untuk penggunaan lahan terkecil adalah badan air dengan luas 417,97 ha atau 0,05%.

Tabel 3-8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamandau

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Transmigrasi	2.142,75	0,28%
Tanah Terbuka	10.196,56	1,33%
Pertanian Lahan Kering Campur	104.659,55	13,63%
Pertanian Lahan Kering	6.357,02	0,83%
Pertambangan	420,76	0,05%
Perkebunan	156.213,76	20,34%
Pemukiman	3.539,99	0,46%
Hutan Tanaman	24.319,97	3,17%
Hutan Rawa Sekunder	788,65	0,10%

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Lahan Kering Sekunder	368.285,97	47,95%
Hutan Lahan Kering Primer	19.252,59	2,51%
Belukar Rawa	5.869,94	0,76%
Belukar	65.618,89	8,54%
Badan Air	417,97	0,05%
Total	768.084,37	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau



Gambar 3-9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.3. Kondisi Lingkungan Hidup

3.3.1. Daya Dukung Dan Daya Tampung

3.3.1.1 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan penduduk setempat dalam mencapai swasembada beras. Perhitungan daya dukung pertanian menggunakan produktivitas lahan. Terdapat beberapa variabel yang dijadikan pertimbangan dalam perhitungan yakni:

1. Luas Lahan Panens (hektar)
2. Jumlah Penduduk (jiwa)
3. Kebutuhan fisik minimum (kg/kapita/tahun)
4. Produksi rata-rata per hektar (kg/ha)

Perhitungan dari daya dukung pertanian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3-9 Data, Parameter dan Rumus Daya Dukung Wilayah untuk Pertanian

Parameter	Satuan	Data yang diperlukan	Sumber data	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Produksi Beras Total	(kg)	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan panen (hektar) = L_p • Jumlah penduduk (jiwa) = P_d • Kebutuhan fisik minimum = KFM • Produksi rata-rata per hektar (kg/ha) = Pr 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • BPS 	$\tau = \frac{(L_p/P_d)}{(KFM/(Pr \times 0,78))}$
2. Kebutuhan pangan Penduduk				

Sumber: (Kurniawan, 2007)

Perhitungan daya dukung wilayah untuk lahan pertanian dapat menggunakan formulasi yang merupakan konsep gabungan dari konsep Odum, Howard dan Issard sebagai berikut:

$$\tau = \frac{L_p/P_d}{KFM/(Pr \times 0,78)}$$

Keterangan:

- τ = Daya dukung wilayah untuk pertanian
- L_p = Luas lahan panen (ha)
- P_d = Jumlah Penduduk (jiwa)
- KFM = Kebutuhan Fisik minimum (kg/kapita/tahun)
- Pr = Produksi lahan rata-rata per hektar
- 0,78 = Konstanta lahan untuk mengubah padi menjadi beras

Menurut (Sayogyo 1971, dalam Kurniawan 2007):

- KFM untuk penduduk desa = 320 kg/kapita/tahun
- KFM untuk penduduk kota = 480 kg/hektar/tahun

Menurut Sayogyo, KFM digunakan karena mendekati kenyataan yang sebenarnya dan adanya perbedaan KFM penduduk desa dan kota. Lahan pertanian yang diperhitungkan merupakan lahan pertanian yang terdapat pada lahan yang sesuai yaitu

lahan yang memiliki kelas kemampuan lahan I-IV. Adapun klasifikasi yang digunakan untuk menghitung daya dukung wilayah pertanian adalah sebagai berikut :

- Nilai $\tau > 1$ = Tinggi → Terjadi surplus pangan
- Nilai $\tau = 1$ = Optimal → Adanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan
- Nilai $\tau < 1$ = Rendah → Lahan tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk setempat

Dari formula perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian dapat dikalkulasikan jumlah penduduk optimum yang dapat ditampung oleh wilayah tersebut. Adapun asumsi yang digunakan dalam formula penduduk optimum ini adalah nilai daya dukung wilayah untuk lahan pertanian dalam kondisi optimum atau sebesar 1.

$$I = \frac{Lp/Pd}{KFM / (Prx0,78)}$$

Jumlah penduduk optimum yang dapat ditampung di wilayah tersebut adalah sebesar:

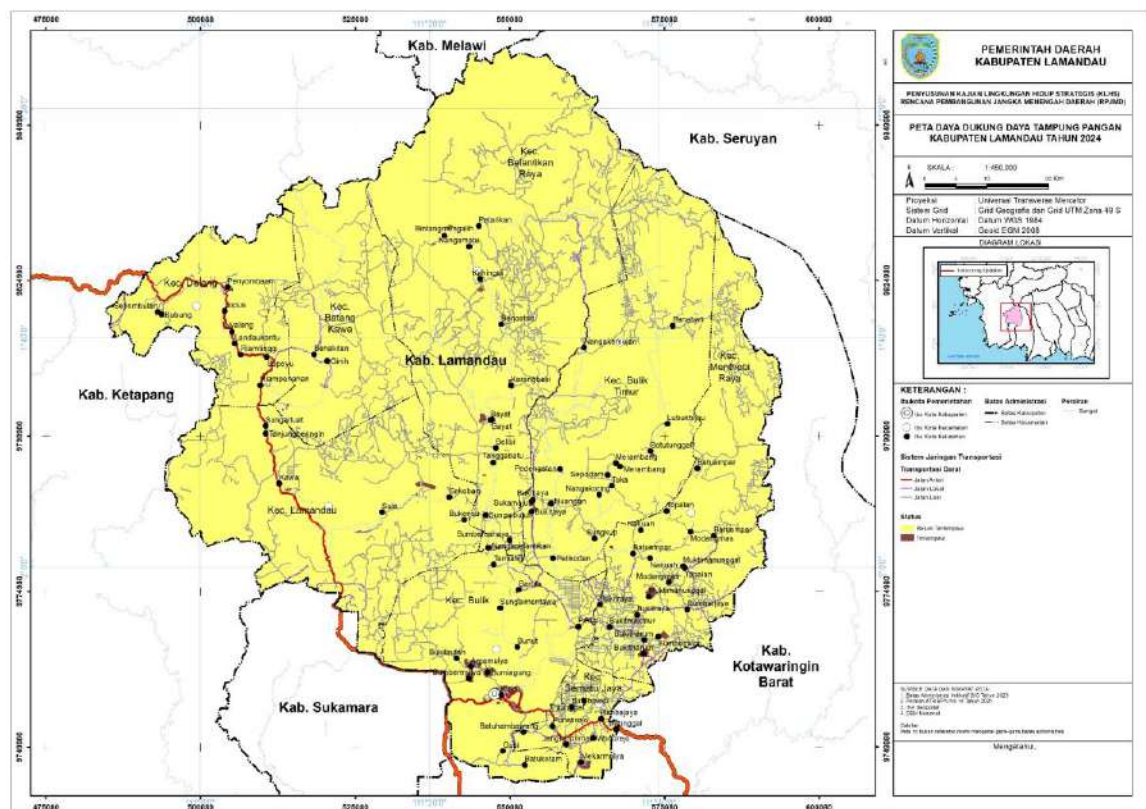
$$Pd = \frac{Lp (Prx0,78)}{KFM}$$

Tabel 3-10 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Daya Dukung Pangan (ha)		
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batang Kawa	66.563,65	253,89	66.817,55
2	Belantikan Raya	201.358,92	994,37	202.353,29
3	Bulik	79.732,26	2.493,61	82.225,87
4	Bulik Timur	126.479,68	775,18	127.254,86
5	Delang	54.862,75	660,98	55.523,73
6	Lamandau	115.725,20	1.399,81	117.125,01
7	Menthobi Raya	94.903,82	2.292,21	97.196,03
8	Sematu Jaya	18.048,70	977,26	19.025,96
Total Keseluruhan		757.674,98	9.847,31	767.522,29

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa dominasi status daya dukung dan daya tampung pangan berada pada kelas aman.



Gambar 3-10 Peta Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Lamandau
Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.3.1.2 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung permukiman merupakan kemampuan suatu daerah dalam penyediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak (Kurniawan, 2007). Perhitungan daya dukung permukiman menggunakan dasar luasan penggunaan lahan. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam perhitungan yakni:

- Luas lahan layak untuk permukiman (m^2)
- Jumlah penduduk (jiwa)

Tabel 3-11 Data, Parameter dan Rumus Daya Dukung Wilayah untuk Permukiman

Parameter	Satuan	Data yang diperlukan	Sumber data	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kemampuan lahan untuk permukiman - Kebutuhan mukim penduduk	(m2)	- Luas lahan yang layak untuk permukiman (m^2) → L_{ip} - Jumlah Penduduk (jiwa) → P_d	- BPN - BPS	$DDP = \frac{(L_{ip}/P_d)}{133}$

Sumber: (Kurniawan, 2007)

Perhitungan daya dukung wilayah untuk permukiman menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$DDP = \frac{(L.ip/Pd)}{113}$$

Keterangan:

- DDP = Daya dukung permukiman
- L.Ip = Luas lahan yang layak untuk permukiman (m²)
- Pd = Jumlah penduduk (jiwa)
- 133 = Banyaknya kebutuhan lahan per orang (m²) untuk kepadatan penduduk <50 jiwa/ha

Adapun klasifikasi yang digunakan untuk menghitung daya dukung wilayah untuk lahan permukiman adalah sebagai berikut.

- Nilai DDP > 1 = Tinggi, masih mampu menampung jumlah penduduk tertentu
- Nilai DDP = 1 = Optimal, adanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan permukiman
- Nilai DDP < 1 = Rendah, jumlah penduduk melebihi kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman secara horizontal sehingga perlu dibuat permukiman vertikal untuk menambah kapasitas ruang.

Tabel 3-12 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Daya Dukung Permukiman	
		Aman	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Batang Kawa	66.870,14	66.870,14
2	Belantikan Raya	202.503,09	202.503,09
3	Bulik	82.286,92	82.286,92
4	Bulik Timur	127.341,52	127.341,52
5	Delang	55.568,08	55.568,08
6	Lamandau	117.217,05	117.217,05
7	Menthobi Raya	97.258,18	97.258,18
8	Sematu Jaya	19.039,37	19.039,37
Kabupaten Lamandau		768.084,36	768.084,36

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

Hasil analisis daya dukung lahan permukiman menunjukkan bahwa pada akhir tahun perencanaan, daya dukung permukiman di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamandau tergolong aman hingga tahun 2044, yang artinya masih dapat menyediakan lahan permukiman secara horizontal dan masih dapat menampung penduduk hingga tahun 2044.

Rumus Daya Dukung Air

$$DDA = SA / DA$$

Keterangan:

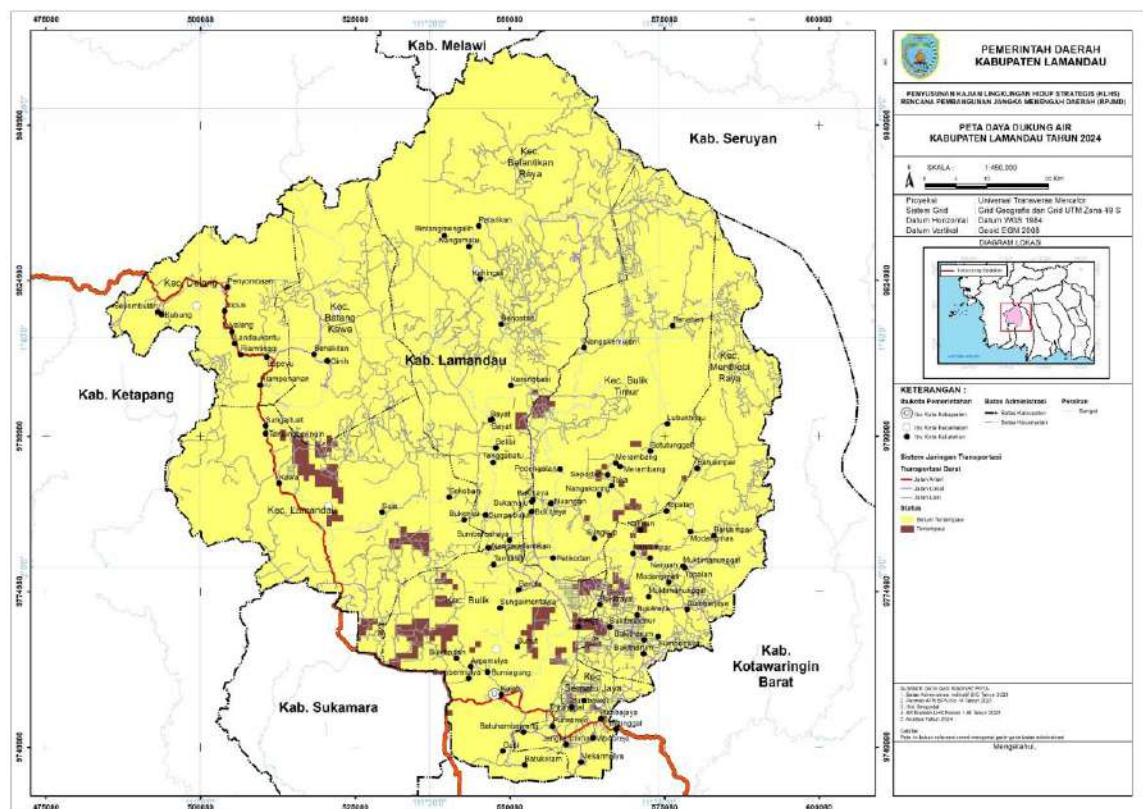
- $DDA < 1$ = Daya dukung air terlampaui atau buruk
- $DDA 1-3$ = Daya dukung air aman bersyarat atau sedang
- $DDA > 3$ = Daya dukung air aman atau baik

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air terlampaui yakni Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Menthobi Raya, dan Kecamatan Sematu Jaya. Namun apabila dilihat dari luasnya, luasan dari daerah yang memiliki daya dukung air terlampaui masih cukup kecil dibandingkan luasan wilayah kecamatan dengan luasan DDDT air berstatus terlampaui adalah 22.000,82 ha

Tabel 3-13 Daya Dukung Air di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Daya Dukung Air (ha)		
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batang Kawa	66.573,35	244,20	66.817,55
2	Belantikan Raya	201.662,09	691,20	202.353,29
3	Bulik	73.501,03	8.724,84	82.225,87
4	Bulik Timur	125.028,19	2.226,66	127.254,85
5	Delang	55.523,73		55.523,73
6	Lamandau	110.199,88	6.925,12	117.125,01
7	Menthobi Raya	94.604,74	2.591,29	97.196,03
8	Sematu Jaya	18.428,45	597,51	19.025,96
Total Keseluruhan		745.521,47	22.000,82	767.522,29

Sumber: Analisis, 2024



Gambar 3-12 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau

3.3.2. Jasa Lingkungan Hidup

3.3.2.1 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (P1)

Jasa lingkungan hidup penyedia pangan (P1) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya bahan pangan. Dalam hal ini, bahan pangan dapat berupa sumber pangan hewani maupun hayati antara lain hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan, dan hasil peternakan.

Ketersediaan bahan pangan dinilai tinggi pada ekoregion dataran fluvial karena memiliki tanah yang subur dan sesuai untuk tumbuhnya berbagai macam tumbuhan. Penggunaan lahan yang sering ditemukan pada ekoregion tersebut adalah sawah dan ladang. Ketersediaan bahan pangan juga bergantung pada tutupan vegetasi suatu lahan. Tutupan vegetasi suatu lahan yang rapat mendukung kemungkinan tumbuhnya berbagai tumbuhan untuk sumber pangan.

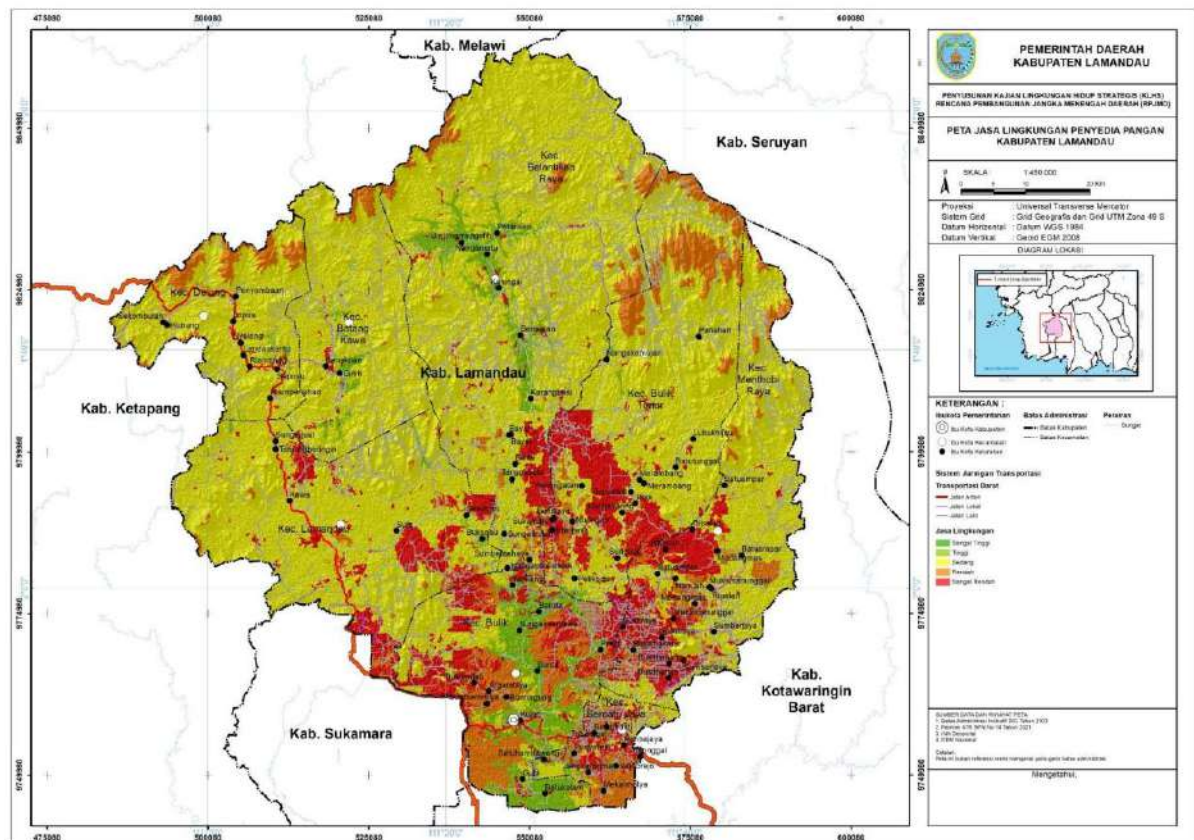
Jasa lingkungan hidup dalam menyediakan bahan pangan sangat penting untuk menentukan keberlangsungan hidup manusia karena pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Tanpa jasa lingkungan ini kebutuhan pangan manusia tidak akan tercukupi. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi di antaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan hidup penyedia pangan sedang, yaitu sebesar 554.080,45 Ha.

Tabel 3-14 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						Total
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	911,33	2.069,21	60.850,69	3.038,91		66.870,14
2	Belantikan Raya	8.164,36	9.237,44	171.251,60	13.849,68		202.503,09
3	Bulik	18.212,10	23.791,52	17.521,36	22.761,93	0,00	82.286,92
4	Bulik Timur	20.779,28	18.240,45	87.496,87	824,96		127.341,55
5	Delang	517,44	7.161,88	47.384,91	503,86		55.568,08
6	Lamandau	15.101,85	3.075,17	97.768,90	1.271,14		117.217,05
7	Menthobi Raya	20.526,42	10.348,90	66.082,46	300,37		97.258,15
8	Sematu Jaya	4.725,27	6.983,27	5.723,66	1.537,63	69,54	19.039,37
	Total	88.938,05	80.907,84	554.080,45	44.088,48	69,54	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-13 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

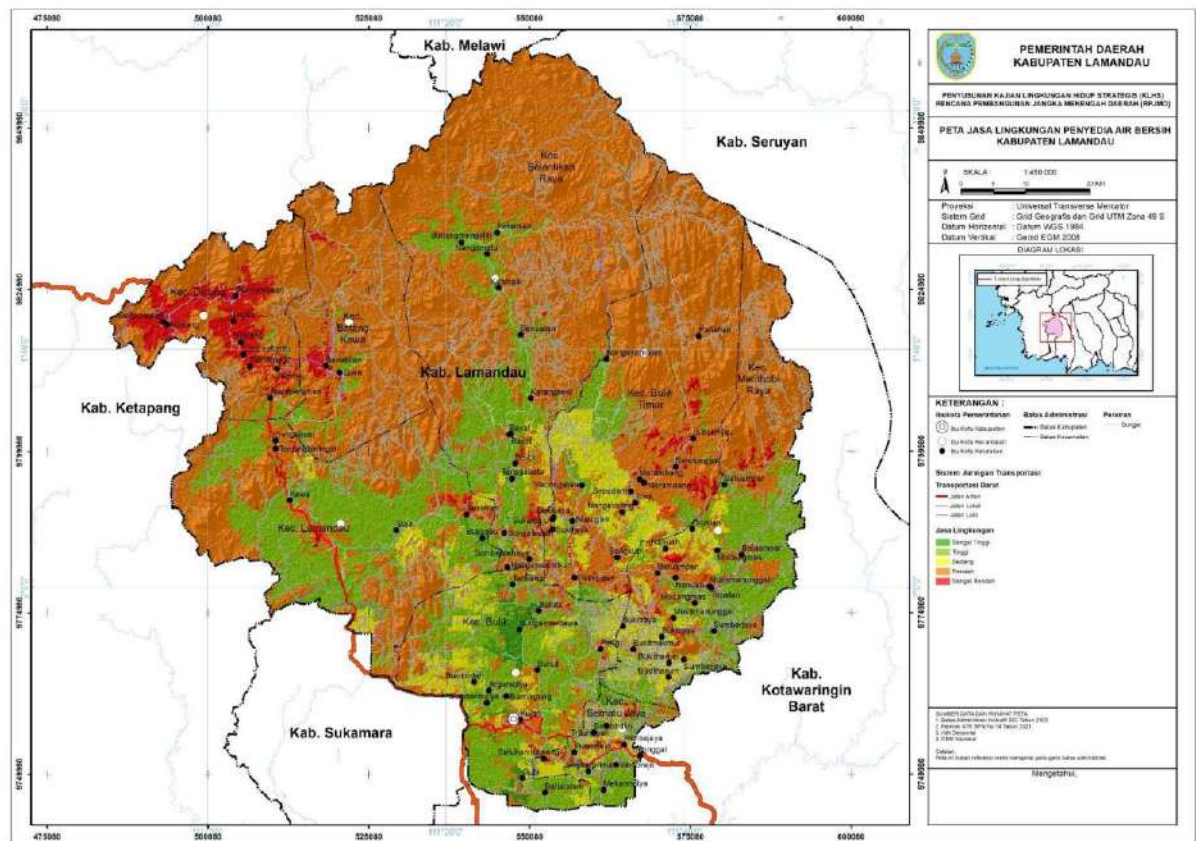
Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih (P2)

Jasa lingkungan hidup berbasis jasa penyedia air bersih (P2) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya air. Dalam hal ini, penyediaan air berasal dari air hujan, air tanah, dan air permukaan. Oleh karena itu ketersediaan air dipengaruhi oleh curah hujan, jenis tanah dan batuan, serta tutupan lahan. Oleh karena itu, jasa lingkungan penyedia air bersih ini akan berbeda pada setiap ekoregion. Kerapatan vegetasi juga dapat menjadi penentu ketersediaan air bersih. Penggunaan lahan yang memiliki vegetasi rapat memungkinkan tersimpannya cadangan air oleh tanaman semakin banyak. Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan hidup penyedia air bersih rendah, yaitu seluas 473.930,15 Ha.

Tabel 3-15 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						Total
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	2.595,21	59.649,33	162,22	4.463,38		66.870,14
2	Belantikan Raya	1.083,21	163.242,80	4.111,20	33.497,58	568,30	202.503,09
3	Bulik	673,29	18.408,36	17.017,94	39.629,98	6.557,36	82.286,92
4	Bulik Timur	4.330,55	92.806,75	17.740,30	12.215,63	248,32	127.341,55
5	Delang	15.808,08	38.057,14	8,03	1.694,83		55.568,08
6	Lamandau	1.418,68	56.039,07	6.251,96	52.829,59	677,74	117.217,05
7	Menthobi Raya	2.096,93	46.154,51	15.801,21	32.974,21	231,30	97.258,15
8	Sematu Jaya	529,74	3.572,19	5.191,37	9.227,90	518,17	19.039,37
	Total	28.535,68	477.930,15	66.284,24	186.533,10	8.801,19	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-14 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat (P3)

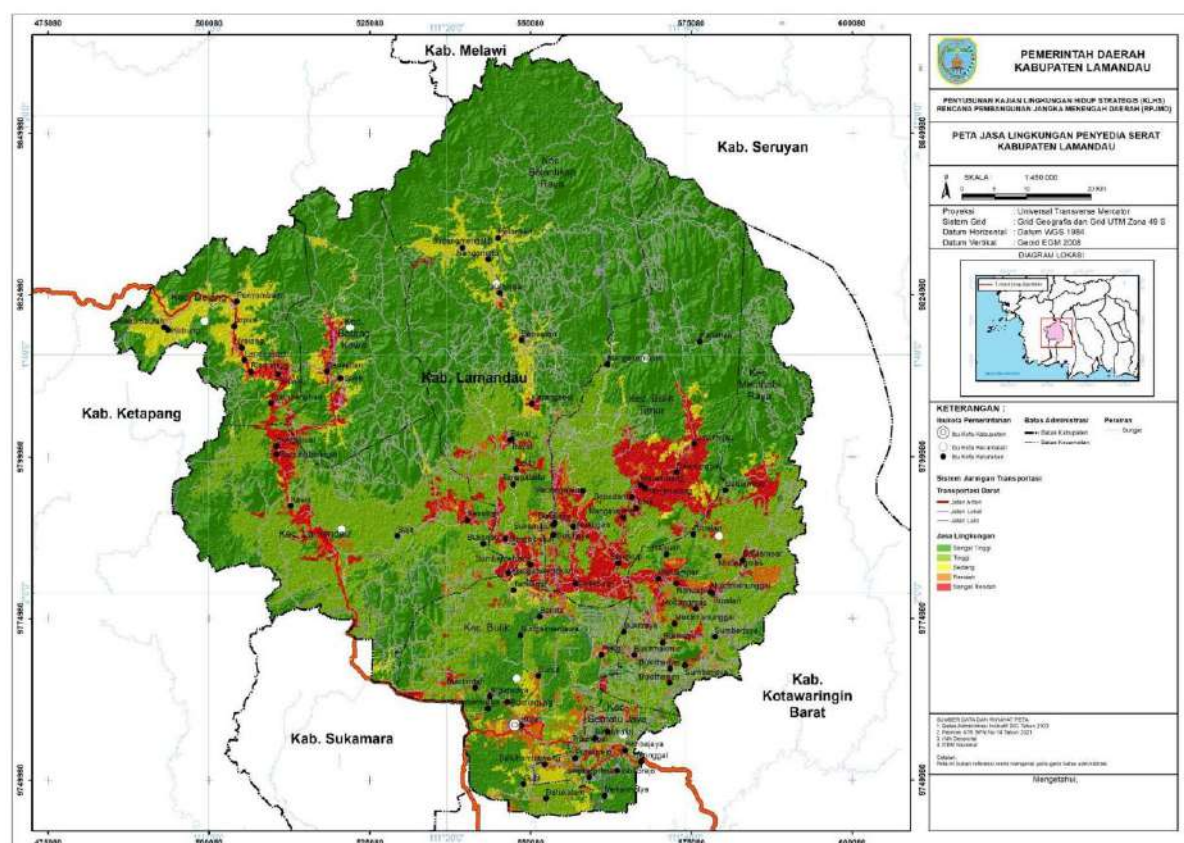
Jasa lingkungan hidup sebagai penyedia serat fiber (P3) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat berupa tersedianya bahan serat berbentuk jaringan memanjang yang utuh kepada manusia. Serat dapat diperoleh dari hewan, tumbuhan, maupun proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan karbon. Dalam kajian ini hanya berfokus pada jenis serat kayu dan jenis serat lainnya seperti kapas, rami, sutra. Dalam kehidupan dan aktivitasnya manusia memerlukan serat, seperti serat dari tumbuhan untuk membuat kertas dan serat dari hewan untuk membuat bahan tekstil. Maka dari itu, serat sangat penting bagi manusia. Adapun sesuai dengan sumber penyedia, kemampuan lingkungan dalam menyediakan serat di suatu kawasan dipengaruhi oleh ekoregion dan tutupan vegetasi kawasan.

Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup penyedia serat sangat tinggi dengan luas wilayah terbesar yaitu seluas 438.848,44 Ha.

Tabel 3-16 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	334,82	2.971,82	5.299,19	1.233,32	57.030,99	66.870,14
2	Belantikan Raya	2.178,72	6.083,25	14.206,32	23.667,65	156.367,14	202.503,09
3	Bulik	6.944,14	3.630,53	7.104,97	31.260,33	33.346,95	82.286,92
4	Bulik Timur	3.744,33	24.327,32	3.549,55	28.825,94	66.894,41	127.341,55
5	Delang	402,54	2.798,81	15.909,40	1.176,17	35.281,16	55.568,08
6	Lamandau	2.571,05	7.940,08	1.715,64	57.876,16	47.114,12	117.217,05
7	Menthobi Raya	5.754,62	7.984,56	1.376,82	47.138,22	35.003,93	97.258,15
8	Sematu Jaya	1.660,41	1.317,20	1.871,71	6.380,31	7.809,73	19.039,37
	Total	23.590,64	57.053,57	51.033,61	197.558,10	438.848,44	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-15 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan bakar (P4)

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan bakar berupa energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi.

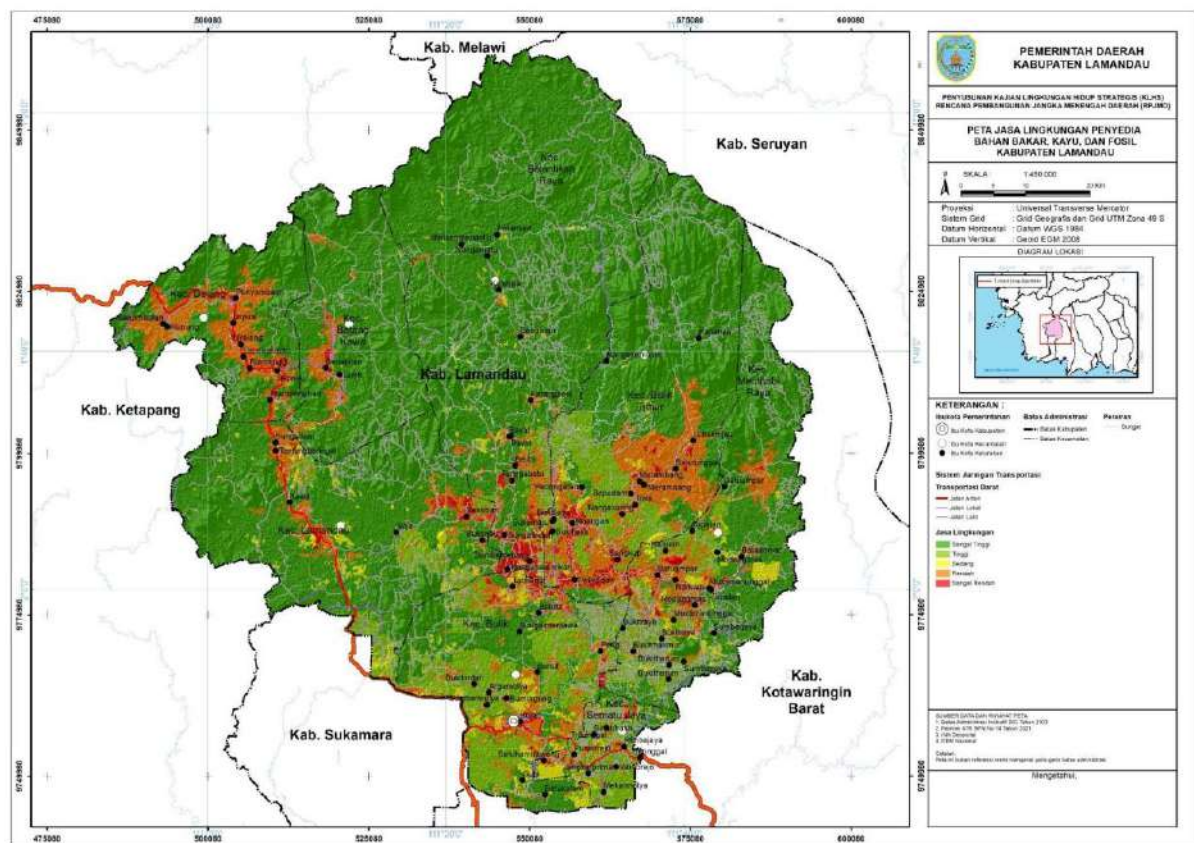
Selain itu ekosistem juga menyediakan bahan bakar yang berasal dari biomassa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi pembakaran. Sumber bahan bakar fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber bahan bakar biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari penutupan lahan dan karakteristik vegetasi. Nilai indeks jasa lingkungan hidup Penyedia Bahan bakar (fuel) (P4) berupa penyedia kayu bakar dan bahan bakar dari fosil dan tertinggi umumnya terdapat pada ekoregion bentanglahan Dataran Fluvio-vulkanik Material Piroklastik, selain itu terdapat pula pada satuan ekoregion Dataran Kaki Gunungapi Material Piroklastik. Tingginya nilai indeks Jasa Lingkungan Hidup ini dipengaruhi oleh ekoregion yang bersifat statis dan penutup lahan yang dinamis namun mencerminkan potensi dari ekoregion yang berada di bawahnya.

Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup penyedia bahan bakar sangat tinggi dengan luas wilayah terbesar yaitu seluas 537.445,23 Ha.

Tabel 3-17 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Bakar Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						Total
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	529,62	4.833,68	624,14	122,97	60.759,73	66.870,14
2	Belantikan Raya	3.190,36	6.949,07	3.485,08	3.541,85	185.336,74	202.503,09
3	Bulik	2.884,50	13.898,51	7.571,32	33.221,42	24.711,18	82.286,92
4	Bulik Timur	3.992,19	27.697,11	2.844,36	17.347,96	75.459,93	127.341,55
5	Delang	418,23	17.691,03	50,18	489,59	36.919,04	55.568,08
6	Lamandau	1.543,33	9.800,06	5.436,31	9.451,17	90.986,18	117.217,05
7	Menthobi Raya	1.822,18	13.197,05	5.559,03	16.756,81	59.923,10	97.258,15
8	Sematu Jaya	693,1	2.414,97	2.479,86	10.102,11	3.349,33	19.039,37
	Total	15.073,50	96.481,48	28.050,28	91.033,87	537.445,23	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-16 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Bakar Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Sumber Daya Genetik (P5)

Jasa lingkungan penyedia sumber daya genetik (P5) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat kepada manusia dalam menyediakan sumber daya genetik. Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, di mana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Setiap ekoregion memiliki perbedaan dalam keanekaragaman flora dan fauna. Dalam hal ini, ekoregion yang memiliki tutupan vegetasi luas memiliki ketersediaan sumber daya genetik yang lebih tinggi.

Sumber daya genetik yang terlihat dari keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lebih luas yaitu berperan dalam pengaturan kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, hidrologi, suhu, kelembaban dan pengendalian pencemaran udara. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik salah

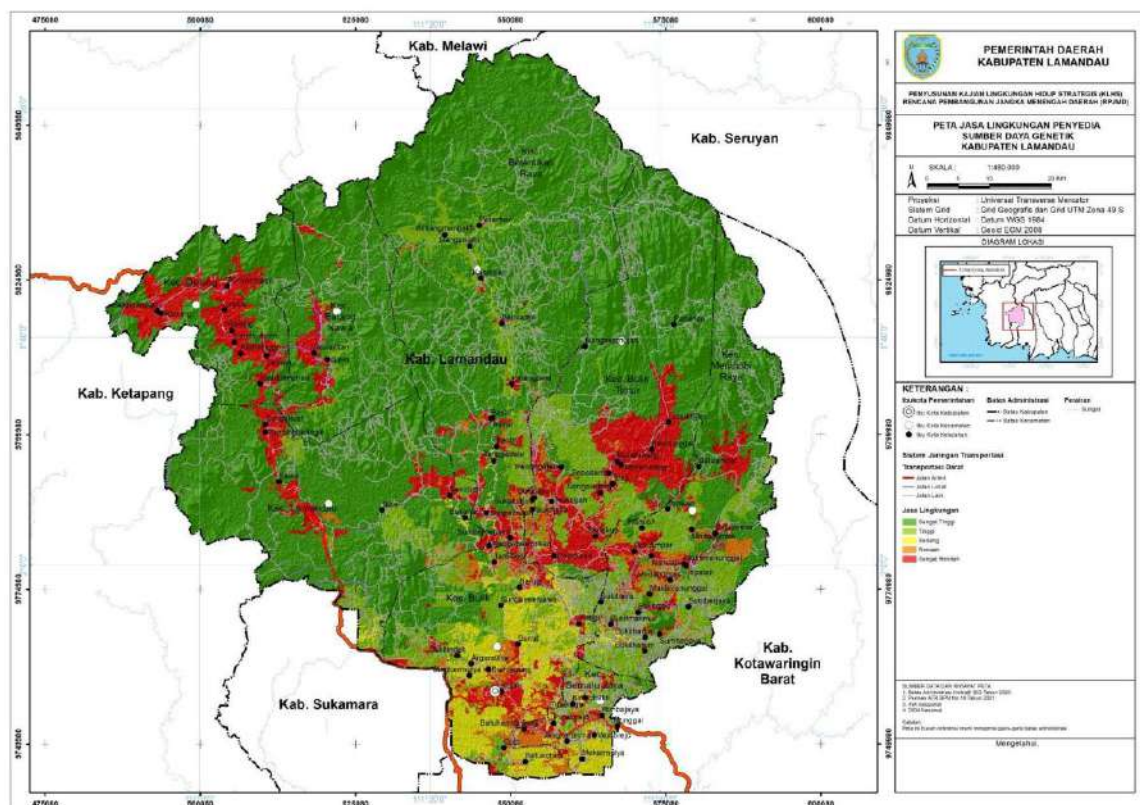
satunya ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi.

Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup penyedia sumberdaya genetik sedang dengan luasan sebesar 496.517,78 Ha.

Tabel 3-18 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	5.441,32	125,60	58.238,24		3.064,98	66.870,14
2	Belantikan Raya	6.380,16	3.121,65	174.094,15	523,98	18.383,15	202.503,09
3	Bulik	10.006,11	8.155,43	12.525,20	30.302,77	21.297,41	82.286,92
4	Bulik Timur	28.313,93	4.210,03	75.470,24	375,39	18.971,96	127.341,55
5	Delang	18.111,58	495,32	36.457,33		503,86	55.568,08
6	Lamandau	9.204,03	1.828,45	93.642,04	1.290,80	11.251,73	117.217,05
7	Menthobi Raya	9.785,23	7.158,92	45.460,54	1.204,16	33.649,31	97.258,15
8	Sematu Jaya	2.623,01	2.224,90	630,03	6.784,25	6.777,18	19.039,37
	Total	89.865,37	27.320,28	496.517,78	40.481,35	113.899,58	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

3.3.2.2 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim (R1)

Jasa lingkungan hidup pengaturan iklim (R1) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembapan, serta angin. Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena perubahan global (*global changes*), di mana sebagian dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam tata guna tanah dan penutup tanah (*land use and land cover changes*), perubahan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) dan perubahan iklim (Najmulmunir).

Pemanasan global atau perubahan iklim sangat penting ditelaah karena dampaknya bersifat global. Dampak yang ditimbulkan antara lain gangguan kesehatan, pertanian (pola tanam dan jenis tanaman), kondisi sosial dan ekonomi. Dalam menanggulangi/meminimalisir dampak terhadap perubahan iklim, pengaturan pemanfaatan lahan diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik dalam pengalokasian fungsi tertentu agar aktivitas di atas lahan tersebut dapat berjalan secara optimal.

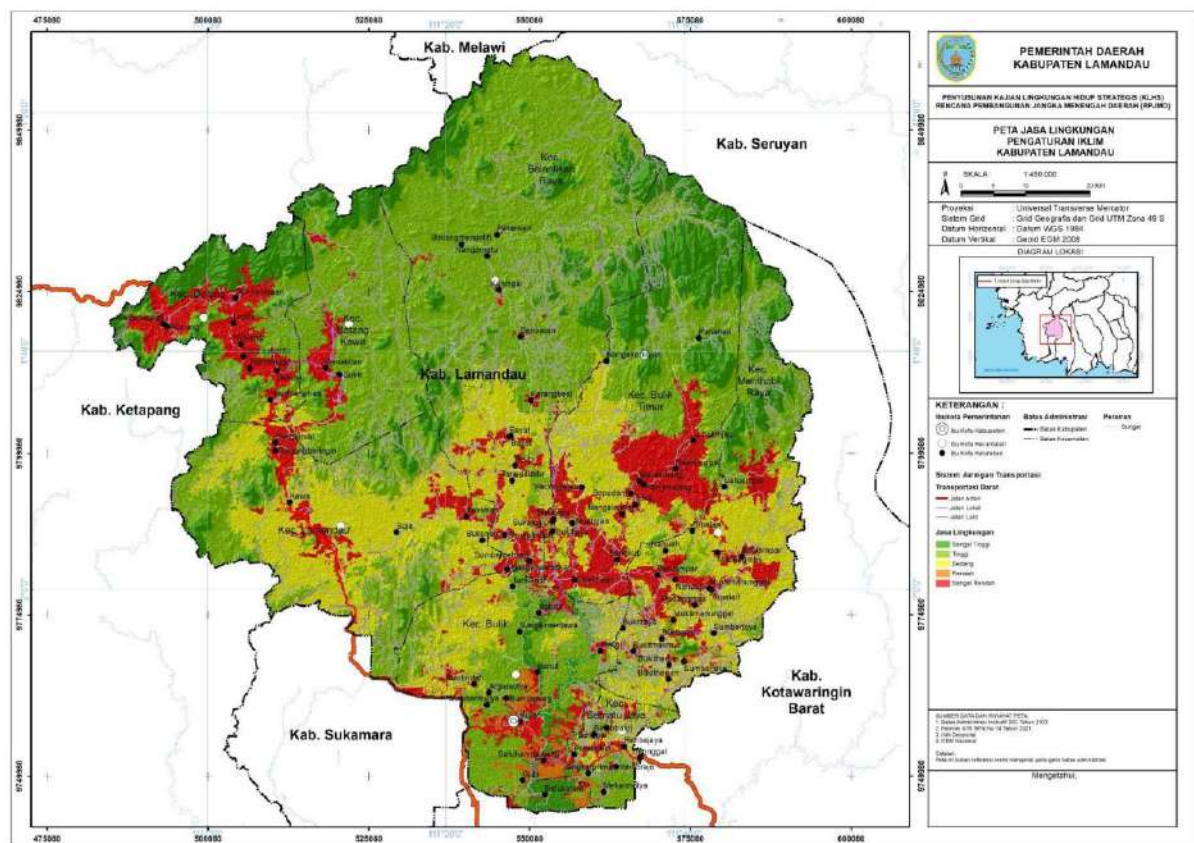
Iklim antara satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda. Ada berbagai hal yang mempengaruhi kondisi iklim di suatu daerah, yaitu kondisi topografi, bentuk lahan dan tutupan vegetasi. Dalam hal ini, wilayah yang berada di ketinggian seperti pegunungan lebih berkontribusi tinggi dalam jasa lingkungan hidup pengaturan iklim apabila persentase tutupan vegetasi juga tinggi. Meskipun begitu, wilayah yang berada di dataran rendah juga dapat berkontribusi tinggi dalam jasa lingkungan hidup pengaturan iklim selama memiliki persentase tutupan vegetasi tinggi.

Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan iklim tinggi dengan luasan sebesar 355.863,55 Ha.

Tabel 3-19 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	5.242,73	156,61	1.400,90	51.878,67	8.191,23	66.870,14
2	Belantikan Raya	7.940,90	672,07	24.095,76	141.048,62	28.745,74	202.503,09
3	Bulik	9.182,87	5.677,77	21.797,61	37.264,53	8.364,15	82.286,92
4	Bulik Timur	30.666,40	303,17	28.888,79	36.640,77	30.842,42	127.341,55
5	Delang	18.111,58	495,32	1.176,17	16.728,35	19.056,67	55.568,08
6	Lamandau	10.284,79	385,89	58.198,97	41.428,09	6.919,32	117.217,05
7	Menthobi Raya	14.412,31	441,87	47.272,89	22.952,89	12.178,20	97.258,15
8	Sematu Jaya	2.936,51	1.878,73	5.992,80	7.921,64	309,68	19.039,37
	Total	98.778,08	10.011,43	188.823,88	355.863,55	114.607,42	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-18 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (R2)

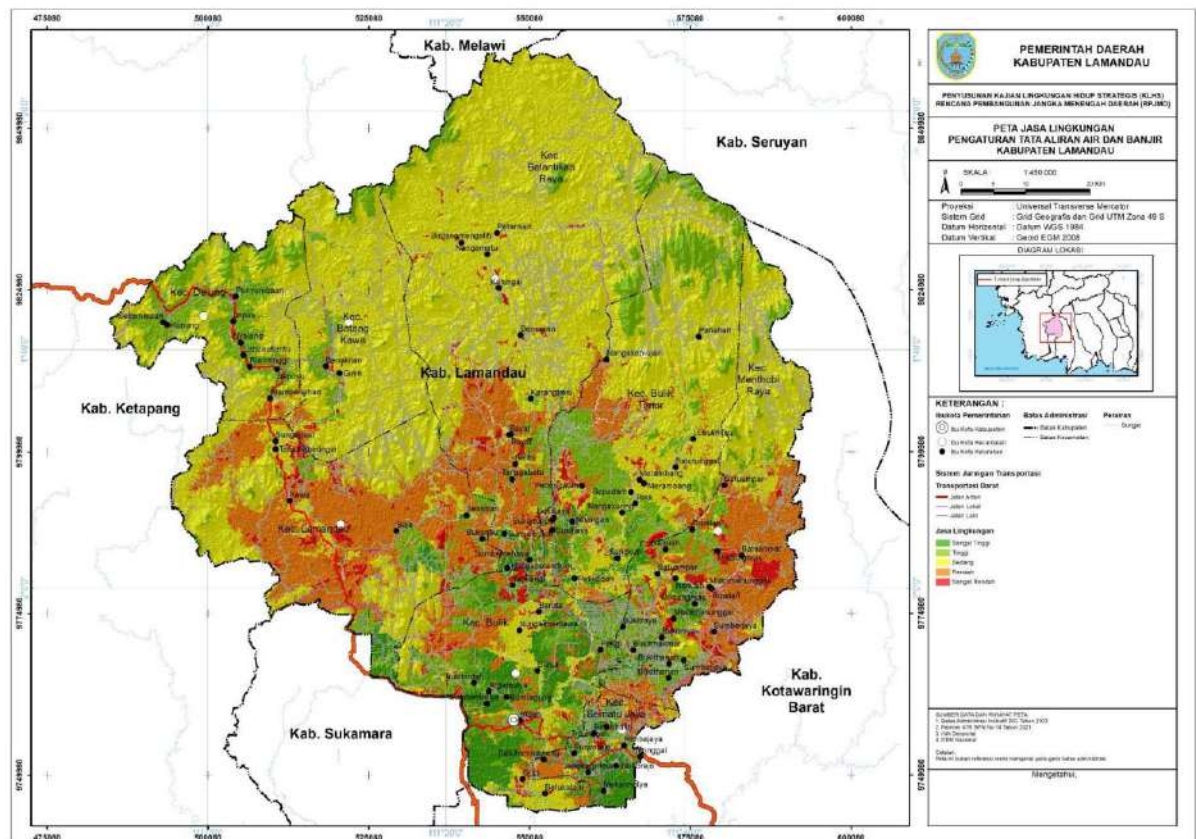
Jasa lingkungan hidup jasa pengaturan tata aliran air dan banjir (R2) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam mengatur siklus hidrologi suatu wilayah. Siklus hidrologi berlangsung secara kontinyu mulai dari terjadinya penguapan air, kondensasi, turunnya hujan hingga mengalirnya air hujan di permukaan tanah dan infiltrasi air ke dalam tanah. Tata aliran siklus air tersebut dapat berjalan dengan baik apabila lahan memiliki tutupan vegetasi yang berperan untuk menyimpan cadangan air. Semakin rapat vegetasi maka pengaturan tata air akan semakin baik. Selain itu, pengaturan tata air juga dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah. Hal ini dikarenakan air mengalir dari permukaan tinggi ke rendah sehingga ketika tidak terdapat vegetasi yang mampu menyerap air, air tersebut akan lebih cepat mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Pengaturan tata air ini penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan mengendalikan air agar tidak terjadi banjir.

Berdasarkan tabel di bawah, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan tata aliran air dan banjir tingkat sedang dengan luasan sebesar 423.841,56 Ha.

Tabel 3-20 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						Total
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	522,12	1.823,07	58.012,67	6.269,46	242,82	66.870,14
2	Belantikan Raya	3.590,87	22.452,03	162.021,08	12.065,29	2.373,82	202.503,09
3	Bulik	3.756,28	15.894,24	17.959,63	21.025,08	23.651,69	82.286,92
4	Bulik Timur	3.097,03	12.652,93	73.059,98	34.508,71	4.022,89	127.341,55
5	Delang	48,77	2.157,27	29.827,43	23.534,61		55.568,08
6	Lamandau	5.011,38	53.414,56	46.121,87	8.479,11	4.190,14	117.217,05
7	Menthobi Raya	5.966,67	33.141,48	34.829,15	19.545,24	3.775,61	97.258,15
8	Sematu Jaya	1.001,32	5.035,87	2.009,76	4.455,87	6.536,55	19.039,37
	Total	22.994,44	146.571,45	423.841,56	129.883,39	44.793,53	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-19 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

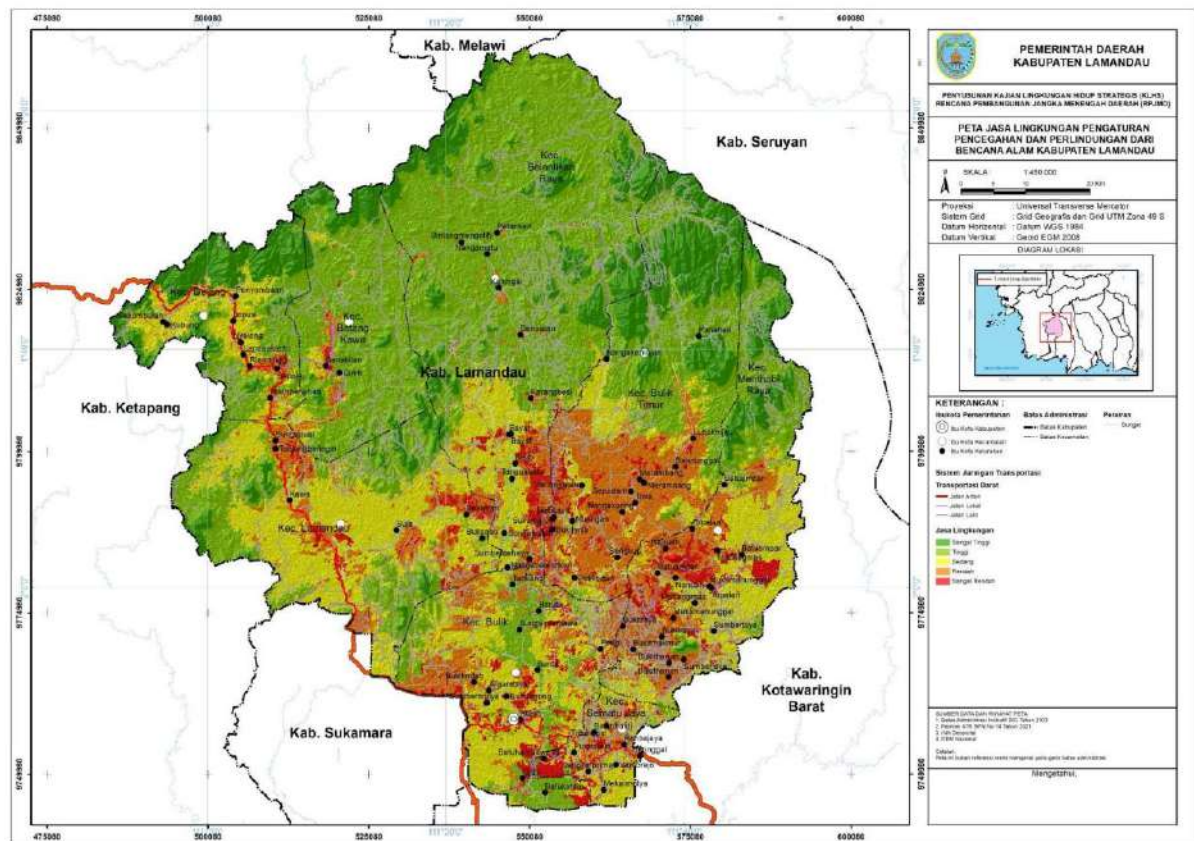
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (R3)

Jasa lingkungan hidup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana (R3) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam melindungi dan mencegah bencana alam terjadi. Bencana alam tersebut meliputi bencana longsor, erosi, banjir, abrasi, tsunami dan kebakaran lahan. Kemampuan lingkungan dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana berbeda antar bentuk lahan dan liputan vegetasi. Tempat Tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Bentuk lahan struktural dan solusional pada pegunungan atau perbukitan berkemiringan lereng curam lebih rawan mengalami proses erosi bahkan hingga terjadi tanah longsor. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana tingkat tinggi dengan luasan sebesar 314.431,99 Ha.

Tabel 3-21 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						Total
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	576,08	3.134,39	3.461,99	51.506,15	8.191,53	66.870,14
2	Belantikan Raya	4.480,62	9.901,92	21.109,28	138.265,53	28.745,74	202.503,09
3	Bulik	9.093,59	16.952,23	36.910,92	19.329,88	0,3	82.286,92
4	Bulik Timur	5.119,47	40.066,67	16.355,91	35.130,64	30.668,86	127.341,55
5	Delang	987,72	2.751,10	16.086,40	16.688,29	19.054,59	55.568,08
6	Lamandau	4.061,09	16.349,82	56.002,78	33.884,03	6.919,32	117.217,05
7	Menthobi Raya	8.698,14	23.727,29	34.297,11	18.481,03	12.054,59	97.258,15
8	Sematu Jaya	3.060,42	4.973,20	9.859,31	1.146,44		19.039,37
	Total	36.077,14	117.856,62	194.083,70	314.431,99	105.634,93	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-20 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air (R4)

Jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air (R4) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam membersihkan pencemar air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban 70 pencemar dan teknik pemulihan alam. Pembersihan pencemar tersebut dilakukan melalui tiga cara yaitu pengenceran, penguraian, dan penyerapan pencemar baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis pada badan air.

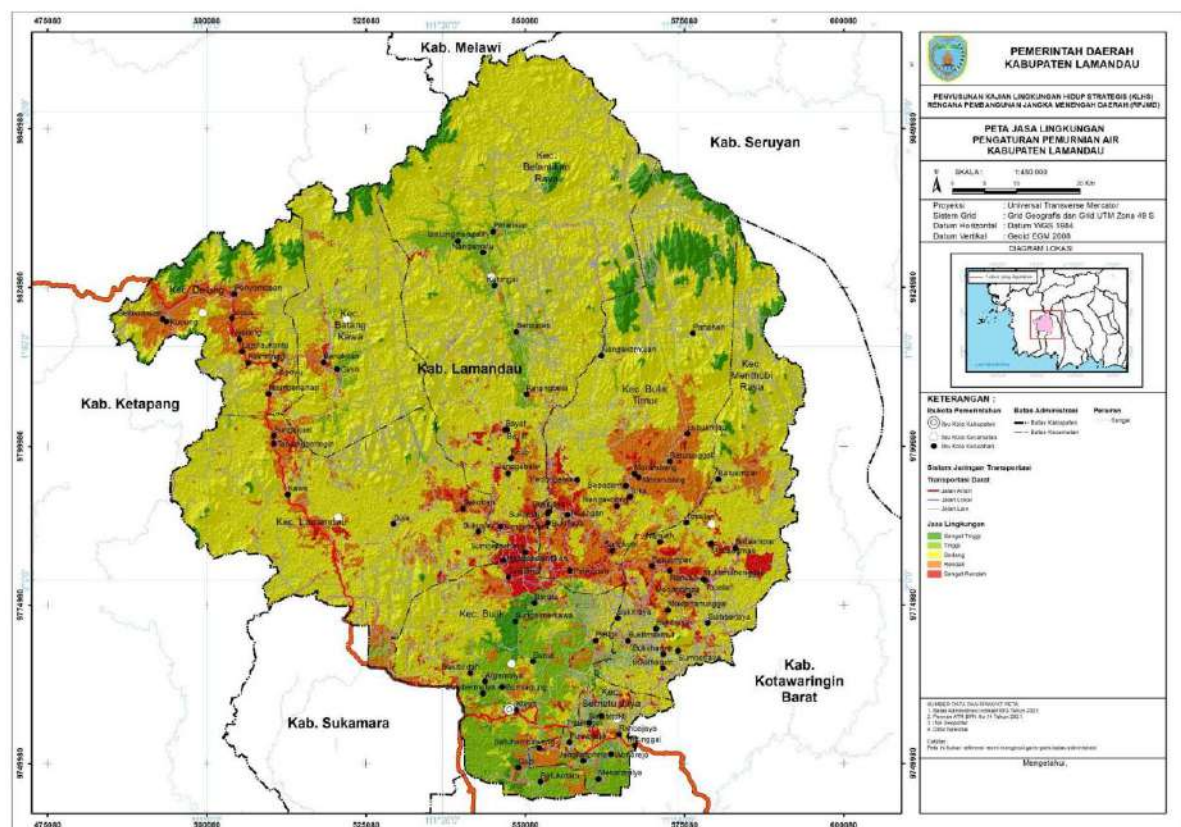
Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi yang salah satu prosesnya adalah penguapan/ evaporasi, dengan adanya proses evaporasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan panas dari matahari, air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan. Selanjutnya, secara biologis, pemurnian air dapat terjadi akibat adanya vegetasi dan aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Sementara pemurnian air secara kimia terjadi apabila muncul reaksi antar molekul yang berada di badan air, namun pemurnian air secara kimia tidak terjadi secara terus menerus dan bergantung pada kandungan zat dalam badan air.

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air tingkat sedang dengan luasan sebesar 542.640,08 Ha.

Tabel 3-22 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	460,42	3.250,98	57.927,00	3.286,71	1.945,03	66.870,14
2	Belantikan Raya	4.682,75	8.452,55	168.829,58	13.403,72	7.134,49	202.503,09
3	Bulik	3.978,17	11.645,39	30.608,32	29.787,33	6.267,72	82.286,92
4	Bulik Timur	6.070,30	28.273,62	77.772,24	755,6	14.469,79	127.341,55
5	Delang	897,85	15.703,35	31.790,74	518,66	6.657,48	55.568,08
6	Lamandau	2.873,37	16.396,63	95.586,29	1.529,57	831,2	117.217,05
7	Menthobi Raya	6.085,39	14.055,91	72.639,01	1.450,00	3.027,85	97.258,15
8	Sematu Jaya	884,33	3.351,02	7.486,91	7.059,78	257,33	19.039,37
	Total	25.932,58	101.129,44	542.640,08	57.791,36	40.590,89	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-21 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengelolaan dan Pengurai Limbah (R5)

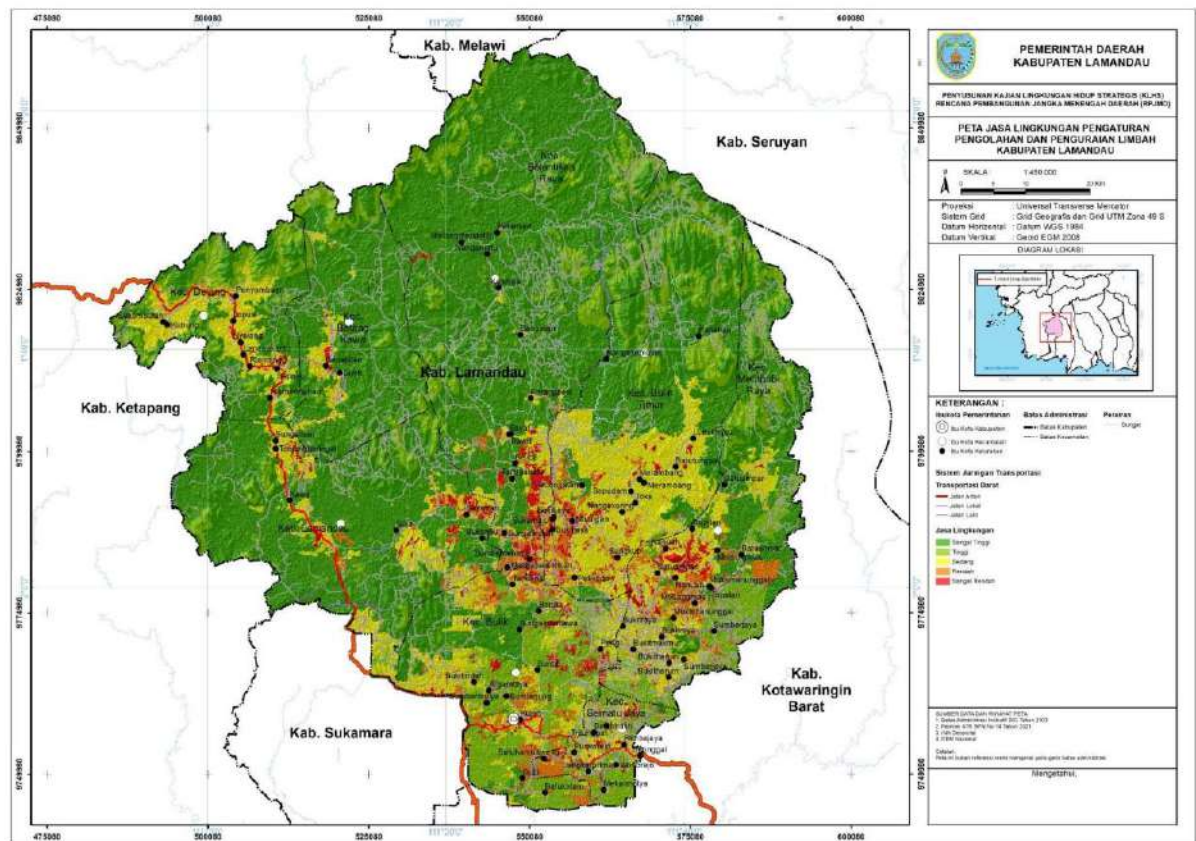
Jasa lingkungan hidup jasa pengaturan pengolahan dan pengurai limbah (R5) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam menetralkan dan menyerap limbah. Penetralkan, penguraian, dan penyerapan zat pencemar dibantu oleh mikroba aerob sehingga menjadi zat anorganik yang tidak mencemari lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah di antaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Daya tampung limbah pada setiap lingkungan berbeda dikarenakan ketersediaan mikroba yang membantu penguraian limbah juga berbeda. Lingkungan yang tersusun atas material-material lepas (piroklastik) dan batuan gunung api tua lebih mudah dalam menyerap dan mengalirkan air ke tanah sehingga pengolahan dan penguraian limbah semakin baik. Material-material tersebut dapat ditemukan pada tempat dengan elevasi tinggi seperti di pegunungan ataupun perbukitan.

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan pengolahan dan penguraian limbah tingkat sangat tinggi dengan luasan sebesar 437.479,98 Ha.

Tabel 3-23 Jasa Lingkungan Hidup Pengolahan dan Pengurai Limbah Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						Total
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	448,87	371,55	4.772,58	6.763,62	54.513,53	66.870,14
2	Belantikan Raya	3.969,39	3.671,98	7.036,54	24.188,57	163.636,62	202.503,09
3	Bulik	3.756,79	9.285,57	21.430,81	31.607,26	16.206,50	82.286,92
4	Bulik Timur	3.371,02	6.098,04	41.581,92	17.453,33	58.837,23	127.341,55
5	Delang	490,09	497,63	17.619,17	12.441,34	24.519,85	55.568,08
6	Lamandau	2.975,83	1.867,35	16.845,40	10.639,25	84.889,22	117.217,05
7	Menthobi Raya	4.067,34	8.031,69	23.326,68	27.186,33	34.646,11	97.258,15
8	Sematu Jaya	828,31	2.741,33	5.426,99	9.811,82	230,92	19.039,37
	Total	19.907,64	32.565,15	138.040,09	140.091,51	437.479,98	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-22 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Pengurai Limbah Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara (R6)

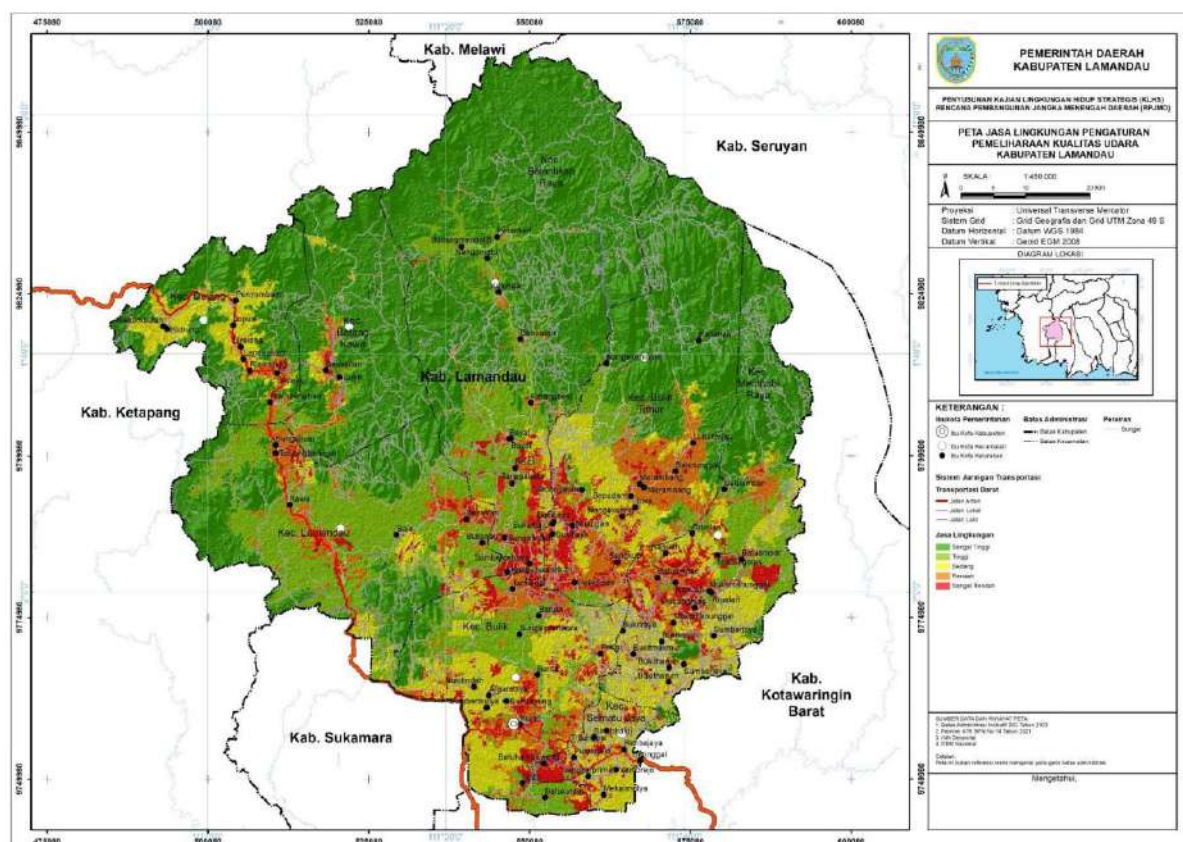
Ekosistem memiliki peran dalam pembersihan atmosfer melalui penyerapan bahan kimia dan aerosol. Salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem adalah tersedianya kualitas udara yang bersih. Udara berperan signifikan pada kelangsungan hidup lingkungan biotik maupun abiotik, di mana baik buruk kondisinya mampu mempengaruhi kesehatan makhluk hidup yang menghirupnya. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besarnya polutan yang dikandung dalam atmosfer yang bisa disebabkan oleh faktor meteorologis seperti hujan, angin, dan juga dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan ruang karena dengan adanya kegiatan dapat memicu adanya polutan yang dilepaskan ke atmosfer. Maka dari itu pembahasan fungsi pengaturan dan pengendalian selanjutnya dari ekosistem adalah terkait dengan pengaturan kualitas udara, dengan indikator yang digunakan adalah tutupan lahan bervegetasi, semakin tinggi luasan tutupan lahan bervegetasi maka semakin baik jasa lingkungan pengaturan kualitas udaranya.

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara tingkat sangat tinggi dengan luasan sebesar 384.282,48 Ha.

Tabel 3-24 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	445,81	3.228,04	2.187,46	4.344,06	56.664,78	66.870,14
2	Belantikan Raya	5.997,01	7.206,96	3.650,42	32.758,15	152.890,56	202.503,09
3	Bulik	9.797,34	13.091,41	33.210,42	21.823,97	4.363,77	82.286,92
4	Bulik Timur	8.422,06	23.052,34	20.262,79	10.733,19	64.871,17	127.341,55
5	Delang	416,3	3.241,59	14.925,03	1.680,03	35.305,15	55.568,08
6	Lamandau	4.088,94	11.449,54	7.039,52	55.420,76	39.218,29	117.217,05
7	Menthobi Raya	10.302,43	8.905,34	33.057,00	14.636,04	30.357,34	97.258,15
8	Sematu Jaya	2.786,17	2.435,76	12.415,52	790,49	611,43	19.039,37
	Total	42.256,06	72.610,98	126.748,15	142.186,70	384.282,48	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-23 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

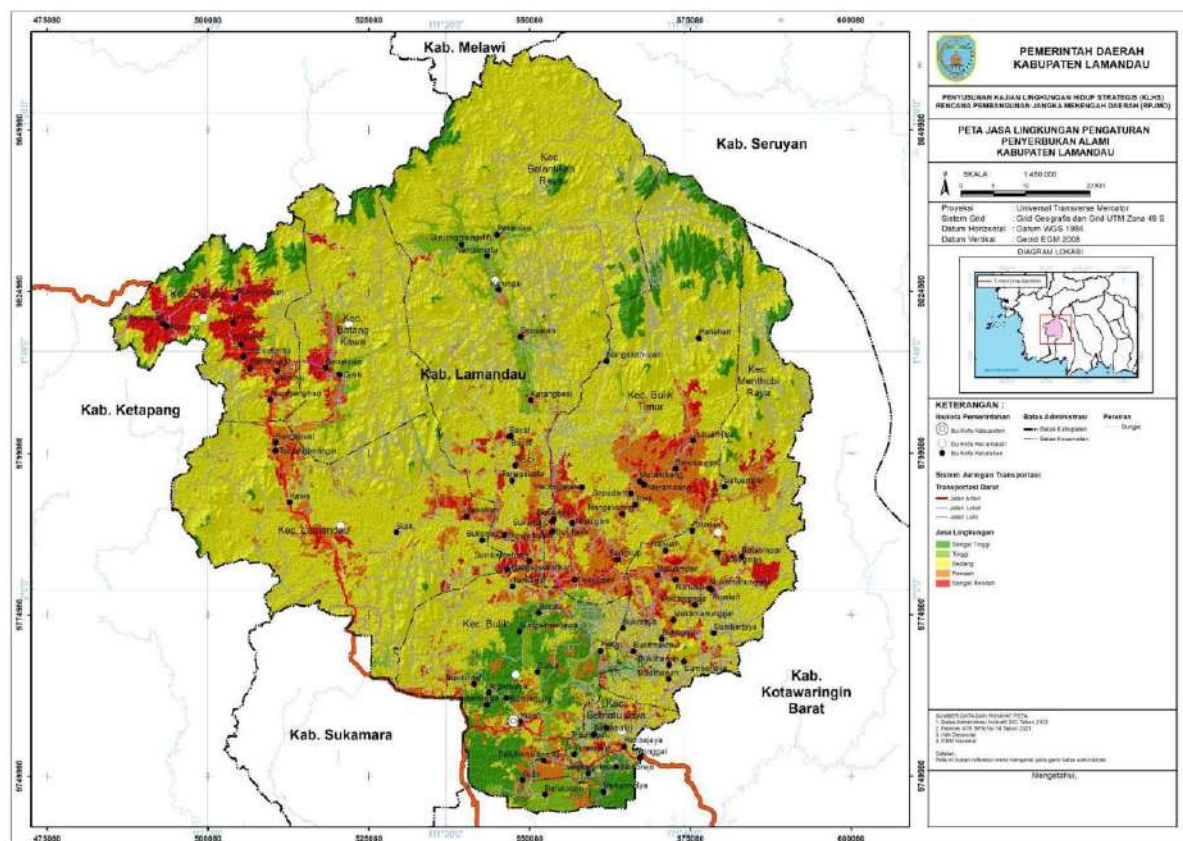
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami (R7)

Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Terdapat lima kelas dalam Jasa Lingkungan Hidup pengaturan penyerbukan alami, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan penyerbukan alami tingkat sedang dengan luasan sebesar 549.915,02 Ha.

Tabel 3-25 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	2.975,38	3.109,10	55.801,72	3.038,91	1.945,03	66.870,14
2	Belantikan Raya	4.665,49	8.024,97	169.558,78	13.119,35	7.134,49	202.503,09
3	Bulik	2.056,98	12.190,79	33.650,21	8.840,47	25.548,47	82.286,92
4	Bulik Timur	9.067,40	23.873,48	79.400,84	548,53	14.451,30	127.341,55
5	Delang	15.897,95	2.751,10	29.757,70	505,94	6.655,40	55.568,08
6	Lamandau	3.843,77	11.615,22	99.713,61	1.213,26	831,2	117.217,05
7	Menthobi Raya	7.491,46	11.157,20	74.546,22	124,15	3.939,12	97.258,15
8	Sematu Jaya	977,19	3.573,33	7.485,93	434,44	6.568,47	19.039,37
	Total	46.975,62	76.295,19	549.915,02	27.825,05	67.073,48	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-24 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama dan Penyakit (R8)

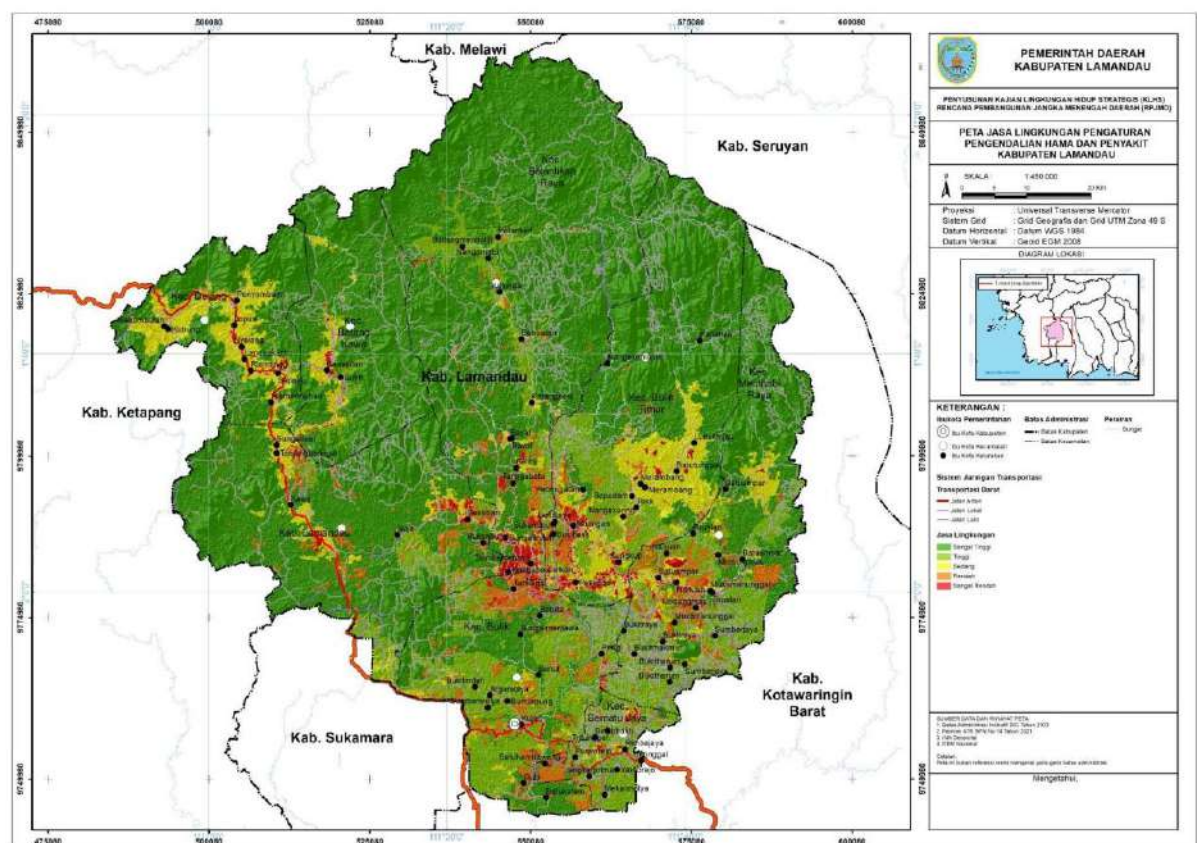
Hama dapat diidentifikasi sebagai makhluk hidup yang dapat mengancam kegiatan produksi seperti pertanian dan perkebunan utamanya dapat menurunkan hasil panen. Tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, hama sendiri juga dapat menyerang manusia atau bisa disebut sebagai penyakit. Sehingga adanya peran lingkungan dalam pengendalian hama dan penyakit ini diperlukan karena keberadaan hama dan penyakit dapat mempengaruhi tidak hanya ekologi dan kesehatan, tetapi juga ekonomi. Secara alami ekosistem telah memberikan jasa dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan melalui hubungan trofik atau rantai makanan dan penguraian limbah dan/atau sampah. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan pengendalian hama dan penyakit tingkat sangat tinggi dengan luasan sebesar 500.768,67 Ha.

Tabel 3-26 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendali Hama Penyakit Kabupaten Lamandau

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	593,78	742,32	4.748,38	3.064,25	57.721,41	66.870,14

No	Jasa Lingkungan Hidup (ha)						
	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Belantikan Raya	3.480,16	6.114,46	4.067,90	16.712,04	172.128,52	202.503,09
3	Bulik	1.521,23	14.233,70	2.658,83	39.475,65	24.397,52	82.286,92
4	Bulik Timur	4.270,01	5.464,71	24.786,43	17.808,26	75.012,13	127.341,55
5	Delang	490,09	539,78	17.619,17	503,86	36.415,18	55.568,08
6	Lamandau	1.948,50	6.762,77	8.086,35	10.028,88	90.390,55	117.217,05
7	Menthobi Raya	2.185,96	10.019,41	8.340,38	32.752,51	43.959,90	97.258,15
8	Sematu Jaya	602,62	2.963,28	1.070,51	13.659,50	743,46	19.039,37
	Total	15.092,36	46.840,43	71.377,95	134.004,95	500.768,67	768.084,30

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019



Gambar 3-25 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendali Hama Penyakit Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

3.3.2.3 Jasa Lingkungan Hidup Budaya

Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1)

Keberadaan ekosistem mampu memberikan manfaat penyediaan lahan dan ruang untuk hidup dan melakukan interaksi sosial. Adanya ekosistem mampu menunjang

adanya aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya aktivitas budaya. Kemampuan ruang atau lahan dalam menunjang berbagai kegiatan dan aktivitas tersebut sangat tergantung oleh tingkat kesesuaian lahan yang mana dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan fisik kawasan tersebut. Kondisi ekoregion bentang alam yang mampu mendukung penyediaan jasa ini adalah lahan dengan tingkat kerawanan bencana rendah, topografi landai dan mampu menyediakan sumber kebutuhan air. Selain itu interaksi masyarakat yang ada juga besar dipengaruhi oleh pengembangan wilayah yang mampu menjadi identitas dari kawasan tersebut.

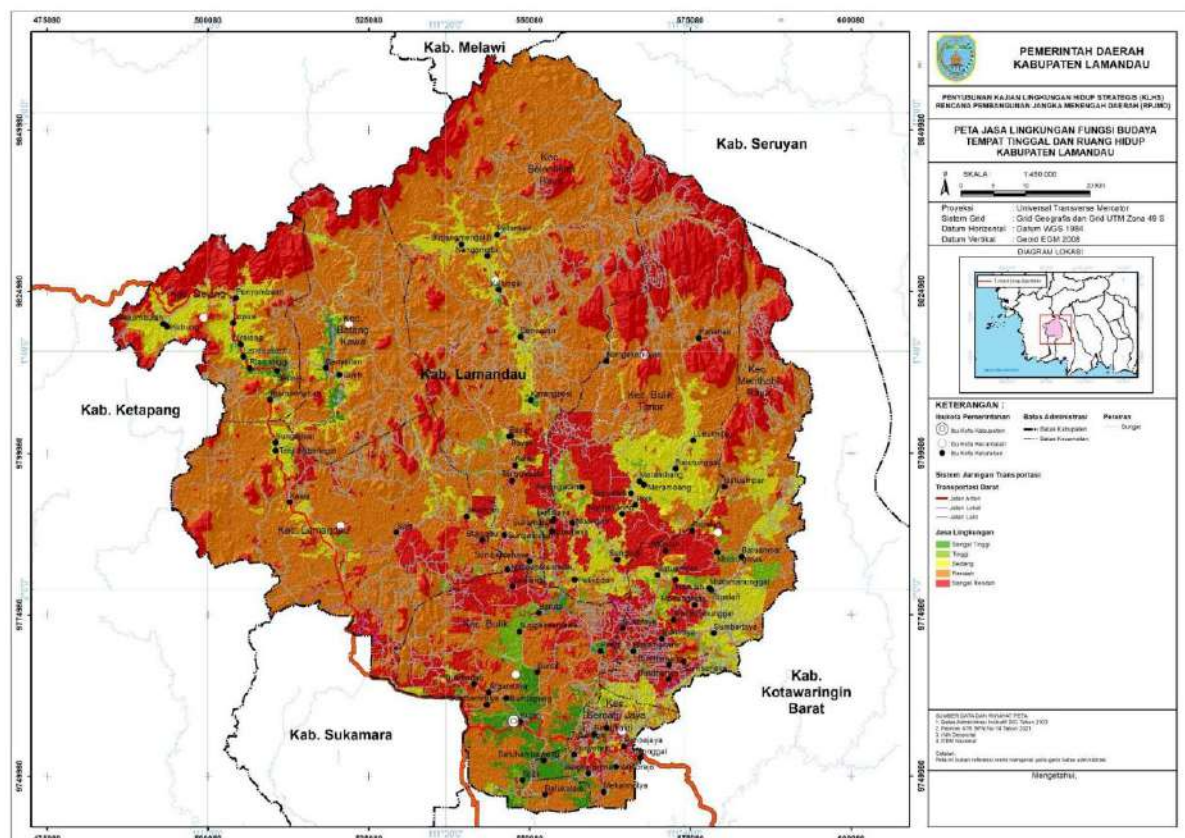
Berikut tabel jasa lingkungan hidup budaya tempat tinggal dan ruang hidup Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkatan kemampuannya.

Tabel 3-27 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	8.809,83	50.037,47	5.727,45		2.295,39	66.870,14
2	Belantikan Raya	37.424,66	146.431,50	16.058,07	1.962,10	626,76	202.503,09
3	Bulik	20.368,44	43.016,02	1.329,08	5.285,64	12.287,74	82.286,92
4	Bulik Timur	51.702,28	48.230,92	24.588,92	2.764,68	54,76	127.341,55
5	Delang	19.098,82	17.767,67	16.711,86		1.989,74	55.568,08
6	Lamandau	22.093,25	85.415,94	7.990,50	1.711,03	6,34	117.217,05
7	Menthobi Raya	32.895,00	36.161,18	22.900,54	5.189,34	112,09	97.258,15
8	Sematu Jaya	3.716,30	8.370,16	3.399,15	631,98	2.921,78	19.039,37
Total		196.108,57	435.430,86	98.705,56	17.544,77	20.294,60	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup tingkat rendah dengan luas sebesar 435.430,86 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Lamandau digambarkan pada peta berikut.



Gambar 3-26 Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Budaya Rekreasi dan Ekowisata (C2)

Variasi bentang alam dan vegetasi alami memberikan pengaruh kepada besarnya jasa rekreasi dan ekowisata. Keberadaan ekosistem yang masih alami mampu memberikan daya tarik dengan adanya keindahan saujana, terutama bagi masyarakat di luar daerah tersebut. Tidak hanya dari saujana bentang alamnya namun juga dari keanekaragaman flora dan fauna yang turut menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Keberadaan wisata alam ini dapat menjadi nilai ekonomi penggerak ekonomi lokal.

Kabupaten Lamandau memiliki fungsi budaya rekreasi dan ekowisata yang terbagi dalam lima kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berikut tabel jasa lingkungan hidup budaya rekreasi dan ekowisata Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkatan kemampuannya.

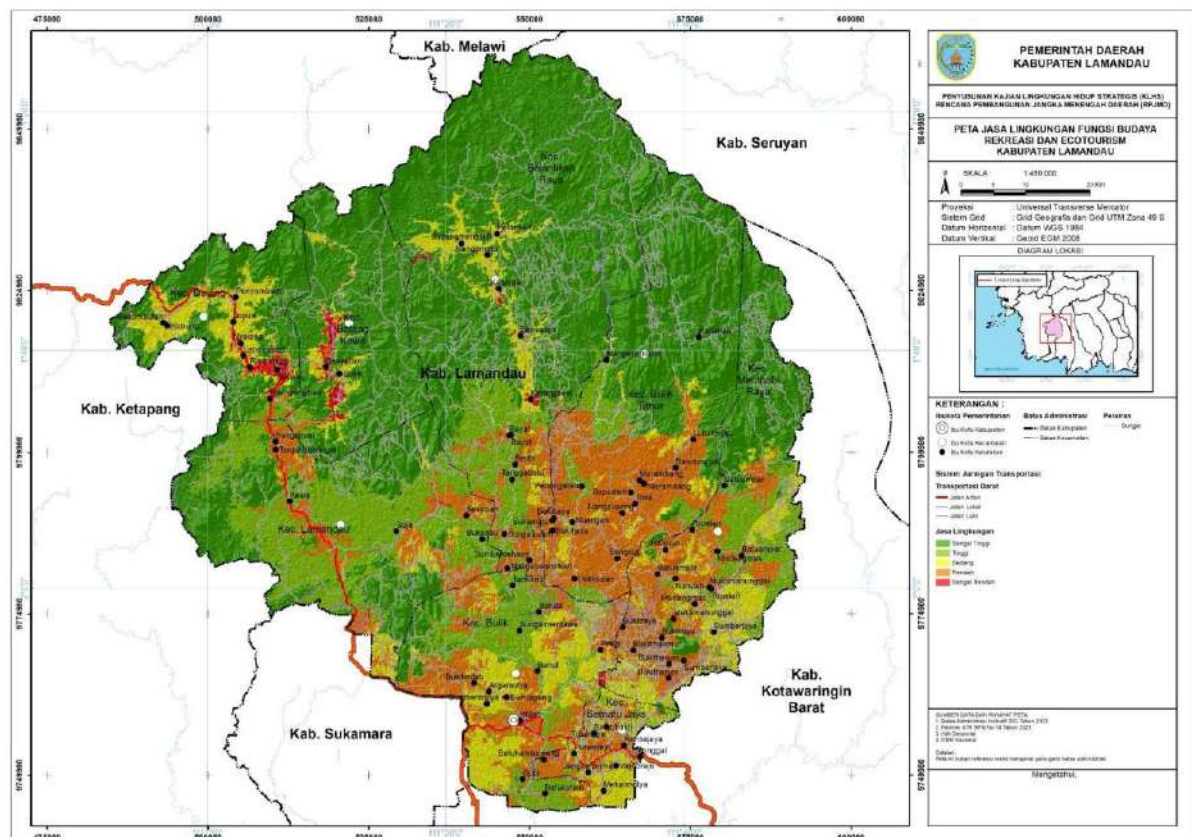
Tabel 3-28 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	2.544,38	869,19	5.218,33	1.229,84	57.008,41	66.870,14
2	Belantikan Raya	1.406,24	10.888,66	15.200,54	20.320,47	154.687,18	202.503,09

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Bulik	1.909,88	26.559,11	25.198,40	23.866,70	4.752,83	82.286,92
4	Bulik Timur	450,64	44.947,50	5.994,01	10.307,17	65.642,24	127.341,55
5	Delang	2.056,77	1.639,90	15.414,09	1.176,17	35.281,16	55.568,08
6	Lamandau	677,77	16.626,11	5.577,95	51.865,45	42.469,77	117.217,05
7	Menthobi Raya	593,87	29.066,99	21.505,86	15.999,78	30.091,66	97.258,15
8	Sematu Jaya	337,28	8.036,33	9.116,17	1.381,66	167,92	19.039,37
Total		9.976,83	138.633,79	103.225,33	126.147,22	390.101,19	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan budaya rekreasi dan ekowisata tingkat sangat tinggi dengan luas sebesar 390.101,19 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan rekreasi dan ekowisata di Kabupaten Lamandau digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 3-27 Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Budaya Estetika Alam (C3)

Ekosistem sejatinya memiliki nilai estetika yang dapat dinikmati. Keberadaan saujana ataupun lingkungan alami tidak hanya bisa dinikmati secara sengaja (menjadi objek wisata) namun dapat berupa pemandangan yang didapatkan selama melewati rute tertentu. Keberadaan ekosistem seperti laut, lembah, pegunungan, dan pantai dapat memberikan keindahan visual dan nilai estetika. Keberadaan keindahan lingkungan alami dan juga fenomena alam memiliki nilai daya tarik untuk wisata. Maka tidak heran apabila jasa lingkungan untuk estetika relatif sama dengan jasa lingkungan hidup untuk ekowisata.

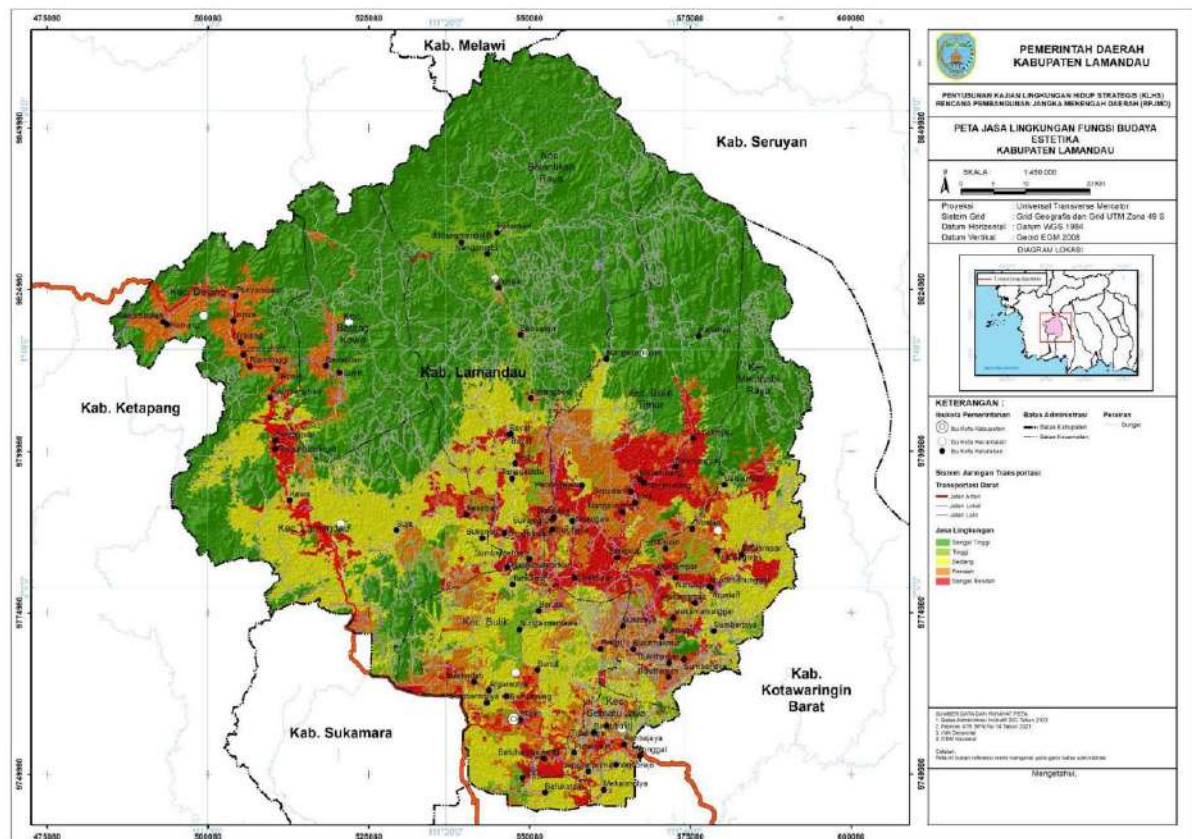
Berikut tabel jasa lingkungan hidup budaya estetika alam Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkatan kemampuannya.

Tabel 3-29 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Estetika Alam Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	911,08	4.659,33	1.229,84	3.061,20	57.008,71	66.870,14
2	Belantikan Raya	7.162,47	5.381,15	20.379,03	14.892,92	154.687,53	202.503,09
3	Bulik	8.612,19	19.653,22	40.039,20	9.224,94	4.757,36	82.286,92
4	Bulik Timur	26.620,42	21.708,56	11.724,24	1.640,16	65.648,17	127.341,55
5	Delang	1.327,23	17.279,67	1.176,17	503,86	35.281,16	55.568,08
6	Lamandau	9.666,63	7.338,62	52.510,90	5.231,14	42.469,77	117.217,05
7	Menthobi Raya	13.169,22	17.489,37	32.724,68	3.260,73	30.614,15	97.258,15
8	Sematu Jaya	3.450,24	4.869,37	9.305,55	801,76	612,45	19.039,37
Total		70.919,47	98.379,29	169.089,60	38.616,71	391.079,30	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki Jasa Lingkungan Hidup budaya estetika alam tingkat sangat tinggi dengan luasan sebesar 391.079,30 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan estetika alam di Kabupaten Lamandau digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 3-28 Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Estetika Alam Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

3.3.2.4 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung

Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan (S1)

Ekosistem mampu memberikan jasa dalam pembentukan lapisan tanah. Tanah merupakan kumpulan dari partikel mineral atau batuan serta organisme dan senyawa organik baik udara maupun air. Unsur utama dari tanah merupakan mineral yang terbentuk dengan komposisi homogen dari padatan anorganik. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan bervariasi antar lokasi. Lahan yang memiliki jasa pendukung pembentukan tanah yang besar adalah lahan dengan penyinaran matahari tinggi, jenis batuan yang dikandungnya cepat lapuk serta kondisi curah hujan yang tinggi. Perbedaan kondisi ekoregion, batuan dan iklim pada tiap daerah menyebabkan adanya variasi dalam jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan.

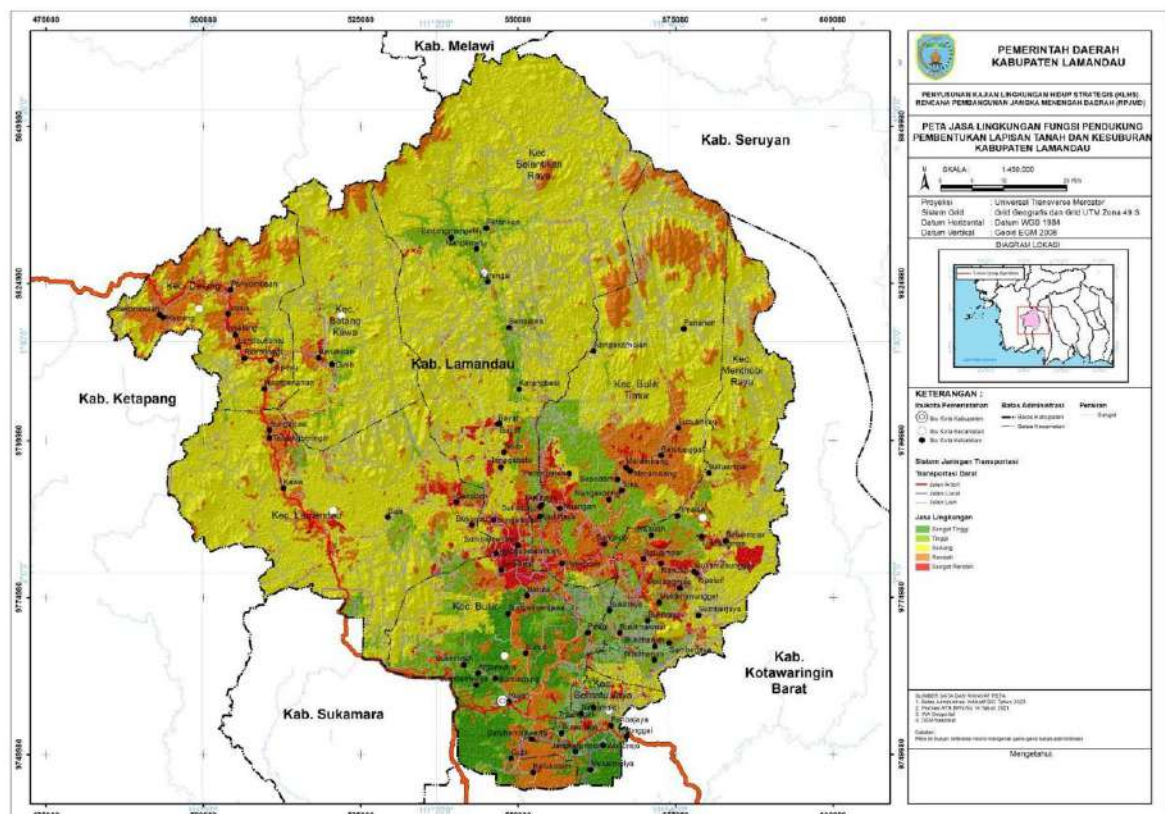
Berikut tabel jasa lingkungan hidup pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan berdasarkan tingkatan kemampuannya.

Tabel 3-30 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	518,33	5.348,52	57.960,90	3.042,39		66.870,14
2	Belantikan Raya	5.122,10	15.225,87	165.634,75	16.520,37		202.503,09
3	Bulik	4.318,98	21.036,26	11.832,43	19.550,78	25.548,47	82.286,92
4	Bulik Timur	6.419,57	42.620,50	60.457,97	17.684,75	158,75	127.341,55
5	Delang	964,88	22.374,74	31.724,60	503,86		55.568,08
6	Lamandau	3.553,64	13.451,21	92.987,20	7.225,02		117.217,05
7	Menthobi Raya	6.536,83	16.913,34	57.035,57	15.608,46	1.163,95	97.258,15
8	Sematu Jaya	966,05	3.887,90	3.039,83	4511,69	6633,9	19.039,37
Total		28.400,38	140.858,34	480.673,25	84.647,32	33.505,07	768.084,35

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki Jasa Lingkungan Hidup pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tingkat sedang dengan luas sebesar 480.673,25 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan tersebut di Kabupaten Lamandau digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 3-29 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara (S2)

Unsur hara berperan penting dalam perkembangan tumbuhan terutama dalam merangsang pertumbuhan akar serta tanaman muda. Zat hara juga mampu membantu tanaman dalam mempercepat proses pembungaan dan pemasakan buah. Ekosistem secara alami mampu menyediakan zat hara secara kontinyu (terus-menerus) melalui interaksi antara organisme dan alam baik atmosfer, biosfer, geosfer dan hidrosfer. Bervariasinya tingkat produktivitas lahan dan kesuburan tanah dipengaruhi akumulasi hara pada tumbuhan yang kemudian kembali ke tanah melalui siklus yang juga dipengaruhi oleh kondisi tumbuhan, iklim, dan jenis tanahnya.

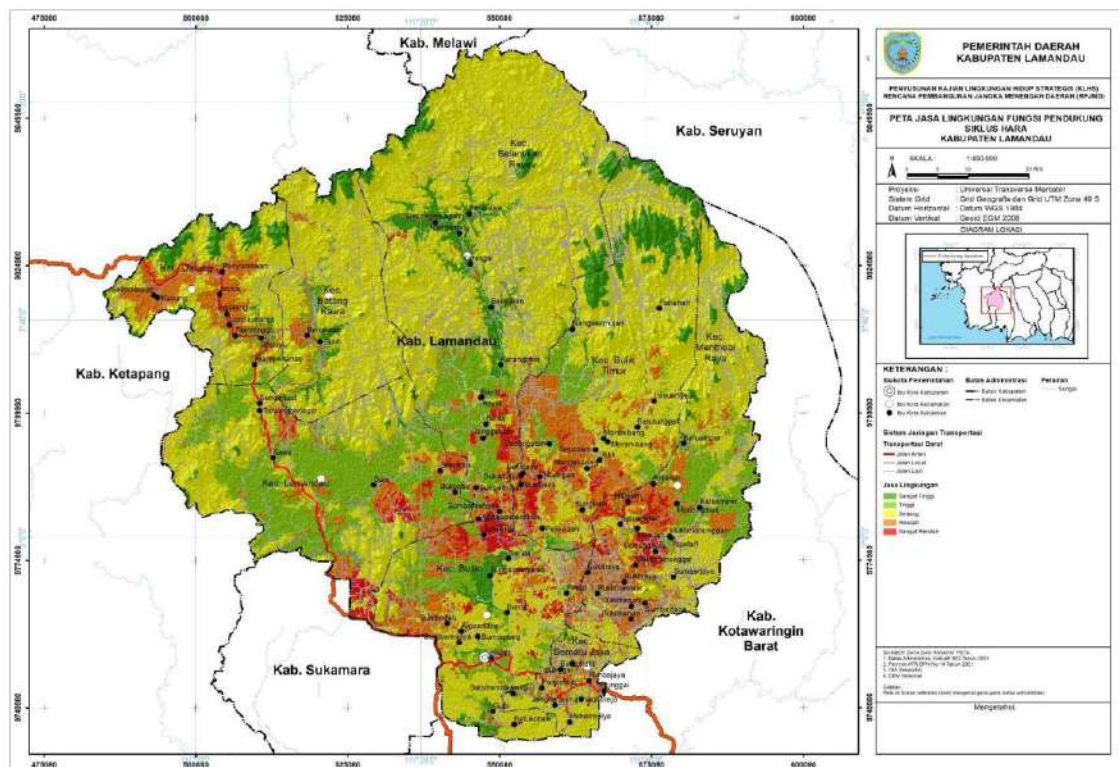
Berikut tabel jasa lingkungan hidup pendukung siklus hara berdasarkan tingkatan kemampuannya.

Tabel 3-31 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	108,98	3.305,46	55.079,26	3.392,50	4.983,94	66.870,14
2	Belantikan Raya	3.506,26	9.872,25	148.925,86	19.944,87	20.253,84	202.503,09
3	Bulik	6.928,69	16.951,98	38.614,27	14.942,02	4.849,96	82.286,92
4	Bulik Timur	3.506,85	26.639,55	72.490,35	9.878,80	14.825,99	127.341,55
5	Delang	72,75	15.859,31	29.331,61	3.145,16	7.159,26	55.568,08
6	Lamandau	5.452,48	13.019,88	46.148,10	51.178,61	1.417,99	117.217,05
7	Menthobi Raya	5.023,58	23.682,98	51.015,17	14.726,89	2.809,54	97.258,15
8	Sematu Jaya	412,61	4.965,39	12.340,88	1.101,64	218,86	19.039,37
Total		25.012,20	114.296,80	453.945,50	118.310,49	56.519,37	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa ekosistem siklus hara tingkat sedang dengan luasan sebesar 453.945,50 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan pendukung siklus hara di Kabupaten Lamandau digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 3-30 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer (S3)

Jasa produksi primer merupakan peran ekosistem dalam penyediaan oksigen dan habitat spesies. Oksigen merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Selain itu keberadaan oksigen juga menjadi kunci hadirnya berbagai keanekaragaman biodiversitas atau menjadi habitat bagi berbagai spesies makhluk hidup. Selain meningkatkan kadar oksigen ekosistem juga mampu mengurangi kadar karbondioksida. Tanaman menyerap karbondioksida dalam proses fotosintesis yang kemudian hasilnya berupa oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Keberadaan vegetasi menjadi faktor utama perbedaan kelas pada jasa pendukung produksi primer ini.

Berikut tabel jasa lingkungan hidup pendukung produksi primer berdasarkan tingkatan kemampuannya.

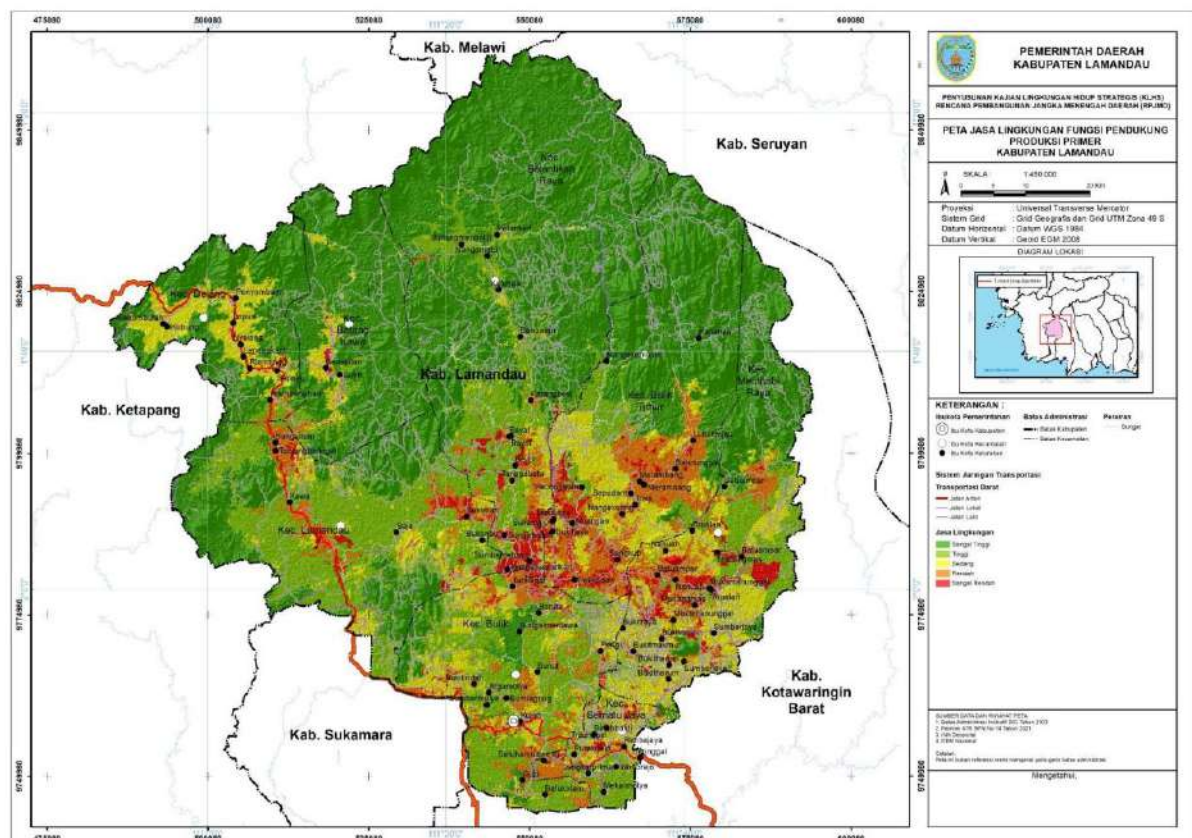
Tabel 3-32 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	587,68	583,03	4.917,25	4.290,90	56.491,28	66.870,14
2	Belantikan Raya	5.362,48	5.182,12	6.607,80	32.629,13	152.721,55	202.503,09
3	Bulik	2.082,64	14.058,98	20.001,34	37.889,39	8.254,57	82.286,92
4	Bulik Timur	6.709,70	23.949,39	21.224,66	10.447,23	65.010,58	127.341,55

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Delang	423,95	816,22	17.408,87	1.680,03	35.239,01	55.568,08
6	Lamandau	3.574,60	8.337,48	10.279,66	55.807,03	39.218,29	117.217,05
7	Menthobi Raya	7.130,65	11.640,65	32.542,45	15.713,68	30.230,72	97.258,15
8	Sematu Jaya	965,51	3.658,59	6.840,11	6.995,01	580,15	19.039,37
Total		26.837,22	68.226,47	119.822,15	165.452,38	387.746,14	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki Jasa Lingkungan Hidup pendukung produksi primer tingkat sangat tinggi dengan luas sebesar 387.746,14 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan pendukung produksi primer di Kabupaten Lamandau digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 3-31 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas (S4)

Biodiversitas merupakan keanekaragaman kehidupan di muka bumi mulai dari tumbuhan, hewan, jamur hingga mikroorganisme yang termasuk di dalamnya materi genetik yang dikandungnya serta sistem ekologi tempat mereka berada. Ekosistem

memberikan manfaat dengan menyediakan habitat mulai dari tempat untuk istirahat, makan hingga pada tempat perkembangbiakan. Semakin tingginya fungsi dukungan biodiversitas ditandai dengan semakin beragamnya karakter biodiversitas. Beragamnya biodiversitas besar dipengaruhi oleh ekoregion, karena ekoregion merupakan kawasan yang menggambarkan integritas lingkungan hidup yang didasarkan pada kesamaan iklim, tanah, serta flora dan fauna.

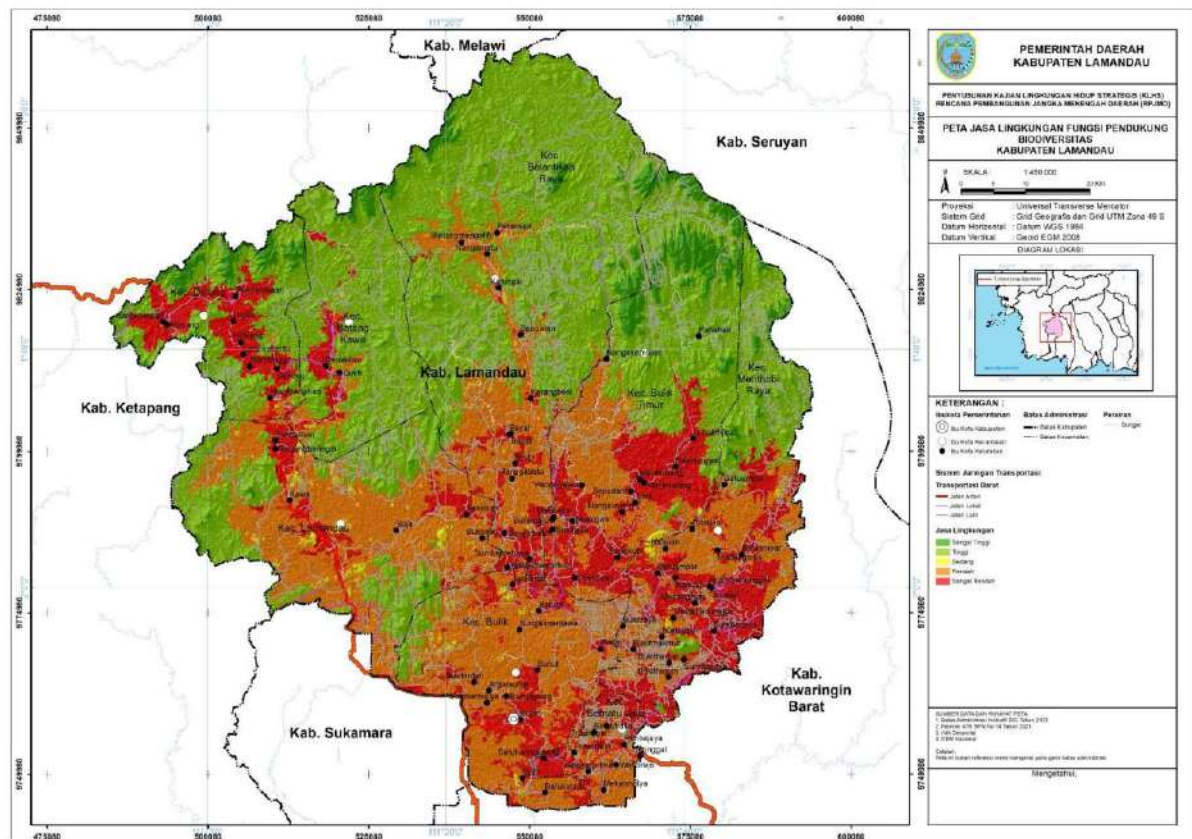
Berikut tabel jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas berdasarkan tingkatan kemampuannya.

Tabel 3-33 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	5.566,92	4.294,81	517,13	54.546,25	1.945,03	66.870,14
2	Belantikan Raya	9.503,32	38.312,58	1.965,63	145.587,07	7.134,49	202.503,09
3	Bulik	18.217,69	59.316,40	1.161,63	3.591,20		82.286,92
4	Bulik Timur	32.523,96	29.175,35	790,13	50.559,56	14.292,55	127.341,55
5	Delang	18.606,89	1.680,03	42,15	28.581,53	6.657,48	55.568,08
6	Lamandau	11.032,48	63.714,80	3.251,49	38.387,09	831,20	117.217,05
7	Menthobi Raya	33.520,17	33.646,33	697,98	26.494,90	2.898,78	97.258,15
8	Sematu Jaya	8.260,60	10.610,84		167,92		19.039,37
Total		137.232,04	240.751,13	8.426,13	347.915,52	33.759,53	768.084,36

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa ekosistem pendukung biodiversitas tingkat tinggi dengan luasan sebesar 347.915,52 Ha. Secara spasial, luas area yang memiliki jasa lingkungan pendukung biodiversitas di Kabupaten Lamandau digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 3-32 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas Kabupaten Lamandau

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

3.3.3. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Ekoregion

Analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat yang optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya alam beserta ekosistemnya. Analisis efisiensi sumber daya alam di Kabupaten Lamandau meliputi ekoregion.

Berdasarkan Peta Ekoregion Kabupaten Lamandau, terdapat 7 ekoregion yang ada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Lamandau. Ketujuh ekoregion tersebut adalah:

1. Dataran Fluvial Sungai
2. Dataran Rawa Sungai
3. Lembah antar Perbukitan Struktural Patahan
4. Lereng Kaki Perbukitan Struktural Patahan
5. Pegunungan Struktural Patahan
6. Perbukitan Intrusif
7. Perbukitan Struktural Patahan

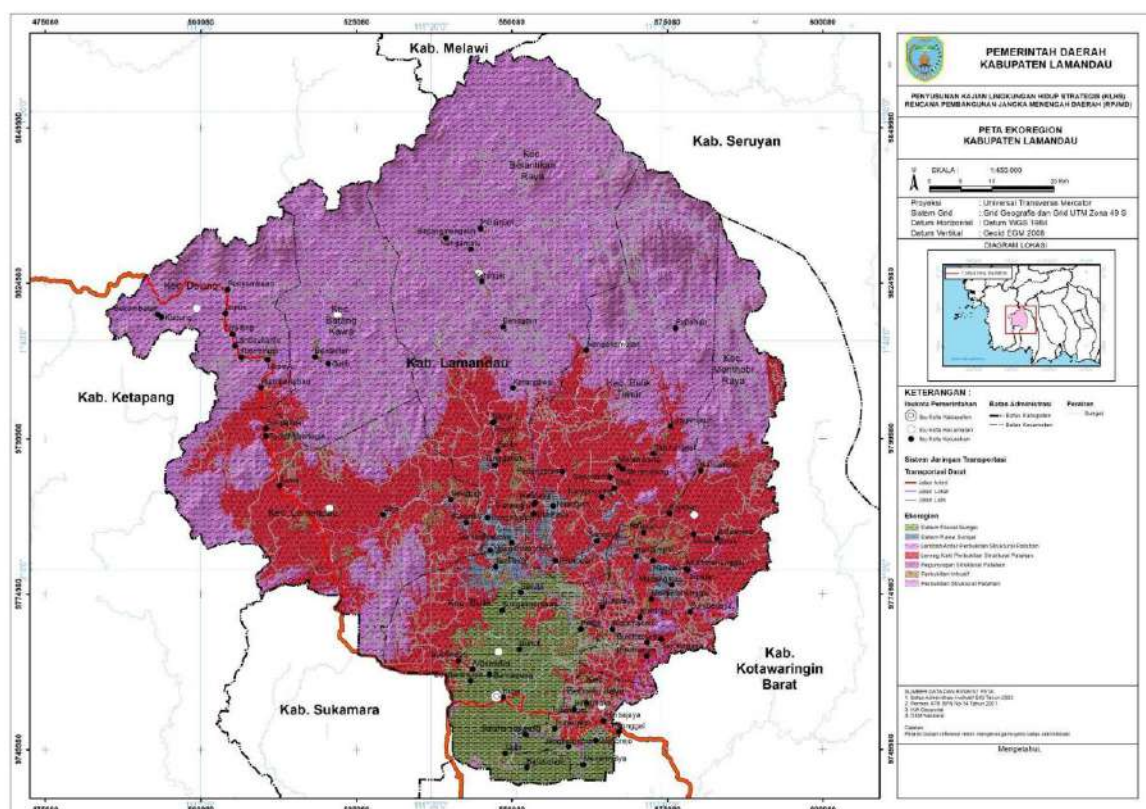
Sisi selatan Kabupaten Lamandau sebagian besar tersusun atas Dataran Fluvial Sungai, Dataran Rawa Sungai, dan Perbukitan Intrusif. Hal tersebut dikontrol oleh topografinya yang relatif datar atau berombak dengan material penyusun ekoregion tersebut sebagian besar adalah material aluvial yang berasal dari batuan plutonik seperti tonalit atau granit. Di sisi utara, terdapat perbukitan dan pegunungan struktural patahan. Kawasan ini dikontrol secara kuat oleh aktivitas tektonik dan menghasilkan struktur-struktur

geologi berupa patahan yang terjadi ketika kompresi tektonik mengenai material keras. Secara litologi, kawasan utara tersusun atas batuan intrusif seperti granit dan sebagai batuan ekstrusif seperti andesit atau basalt. Bilamana material tersebut terkena gaya atau tenaga endogen, terjadi patahan yang ditandai, secara visual, dengan banyaknya lereng - lereng curam dan menampilkan pola-pola kelurusan. Berikut merupakan luasan ekoregion di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-34 Ekoregion Kabupaten Lamandau

Jenis Ekoregion	Luas (Ha)
(1)	(2)
Dataran Fluvial Sungai	58.728,67
Dataran Rawa Sungai	14.866,69
Lembah Antar Perbukitan Struktural Patahan	23.373,13
Lereng Kaki Perbukitan Struktural Patahan	236.575,82
Pegunungan Struktural Patahan	33.644,28
Perbukitan Intrusif	26.379,38
Perbukitan Struktural Patahan	374.516,39
Total	768.084,36

Sumber: D3TLH Kabupaten Lamandau, 2023



Gambar 3-33 Ekoregion Kabupaten Lamandau

Sumber: D3TLH Kabupaten Lamandau, 2023

- **Rencana Kehutanan Tingkat Nasional**



75

Tabel 3-35 Rencana Kawasan Hutan Nasional di Kabupaten Lamandau

No	Rencana Kawasan Hutan	Luas Per Kecamatan								Luas Total (ha)
		Batang Kawa	Belantikan Raya	Bulik	Bulik Timur	Delang	Lamandau	Menthobi Raya	Sematu Jaya	Grand Total
1	Kawasan Hutan Non Kehutanan	2.251,14	4.095,74	14.804,61	18.984,19	1.573,04	4.442,82	12.049,22	741,04	58.941,80
2	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	474,47	221,91	4,36	204,80	78,86	75,74	32,49		1.092,64
3	Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	37.495,86	138.759,75	92,43	70.955,74	25.999,56	58.391,36	46.475,04	1.423,82	379.593,56
4	Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	728,57	5.770,51	5.726,28	0,00	5.385,15	5.705,68	2.449,94	14,75	25.780,88
5	Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan dan Ekosistem Gambut	15.048,14	30.541,43	6.721,32	6.403,67	14.265,72	4.100,67	8.501,39	1.186,74	86.769,08
	Grand Total	55.998,19	179.389,34	27.349,01	96.548,40	47.302,33	72.716,27	69.508,07	3.366,34	552.177,96

Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

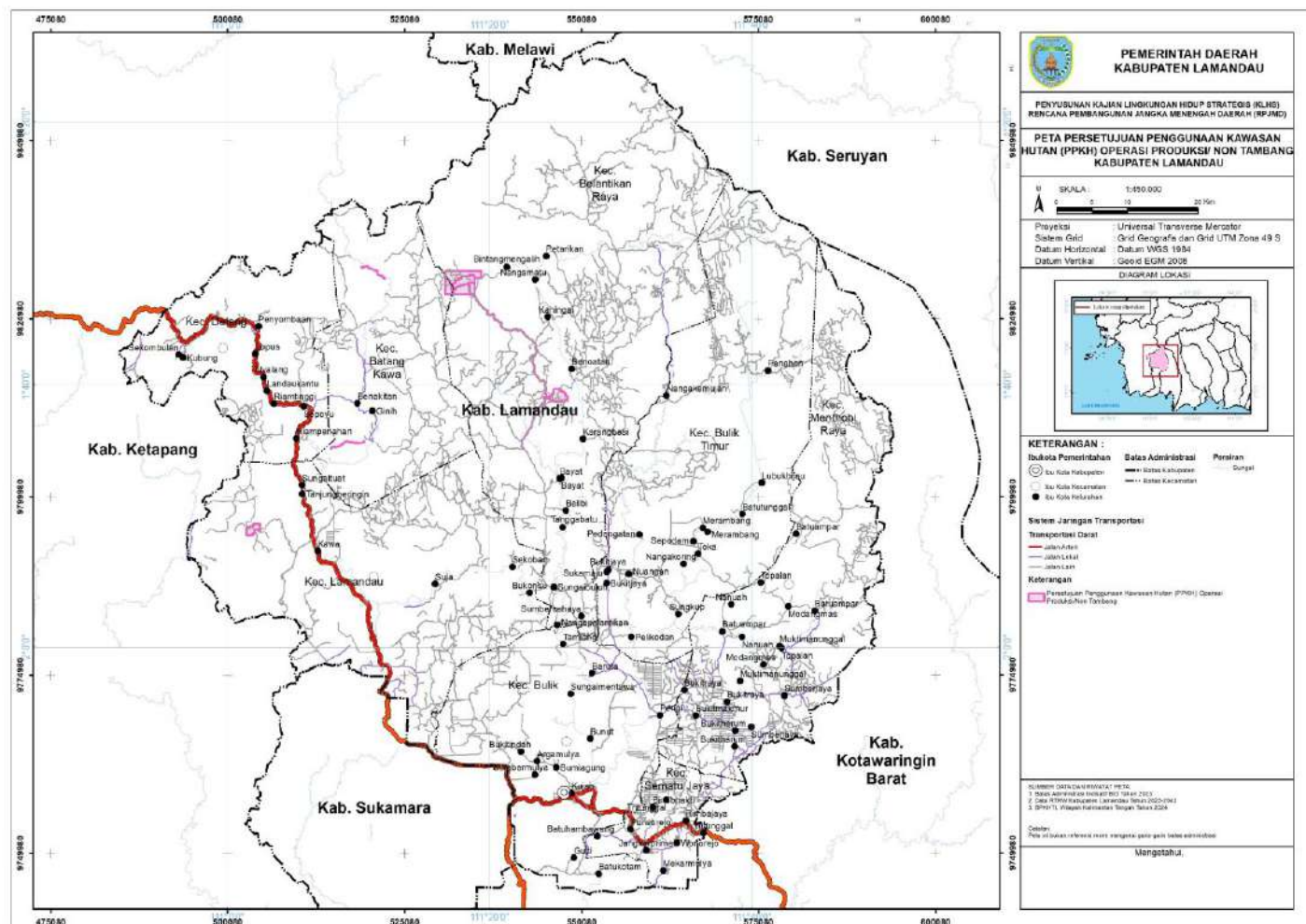
- **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 ayat 32 Definisi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan sedangkan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.

Dalam pasal 367 Permen LHK No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri meliputi:

- religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohani;
- pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter;**

- c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;**
- d. panas bumi;
- e. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya;
- h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- i. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
- j. industri selain industri primer Hasil Hutan;
- k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
- l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;



Gambar 3-35 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kabupaten Lamandau

Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

Tabel 3-36 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Lamandau

Jenis PPKH	Luas Per Kecamatan (ha)				Luas Total
	Batang Kawa	Belantikan Raya	Bulik	Lamandau	
Non Tambang	20,20	-	0,25	-	20,45
Pemerintah Kabupaten Lamandau	20,20	-	-	-	20,20
PLN (Persero), PT	-	-	0,25	-	0,25
Tambang	200,61	1.669,93	-	195,84	2.066,38
Farindo Agung, PT	-	-	-	195,84	195,84
Kapuas Prima Coal, PT	200,61	1.323,31	-	-	1.523,92
Megah Prima Semesta, PT	-	346,62	-	-	346,62
Grand Total	220,81	1.669,93	0,25	195,84	2.086,83

Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

Dari hasil identifikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Kabupaten Lamandau terdiri dari dua kegiatan yakni kegiatan tambang dan non tambang. Dengan luasan kegiatan non tambang adalah 20,45 ha yang digunakan oleh PLN dan Pemerintah Kabupaten Lamandau sendiri. Sedangkan untuk PPKH Tambang teridentifikasi terdapat 4 perusahaan yang melakukan aktivitasnya dengan luasan PPKH 2.066,38 ha yang tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Lamandau.

- **Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB)**

PIPPIB adalah kebijakan pemerintah dalam penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. PIPPIB adalah bentuk komitmen dari pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. Identifikasi lokasi PIPPIB di Kabupaten Lamandau didasarkan pada SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perijinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.



80

Tabel 3-37 Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) di Kabupaten Lamandau

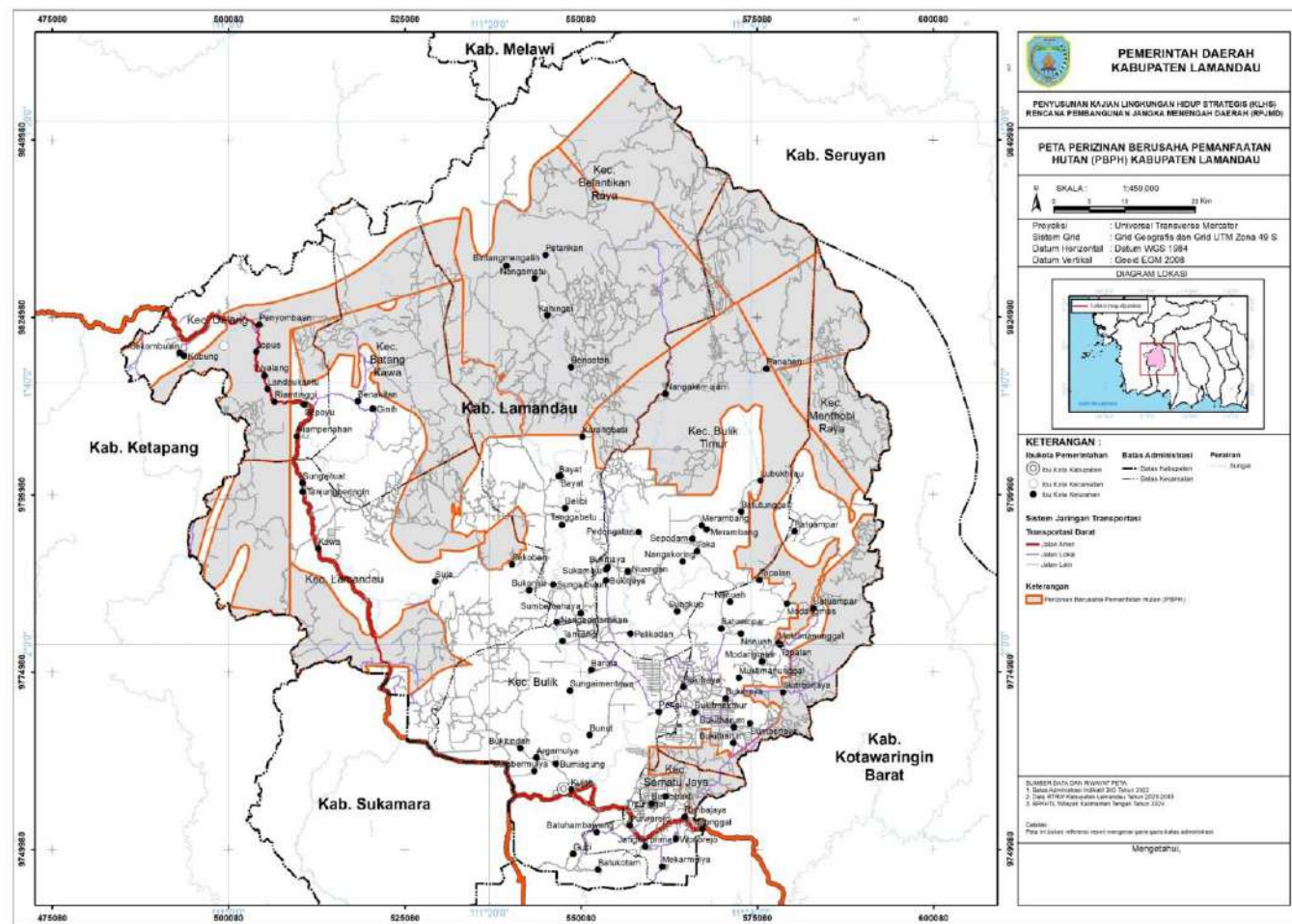
PIPPIB	Luas Per Kecamatan (ha)							Luas Total (ha)
	Batang Kawa	Belantikan Raya	Bulik	Bulik Timur	Delang	Lamandau	Menthobi Raya	
PIPPIB GAMBUT	-	-	176,88	-	-	-	-	176,88
PIPPIB KAWASAN	7.628,30	29.284,24	-	1.383,44	19.187,31	-	8.764,17	66.247,47
PIPPIB PRIMER	237,03	559,33	191,76	-	65,52	143,39	-	1.197,03
Grand Total	7.865,34	29.843,56	368,64	1.383,44	19.252,83	143,39	8.764,17	67.621,38

Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

Dari hasil identifikasi didapatkan hasil bahwa terdapat area seluas 67.621,38 ha di Kabupaten Lamandau yang bertampalan dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Terdapat 3 jenis Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru di Kabupaten Lamandau yakni PIPPIB Gambut dengan luasan 176,88 ha yang berada di Kecamatan Bulik, PIPPIB Kawasan dengan luasan 66.247,47 ha yang terdistribusi di Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang, dan Kecamatan Lamandau. Sedangkan PIPPIB Hutan Alam Primer dengan luasan 1.197,03 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau, dan Kecamatan Menthoi Raya.

- **Pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)**

Dalam pasal 367 Permen LHK No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Sebaran dari Pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersaji pada peta dan tabel berikut.



Gambar 3-37 Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kabupaten Lamandau
Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

Tabel 3-38 Daftar Pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kabupaten Lamandau

Perusahaan	Luas Per Kecamatan								Luas Total
	Batang Kawa	Belantikan Raya	Bulik	Bulik Timur	Delang	Lamandau	Menthobi Raya	Sematu Jaya	
PT AGRA PRIMERA PLANTATION (d.h. PT WANAKAYU BATUPUTH)	-	-	-	-	-	2.068,62	-	-	2.068,62
PT AMPRAH MITRA JAYA	26.970,13	10.101,61	-	-	2.871,69	12.224,56	-	-	52.167,99
PT ERYTHRINA NUGRAHA MEGAH	-	-	-	11.012,71	-	-	7.605,98	-	18.618,69
PT GRACE PUTRI PERDANA	-	-	83,55	-	-	19.421,69	-	-	19.505,23
PT HUTANINDO LESTARI RAYA TIMBER	-	29.109,32	0,00	17.202,57	-	-	61,95	-	46.373,84
PT INTRADO JAYA INTIGA	-	-	-	2.385,35	-	-	13.433,52	-	15.818,87
PT KARDA TRADES	-	89.530,89	-	2.086,93	-	-	-	-	91.617,82
PT KORINTIGA HUTANI	-	-	386,72	-	-	-	23.676,37	4.493,35	28.556,44
PT PANCARAN WANANUSA	-	754,45	-	-	-	3.064,09	-	-	3.818,55
PT SARI BUMI KUSUMA (UNIT I DAN II)	9.986,84	3.194,04	-	-	24.793,13	19.680,85	-	-	57.654,87
PT SUKA JAYA MAKMUR	15,62	-	-	-	-	-	-	-	15,62
PT TRISETIA INTIGA	-	8.251,24	-	41.265,19	-	-	9.071,34	-	58.587,77
PT WANA HIJAU PESAGUAN	-	-	-	-	314,84	4,96	-	-	319,79
Grand Total	36.972,59	140.941,56	470,26	73.952,75	27.979,65	56.464,77	53.849,16	4.493,35	395.124,10

Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

Dari hasil identifikasi terdapat 13 (tigabelas) Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Lamandau. Izin-izin tersebut tersebar di ke delapan kecamatan di Lamandau. Perusahaan dengan luasan izin terluas adalah PT KARDA TRADES dengan luasan izin 91.617,82 ha yang berada di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Bulik Timur.

3.3.4. Indeks Kualitas Lingkungan

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019-2023 di Kabupaten Lamandau cenderung fluktuatif. Berdasarkan data didapatkan IKLH Kabupaten Lamandau kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3-39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Indeks Kualitas	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,87	88,65	89,69	91,64	91,02
Indeks Kualitas Air (IKA)	64,8	51,6	64	70	66,84
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	68	75,15	75,53	76,8	76,58
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,4	71,76	76,93	80,25	78,77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, 2024

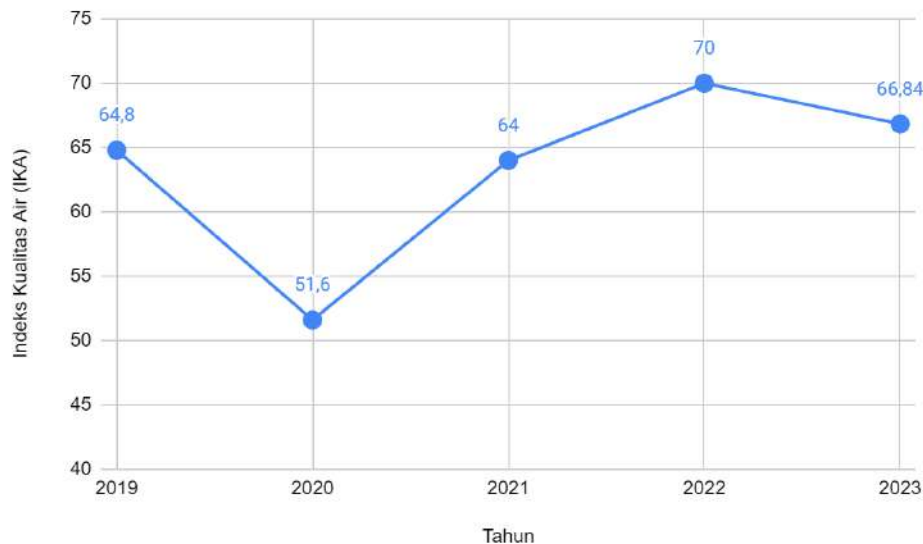
Keterangan: Sangatbaik ($90 \leq \text{IKLH} \leq 100$) Sedang ($50 \leq \text{IKLH} < 70$) Sangat Kurang ($0 \leq \text{IKLH} < 25$)
Baik ($70 \leq \text{IKLH} < 90$) Kurang ($25 \leq \text{IKLH} < 50$)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lamandau tahun 2023 mengalami penurunan dari angka 80,25 pada tahun 2022 menjadi 78,77. Adapun meskipun berindikasi menurunnya kualitas lingkungan, berdasarkan kategori kelasnya, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lamandau masih tergolong baik.

3.3.4.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), padatan terlarut (TDS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N), total fosfat dan fecal coliform.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Tanggal 04 Desember 2020 Nomor 5.318/PPKL/SET/REN,O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Berdasarkan data diperoleh IKA Kabupaten Lamandau tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.



Gambar 3-38 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau, 2023

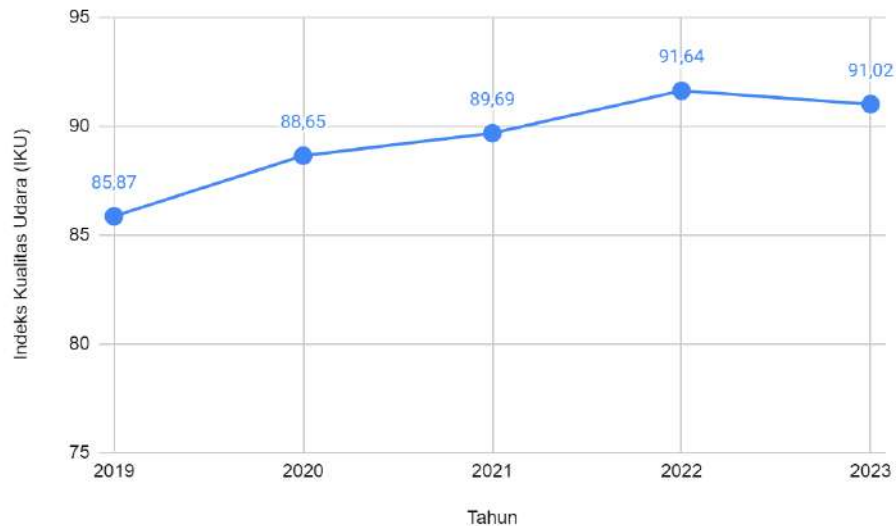
Dari data di atas, diketahui bahwa IKA Kabupaten Lamandau tahun 2023 menurun dari 70 pada tahun 2022 menjadi 66,84. Penurunan ini menyebabkan kualitas air Kabupaten Lamandau termasuk dalam kategori sedang.

3.3.4.2 Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKU didapatkan melalui data pemantauan kualitas udara di Kabupaten Lamandau yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Perhitungan indeks kualitas udara dilakukan berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Tanggal 04 Desember 2020 Nomor 5.318/PPKL/SET/REN,O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Lamandau Tahun 2023 mencapai 91,02, menurun dari tahun 2022 yang semula sebesar 91,64. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas udara di Kabupaten lamandau telah berhasil mengarah ke kondisi yang lebih baik namun masih perlu upaya peningkatan lebih lagi. IKU Kabupaten Lamandau harus dijaga dan diupayakan agar terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Adapun fluktuasi IKU Kabupaten Lamandau dari tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 3-39 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau, 2023

3.3.4.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan. IKTL berfokus pada kondisi kawasan hutan dan area penggunaan lain. Dalam perhitungannya, IKTL didapatkan melalui penjumlahan:

1. Luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan tutupan lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/ waduk, lahan kemiringan lereng >25%.
3. Arah penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Luas tutupan lahan dapat ditingkatkan jika upaya peningkatan dilakukan secara intensif melalui program penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

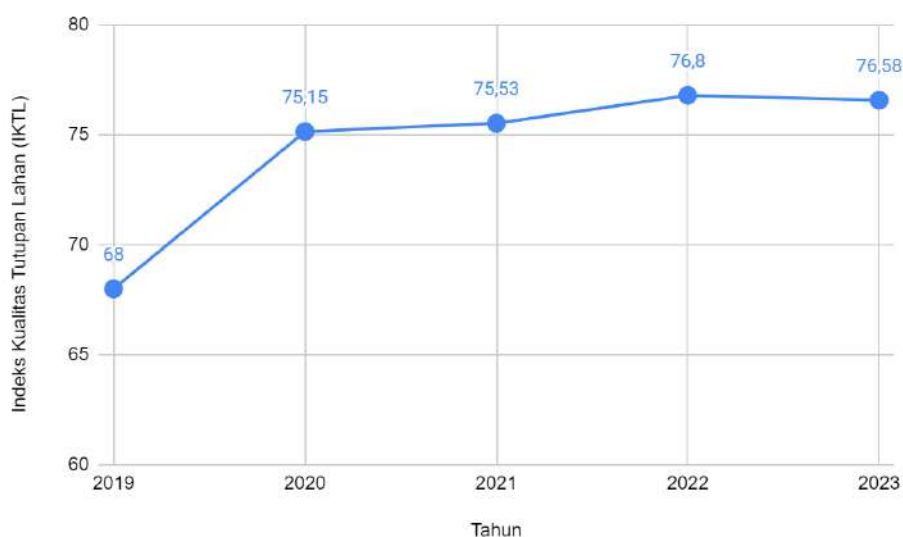
Berkaitan dengan lahan kritis Pada tahun 2022 Ditjen PDASRH telah melakukan *update* Peta Lahan Kritis Nasional. Peta lahan kritis tersebut juga telah disahkan melalui SK Direktur Jenderal PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/ DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022. Penyusunan Peta Lahan Kritis mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 yang memperhitungkan pengaruh erosi, lereng lahan, dan penutupan lahan. Kecenderungan luasan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut

Tabel 3-40 Luasan Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Tengah

Tingkat Kekritisan Lahan	Tahun				
	2006	2011	2013	2018	2022
Kritis	1.939.144	3.498.036	4.785.299	768.756	734.524
Sangat Kritis	1.267.743	1.138.854	359.405	92.484	85.159
Jumlah	3.206.887	4.636.890	5.144.704	861.24	819.683

Sumber: <https://pdasrh.menlhk.go.id/>

Apabila dilihat dari trend tahun 2006 hingga tahun 2013 teridentifikasi adanya peningkatan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian mengalami penurunan dari tahun 2013-2022. Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah turut andil dalam preservasi dari kondisi lahan DAS terutama dengan adanya isu alih fungsi lahan yang berkembang di Kabupaten Lamandau. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kondisi lahan kritis yang bertambah/berkurang dapat mempengaruhi nilai dari IKTL. Di Kabupaten Lamandau IKTL tahun 2019-2023 digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 3-40 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau, 2023

Dari data di atas, diketahui bahwa IKTL Kabupaten Lamandau tahun 2023 mengalami penurunan kecil dari tahun 2022 sebesar 76,8 menjadi 76,58 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dalam kaitannya dengan pelestarian dan penghijauan hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau masih belum optimal sehingga perlu dipertimbangkan kembali upaya strategis yang dapat mengatasi hal ini.

3.3.5. Keanekaragaman Hayati

3.3.5.1 Kawasan Hutan

Hutan memiliki peranan besar dalam mendukung keanekaragaman hayati. Hutan menjadi tempat berkembang biaknya aneka flora dan fauna yang saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem, semua komponen di dalamnya memiliki peran tersendiri. Semakin beragam hewan dan tanaman, maka semakin banyak pula makhluk hidup yang memiliki peran penting. Keanekaragaman hayati dapat mendukung ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif pada lingkungan secara makro. Ekosistem yang sehat akan menciptakan kualitas air, tanah dan udara yang baik, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, mendukung pertanian, serta menjadi pengendali hama dan penyakit (lestari-indonesia.org).

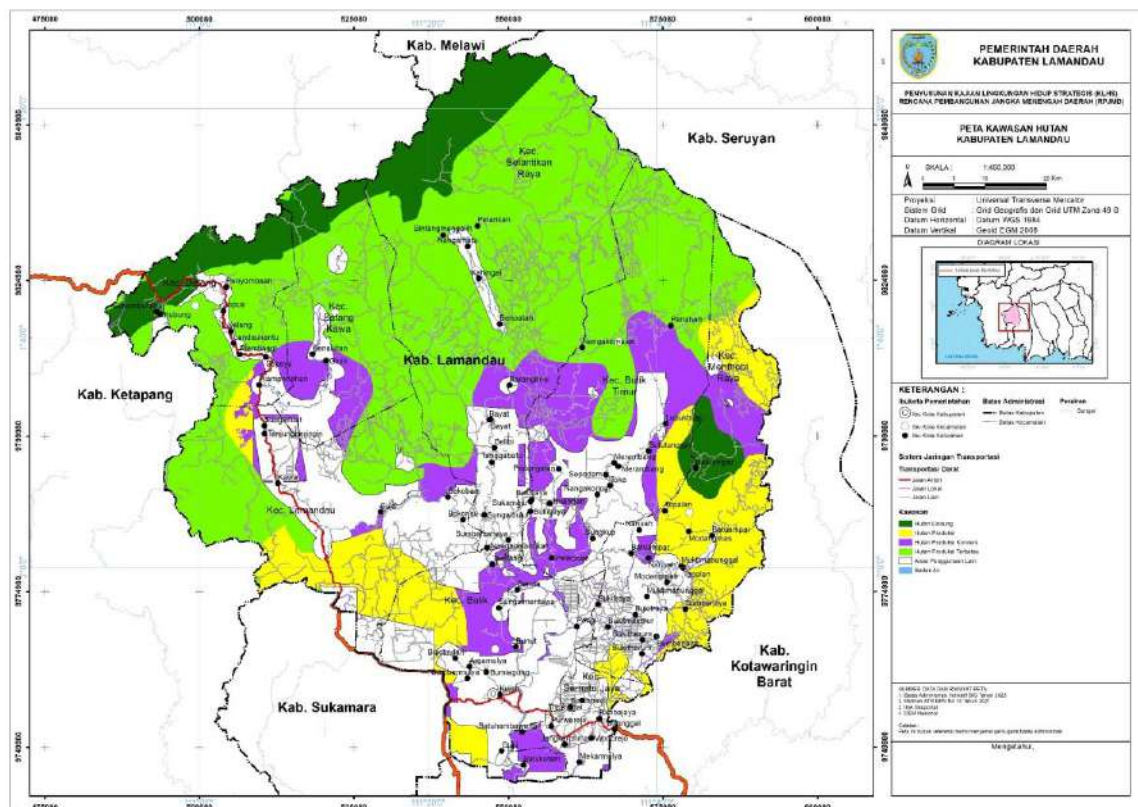
Berdasarkan SK No. 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan hutan di Kabupaten Lamandau terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, dan hutan produksi terbatas. Potensi hutan ini tetap dipertahankan untuk menjaga keunikan flora dan fauna, yang sangat menarik untuk dimanfaatkan menjadi objek wisata alam. Sektor kehutanan diharapkan mampu memanfaatkan Potensi sumber daya hutan tersebut sekaligus berperan sebagai salah satu sektor pendorong pembangunan dan pengembangan wilayah. Berikut data luas kawasan hutan di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-41 Kawasan Hutan Kabupaten Lamandau

Kecamatan	Kawasan Hutan (ha)					Total (ha)
	Areal Penggunaan Lain	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konvers	Hutan Produksi Terbatas	
Batang Kawa	10.403,73	7.643,55		10.417,17	37.887,22	66.351,67
Belantikan Raya	22.486,08	29.284,24		11.098,82	138.880,16	201.749,29
Bulik	53.740,00		13.667,79	13.982,01		81.389,80
Bulik Timur	33.423,53	1.383,44	5.919,74	35.130,38	50.507,12	126.364,21
Delang	8.001,98	19.187,31	1.160,31	1.959,40	24.983,82	55.292,82
Lamandau	43.686,86		22.694,54	6.571,41	43.688,53	116.641,33
Menthobi Raya	27.451,87	8.764,17	44.473,43	9.254,68	6.972,17	96.916,33
Sematu Jaya	15.631,07		1.423,82	1.946,72		19.001,61
Total	214.825,12	66.262,72	89.339,62	90.360,59	302.919,02	763.707,06

Sumber: SK No. 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara spasial, kawasan hutan di Kabupaten Lamandau digambarkan pada peta berikut.



Gambar 3-41 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lamandau

Sumber: SK No. 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021

Selain kawasan hutan di atas Kabupaten Lamandau juga memiliki perhutanan sosial. Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat desa sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Rakyat mendapat izin atas hak kelola perhutanan sosial yang terdiri dari 5 skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan pola kemitraan.

Di Kabupaten Lamandau terdapat Hutan Adat Desa yang keberadaannya telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Hutan Adat Desa Kinipan yang diakui melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4513/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1.5/2022 dengan luasan Hutan Adat mencapai ± 6.825 hektare. Desa Kinipan sendiri mayoritas penduduknya merupakan bagian dari komunitas adat Dayak Tomun yang dihuni oleh 198 keluarga yang terdiri dari 331 laki-laki dan 312 perempuan. Desa Kinipan dipimpin oleh Mantir Adata yang merupakan perpanjangan tangan dari Domang pada tingkat desa atau kecamatan. Mantir Adat berperan penting dalam penegakan hukum adat Dayak, termasuk dalam pengambilan keputusan di sistem peradilan adat yang melibatkan kesaksian, bukti, serta ahli hukum adat.

Terdapat tiga hak utama dalam pengelolaan wilayah adat di Kinipan yakni (1) Hak Komunal, Hak kepemilikan bersama yang dimiliki seluruh masyarakat adat Desa Kinipan dan diatur oleh hukum adat; (2) Hak Keluarga, Hak yang melekat pada hubungan keluarga atau kekerabatan dalam wilayah adat; dan (3) Hak Individu, Hak kepemilikan dan otoritas individu untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu yang diatur oleh hukum adat.

3.3.5.2 Ekosistem Flora dan Fauna

Potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati dapat dilihat melalui Jasa Lingkungan Hidup keanekaragaman hayati yang ada di ekoregion. Pulau Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tutupan lahan dan kondisi kawasan hutan hujan dataran rendah menjadi habitat yang sangat mendukung untuk tumbuh kembang berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Secara khusus, salah satu kantong keanekaragaman hayati di Pulau Kalimantan adalah Pegunungan Schwaner-uller yang terletak di tengah Pulau Kalimantan karena fungsinya yang sangat vital terhadap metabolisme dan dinamika ekosistem, kawasan ini sering kali disebut sebagai Heart of Borneo.

Kabupaten Lamandau termasuk ke dalam ekosistem tersebut terutama untuk kawasan perbukitan di sebelah utara. Di sebelah selatan terdapat banyak ekosistem rawa. Oleh karena hal tersebut, terdapat keanekaragaman hayati yang relatif tinggi di kawasan utara, di mana terdapat banyak satwa langka dan dilindungi seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Gibon Borneo (*Hylobates muelleri*), Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Tarsius (*Tarsius sp.*), Biawak Tak Bertelinga (*Varanus borneensis*)

Tabel 3-42 Daftar Fauna dan Flora di Kabupaten Lamandau

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hewan Menyusui	<i>Bos javanicus</i>	Banteng			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Cervus spp</i>	Menjangan			Ya		
	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing Hutan			Ya		
	<i>Helarctos Malayanus</i>	Beruang Madu			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Felis badia</i>	Kucing Merah			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Hylobates muelleri</i>	Owa			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak			Ya		
	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing Tanah			Ya		
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Mydaus javanensis</i>	Senggung/Sigung			Ya		
	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tahun 2019
	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau			Ya		

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dahan/Macan Dahan					
	<i>Pteurista elegans</i>	Bajing Terbang			Ya		
	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang Utan			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Tragulus spp</i>	Kancil/Pelanduk			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Tarsius spp</i>	Singapuar, Binatang Hantu			Ya		
	<i>Canis sp</i>	Anjing				Ya	
	<i>Suncus murinus</i>	Celurut				Ya	
	<i>Felis silvestris catus</i>	Kucing				Ya	
	<i>Felis domestika</i>	Kucing				Ya	
	<i>Mussp</i>	Mencit				Ya	
	<i>Rattus rattus</i>	Tikus rumah				Ya	
	<i>Rattus argentiventer</i>	Tikus Sawah				Ya	
	<i>Rattus norvegicus</i>	Tikus got				Ya	
	<i>Rattus tiomanicus</i>	Tikus pohon				Ya	
	<i>Bandicota indica</i>	Tikus wirok				Ya	
	<i>Canis familiaris domesticus</i>	Anjing				Ya	
	<i>Lariscus insignus</i>	Bajing				Ya	
	<i>Cynopterus sphinx</i>	Codot				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Pteropus vampyrus</i>	Kalong				Ya	
	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet ekor panjang				Ya	
	<i>Sus scrofa</i>	Babi hutan				Ya	
	<i>Trichys fasciculata</i>	Angkisekor panjang				Ya	
	<i>Callosciurus prevostii</i>	Bajing tiga warna				Ya	
	<i>Callosciurus notatus</i>	Bajing Kelapa				Ya	
	<i>Exilisciurus whiteheadi</i>	Bajing kerdil telinga kuncung				Ya	
	<i>Nannosciurus exilis</i>	Bajing kerdil dataran Rendah				Ya	
	<i>Nannosciurus melanotis</i>	Bajing kerdil telinga hitam				Ya	
	<i>Aeromysteophromelas</i>	Bajing terbang hitam				Ya	
	<i>Presbytis cristata</i>	Lutung kelabu				Ya	
2. Burung	<i>Acchipteridae</i>	Alap-Alap (Semua Jenis)			Ya		
	<i>Alcedinidae</i>	Raja Udang / Cekakak / Pekaka (Semua Jenis)			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Argusianus argus</i>	Kuau			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul			Ya		

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Bucerotidae</i>	Julang / Enggang / Rangkong (Semua Jenis)			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Nectariidae</i>	Burung Madu (Semua Jenis) ciriparuh panjang dan mengisap bunga			Ya		
	<i>Gracula robusta</i> <i>Gracula religiosa</i>	Burung Beo			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Passer montanus</i>	Burung gereja				Ya	
	<i>Gallus varius</i>	Ayam hutan				Ya	
	<i>Psittacula alexandri</i>	Betet				Ya	
	<i>Bubusp</i>	Burunghantu				Ya	
	<i>Otus migicus</i> <i>beccarii</i>	Burunghantu				Ya	
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Cucak rowo				Ya	
	<i>Cairinascutulata</i>	Itik Liar			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Leptoptilius javanicus</i>	Bangau			Ya		
	<i>Bubulcus ibis</i>	Bangau Putih			Ya		
	<i>Megapodius reintwardtii</i>	Burung gosong			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantingan, Klaces			Ya		
	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung Gunting, Bintayung			Ya		
	<i>Lhopozosterops javanica</i>	Burung kacamata leher abu-abu			Ya		
	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang Ekor Putih			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Corvus enca</i>	Gagak hutan			Ya		
	<i>Accipitridae</i>	Elang			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Pandionidae</i>	Burungalap-alap, Elang			Ya		
	<i>Falconidae</i>	Elang Alap-alap			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Bucerotidae</i>	Enggang			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Serinus canaria</i>	Kenari				Ya	
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Kutilang				Ya	
	<i>Columbia lifia</i>	Merpati				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Turnix suscifator</i>	Puyuh				Ya	
	<i>Hirundo rustica guturalis</i>	Sriti				Ya	
	<i>Streptopelia chinensis</i>	Tekukur Biasa				Ya	
	<i>Colocalia esculenta</i>	Walet Sapi				Ya	
	<i>Collocalia linchi</i>	Walet Linchi				Ya	
	<i>Centropus sinensis</i>	Bubut besar				Ya	
	<i>Centropus bengalensis</i>	Bubut alang-alang				Ya	
	<i>Centropus superciliosus</i>	Bubut Putih				Ya	
	<i>Centropus phasianinus</i>	Bubut Pheasant				Ya	
	<i>Treron</i>	Punai				Ya	
	<i>Argusianus argus</i>	Kuau			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Alcedinidae</i>	Burung Udang, Raja Udang			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Pittidae</i>	Burung paok			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak Kerdil			Ya		
	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
3. Reptil	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya Muara			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Hydrasaurus ambonensis</i>	Biawak Ambon			Ya		
	<i>Python molorus</i>	Sanca Bodo			Ya		
	<i>Tomistomescheleg elii</i>	Buaya Sapit			Ya		
	<i>Veranus borneensis</i>	Biawak Kalimantan			Ya		
	<i>Veranus nebulosus</i>	Biawak Abu-Abu			Ya		
	<i>Notochelys platinota</i>	Beiyogo				Ya	
	<i>Varanus salvator</i>	Biawak air				Ya	
	<i>Amyda cartilaginea</i>	Bulus/labi-labi biasa				Ya	
	<i>Calotessp.</i>	Bunglon				Ya	
	<i>Bronchocela cristatella</i>	Bunglon berjambul hijau				Ya	
	<i>Bronchocela jubata</i>	Bunglon pohon ramping				Ya	
	<i>Cosymbotus platyurus</i>	Cicak Berekor pipih				Ya	
	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Cicak Rumah berekor duri				Ya	
	<i>Draco quinquefasciatus</i>	Cicak terbang belang lima				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Draco melanopogon</i>	Cicak terbang berjanggut hitam				Ya	
	<i>Draco volans</i>	Cicak terbang biasa				Ya	
	<i>Draco obscurus</i>	Cicak terbang samar				Ya	
	<i>Mabuya rugifera</i>	Kadal Bersisik Kasar				Ya	
	<i>Gonocephalus chamaeleontinus</i>	Kadal chameleon				Ya	
	<i>Gonocephalus doriae</i>	Kadal doria				Ya	
	<i>Mabuyamacularia</i>	Kadal hutan berbintik				Ya	
	<i>Sphenomorphus indices</i>	Kadal hutan india				Ya	
	<i>Mabuyamultifasciata</i>	Kadal Matahari bergaris banyak				Ya	
	<i>Lipidiavittigera</i>	Kadal Pohon bergaris				Ya	
	<i>Acanthosaura sp.</i>	Kadal Pohon bertanduk				Ya	
	<i>Dasia olivacea</i>	Kadal Pohon olive				Ya	
	<i>Pelochelys cantorii</i>	Labi-labi raksasa				Ya	
	<i>Cyrtodactylus sp.</i>	Tokek Berjari kaki ramping				Ya	
	<i>Cyrtodactylus peguensis</i>	tokek bertotol lebar				Ya	
	<i>Gekko gekko</i>	Tokek Rumah				Ya	
	<i>Vipera russelli</i>	Ular bandotan puspo				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Maticorabivirgata flaviceps</i>	Ular cabal kepala merah/ular koral biru				Ya	
	<i>Boiga dendrophila</i>	Ular Cincin mas				Ya	
	<i>Naja sumatrana</i>	Ular cobra sumatra				Ya	
	<i>Naja sputatrix</i>	Ular cobra/sendok				Ya	
	<i>Ahaetullaprasina</i>	Ular Gadung/ular pucuk				Ya	
	<i>Trimeresurus albolabris</i>	Ular Hijau				Ya	
	<i>Trimeresurus stejnegeri</i>	Ular Hijau bambu				Ya	
	<i>Acerochordus granulatus</i>	Ular Kadut				Ya	
	<i>Homalopsis buccata</i>	Ular Kadut belang				Ya	
	<i>Acrochordus javanicus</i>	Ular Karung				Ya	
	<i>Rhamphotyphlops braminus</i>	Ular Kawat				Ya	
	<i>Xenochrophis vittatus</i>	Ular Kisik/ lare angon				Ya	
	<i>Enhydryis plumbea</i>	Ular lumpur				Ya	
	<i>Boiga dendrophila</i>	Ular mangrove				Ya	
	<i>Xenopeltis unicolor</i>	Ular Pelangi				Ya	
	<i>Psammodynastes pulverulentus</i>	Ular peniru viper biasa				Ya	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i>	Ular Picung				Ya	
	<i>Python curtus</i>	Ular Sanca Darah				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Morelia viridis</i>	Ular Sanca Hijau.				Ya	
	<i>Python reticulatus</i>	Ular Sanca Kembang				Ya	
	<i>Zaocyscarinatus</i>	Ular Sapi				Ya	
	<i>Python reticulatus</i>	Ular Sawah				Ya	
	<i>Aplopeltura boa</i>	Ular semak				Ya	
	<i>Sibynophis geminatus</i>	Ular Serasah				Ya	
	<i>Boiga denrophi</i>	Ular Taliwangsa				Ya	
	<i>Dendrelaphis pictus</i>	Ular tambang				Ya	
	<i>Calloselasma rhodostoma</i>	Ular Tanah				Ya	
	<i>Ptyas korros</i>	Ular Tikus / ular jali				Ya	
	<i>Bungarus javanicus</i>	Ular welang				Ya	
	<i>Bungarus candius</i>	Ular weling				Ya	
	<i>Bungarus javanicus</i>	Ular welang				Ya	
	<i>Rhamphotyphlops braminus</i>	Ular Kawat				Ya	
	<i>Python reticulatus</i>	Ular Sanca Kembang				Ya	
	<i>Morelia viridis</i>	Ular Sanca Hijau.				Ya	
	<i>Acrochordus javanicus</i>	Ular Karung				Ya	
	<i>Xenochrophis vittatus</i>	Ular Kisik				Ya	
	<i>Homalopsis buccata</i>	Ular Kadut belang				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Ahaetullaprasina</i>	Ular Gadung				Ya	
	<i>Boigadendrophila</i>	Ular Cincin mas				Ya	
	<i>Dendrelaphispictus</i>	Ular Tambang				Ya	
	<i>Ptyaskorros</i>	Ular Tikus / ular jali				Ya	
	<i>Sibynophisgeminatus</i>	Ular Serasah				Ya	
	<i>Zaocyscarinatus</i>	Ular Sapi				Ya	
	<i>Viperarusselli</i>	Ular Bandotan Puspo				Ya	
	<i>Calloselasmarhodostoma</i>	Ular Tanah				Ya	
	<i>Bungaruscanddius</i>	Ular weling				Ya	
	<i>Calotes cristatellus</i>	Bunglon				Ya	
	<i>Bronchocela jubata</i>	Bunglon Surai				Ya	
	<i>Dracovolans</i>	Cleret Gombel				Ya	
	<i>Cosymbotus platyru</i>	Cecak Tembok				Ya	
	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Cecak Kayu				Ya	
	<i>Gehyra mutilata</i>	Cecak Gula				Ya	
	<i>Cyrtodactylus marmoratus</i>	Cecak Batu				Ya	
	<i>Mabuyamultifasciata</i>	Kadal Kebun				Ya	
	<i>Takydromus sexlineatus</i>	Kadal Rumput				Ya	
	<i>Geckogecko</i>	Tokek rumah				Ya	
	<i>Geckomonarchus</i>	Tokek Berbintik				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Geckosmithii</i>	Tokek Hutan				Ya	
	<i>Varanus salvator</i>	Biawak				Ya	
	<i>Amyda cartilaginea</i>	Bulus				Ya	
	<i>Chelydra serpentina</i>	Kura-kura				Ya	
4. Amphibi	<i>Chitra indika</i>	Labi-Labi Besar			Ya		
	<i>Batagur baska</i>	Tuntong			Ya		
	<i>Limnonectes shom penarum</i>	bangkong batu/bohng				Ya	
	<i>Bufo melanostictus</i>	Bangkong kolong (lingk. Rumah)				Ya	
	<i>Bufo asper</i>	Bangkong sungai				Ya	
	<i>Limnonectes kuhli</i>	Bangkong tuli				Ya	
						Ya	
	<i>Megophrys nasuta</i>	Katak bertanduk				Ya	
	<i>Rana paramacrodon</i>	Katak bertopeng				Ya	
	<i>Fejervarya cancrivora</i>	Katak Hijau/katak pemakan kepiting				Ya	
	<i>Polypedates leucomystax</i>	Katak pohon bergaris empat				Ya	
	<i>Nyctixalus pictus</i>	Katak pohon telinga/katak pohon bertotol				Ya	
	<i>Rana limnocharis</i>	Katak Sawah				Ya	
	<i>Rana cancrivora</i>	Katak Sawah				Ya	
	<i>Leptobrachium hasseltii</i>	Katak serasah				Ya	
	<i>Leptobrachium montanum</i>	Katak Serasah gunung				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Rana macrodon</i>	Katak sungai				Ya	
	<i>Fejervarya limnocharis</i>	Katak Tegalan				Ya	
	<i>Bufo divergen</i>	Kodok berjambul				Ya	
	<i>Pelophrynesp.</i>	Kodok kerdil dataran rendah				Ya	
	<i>Bufo asper</i>	Kodok puru besar				Ya	
	<i>Bufo juxtasper</i>	Kodok puru besar				Ya	
	<i>Bufo parvus</i>	Kodok Puru Kerdil				Ya	
	<i>Bufo quadriporcatus</i>	Kodok pururawa				Ya	
	<i>Ansonia leptopus</i>	Kodok Ramping				Ya	
	<i>Rana baramica</i>	Kongkang baram				Ya	
	<i>Staorois tuberilingus</i>	Kongkang batu totol hijau				Ya	
	<i>Staorois natator</i>	Kongkang batu totol- hitam				Ya	
	<i>Rana signata</i>	Kongkang bertotol				Ya	
	<i>Rana erythraea</i>	Kongkang gading				Ya	
	<i>Rana nicobariensis</i>	Kongkang jangkrik				Ya	
	<i>Rana chalconota</i>	Kongkang kolam				Ya	
	<i>Rana kampeni</i>	Kongkang macan				Ya	
	<i>Rana hosii</i>	Kongkang Racun				Ya	
	<i>Rananigrovittata</i>	Kongkang sisigelap				Ya	
	<i>Rana picturata</i>	Kongkang sungai bergaris				Ya	
	<i>Microhyla heymonsi</i>	Percil Bintik dua				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Microhyla borneensis</i>	Percil mulut panah borneo				Ya	
	<i>Microhyla achatina</i>	Percil jawa				Ya	
	<i>Monopterus albus</i>	Belut				Ya	
	<i>Rana macrodon</i>	Katak Hijau				Ya	
	<i>Rana limnocharis</i>	Katak rawa				Ya	
	<i>Rana cancrivora</i>	Katak Sawah				Ya	
5. Ikan	<i>Channa striata</i>	Ikan Gabus				Ya	
	<i>Ophiocephalus pleurophthalmus</i>	Bahau				Ya	
	<i>Chana lucius</i>	Ikan Gabus				Ya	
	<i>Mystus wyckii</i>	Ikan Baung				Ya	
	<i>Mystus nemurus</i>	Kenuri				Ya	
	<i>Mystus micrachantus</i>	Ikan baung coklat				Ya	
	<i>Leiocassis stenomus</i>	Ketobung				Ya	
	<i>Wallago miostoma</i>	Ikan Tapah				Ya	
	<i>Clarias nieuhofii</i>	Ikan lele				Ya	
	<i>Notopterus chitala</i>	Ikan Belida				Ya	
	<i>Botia hymenophysa</i>	Giut				Ya	
	<i>Kryptopterus limpok</i>	Ikan lais sungai				Ya	
6. Keong	<i>Achatina fulica</i>	Bekicot				Ya	
	<i>Paludina sp</i>	Kreco				Ya	
	<i>Limnaea javanica</i>	Keong sawah				Ya	
	<i>Pomacea canaliculata</i>	Keongmas				Ya	
	<i>Helix sp</i>	Siput kebun				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Amphidromus</i>	Siput rakus				Ya	
	<i>Vaginulasp</i>	Siput telanjang				Ya	
	<i>Achatinafulica</i>	Bekicot				Ya	
	<i>Paludinasp</i>	Kreco				Ya	
	<i>Hanguana malayana</i>	Bakung air				Ya	
	<i>Cyanotis cristata</i>	Eceng				Ya	
	<i>Eichhornia crassipes</i>	Eceng Gondok				Ya	
	<i>Hydrillaverticillata</i>	Ganggang				Ya	
	<i>Mimosa pigra</i>	Jukut bocang				Ya	
	<i>Salvinia molesta</i>	Klambang				Ya	
	<i>Echinocchloacrus-galli</i>	Padi burung				Ya	
	<i>Marsilea crenata</i>	Semanggi				Ya	
7. Serangga	<i>Troides spp</i>	Kupu Raja			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Oxya japonica</i>	Belalang hijau				Ya	
	<i>Valanganigricormis</i>	Belalang kayu				Ya	
	<i>Montis religiosa</i>	Belalang sembah				Ya	
	<i>Periplaneta australasiae</i>	Kecoa				Ya	
	<i>Neurothemissp</i>	Capung air				Ya	
	Sub ordo : <i>Anisoptera</i>	Capung biasa				Ya	
	Sub ordo : <i>Zygoptera</i>	Capung jarum				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kupu-kupu				Ya	
	<i>Antheraca</i>	Ngengat				Ya	
	<i>Polyphemus</i>	Ngengat				Ya	
	<i>Atlas</i>	Ngengat				Ya	
	<i>Cercropia</i>	Ngengat				Ya	
	<i>Tibicen linnei</i>	Gareng pung				Ya	
	<i>Fam : Coccinellidae</i>	Kumbangkoksi				Ya	
	<i>Cymex rotundus</i>	Kutu busuk				Ya	
	<i>Aphidsp</i>	Kutu Daun				Ya	
	<i>Pediculus humanus</i>	Kutu Kepala				Ya	
	<i>Psylla alni</i>	Kutu Loncat				Ya	
	<i>Dundabia manifera</i>	Tonggeret				Ya	
	<i>Nilaparvatalugens</i>	Wereng Coklat				Ya	
	<i>Nephotettix sp</i>	Wereng Hijau				Ya	
	<i>Leptocorisa oratorius</i>	Walang sangit				Ya	
	<i>Hylobius abietis</i>	Kumbang penggerek				Ya	
	<i>Trypoxylus dichotomus</i>	Kumbang badak				Ya	
	<i>Tribolium castaneum</i>	Kumbang tepung				Ya	
	<i>Acanthoscellides obtectus</i>	Kumbang bijikacang-kacangan				Ya	
	<i>Necrobiasp</i>	Kumbang kopra				Ya	
	<i>Oryctes rhinoceros</i>	Kumbang tanduk				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Orytes rhinoceros</i>	Kumbang kelapa				Ya	
	<i>Diconocoris hewetti</i>	Kepik				Ya	
	<i>Photuris lucicrescens</i>	Kunang-kunang				Ya	
	<i>Rhyzopertadiminica</i>	Kutu Gabah				Ya	
	<i>Apis cerana</i>	Lebah Madu/lokal				Ya	
	<i>Apis dorsata</i>	Lebah hutan				Ya	
	<i>Apis andreniformis</i>	Lebah				Ya	
	<i>Apis florea</i>	Lebah				Ya	
	<i>Apis laboriosa</i>	Lebah				Ya	
	<i>Calotermestectona</i>	Rayap				Ya	
	<i>Monomorium pharaonis</i>	Semut pharaoh				Ya	
	<i>Solenopsis molesta</i>	Semut Pencuri				Ya	
	<i>Solenopsis invicta</i>	Semutapi				Ya	
	<i>Paratrechina longicornis</i>	Semut gila				Ya	
	<i>Tapinoma sessile</i>	Semut bau				Ya	
	<i>Tapinoma indica</i>	Semut bau				Ya	
	<i>Tapinomamelanocephalum</i>	Semut bau				Ya	
	<i>Oecophylla saragillina</i>	Semut Rangrang				Ya	
	<i>Musca domestica</i>	Lalat Rumah				Ya	
	<i>Drosophilla melanogaster</i>	Lalat buah				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Anopheles sp</i>	Nyamuk malaria				Ya	
	<i>Culex</i>	Nyamuk				Ya	
	<i>Aedes aegypti</i>	Nyamuk DB				Ya	
	<i>Gerris remigis</i>	Anggang-anggang				Ya	
	<i>Gyrinidae</i>	Kumbang air hitam				Ya	
	<i>Dystiscidae</i>	Kumbang penyelam				Ya	
	<i>Brodiaeae</i>	Molusca air tawar/siput				Ya	
	<i>Lymnaea rubiginosa</i>	Molusca air tawar/siput				Ya	
	<i>Melanoides tuberculata</i>	Molusca air tawar/siput				Ya	
	<i>Thiarascabra</i>	Molusca air tawar/siput				Ya	
	<i>Lymnaea</i>	Molusca air tawar/siput				Ya	
	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air				Ya	
	<i>Hydrometridae</i>	Pengukur air				Ya	
	<i>Corbicula javanica</i>	Remis				Ya	
	<i>Notonectidae</i>	Serangga Perenang gaya punggung				Ya	
	<i>Cerberus rynchops</i>	Ular air				Ya	
	<i>Enhydra</i>	Ular-air pelangi				Ya	
	<i>Tetraodon kretamensis</i>	Buntalair tawar				Ya	
	<i>Gryllotalpa</i>	Jengkerik				Ya	
8. Tumbuh-tumbuhan	<i>Cystostachys</i>	Pinang Merah Kalimantan			Ya		

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek Hitam			Ya		
	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	AnggrekTebu			Ya		
	<i>Paraphalaenopsis/ aycockii</i>	AnggrekBulan Kalimantan Tengah			Ya		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018
	<i>Vandariana</i>	Vanda pensil			Ya		
	<i>Nephentes spp</i>	KantongSemar (Semua Jenis)			Ya		
	<i>Shorea spp</i>	Tengkawang			Ya		
	<i>Imperata cylindrica</i>	Alang-alang				Ya	
	<i>Crinum asiaticum</i> L.	Bakung				Ya	
	<i>Henslowia frutescens champ</i>	Benalu				Ya	
	<i>DonaxCanniformis</i>	Bomban/Bemban				Ya	
	<i>Oxalis corniculata</i>	Calincing				Ya	
	<i>Buchanania arborescens</i>	Gerokayam				Ya	
	<i>Neobalanocarpus Heimii</i>	Congal/ Pokok Cengal				Ya	
	<i>Dracontionelon Puberulum</i>	Dahu				Ya	
	<i>Saccharum officinarum</i>	Glagah				Ya	
	<i>Cratoxylon Arborescens</i>	Gerunggang				Ya	
	<i>Clidemia hirta</i>	Harendong Bulu				Ya	
	<i>Syzygium cumini</i>	Jamblang				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Achyranthes aspera</i>	Jarong				Ya	
	<i>Allmania nodiflora</i> R.Br.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Borreriarepens</i> D.C.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Borreria setidens</i> (Miq) Bold.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Centotheca lappacea</i>	Jenis rumput				Ya	
	<i>Eclipta prostrata</i> L.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Emilia sonchifolia</i> (L). Wight.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Fimbristylis bartata</i> Bth.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Fimbristylis vahlii</i> (Lam)	Jenis rumput				Ya	
	<i>Fimbristylis spathacea</i> Roth.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Fuirena ciliaris</i> Roxb.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Fuirena pumila</i> Torr.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L) Lamk.	Jenis rumput / rumput mutiara				Ya	
	<i>Hedyotis diffusa</i>	Jenis rumput/ rumput lidahular				Ya	
	<i>Hedyotis pinifolia</i> G.Dos	Jenis rumput				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Leucas aspera</i> (Willd) Link.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Leucas Zeylanica</i> (L) R.Br.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Merremiaemarginata</i> Hall.F.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Physalis angulata</i> L.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Polytrias amaura</i> Muhl.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Scirpus acutus</i> Muhl.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Scirpus grossus</i> L.	Jenis rumput				Ya	
	<i>Scirpus littoralis</i> Schrad	Jenis rumput				Ya	
	<i>Spermacocesp</i>	Jenis rumput				Ya	
	<i>Cyperus aristatus</i> Rottr	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Cyperus cyperinus</i> V.S	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Cyperus eragrostis</i>	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Cyperus odoratus</i> L	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Cyperus radiatus</i> Vahl.	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Cyperus unicatus</i> Poir	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Pycneus polystachyos</i>	Jenis rumput teki				Ya	
	<i>Kyllingabrevifolia</i>	Jukutpendul				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Achiote</i>	Keluing				Ya	
	<i>Dacryodes Rostrata</i> F. <i>Cuspidata</i>	Kembayau				Ya	
	<i>Elateriospermum Tapos</i>	Kelampai				Ya	
	<i>Pangium Edule</i>	Kempayangan/Kepayang				Ya	
	<i>Rhodomyrtus Tomentosa</i>	Karamunting				Ya	
	<i>Chromolaena odorata</i>	Kirinyuh				Ya	
	<i>Scorodocarpus Borneensis</i>	Kumpang Berdarah/sambang darah				Ya	
	<i>Ipomoea carssicaulis</i> Rob	Krangkongon				Ya	
	<i>Portulacaolerarea</i> L.	Krokot				Ya	
	<i>Scorodocarpus Borneensis</i>	Kulim				Ya	
	<i>Aegle Marmelos</i> (L.)	Maja				Ya	
	<i>Solanum Melongena</i>	Mentorung				Ya	
	<i>Vernonia Arborea</i> Schreb. Ham.	Merambung				Ya	
	<i>Palaquium Rostratum</i>	Nyatoh				Ya	
	<i>Tridax procumbens</i> L.	Orang-aring				Ya	
	<i>Cibotium barometz</i>	Pakis Ekor Monyet				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Euphorbia hirta</i>	Patikan kebo				Ya	
	<i>Averrhoa Carambola</i>	Pelimping Damak/Belimbing Demak				Ya	
	<i>Leucaena leucephala</i>	Petai cina				Ya	
	<i>Pileamelastomoide s</i>	Pohpohan				Ya	
	<i>Codiaeum Variegatum</i>	Purang/Puring				Ya	
	<i>Eleocharis dulcis</i>	Purun tikus				Ya	
	<i>Planchonia Valida</i>	Putat				Ya	
	<i>Mimosa pudica</i>	Putri malu				Ya	
	<i>Gluta Renghas L</i>	Rengas				Ya	
	<i>Panicum repens</i>	Rumput balungan				Ya	
	<i>Paspalum vaginatumSw.</i>	Rumput asinan				Ya	
	<i>Corchorus acutanguluslamk.</i>	Rumput bayam				Ya	
	<i>Echinochloa colona</i>	Rumput bebek				Ya	
	<i>Cynodon nlemfuensis</i>	Rumput bintang				Ya	
	<i>Asystasia gangetica</i>	Rumput bunga putih				Ya	
	<i>Digitaria ciliaris</i>	Rumput Ayam Ceker				Ya	
	<i>Brachiaria subquadripara</i>	Rumputcori				Ya	
	<i>Digitaria milanjana</i>	Rumput digit				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Pennisetum polystachion</i>	Rumput ekor kucing				Ya	
	<i>Bothriochloa pertusa</i>	Rumput embun				Ya	
	<i>Andropogon gayanus</i>	Rumput gamba				Ya	
	<i>Polygonum cuspidatum</i>	Rumput gelam				Ya	
	<i>Cynodon dactylon</i>	Rumput grinting				Ya	
	<i>Dichanthium annulatum</i>	Rumput hindi				Ya	
	<i>Digitaria sp</i>	Rumput jampang				Ya	
	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Rumput Jariji				Ya	
	<i>Chrysopogon aciculata</i>	Rumput jarum				Ya	
	<i>Commelina nudiflora</i> L.	Rumput jeboran				Ya	
	<i>Chloris bartata</i>	Rumput jejaronan				Ya	
	<i>Lycopodium cernuum</i> L.	Rumput kawat				Ya	
	<i>Ischaemum muticum</i>	Rumput kemarau				Ya	
	<i>Chrysopogon aciculatus</i>	Rumput kemuncup				Ya	
	<i>Kyllinga monocephala rothb.</i>	Rumput kenop				Ya	
	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.	Rumput kerbau				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Stenotaphrum secundatum</i>	Rumput ketam				Ya	
	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Rumput kikuyu				Ya	
	<i>Paspalum scrobiculatum</i>	Rumput Kinangan				Ya	
	<i>Selaginella tamariscina</i>	Rumput kipas				Ya	
	<i>Hymenachne acutigluma</i>	Rumput kumpai				Ya	
	<i>Ischaemum magnum</i>	Rumput melayu				Ya	
	<i>Ischaemum ciliare</i>	Rumput padang				Ya	
	<i>Brachiaria brizantha</i>	Rumput palisade				Ya	
	<i>Digitaria erianta</i>	Rumput Pangola				Ya	
	<i>Brachiaria mutica</i>	Rumput para				Ya	
	<i>Paspalum</i>	Rumput paspalum				Ya	
	<i>Cyperus papyrus</i>	Rumput payung				Ya	
	<i>Chlorophytum comosum</i>	Rumput putih				Ya	
	<i>Ischaemum rugosum</i>	Rumput randan				Ya	
	<i>Brachiaria ruziziensis</i>	Rumput ruzi				Ya	
	<i>Ischaemum timorense</i>	Rumput Sarang buaya				Ya	
	<i>Brachiaria decumbens</i>	Rumput Signal				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Desmodium heterphyllum</i>	Rumput Sisik betok				Ya	
	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	Rumput Tapak jalak				Ya	
	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Rumput teki ladang				Ya	
	<i>Cyperus kyllinga</i> Endl.	Rumput teki udel-udelan				Ya	
	<i>Heteropogon contortus</i>	Rumput tombak				Ya	
	<i>Eragrostis unioloides</i>	Rumput udang				Ya	
	<i>Eleusine indica</i> L. Gaertn.	Suket tulangan				Ya	
	<i>Elephantophorus scaber</i>	Tapak liman				Ya	
	<i>Saccharum officinarum</i>	Tebu				Ya	
	<i>Clitoria ternatea</i>	Telang				Ya	
	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>	Telasihan				Ya	
	<i>Ageratum conyzoides</i>	Wedusan				Ya	
	<i>Cymbidium finlaysonianum</i>	Anggrek Lidah Ular				Ya	
	<i>Coelogyne asperata</i>	Anggrek Madu				Ya	
	<i>Bubophyllum beccarii</i>	Anggrek Kuping Gajah				Ya	
	<i>Dendrobium crumenatum</i>	Anggrek Merpati				Ya	
	<i>Vanda hookeriana</i>	Anggrek Pensil				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Dendrobium secundum</i>	Anggrek Sikat gigi				Ya	
	<i>Paphiopedilum kolopakingii</i>	Anggrek Kantung				Ya	
	<i>Arenga pinnata</i>	Aren				Ya	
	<i>Tamarindus indica</i> L.	Asam jawa				Ya	
	<i>Diallumindum</i> L.	Asam kranji				Ya	
	<i>Ficus septicaburm.f</i>	Awar-awar				Ya	
	<i>Palaquium walsunfolium</i>	Balam suntai				Ya	
	<i>Gigantolochloa apus kurz</i>	Bambu apus				Ya	
	<i>Schizotachyumblune</i>	Bambutamiang				Ya	
	<i>Gigantolochloa levis</i>	Bambusuluk				Ya	
	<i>Dendrocalamus asper</i>	Bambupetung				Ya	
	<i>Bambusa vulgaris Schard</i>	Bambukuning				Ya	
	<i>Zizypus Jujuba</i>	Bebara/Bidara				Ya	
	<i>Gossypium</i>	Bekapas				Ya	
	<i>Ceiba Pentandra</i>	Bekapuk				Ya	
	<i>Baccaurea Macrocarpa</i>	Bekapul				Ya	
	<i>Artocarpus elasticus</i>	Benda				Ya	
	<i>Dryobalanops</i>	Bengkirai				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Ficus benyamina</i>	Beringin				Ya	
	<i>Ficus retusa</i>	Beringinkaret				Ya	
	<i>Eugeissonautilis</i>	Bertan/sagu hutan				Ya	
	<i>Piper Albi Linn</i>	Besahang				Ya	
	<i>Lagerstroemia indica</i>	Bungur				Ya	
	<i>Erythrina fuscalour</i>	Cangkring				Ya	
	<i>Erythrinavariegata</i>	Dadap				Ya	
	<i>Agathis Dammara</i>	Dammar Timau				Ya	
	<i>Durio Zibethinus</i>	Durian				Ya	
	<i>Durio kutejensis</i>	Durian hutan				Ya	
		Enau				Ya	
	<i>Syzygium Aqueum</i>	Jambu Air				Ya	
	<i>Agathis Lalillardieri</i>	Jambu Monyet				Ya	
	<i>Jatropha multifida</i>	Jarak pagar				Ya	
	<i>Dyera consulata</i>	Jelutung				Ya	
	<i>Pithecelobium jiringa</i>	Jengkol				Ya	
	<i>Archidendron Pauciflorum</i>	Joring Hantu				Ya	
	<i>Cassiasiamena</i>	Johar				Ya	
	<i>Nephentes spp</i>	Kantongsemar				Ya	
	<i>Scorodocarpus borneensis</i>	Kayu Bawang/pohon kulim				Ya	
	<i>Parinarium Corymbosum</i>	Kayu Batu				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Sandoricum koetjape</i>	Kecapi				Ya	
	<i>Datura metel</i>	Kecubung				Ya	
	<i>LanneaGrandis Engl</i>	Kedondong				Ya	
	<i>Stenochlaena palustris</i>	Kelakai				Ya	
	<i>Zingiber ZerumbetL</i>	Kelempoyang/Lempuyang				Ya	
	<i>Moringaoleiferalam</i>	Kelor				Ya	
	<i>Murraya paniculata</i>	Kemuning				Ya	
	<i>CanangaSp</i>	Kenanga				Ya	
	<i>Terminaliacatapa</i>	Ketapang				Ya	
	<i>Cassia alata</i>	Ketepeng				Ya	
	<i>Sterculia Foetida</i>	Kepua/Kepuh				Ya	
	<i>Dialium Indum</i>	KerANJI/Asam KerANJI				Ya	
	<i>Canavalia</i>	Koru/Kacang Koro				Ya	
	<i>Scorodocarpus Borneensis</i>	Kulim				Ya	
	<i>Nephelium mutabile</i>	Kapulasan				Ya	
	<i>Citrus Sp</i>	Limau				Ya	
	<i>GarciniaXanthochymus</i>	Gandis/Asam Kandis				Ya	
	<i>Dioscorea Hispida</i>	Garung/Gadung				Ya	
	<i>Uncaria Gambir Roxb</i>	Gambir				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Ganophyllum falcatum</i>	Mangir				Ya	
	<i>Morinda citrifolia</i>	Mengkudu				Ya	
	<i>Artocarpus Anisophyllus</i>	Mentawa				Ya	
	<i>Equisetum palustre</i>	Pakukuda				Ya	
	<i>Diplazium esculentum</i>	Paku sayur				Ya	
	<i>platycerium bifurcatum</i>	Pakutanduk rusa				Ya	
	<i>Aspleniumsp</i>	Pakusarang burung				Ya	
	<i>Dryobalanops aromatica</i>	Pohon kapur/mengkayat				Ya	
	<i>Adiantumsp</i>	Suplir				Ya	
	<i>Fabaceae sp.</i>	Polong-polongan				Ya	
	<i>Myrmecodia Pendens</i>	Sarangsemut				Ya	
	<i>Manihot glaziovii</i>	Singkong karet				Ya	
	<i>Solanum ferox Linn</i>	Terongasam				Ya	
	<i>Mimusops elengiL.</i>	Tanjung				Ya	
	<i>Indigofera suffrutiosa</i>	Tarum				Ya	
	<i>Durio oxleyanus</i>	Trantungan				Ya	
	<i>Sesbania grandiflora</i>	Turi				Ya	
	<i>Avicenniasp</i>	Api-api				Ya	
	<i>Limnocharis flava</i>	Genjer				Ya	
	<i>Ipomoea aquatica</i>	Kangkung air				Ya	

Golongan	Nama Spesies		Endemik	Status			Sumber
	Nama Latin	Nama Lokal		Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Nypa fruticans Wurm</i>	Nipah				Ya	
	<i>Pandanus odorifer</i>	PandanAir				Ya	
	<i>Nasturtium officinale</i>	Selada air				Ya	
	<i>Pistiastratiotes</i>	Selada air				Ya	
	<i>Bruguierasp</i>	Tanjang				Ya	
	<i>Nymphoides indica</i>	Teratai				Ya	
9. Arachnid	<i>Oxyopes javanus</i>	Laba-laba				Ya	
	<i>Atrax sp</i>	Laba-laba				Ya	
	<i>Cheiracanthiumsp</i>	Laba-laba				Ya	
	<i>Latrodectus sp</i>	Laba-laba				Ya	
	<i>Phoneutria sp</i>	Laba-laba				Ya	
	<i>Tegenariasp</i>	Laba-laba				Ya	
	<i>Androctonus</i>	Kala				Ya	
	<i>Isometrusmaculatus</i>	Kalajengking				Ya	
10. Arthropoda	<i>Julusvirgatus</i>	Kaki seribu				Ya	
	<i>Scoloppdridae</i>	Kelabang				Ya	

Sumber: RPPLH DLHK Kabupaten Lamandau, 2019 ; Analisis, 2023

3.3.6. Dampak Dan Risiko Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Sesuatu yang terjadi dikarenakan tindakan atau perlakuan tertentu yang merupakan sebuah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dalam jangka waktu tertentu disebut dengan dampak. Sedangkan, risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/ dampak dari sebuah aksi yang dapat dikenali lebih awal. Dalam konteks lingkungan hidup, dampak kegiatan manusia terhadap kondisi lingkungan hidup pada umumnya bersifat negatif. Dampak yang terjadi tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga berpengaruh kembali ke manusia sehingga risiko terjadinya dampak perlu dikenali lebih awal. Oleh karena itu, kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak penting untuk dilakukan.

Risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologis. Beragam permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam risiko ekologis, yaitu:

1. Risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), yaitu ragam risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya.
2. Risiko mental (*mental risk*), yaitu ragam risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis.
3. Risiko sosial (*social risk*), yaitu ragam risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (*social-ecological*)

Risiko fisik-ekologis dapat disebabkan baik oleh proses alam maupun kegiatan manusia (*man made risk*). Salah satu contohnya adalah banjir. Risiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Salah satu risiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Risiko sosial merupakan akibat dari faktor-faktor eksternal seperti kondisi alam, teknologi dan industri. Risiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam risiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer di mana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan.

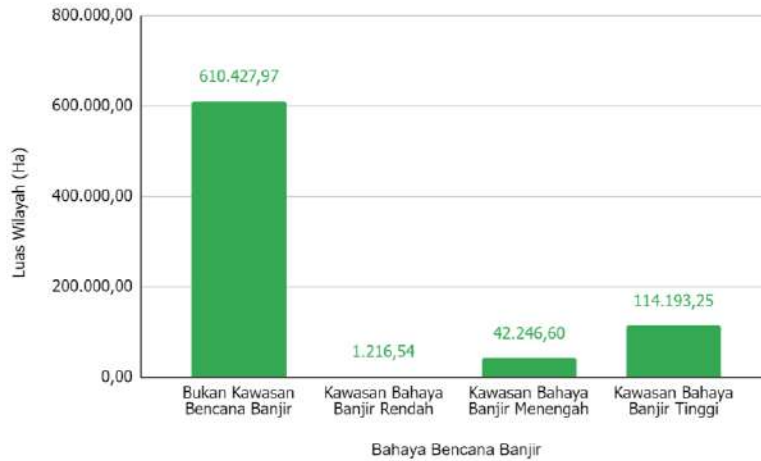
3.3.4.1 Dampak dan Risiko Bencana Alam

Salah satu bentuk risiko ekologis yang memiliki dampak signifikan adalah risiko bencana alam. Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/ penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.

Bahaya bencana alam di Kabupaten Lamandau antara lain banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Ketiga bencana tersebut dijabarkan sebagai berikut.

3.3.4.1.1 Bahaya Bencana Banjir

Kawasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 4 (empat) berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu kawasan bahaya banjir tinggi, kawasan bahaya banjir menengah, kawasan bahaya banjir rendah dan bukan kawasan bahaya banjir. Berikut luas wilayah berdasarkan kawasan tersebut.



Gambar 3-42 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Lamandau

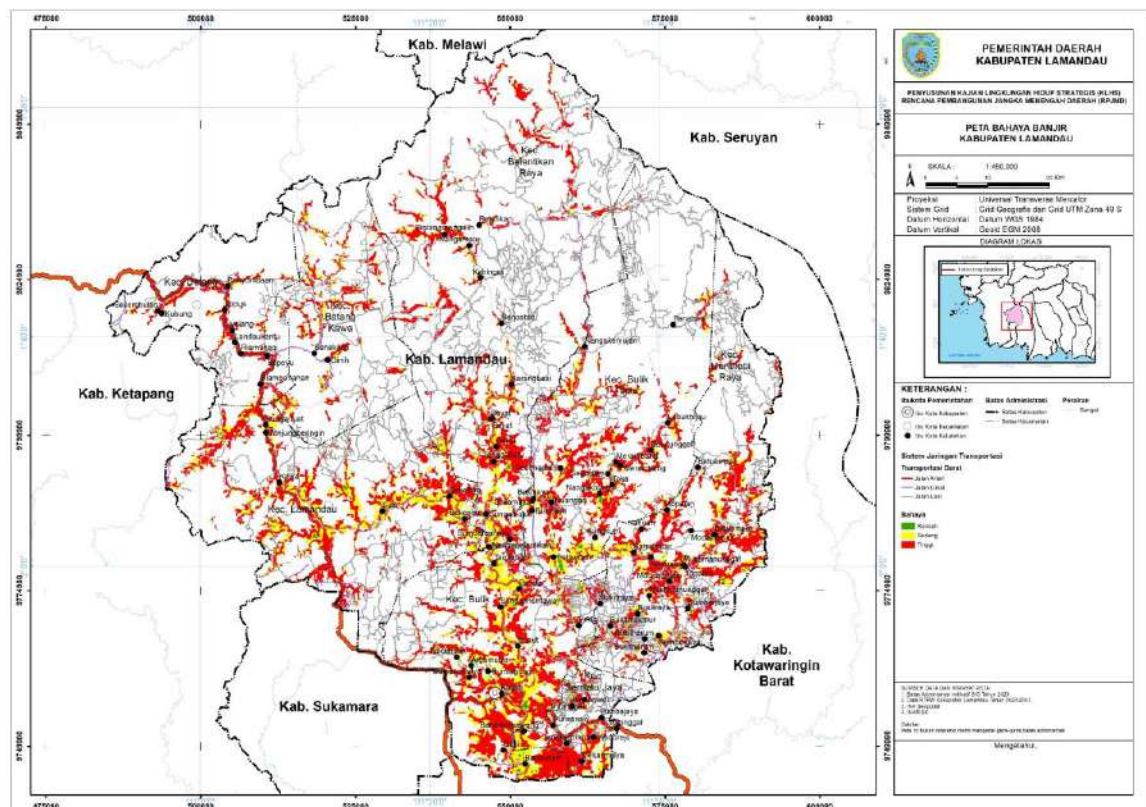
Sumber: Olah Data, 2023

Tabel 3-43 Luas Bahaya Banjir tiap Kecamatan

Kecamatan	Tidak Ada Potensi	Rendah	Sedang	Tinggi
Batang Kawa	58.939,79	14,67	2.145,64	5.770,04
Belantikan Raya	177.084,73	84,60	5.182,40	20.151,37
Bulik	46.174,73	436,03	11.581,84	24.094,33
Bulik Timur	104.174,44	287,19	5.811,00	17.068,91
Delang	51.095,14	1,36	721,39	3.750,19
Lamandau	88.320,36	202,86	9.079,05	19.614,78
Menthobi Raya	72.845,38	162,31	5.507,45	18.743,02
Sematu Jaya	11.793,42	27,52	2.217,82	5.000,61
Kabupaten Lamandau	610.427,97	1.216,54	42.246,60	114.193,25

Sumber: Olah Data, 2023

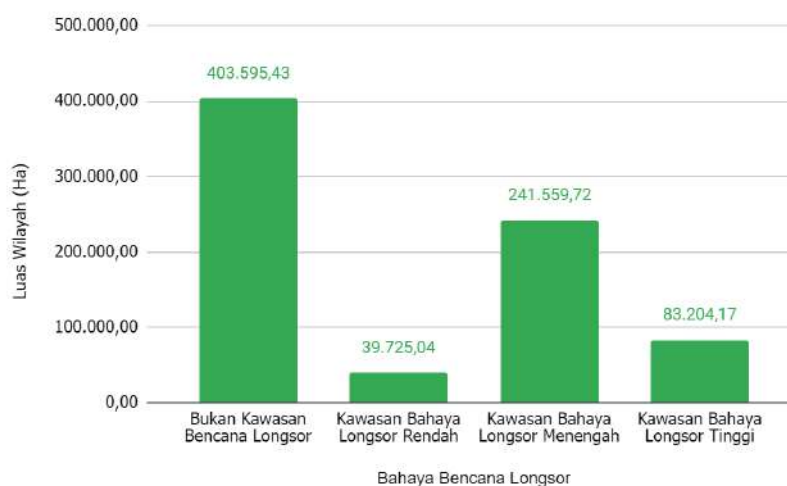
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Kabupaten Lamandau didominasi daerah bukan kawasan bencana banjir sebesar 79,47% dari luas wilayah keseluruhan atau seluas 610.427,97 ha. Sebaliknya, kawasan dengan luas terkecil adalah kawasan bahaya banjir rendah, yakni seluas 1.216,54 ha. Sisanya sebesar 14,87% wilayah merupakan kawasan bahaya banjir tinggi dan 5,50% merupakan kawasan bahaya banjir menengah. Secara spasial, kawasan bahaya bencana banjir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-43 Peta Kawasan Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Lamandau
Sumber: Olah Data, 2023

3.3.4.1.2 Bahaya Bencana Tanah Longsor

Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 4 (empat) kawasan bahaya bencana tanah longsor berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu kawasan bahaya tanah longsor tinggi, kawasan bahaya tanah longsor menengah, kawasan bahaya tanah longsor rendah dan bukan kawasan bahaya tanah longsor. Berikut luas wilayah berdasarkan kawasan tersebut.



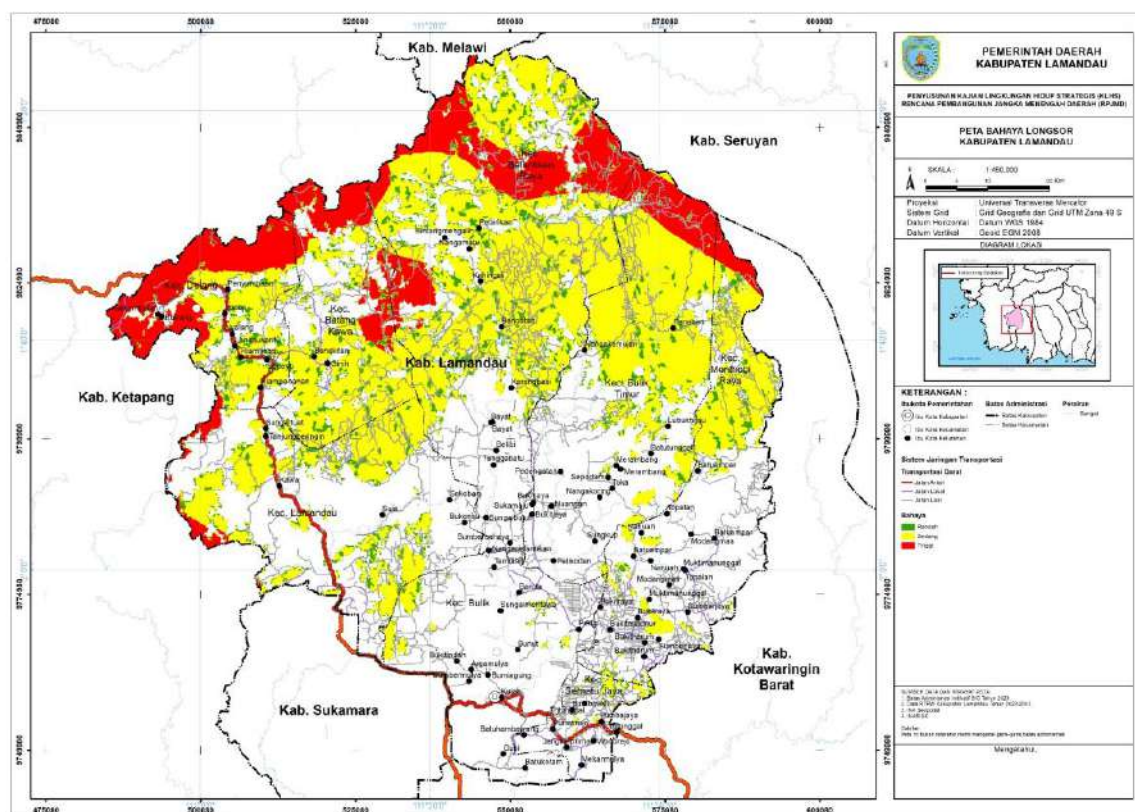
Gambar 3-44 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamandau
Sumber: Olah Data, 2023

Tabel 3-44 Luas Bahaya Bencana Tanah Longsor tiap Kecamatan

Kecamatan	Tidak Ada Potensi	Rendah	Sedang	Tinggi
Batang Kawa	21.174,20	4.804,00	28.393,56	12.498,38
Belantikan Raya	62.956,67	15.564,69	91.822,38	32.159,34
Bulik	78.358,58	759,60	3.168,75	
Bulik Timur	65.018,25	5.014,79	47.148,44	10.160,07
Delang	12.005,79	3.548,26	17.243,03	22.771,01
Lamandau	78.381,81	5.898,75	29.930,17	3.006,32
Menthobi Raya	68.563,09	3.591,59	22.494,42	2.609,05
Sematu Jaya	17.137,03	543,35	1.358,99	
Kabupaten Lamandau	403.595,43	39.725,04	241.559,72	83.204,17

Sumber: Olah Data, 2023

Sama seperti bencana banjir, berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Kabupaten Lamandau didominasi daerah bukan kawasan bencana tanah longsor sebesar 52,55% dari luas wilayah keseluruhan atau seluas 403.595,43 ha. Sebaliknya, kawasan dengan luas terkecil adalah kawasan bahaya tanah longsor rendah, yakni seluas 39.725,04 ha. Sisanya sebesar 31,45% wilayah merupakan kawasan bahaya longsor menengah dan 10,83% merupakan kawasan bahaya longsor tinggi. Secara spasial, kawasan bahaya bencana tanah longsor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-45 Peta Kawasan Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamandau

Sumber: Olah Data, 2023

3.3.4.1.3 Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kawasan bahaya bencana berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu kawasan bahaya kebakaran tinggi, kawasan bahaya kebakaran menengah, kawasan bahaya kebakaran rendah dan bukan kawasan bahaya kebakaran. Berikut luas wilayah berdasarkan kawasan tersebut.



Gambar 3-46 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lamandau
Sumber: Olah Data, 2023

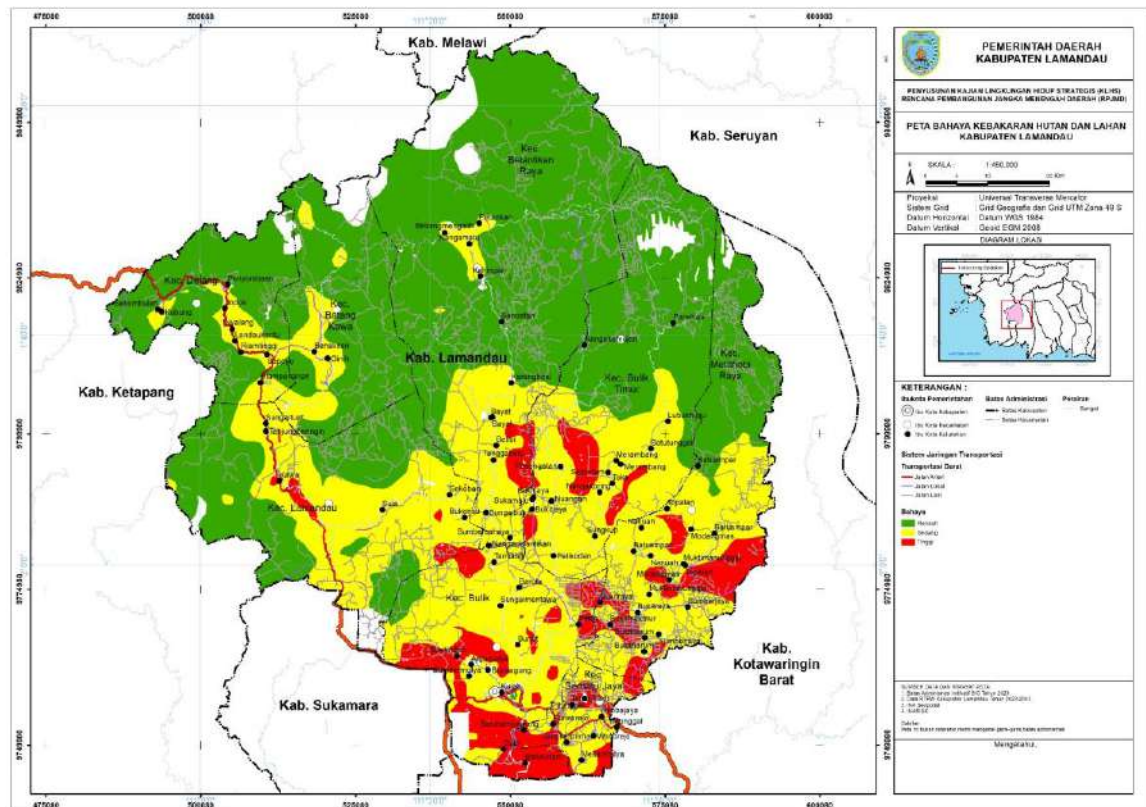
Tabel 3-45 Luas Bahaya Bencana Kebakaran Tiap Kecamatan

Kecamatan	Tidak Ada Potensi	Rendah	Sedang	Tinggi
Batang Kawa	4.147,71	50.158,40	12.564,03	
Belantikan Raya	10.858,08	155.850,09	32.482,24	3.312,68
Bulik	5.890,94	2.505,30	49.867,08	24.023,60
Bulik Timur	4.823,75	65.848,18	48.733,76	7.935,85
Delang	2.000,79	43.406,10	10.161,19	
Lamandau	4.843,28	55.053,24	54.550,60	2.769,94
Menthobi Raya	1.709,55	29.845,39	50.105,10	15.598,11
Sematu Jaya	1.083,47		11.571,03	6.384,87
Kabupaten Lamandau	35.357,59	402.666,70	270.035,03	60.025,05

Sumber: Olah Data, 2023

Berbeda dengan bencana-bencana sebelumnya, Kabupaten Lamandau didominasi kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan rendah sebesar 52,42% dari luas wilayah keseluruhan atau seluas 402.666,70 ha. Sebaliknya, kawasan dengan luas terkecil adalah bukan kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan, yakni seluas 35.357,59 ha. Sisanya sebesar 35,16% wilayah merupakan kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan menengah dan 7,81% merupakan kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi.

Secara spasial, kawasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

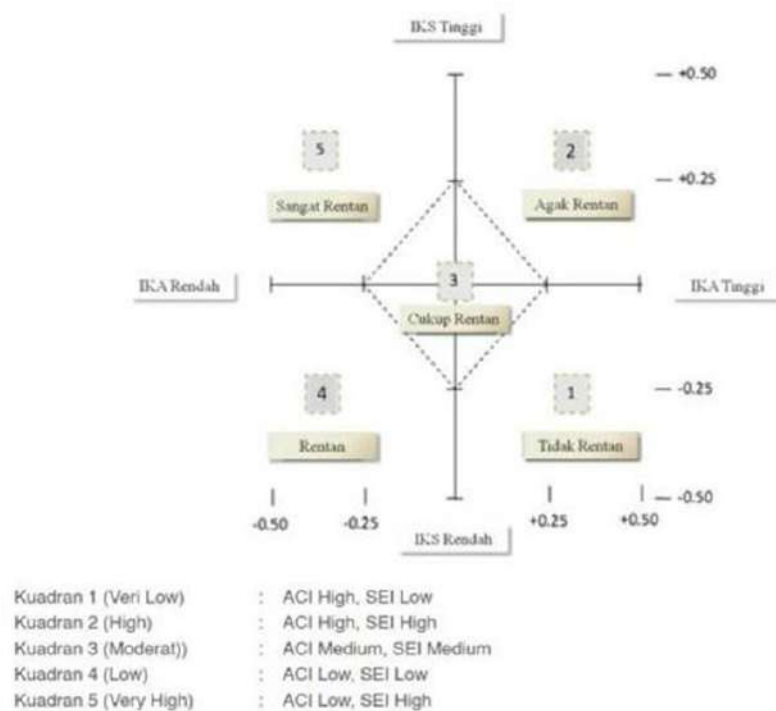


Gambar 3-47 Peta Kawasan Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lamandau
Sumber: Olah Data, 2023

3.3.7. Perubahan Iklim

A. Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Keterpaparan dan sensitivitas disajikan dalam Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), sedangkan tingkat kemampuan adaptif disajikan dalam Indeks Kemampuan Adaptif (IKA). IKS semakin tinggi menunjukkan semakin rentan, sedangkan IKA semakin tinggi menunjukkan kondisi yang semakin tidak rentan (KLHK, 2015). Tingkat kerentanan dikategorikan 1 (tidak rentan) sampai dengan 5 (sangat rentan) yang dapat dipetakan dalam kuadran sebagai berikut.



Gambar 3-48 Kuadran Kerentanan Perubahan Iklim

Sumber: Setiawan, 2019

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang diterbitkan oleh KLHK, Kabupaten Lamandau memiliki rata-rata nilai IKA 0,48; nilai IKS 0,46; nilai kerentanan 3,21; risiko banjir 2,91; dan nilai risiko kering 2,91. Berikut adalah indeks IKA, IKS, nilai kerentanan, risiko banjir, dan risiko kering di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-46 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim

Kecamatan	Desa	IKA	IKS	Kerentana n	Risiko Banjir	Risiko Kering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bulik	Batu Kotam	33.133	5.134	3	3	3

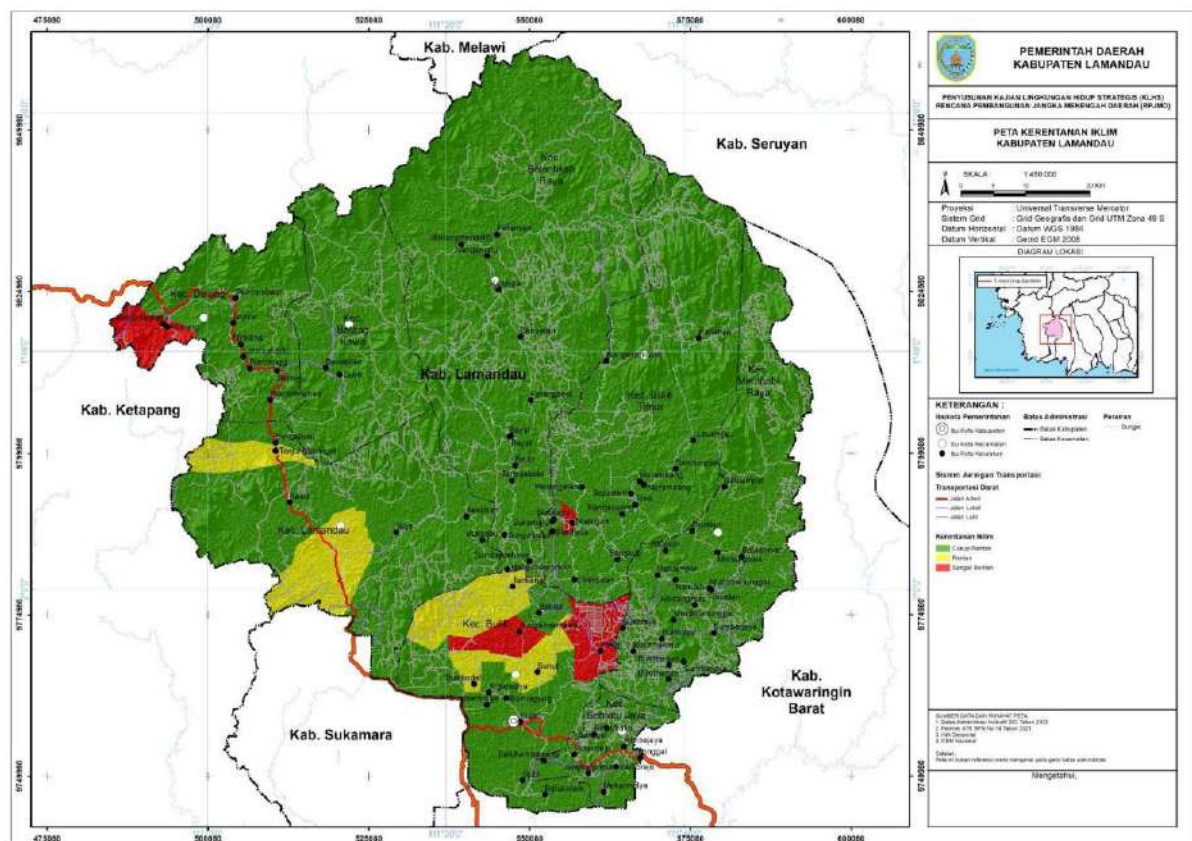
Kecamatan	Desa	IKA	IKS	Kerentana n	Risiko Banjir	Risiko Kering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bulik	Guci	31.125	4.674	3	3	3
Bulik	Kujan	40.063	4.674	3	3	3
Bulik	Nanga Bulik	44.919	5.869	3	3	3
Bulik	Bumi Agung	463.075	4.837	3	3	3
Bulik	Sumber Mulya	42.943	4.907	3	3	3
Bulik	Bukit Indah	28.857	4.577	4	4	4
Bulik	Arga Mulya	480.435	4.582	3	3	3
Bulik	Bunut	267.555	4.636	4	4	4
Bulik	Sungai Mentawa	291.745	5.714	5	5	5
Bulik	Beruta	38.506	4.966	3	3	3
Bulik	Tamiang	23.569	4.334	4	4	4
Bulik	Perigi Raya	31.724	5.927	5	5	5
Bulik	Nanga Pamalontian	197.435	5.558	5	5	5
Bulik	Persiapan Liku Mulya Sakti	297.345	5.124	3	3	3
Sematu Jaya	Mekar Mulya	343.435	5.197	3	3	3
Sematu Jaya	Jangkar Prima	39.258	5.299	3	3	3
Sematu Jaya	Purworejo	38.365	6.332	3	3	3
Sematu Jaya	Wonorejo	403.285	4.627	3	3	3
Sematu Jaya	Tri Tunggal	52.052	4.557	3	3	3
Sematu Jaya	Bina Bhakti	445.985	5.242	3	3	3
Sematu Jaya	Hambawang	33.044	4.897	3	3	3
Sematu Jaya	Rimba Jaya	332.085	4.977	3	3	3
Menthobi Raya	Bukit Makmur	39.826	4.602	3	3	3
Menthobi Raya	Bukit Raya	48.847	4.482	3	3	3
Menthobi Raya	Sumber Jaya	535.045	4.487	3	3	3
Menthobi Raya	Bukit Harum	43.836	4.272	3	3	3
Menthobi Raya	Melata	44.462	4.092	3	3	3
Menthobi Raya	Mukti Manunggal	520.035	4.322	3	3	3
Menthobi Raya	Modang Mas	43.717	5.154	3	3	3
Menthobi Raya	Nanuah	493.195	5.364	3	3	3
Menthobi Raya	Topalan	419.175	4.352	3	3	3
Menthobi Raya	BatuAmpar	355.055	4.236	3	3	3
Menthobi Raya	Lubuk Hiju	406.535	4.018	3	3	3
Bulik Timur	Bukit Jaya	55.957	5.184	3	3	3
Bulik Timur	Sukamaju	38.922	6.514	5	5	5

Kecamatan	Desa	IKA	IKS	Kerentana n	Risiko Banjir	Risiko Kering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bulik Timur	Nanga Palikodan	40.091	5.566	3	3	3
Bulik Timur	Sungkup	395.415	6.131	3	3	3
Bulik Timur	Nanga Koring	425.385	4.386	3	3	3
Bulik Timur	Nuangan	30.986	4.796	3	3	3
Bulik Timur	Toka	353.085	4.174	3	3	3
Bulik Timur	Sepondam	29.584	4.874	3	3	3
Bulik Timur	Pedongatan	38.455	5.181	3	3	3
Bulik Timur	Merambang	34.965	4.853	3	3	3
Bulik Timur	Batu Tunggal	38.303	5.043	3	3	3
Bulik Timur	Nanga Kemujan	36.394	4.503	3	3	3
Lamandau	Cuhai	429.695	4.508	3	3	3
Lamandau	Kawa	31.341	4.628	3	3	3
Lamandau	Panopa	26.628	4.068	4	4	4
Lamandau	Suja	40.463	5.121	3	3	3
Lamandau	Sekoban	405.605	6.143	3	3	3
Lamandau	Bakonsu	395.035	4.829	3	3	3
Lamandau	Tapin Bini	47.407	5.127	3	3	3
Lamandau	Karang Taba	349.215	4.999	3	3	3
Lamandau	Tanjung Beringin	32.726	4.118	4	4	4
Lamandau	Sungai Tuat	40.632	5.683	3	3	3
Lamandau	Samujaya	365.795	5.544	3	3	3
Belantikan Raya	Nanga Belantikan	331.805	4.821	3	3	3
Belantikan Raya	Sungai Buluh	42.989	4.821	3	3	3
Belantikan Raya	Tangga Batu	263.475	5.069	3	3	3
Belantikan Raya	Balibi	302.835	4.479	3	3	3
Belantikan Raya	Bayat	3.339	4.549	3	3	3
Belantikan Raya	Karang Besi	4.479	4.003	3	3	3
Belantikan Raya	Benuatan	493	3.648	3	3	3
Belantikan Raya	Kahingai	376.635	4.003	3	3	3
Belantikan Raya	Nanga Matu	499	3.948	3	3	3

Kecamatan	Desa	IKA	IKS	Kerentana n	Risiko Banjir	Risiko Kering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belantikan Raya	Petarikan	43.501	5.986	3	3	3
Belantikan Raya	Bintang Mengalih	427.735	5.511	3	3	3
Belantikan Raya	Sumber Cahaya	34.215	4.994	3	3	3
Belantikan Raya	Persiapan Batu Selipi	20.042	5.154	5	5	5
Delang	Riam Penahan	44.068	4.998	3	3	3
Delang	Sepoyu	37.728	5.098	3	3	3
Delang	Riam Tinggi	46.854	5.213	3	3	3
Delang	Landau Kantu	48.378	4.778	3	3	3
Delang	Nyalang	484.105	4.891	3	3	3
Delang	Lopus	442.925	5.933	3	3	3
Delang	Kubung	3.815	6.448	5	5	5
Delang	Sekombulan	44.209	7.153	5	5	5
Delang	Kudangan	541.465	6.268	3	3	3
Delang	Penyombaan	42.463	5.938	3	3	3
Delang	HuluJojabo	37.894	5.643	3	3	3
Batangkawa	Batu Tambun	427.405	4.228	3	3	3
Batangkawa	Kinipan	41.652	4.868	3	3	3
Batangkawa	Ginih	397.115	4.248	3	3	3
Batangkawa	Benakitan	394.335	5.418	3	3	3
Batangkawa	Liku	41.402	6.103	3	3	3
Batangkawa	Mengkalang	36.423	5.133	3	3	3
Batangkawa	Karang Mas	415.105	5.673	3	3	3
Batangkawa	Kina	3.807	4.818	3	3	3
Batangkawa	Jemuat	46.666	6.383	3	3	3

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, 2023

Secara spasial, wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat kerentanan terhadap iklim, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3-49 Peta Kerentanan Iklim

Sumber: SIDIK, 2024

B. Folu Net Sink

Selain identifikasi mengenai kondisi kerentanan iklim di Kabupaten Lamandau, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk pengendalian perubahan iklim dengan pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)*

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang dirumuskan untuk mengendalikan perubahan iklim secara terintegrasi menuju pencapaian net zero emission di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030. Net sink atau FOLU Net Sink adalah kondisi ketika penyerapan karbon oleh sektor kehutanan dan lahan lebih banyak dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan dengan adanya komitmen tersebut maka disusunlah beberapa rencana aksi mitigasi.

Secara garis besar seluruh upaya Kegiatan Pembangunan Kehutanan merupakan bagian dari aksi mitigasi bidang FOLU, namun dikimkan adanya keterbatasan anggaran maka dirumuskan aksi mitigasi yang menjadi prioritas

1. Pencegahan Deforestasi Mineral
2. Pencegahan Deforestasi Gambut
3. Pencegahan Degradasi Konsesi
4. Pembangunan Hutan Tanaman

Tabel 3-47 Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU NET SINK 2030

Kecamatan	RO1 (Pencegahan Deforestasi Gambut)	RO2 (Pencegahan Deforestasi Mineral)	RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)	RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)	RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)	RO6 (Penerapan RIL-C)	RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon)	RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)	RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)	Areal yang tumpang tindih antar arahan	Tidak ada	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Batang Kawa		7.470	8		1.636	456	7269	1		46.304	1.446	2.294	66.883
Belantikan Raya		17.511			3.177	3.118	18.776			150.957	2.674	1.087	197.299
Bulik	43	1.667		329			8.147		261	2.419	2.960	968	16.794
Bulik Timur		44.493	3.632		5.099	5.002	14.306			62.514	3.501	3.033	141.581
Delang		2.211	14		2.888	754	10.145	0		28.905	1.216		46.132
Lamandau		10.215		3.590	987	675	12.874	5		48.332	7.415		84.093
Menthobi Raya		31.451	715	860	747	712	5.766			30.814	2.415		73.480
Sematu Jaya		8		660			476				446		1.591
Total	43	115.026	4.368	5.439	14.534	10.718	77.758	5	261	370.244	22.074	7.381	627.853

Sumber: BPKHTL Wilayah XXI

3.4. Kondisi Kependudukan

3.4.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Aspek kependudukan merupakan hal yang esensial dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan aktor sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu aspek kependudukan perlu diperhatikan kaitannya dengan terjaminnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau adalah sejumlah 102.100 jiwa kepadatan penduduk sebesar 13,38 jiwa/km². Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bulik yakni sebesar 40.150 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Batangkawa dengan jumlah penduduk 2.695 jiwa. Berikut sebaran penduduk dan kepadatan pada tiap kecamatan di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-48 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bulik	40.150	39,32%
	Sematu Jaya	13.450	13,17%
	Menthobi Raya	12.340	12,09%
	Bulik Timur	9.800	9,60%
	Lamandau	9.870	9,67%
	Belantikan Raya	7.840	7,68%
	Delang	5.910	5,79%
	Batangkawa	2.750	2,69%
	Total	102.100	100,00%
	Laju Pertumbuhan	1,65	
	Dependency Ratio	41,42	
	Kepadatan Penduduk	13,38	
	Rasio Jenis Kelamin	114,19	

Sumber: RKPD Tahun 2025

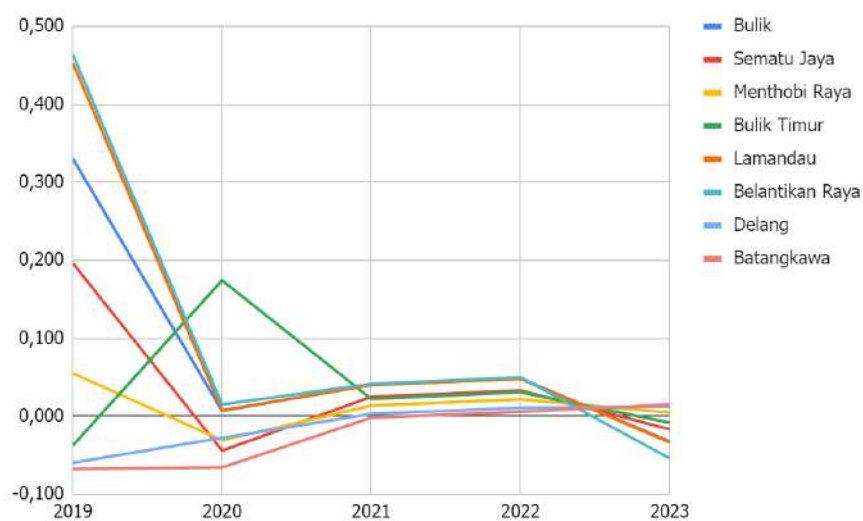
3.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dalam Kabupaten Lamandau dalam angka, menunjukkan Kabupaten Lamandau memiliki laju pertumbuhan penduduk rata – rata - 1,42% pada tahun 2023 yang menunjukkan adanya trend penurunan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Batang Kawa yaitu sebesar 1,48%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah berada pada tahun 2023 di Kecamatan Belantikan Raya dengan laju sebesar -5,41%. Laju pertumbuhan penduduk tiap kecamatan tersaji pada grafik berikut.

Tabel 3-49 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bulik	0,330	0,007	0,040	0,049	-0,032	0,079
2	Sematu Jaya	0,196	-0,044	0,025	0,033	-0,017	0,039
3	Menthobi Raya	0,055	-0,031	0,014	0,022	0,005	0,013
4	Bulik Timur	-0,038	0,174	0,022	0,031	-0,008	0,036
5	Lamandau	0,453	0,008	0,040	0,048	-0,033	0,103
6	Belantikan Raya	0,464	0,015	0,041	0,050	-0,054	0,103
7	Delang	-0,060	-0,028	0,003	0,011	0,012	-0,012
8	Batangkawa	-0,068	-0,066	-0,002	0,006	0,015	-0,023
Kabupaten Lamandau		0,167	0,004	0,023	0,031	-0,014	0,042

Sumber: Olahan Kabupaten Dalam Angka



Gambar 3-51 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: Olahan Kabupaten Dalam Angka

3.4.3 Komposisi Penduduk

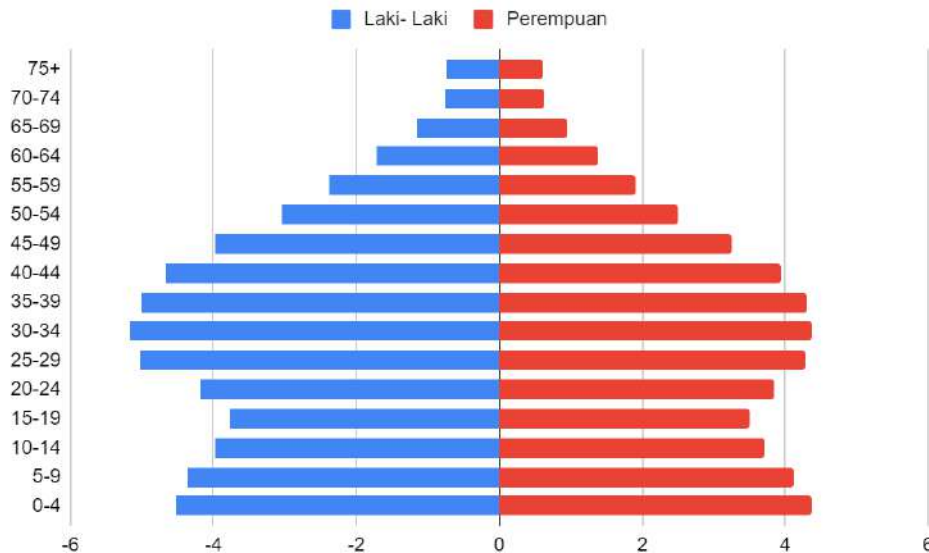
Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu, seperti kelompok jenis kelamin dan kelompok usia. Berikut disajikan tabel penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.

Tabel 3-50 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (ribu jiwa)		Jumlah
	Laki- Laki	Perempuan	
75+	0,74	0,61	1,35
70-74	0,75	0,63	1,38
65-69	1,14	0,96	2,1
60-64	1,72	1,38	3,1
55-59	2,39	1,9	4,29
50-54	3,05	2,5	5,55
45-49	3,97	3,26	7,23
40-44	4,65	3,94	8,6
35-39	5	4,31	9,31
30-34	5,16	4,37	9,53
25-29	5,03	4,27	9,3
20-24	4,19	3,85	8,04
15-19	3,77	3,5	7,27
10-14	3,98	3,71	7,69
5-9	4,36	4,13	8,49
0-4	4,53	4,37	8,9
Jumlah	54,43	47,67	102,1

Sumber: RKPD Tahun 2025

Apabila dilihat dari piramida penduduk dominasi penduduk berada pada penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jenis piramida di bawah ini merupakan piramida ekspansif yakni dengan penduduk usia muda dan produktif yang tinggi, hal ini nantinya berimplikasi pada dibutuhkannya ruang maupun sarana untuk memenuhi kegiatan penduduk usia produktif seperti lapangan pekerjaan dan penduduk usia belum produktif yakni sarana pendidikan dan ruang terbuka.



Gambar 3-52 Piramida Penduduk Tahun 2023

Sumber: RKPD Tahun 2025

Hal yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan penduduk usia produktif adalah *dependency ratio* (rasio ketergantungan) tidak hanya sebagai indikator demografi, *dependency ratio* juga dapat menjadi indikator pada pembahasan ekonomi. Semakin besar *dependency ratio* maka semakin besar pula tanggungan kelompok usia produktif dalam membiayai penduduk belum dan tidak produktif, sehingga pendapatan akan lebih banyak digunakan pada kegiatan konsumsi dibandingkan investasi.

Tabel 3-51 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Total	Dependency Ratio
Penduduk Usia Produktif (jiwa)	38930	33280	72210	41,42
Penduduk Usia Tidak Produktif (jiwa)	15500	14410	29910	
Persentase Penduduk Usia Produktif	38,13%	32,59%	70,72%	
Persentase Penduduk Usia Tidak Produktif	15,18%	14,11%	29,29%	

Sumber: RKPD Tahun 2025

Struktur penduduk Lamandau tahun 2023 jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya terlihat bahwa penduduknya didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur muda dan produktif sebesar 70,72%. Komposisi penduduk laki-laki penduduk usia non produktif pada tahun 2023 sebesar 15,18% dari total penduduk, penduduk usia produktif laki-laki sebesar 38,18% dari total penduduk. Pada struktur umur penduduk perempuan, komposisi penduduk usia non produktif sebesar 29,29% dari total penduduk, dan penduduk usia produktif pada tahun 2023 sebesar 70,72% dari total keseluruhan penduduk.

3.5. Kondisi Perekonomian

3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada adalah gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB selain menjadi bahan penyusunan perencanaan juga bermanfaat untuk bahan evaluasi dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan PDRB ADHK nilai PDRB Kabupaten Lamandau adalah sebesar 4,28 triliun rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang mana sebesar 4,21 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau. Namun begitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau justru menurun. Sektor terbesar yang mempengaruhi penurunan ini adalah sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan produksi dan harga komoditas pertambangan bijih logam.

Apabila dilakukan komparasi antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau dengan kabupaten lainnya terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau merupakan yang terendah di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Di mana pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau adalah sebesar 1,59% dibandingkan dengan provinsi sebesar 4,14%.

Tabel 3-52 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2017-2023						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kotawaringin Barat	6,8	6,48	5,79	0,98	5,61	6,01	6,1
2	Kotawaringin Timur	7,94	6,92	7,13	-3,06	2,1	7,76	1,81
3	Kapuas	7,62	7,01	7,16	-1,04	4,71	7,04	5,71
4	Barito Selatan	5,44	5,12	4,96	-2,9	2,03	6,28	3,27
5	Barito Utara	6,01	5,95	5,42	-2,24	2,82	6,24	5,49
6	Sukamara	6,27	6,17	6,05	1,98	4,74	5,62	5,64
7	Lamandau	6,7	6,85	6,87	1,85	4,01	6,05	1,59
8	Seruyan	5,18	5,21	5,09	-2,23	2,12	4,01	4,55
9	Katingan	6,56	6,59	5,81	-3,25	2,9	5,58	5,98
10	Pulang Pisau	5,83	5,94	6,37	2,68	3,24	4,69	4,84
11	Gunung Mas	6,63	6,87	7,21	3,39	5,09	6,47	4,25
12	Barito Timur	5,98	5,71	5,45	-2,73	2,97	6,06	3,47
13	Murung Raya	5,87	5,61	5,94	-2,45	4,4	7,03	5,46
14	Kota Palangka Raya	6,99	7,14	7,17	-2,85	4,32	6,25	6,57
Kalimantan Tengah		6,73	5,61	6,12	-1,41	3,4	6,45	4,14

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau 2018-2024

Ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi tiap sektornya sektor-sektor yang mengalami peningkatan laju pada tahun 2023 diantaranya sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, perdagangan besar, penyediaan akomodasi, jasa

keuangan, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Sektor ekonomi yang memiliki laju tertinggi pada tahun 2023 adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -29,70%, sedangkan 16 sektor lainnya tetap tumbuh positif.

Tabel 3-53 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tiap Sektor Kabupaten Lamandau

Lapangan Usaha		Laju PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,62%	3,50%	5,24%	5,36%	6,10%
B	Pertambangan dan Penggalian	9,50%	-6,32%	0,75%	0,31%	-29,70%
C	Industri Pengolahan	6,16%	5,52%	7,26%	12,92%	8,34%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,53%	9,54%	6,35%	8,86%	9,68%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,63%	8,03%	-0,13%	8,02%	14,87%
F	Konstruksi	5,26%	-10,15%	7,49%	8,24%	7,75%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,99%	8,06%	2,71%	7,24%	7,86%
H	Transportasi dan Pergudangan	10,16%	5,33%	2,85%	5,50%	4,44%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,00%	-5,66%	2,08%	6,92%	7,04%
J	Informasi dan Komunikasi	6,47%	7,60%	13,22%	9,85%	4,34%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,47%	8,84%	9,64%	5,75%	5,99%
L	Real Estate	7,23%	4,94%	1,72%	2,20%	4,75%
M,N	Jasa Perusahaan	7,59%	-0,92%	2,09%	4,09%	9,60%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,05%	10,77%	-5,37%	5,01%	3,33%
P	Jasa Pendidikan	6,61%	8,12%	-0,10%	2,33%	1,82%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,42%	8,50%	7,79%	4,34%	8,60%
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,20%	5,70%	0,06%	3,68%	8,27%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,87%	1,85%	4,01%	6,05%	1,59%

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau 2020-2024

Apabila ditinjau dari distribusi tiap sektornya, sektor yang memiliki distribusi terbesar pada perekonomian adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan distribusi sebesar 35,3%. disusul oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,07%. Sektor dengan distribusi terkecil adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02%. Jika melihat dari distribusi PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2023, dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (35,30%);
2. Industri Pengolahan (16,07%);
3. Konstruksi (11,58%);
4. Perdagangan Besar dan Eceran (9,99%)

5. Pertambangan dan Penggalian (6,41%)

Tabel 3-54 Distribusi PDRB ADHK tiap Sektor Kabupaten Lamandau

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB (Persen)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,62	29,48	31,86	32,07	35,3
B	Pertambangan dan Penggalian	14,67	13,13	13,36	13,03	6,41
C	Industri Pengolahan	12,77	13,38	14,31	15,03	16,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	12,63	11	10,74	10,84	11,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,36	9,83	9,14	9,22	9,99
H	Transportasi dan Pergudangan	2,83	2,92	2,7	2,67	2,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,7	0,64	0,62	0,66
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,27	1,29	1,28	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,12	1,19	1,2	1,23	1,29
L	Real Estate	1,19	1,22	1,11	1,05	1,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,61	6,15	4,8	4,54	4,57
P	Jasa Pendidikan	6,22	6,5	5,74	5,44	5,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,44	2,41	2,3	2,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,65	0,66	0,6	0,57	0,62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau 2020-2024

3.5.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita merupakan perbandingan antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah sehingga menunjukkan rerata pendapatan penduduk pada suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan indikator kemakmuran penduduk, semakin tinggi nilainya diindikasikan penduduk di suatu wilayah tersebut semakin makmur. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 3-55 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
A.	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	PDRB ADHB	5.489,90	5.773,80	6.566,60	7.315,90	7.518,70

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
	PDRB ADHK	3.746,50	3.815,60	3.968,80	4.208,90	4.275,80
B.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
	PDRB Per Kapita ADHB	68,93	59,15	66,41	72,79	73,64
	PDRB Per Kapita ADHK	47,04	39,09	40,13	41,88	41,88
C.	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010 (persen)	8,03	-16,17	0,11	2,52	0

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau

Dengan mengecualikan dampak Covid-19, terlihat bahwa nilai PDRB per Kapita Kabupaten Lamandau dari tahun 2021 hingga tahun 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 68,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 73,64 juta rupiah. Adanya peningkatan PDRB Per kapita dapat menjadi indikasi bahwa secara ekonomi penduduk Kabupaten Lamandau semakin makmur.

3.5.3 Laju Inflasi

Inflasi/deflasi merupakan indikator yang menggambarkan persentase perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pada waktu tertentu. Tidak semua kenaikan harga barang dapat digolongkan sebagai inflasi, kenaikan harga pada bulan-bulan tertentu seperti masa lebaran tidak tergolong inflasi karena setelah masa lebaran harga akan cenderung kembali stabil, kenaikan harga pada satu/dua jenis barang juga bukan merupakan inflasi kecuali apabila kenaikan tersebut meluas dan menyebabkan kenaikan pada harga barang atau jasa yang lain.

Secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis perhitungan inflasi namun hanya berfokus pada 90 kota di Indonesia, termasuk di dalamnya kota terdekat dengan Kabupaten Lamandau yakni Sampit dan Palangka Raya. Pengendalian inflasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian masyarakat.. Fluktuasi harga barang di Kabupaten Lamandau merujuk pada kota pemasok Kabupaten Lamandau, khususnya Kota Sampit yang merupakan kota terdekat dengan Kabupaten Lamandau. Laju inflasi di Kabupaten Lamandau yang merujuk pada Inflasi Kota Sampit pada tahun 2023 adalah sebesar 2,56% atau berada di bawah laju inflasi nasional sebesar 2,61 persen dan Inflasi Kalimantan Tengah sebesar 2,64 %.



Gambar 3-53 Laju Inflasi Kota Sampit Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sampit Tahun 2024

Sepanjang tahun 2023, puncak inflasi berada di Bulan Januari-Maret, Hal tersebut dikarenakan terjadi kenaikan pada beberapa kelompok pengeluaran yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas yang menjadi pemicu inflasi yaitu daging ayam ras, ikan nila, emas perhiasan, tomat, beras, bawang merah, rimbang/tekokak, gula pasir, ikan gabus dan udang basah.

3.5.4 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menggambarkan distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Rasio atau indeks gini berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Berdasarkan nilai rasio gini, ketimpangan dibagi menjadi tiga kelas tingkatan: (1) Rendah, yaitu rasio gini kurang dari 0,3; (2) Moderat, yaitu rasio gini berada di antara 0,3 sampai 0,5; dan (3) Tinggi, yaitu rasio gini lebih besar dari 0,5. Adapun rasio gini di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3-56 Rasio Gini Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Rasio Gini	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lamandau	0,28	0,3	0,32	0,32	0,33
Provinsi Kalimantan Tengah	0,336	0,33	0,323	0,319	0,317
Nasional	0,38	0,385	0,384	0,381	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Lamandau kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir termasuk dalam kategori moderat, yakni berkisar antara 0,3 sampai 0,5. Dari tahun 2019-2023, tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2023 di mana rasio gini pada tahun ini mencapai 0,33 atau naik 0,01 dari tahun 2022. Adapun jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, rasio gini Kabupaten Lamandau masih berada di bawah rasio gini nasional, meskipun berada sedikit di atas rasio gini provinsi.

3.6. Kondisi Sosial Budaya

3.6.1 Kondisi Kesejahteraan Sosial

3.6.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pengetahuan/ pendidikan, dan dimensi hidup layak yang dilihat dari pendapatan. Indeks ini merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur dimensi pengetahuan/ pendidikan digunakan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan pendekatan pendapatan dengan melihat indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan pokok yang besarnya diambil dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Tabel 3-57 Perkembangan IPM di Kabupaten Lamandau Tahun 2021-2023

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,39	69,62	73,31
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,49	12,51	1252
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,43	8,53	8,67
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (000 Rp)	11.234,00	11.559,00	12.050,00
IPM	70,58	71,11	73,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

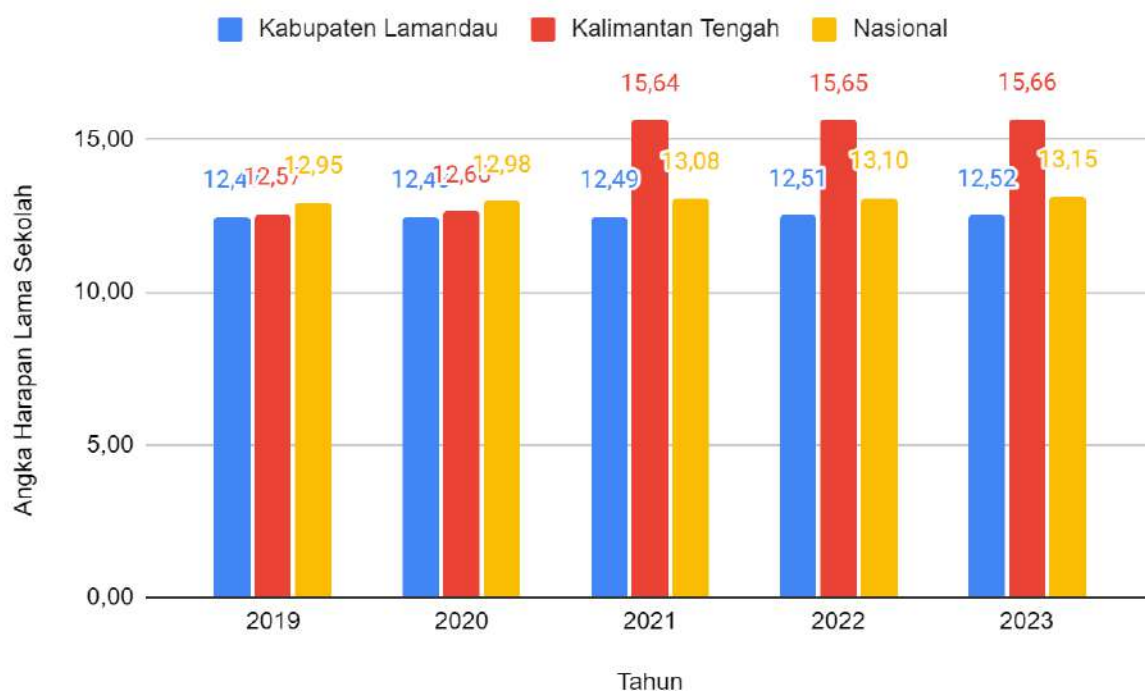
Perhitungan IPM mulai tahun 2016 telah menggunakan metode baru yakni dengan menghitung data secara series mulai tahun 2011-2016. Dengan metode perhitungan yang baru ini, dimensi pengetahuan/ pendidikan dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dengan penimbang masing-masing $\frac{1}{2}$, sedangkan metode lama menggunakan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah dengan penimbang masing-masing $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$.

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diketahui bahwa IPM Kabupaten Lamandau 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif, di mana nilai IPM dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Lamandau sebesar 70,58, meningkat pada tahun 2022 menjadi 71,11 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 73,44. Dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lamandau telah berangsur-angsur menjadi lebih baik.

Adapun menurut standar United Nations Development Program (UNDP), pembangunan manusia dikelompokkan dalam 4 kategori, yakni IPM >80 termasuk kategori sangat tinggi, IPM 70-79 termasuk kategori tinggi, serta IPM 60-79 termasuk kategori sedang. Dalam hal ini, IPM Kabupaten Lamandau yang mencapai 73,44 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah termasuk dalam kategori "tinggi". Hal ini juga ditunjukkan oleh fakta bahwa Kabupaten Lamandau menempati urutan ke-7 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Meskipun begitu, IPM Kabupaten Lamandau harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan IPM dapat dilakukan dengan meningkatkan indikator-indikator yang membentuk 3 (tiga) komponen utama perhitungan, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor kesehatan baik dengan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, maupun dengan peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan, air dan fasilitas BAB sehingga kesehatan di lingkungan tempat tinggal terjaga; dalam kaitannya dengan dimensi pengetahuan/ pendidikan perlu dilakukan peningkatan sarana pendidikan dan upaya bantuan pendidikan bagi anak untuk menjaga semua anak usia sekolah dapat bersekolah minimal 12 tahun; terakhir, dalam mendorong dimensi hidup layak perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru dan pengadaan program bantuan bagi masyarakat.

3.6.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator penyusun IPM yang berguna untuk mengetahui kondisi pembangunan di bidang pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh setiap anak dalam rentang usia pendidikan, dalam satuan tahun. Berikut Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau dari tahun 2019-2023.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lamandau	12,47	12,48	12,49	12,51	12,52
Kalimantan Tengah	12,57	12,66	15,64	15,65	15,66
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

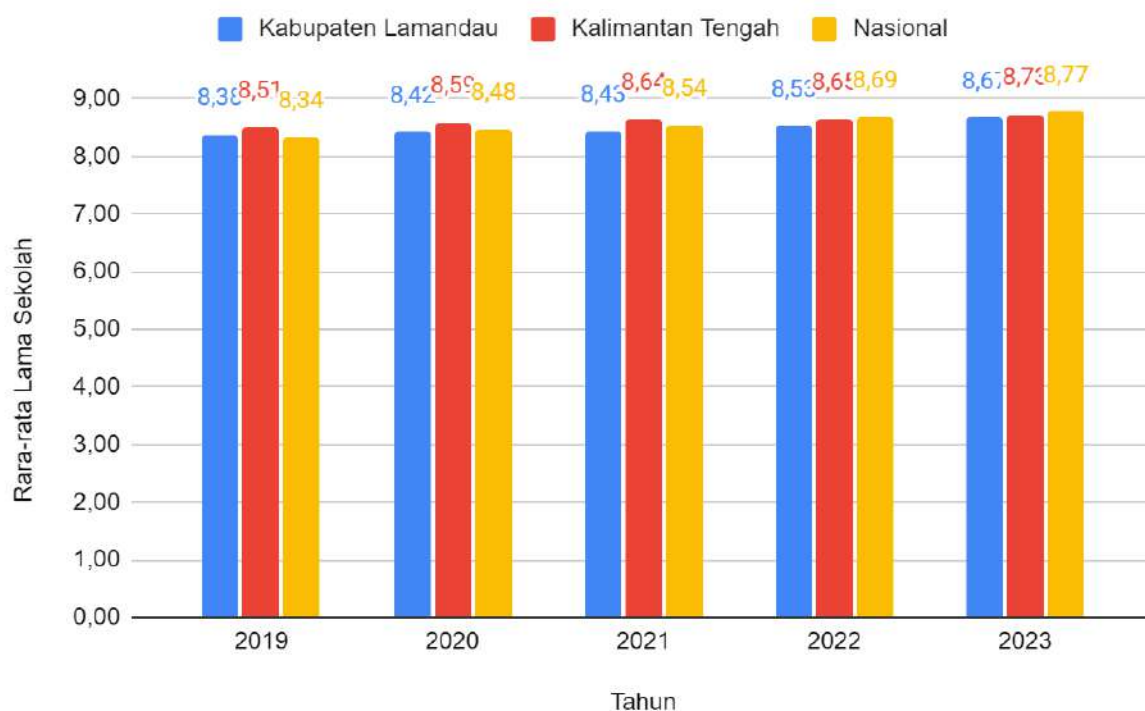
Gambar 3-54 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

Dari diagram di atas, diketahui bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau memiliki tren meningkat. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 mencapai 12,52 tahun. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,52 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas. Meskipun demikian, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau masih berada di bawah Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional sehingga perlu ada upaya peningkatan lebih lanjut.

3.6.1.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator penyusun IPM yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berikut Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau dari tahun 2019-2023.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lamandau	8,38	8,42	8,43	8,53	8,67
Kalimantan Tengah	8,51	8,59	8,64	8,65	8,73
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

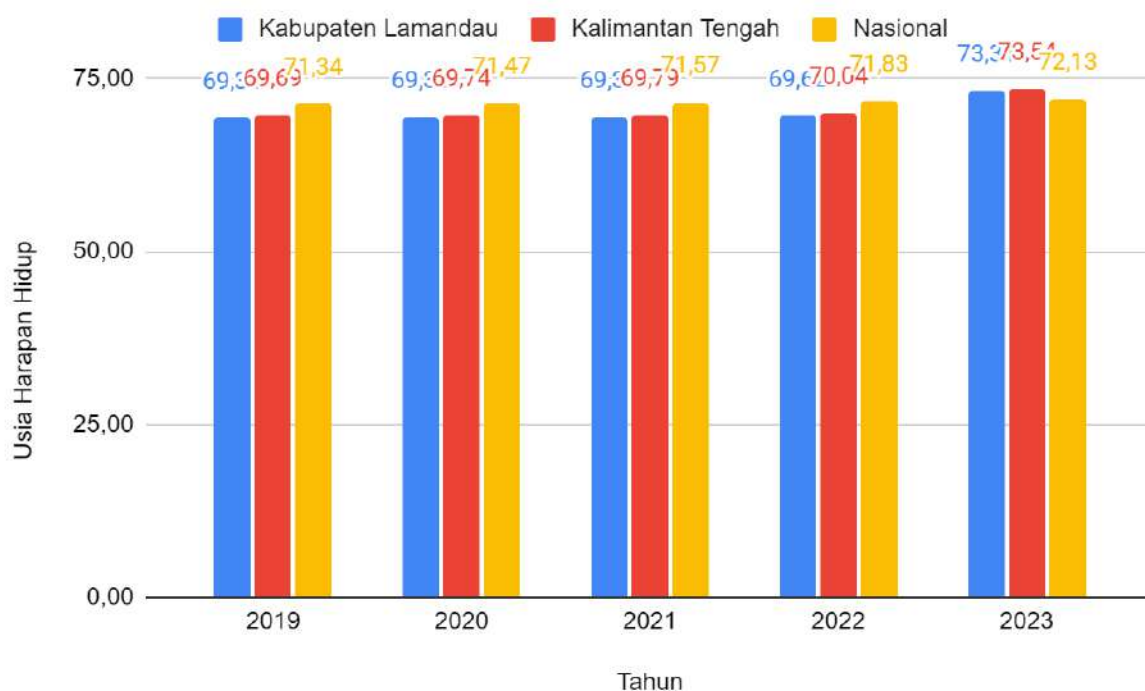
Gambar 3-55 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

Berdasarkan grafik di atas maka diketahui bahwa Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau baru berada di angka 8,67 tahun, atau setara dengan tingkat 2 (dua) hingga tingkat 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama. Angka Rata-rata Lama Sekolah ini masih cukup jauh dari Angka Harapan Lama Sekolah sehingga perlu dilakukan upaya untuk menekan angka putus sekolah melalui ragam program bantuan seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) ataupun Dana BOS. Adapun jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau masih berada di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau masih lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

3.6.1.4 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lamandau dari tahun 2019-2023.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lamandau	69,34	69,36	69,39	69,62	73,31
Kalimantan Tengah	69,69	69,74	69,79	70,04	73,54
Nasional	71,34	71,47	71,57	71,83	72,13

Gambar 3-56 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 mencapai 73,31 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup bayi yang dilahirkan pada tahun 2023 mencapai usia sekitar 73 tahun, lebih lama 3,69 tahun dari tahun 2022. Peningkatan signifikan Usia Harapan Hidup menggambarkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, di mana dapat disimpulkan bahwa telah terdapat peningkatan kualitas kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingginya angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lamandau perlu menjadi perhatian khusus agar angka tersebut tidak menurun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan angka tersebut adalah dengan meningkatkan penjangkauan dan penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat, pengadaan program-program yang membangkitkan semangat hidup sehat di masyarakat, dan implementasi pengelolaan lingkungan sehat. Adapun pada tahun 2023 ini, meskipun Usia Harapan Hidup Kabupaten Lamandau masih berada sedikit di bawah Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, namun telah berhasil berada di atas Usia Harapan Hidup Nasional. Ini menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup Kabupaten Lamandau sudah lebih baik dari kabupaten/kota lain di Indonesia.

3.6.2 Kondisi Kesehatan

3.6.2.1 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk diperlukan pemenuhan sarana kesehatan. Dengan tersedianya sarana kesehatan harapannya masyarakat dapat dengan mudah menjangkau sehingga tercipta keberhasilan layanan kesehatan masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sarana kesehatan di Kabupaten Lamandau terdiri dari apotek, puskesmas pembantu, puskesmas, poliklinik, rumah sakit bersalin, rumah sakit. sarana kesehatan yang paling banyak yaitu puskesmas pembantu sebanyak 74 unit. Kemudian disusul oleh puskesmas sebanyak 11 unit. Sedangkan fasilitas yang jumlahnya paling sedikit yaitu rumah sakit bersalin, rumah sakit umum, dan poliklinik masing-masing sebanyak 1 unit yang berada di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-58 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Lamandau

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Apotek	6
2	Puskesmas Pembantu	74
3	Puskesmas	11
4	Poliklinik	1
5	Rumah Sakit Bersalin	1
6	Rumah Sakit	1
Kabupaten Lamandau		94

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2023

3.6.2.2 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar (WHO, 2015). Dampak kesehatan anak yang stunting adalah gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta risiko penyakit diabetes, stroke, jantung, obesitas, dan lain sebagainya saat dewasa. Stunting disebabkan oleh setidaknya 2 (dua) faktor, yaitu asupan kalori yang tidak mencukupi dan adanya kebutuhan khusus (penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, berat badan lahir sangat rendah, infeksi kronik dan kelainan metabolisme bawaan).

Berdasarkan hasil penilaian SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Lamandau yang semula sebesar 25,5 (tahun 2022), secara signifikan menurun menjadi 13,2 pada tahun 2023. Penurunan ini berhasil dicapai melalui berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau di antaranya :

1. Pemantauan pertumbuhan balita
2. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil
3. Pelatihan pemberian makan bayi dan anak
4. Konseling pemberian ASI eksklusif pada bayi
5. Pemberian imunisasi
6. Gerebek Stunting (Gerakan berkunjung ke keluarga stunting)
7. Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting)

8. Aksi Bergizi di sekolah

Adapun prevalensi stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 3-57 Prevalensi Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Sumber: Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023; RKPD, 2025

Untuk penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan intervensi pada bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi, Kebersihan, Pengasuhan Orangtua, air minum dan sanitasi, PAUD, Perlindungan sosial serta ketahanan pangan. Salah satu inovasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau yaitu melalui pembentukan Bapak Anak Asuh Stunting (BAAS) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, swasta dan tokoh agama untuk penanganan stunting.

3.6.3 Kondisi Pendidikan

3.6.3.1 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam suksesnya pembangunan. Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan tabel jumlah sarana pendidikan baik negeri maupun swasta yang tersedia pada Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-59 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Lamandau

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	MA	1
2	SMK	10
3	SMA	11
4	MTS	4
5	SMP	42
6	MI	6
7	SD	111

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
8	RA	4
9	TK	81
Kabupaten Lamandau		270

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Lamandau terdiri dari TK hingga SMK. Sarana pendidikan yang paling banyak yaitu sarana pendidikan SD sebanyak 111 unit, sedangkan sarana pendidikan yang paling sedikit yaitu MA dengan jumlah sebanyak 1 unit.

3.6.4 Kondisi Sosial Keagamaan

3.6.4.1 Ketersediaan Sarana Peribadatan

Dalam upaya menunjang kegiatan beragama, terdapat berbagai jenis sarana peribadatan di Kabupaten Lamandau baik berupa masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, dan pura. Jumlah sarana peribadatan terbanyak adalah mushola yakni 148 unit dan sarana peribadatan paling sedikit adalah pura sebanyak 14 unit.

Tabel 3-60 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Lamandau

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Vihara	0
2	Pura	14
3	Gereja Katholik	45
4	Gereja Protestan	121
5	Mushola	148
6	Masjid	69
Kabupaten Lamandau		397

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2023

3.7. Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB

Berdasarkan Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lamandau menargetkan pendapatan sebesar Rp. 942.347.723.286,- dan realisasi pendapatan Rp. 977.936.015.560,08. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 861.239.805.453,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 914.107.143.080,00 atau 106,14% yang memberikan kontribusi sebesar 93,47%, sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp. 31.102.304.263,00 realisasinya sebesar Rp.41.283.444.977,00 atau 132,73% memberikan kontribusi sebesar 4,22%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 81.107.917.833 realisasinya sebesar Rp. 63.828.875.480 atau 78,7% hanya memberikan kontribusi sebesar 6,53%. Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah TA. 2023 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3-61 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	REALISASI_1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022
4	PENDAPATAN DAERAH	942.347.723.286	977.936.015.560,08	103.78	885.397.745.076,61
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.107.917.833,00	63.828.875.480,08	78.7	86.025.034.797,06
4 . 1 . 2001	Pajak Daerah	46.490.000.000,00	19.007.923.400,00	40.89	24.716.984.946,96
4 . 1 . 2002	Retribusi Daerah	2.237.613.570,00	2.064.701.156,00	92.27	1.686.581.621,00
4 . 1 . 2003	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.278.000.000,00	1.472.805.946,96	115.24	12.329.741.842,30
4 . 1 . 2004	Lain-lain PAD yang Sah	31.102.304.263,00	41.283.444.977,00	132.73	47.291.726.386,80
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	861.239.805.453,00	914.107.143.080,00	106.14	799.372.710.279,55
4 . 2 . 2001	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	820.243.166.325,00	856.032.363.375,00	104.36	755.294.559.442,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	744.086.017.325,00	777.571.124.375,00	104.5	669.303.131.442,00
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.378.377.000,00	10.378.377.000,00	100	20.270.970.000,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	65.778.772.000,00	68.082.862.000,00	103.5	65.720.458.000,00
4 . 2 . 2002	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.996.639.128,00	58.074.779.705,00	141.66	44.078.150.837,55
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	40.996.639.128,00	57.924.779.705,00	141.29	43.928.150.837,55
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	0,00	150.000.000,00	0	150.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.051.280.425.170,00	969.388.233.810,15	92.21	950.855.084.399,67
5 . 1	BELANJA OPERASI	721.202.405.174,00	653.232.055.389,23	90.58	609.479.834.136,08
5 . 1 . 2001	Belanja Pegawai	350.068.575.921,00	334.877.166.843,00	95.65	318.017.214.846,00
5 . 1 . 2002	Belanja Barang dan Jasa	276.435.186.537,00	242.611.244.299,33	87.76	213.879.328.765,18
5 . 1 . 2005	Belanja Hibah	86.706.081.791,00	68.395.885.062,00	78.88	73.270.685.059,90
5 . 1 . 2006	Belanja Bantuan Sosial	7.972.560.925,00	7.347.759.185,00	92.16	4.312.605.465,00
5 . 2	BELANJA MODAL	191.539.118.005,00	180.799.033.753,82	94.39	217.545.135.307,59
5 . 2 . 2001	Belanja Modal Tanah	760.120.000,00	5.900.000,00	0.78	1.108.169.168,00
5 . 2 . 2002	Belanja Modal Peralatan	45.868.505.203,00	43.923.966.830,00	95.76	36.479.873.412,50

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	REALISASI_1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022
	dan Mesin				
5 . 2 . 2003	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.810.869.386,00	42.667.067.833,00	87.41	67.719.001.496,93
5 . 2 . 2004	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.129.545.616,00	92.327.664.892,00	98.09	111.539.291.730,16
5 . 2 . 2005	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.970.077.800,00	1.874.434.200,00	95.15	698.799.500,00
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	0,00	0	1.539.737.510,00
5 . 3 . 2001	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	0,00	0	1.539.737.510,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	133.538.901.991,00	135.357.144.667,00	101.36	122.290.377.446,00
5 . 4 . 2001	Belanja Bagi Hasil	4.872.761.357,00	4.326.856.452,00	88.8	3.223.741.917,00
5 . 4 . 2002	Belanja Bantuan Keuangan	128.666.140.634,00	131.030.288.215,00	101.84	119.066.635.529,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	108.932.701.884,00	8.547.784.749,93	7,85	-65.457.339.323,06
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.800.701.884,00	119.800.981.884,33	100,00	196.126.041.207,39
6 . 1 . 2001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.800.701.884,00	119.800.981.884,33	100,00	196.126.041.207,39
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.868.000.000,00	10.868.000.000,00	100,00	10.868.000.000,00
6 . 2 . 2002	Penyertaan Modal Daerah	10.868.000.000,00	10.868.000.000,00	100,00	10.868.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	108.932.701.884,00	108.932.981.884,33	100,00	185.258.041.207,39
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	117.480.766.634,26	0,00	119.800.701.884,33

Sumber: LRA Kabupaten Tahun 2023

3.8. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB

Terdapat 3 Pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB yaitu akademisi, filantropi, dan organisasi masyarakat serta media. Akademisi dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pengembangan Kabupaten Lamandau dan pencapaian indikator TPB. Akademisi dan para pakar dapat membantu melakukan identifikasi masalah dan kendala yang dapat menghambat tercapainya indikator TPB dan juga memberikan alternatif solusi agar target pembangunan dapat tercapai. Selain itu juga dapat mengambil peran dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB.

Secara umum peran penting akademisi khususnya mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan TPB yaitu:

1. *Agent of Change* (Agen Perubahan)
Mahasiswa merupakan agen perubahan bangsa untuk membentuk bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Dengan ikut dan aktif dalam melaksanakan program TPB maka mahasiswa telah menjalankan perannya sebagai agen perubahan untuk memajukan Kabupaten Lamandau ke arah yang lebih baik lagi. Mahasiswa diharuskan untuk berpikir secara kritis dan cepat tanggap dalam menangani permasalahan yang terjadi di sekitarnya.
2. *Moral Force* (Kekuatan Moral)
Kekuatan moral dalam peran mahasiswa memegang peranan yang penting dalam masyarakat di mana mahasiswa berperan menjaga nilai-nilai yang tertanam dan tertata di masyarakat.
3. *Social Control* (Pengontrol Sosial)
Mahasiswa memiliki peran mengontrol sosial di masyarakat, bangsa, dan negara. Jika tidak sesuai dengan ideologi, cita-cita bangsa dan negara, mahasiswa dapat memberikan masukan.
4. *Iron Stock* (Penerus Bangsa)
Mahasiswa berperan untuk menentukan nasib bangsa ke depannya agar menjadi lebih baik lagi.

Terdapat satu perguruan tinggi di Kabupaten Lamandau yang memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam pelaksanaan TPB, yaitu Politeknik Lamandau. Politeknik Lamandau memiliki peran dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Politeknik Lamandau melakukan pengabdian masyarakat yang mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan dengan melakukan pelatihan *digital marketing*, pelatihan budidaya tanaman dan peternakan, pemberian edukasi pengenalan hama dan penyakit tanaman. Peran perguruan tinggi dapat dioptimalkan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan .

Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga-nya untuk menolong orang lain. Filantropi memainkan peran penting dalam masyarakat. Filantropi dan pebisnis sangat diperlukan kontribusinya karena keberhasilan TPB. Dana filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran instrumental dalam pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, dan perubahan sosial lainnya.

Filantropi dan bisnis di Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan oleh Lembaga atau pembisnis tingkat lokal, nasional, dan internasional. Beberapa Lembaga filantropi di Kabupaten Lamandau antara lain Forum CSR dan perusahaan yang ada di Kabupaten Lamandau. Di antara perusahaan yang terlibat dalam pembangunan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, dan lainnya tentu merupakan pihak yang paling aktif berperan dalam pergerakan roda pembangunan Kabupaten Lamandau. Berikut peran dari tiap filantropi yang ada di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3-62 Peran Filantropi dan Bisnis

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	PDAM	Perusahaan daerah yang menyediakan layanan penyediaan air bersih yang berkualitas sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah, mempunyai kewajiban juga untuk merencanakan dan mengembangkan akses terhadap layanan air bersih.	Lingkungan, Sanitasi, dan Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
				Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
				Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
2	Bank Daerah /Bank Kalteng	Mitra pemerintah dalam urusan perbankan daerah	Ekonomi	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
				Tujuan 9: Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
3	TELKOM	Mitra pemerintah yang ikut andil dalam program bantuan ekonomi dan sosial	Ekonomi, Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
				Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
				Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	8.1.1.(a) PDB per kapita. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.
				Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara	10.1.1* Koefisien Gini. 10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
4	PLN	Pelaku usaha mitra pemerintah yang ikut andil dalam program ekonomi dan sosial	Ekonomi, Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
				Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
					asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
				Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	8.1.1.(a) PDB per kapita. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.
				Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara	10.1.1* Koefisien Gini. 10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
5	Rumah Sakit	Mitra pemerintah yang ikut andil dalam program bantuan kesehatan	Ekonomi, Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
				Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe. 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.
				Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
				Seluruh Penduduk Semua Usia	
6	Pelaku Usaha/Filantropi	Turut berperan dalam penyediaan bantuan CSR di Kabupaten Lamandau	Ekonomi dan Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
				Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
				Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara	10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
7	Instansi Militer	Membantu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan (penghijauan untuk RTH dan taman, kebersihan jaringan air bersih dan air kotor, serta pelaksanaan program-program pemerintah lainnya)	Lingkungan	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani
8	Instansi Kepolisian	Membantu menjaga ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat.	Sosial	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045

Organisasi masyarakat dan media memiliki peran penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasi. Dalam proses mencapai tujuan TPB,

perlu adanya publikasi dari pihak yang memiliki peran sebagai media dari pemerintah kepada masyarakat.

Media massa merupakan perantara dan publikasi berupa informasi mengenai TPB seperti perkembangan, peningkatan, dan program atau agenda TPB itu sendiri dan masih banyak lagi tugas-tugas yang dilakukan oleh media. Dengan adanya media massa, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui informasi detail mengenai TPB dalam implementasi dan realisasi visi misi Kabupaten Lamandau dan pelaksanaan TPB tersebut. Terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat dan media publikasi dalam pelaksanaan TPB, yaitu:

1. Diseminasi dan advokasi kepada masyarakat
2. Fasilitasi program/kegiatan di lapangan
3. Membangun pemahaman publik
4. Monitoring pelaksanaan

Di Kabupaten Lamandau, organisasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam implementasi TPB adalah organisasi keagamaan yang secara langsung beraktivitas dalam peningkatan kualitas dunia pendidikan dan kesehatan. Terdapat banyak organisasi masyarakat di Kabupaten Lamandau, baik yang berbasis keagamaan, ormas advokasi, LSM, serikat pekerja, maupun organisasi non keagamaan sebagai penunjang percepatan pencapaian TPB.

Tabel 3-63 Peran Organisasi Masyarakat dan Media dalam Pencapaian TPB Kabupaten Lamandau

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKK Kabupaten Lamandau	Kader perempuan membantu dalam pelaksanaan program-program pemerintah	Sosial	Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
2	Stasiun TV lokal (Kalimantan Tengah)	Publikasi dan sosialisasi	Komunikasi dan Sosial	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
3	SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Lamandau	Organisasi yang menghimpun pekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, sebagai lembaga aspirasi, perunding, pembinaan, peningkatan kesejahteraan, perlindungan dan pembelaan, serta sosial kontrol.	Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kamar Dagang dan Industri Negara (KADIN)	Wadah untuk pengusaha	Ekonomi	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
5	PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Lamandau	Melaksanakan kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah	Sosial, Kesehatan	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
6	FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	Membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan	Sosial dan Keagamaan	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
7	LSM Lingkungan	Mendukung pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
8	Ormas Keagamaan	Pengembangan kapasitas sosial dan modal sosial	Sosial	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk

No	Stakeholder	Peran	Bidang	Tujuan PB	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	
9	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	Bekerja sama dengan Perum Perhutani atau dengan pihak pihak lain yang berkepentingan dalam mengelola Sumber Daya Hutan	Lingkungan	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
10	KPUD Kabupaten Lamandau	Menyelenggarakan pemilihan umum	Tata Kelola Kelembagaan	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045



BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Secara keseluruhan, terdapat 241 indikator dan 169 sasaran untuk pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 241 indikator yang ada di Indonesia, terdapat 211 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lamandau. Adapun pada bagian ini, dilakukan perbandingan antara capaian dari setiap indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lamandau dengan target capaian indikator yang tercantum pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2024 untuk mengetahui tingkat ketercapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau dan menentukan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan demi mewujudkan TPB di wilayah.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD disebutkan bahwa penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu: indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta indikator TPB yang tidak/belum ada data.

Adapun secara keseluruhan di Kabupaten Lamandau terdapat 77 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 51 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 17 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 66 indikator yang tidak ada data. Capaian indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4-1 Indikator TPB yang Tidak Relevan dengan Kabupaten Lamandau

No	Pilar	Indikator	Keterangan
1	Lingkungan	6.3.2.(a) Kualitas air danau.	Kabupaten Lamandau tidak memiliki danau
2	Ekonomi	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol	Tidak Ada rencana Pembangunan Jalan Tol
3	Ekonomi	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.	Tidak Ada rencana Pembangunan Jalur Kereta Api
4	Lingkungan	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Kabupaten Lamandau tidak masuk dalam metropolitan
5	Lingkungan	11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kabupaten Lamandau tidak masuk dalam metropolitan
6	Lingkungan	11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Khusus untuk kabupaten kota yang menjadi kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil
7	Lingkungan	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan	Kabupaten Lamandau tidak masuk dalam metropolitan
8	Lingkungan	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Kabupaten Lamandau tidak masuk dalam metropolitan
9	Lingkungan	17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Kabupaten Lamandau tidak masuk dalam Kabupaten 3T

Sumber: Analisis 2024

Capaian indikator TPB di Kabupaten Lamandau pada 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif di mana terdapat beberapa indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, namun kemudian kembali meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan timbulnya penurunan capaian TPB pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga terjadi pada indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target di mana dari tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah indikator ini mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

Secara rinci, indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta tidak/belum ada data dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4-2 Rangkuman Capaian TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2023

No	TPB	SS	SB	BB	TAD
1	Tanpa Kemiskinan	6	11	3	4
2	Tanpa Kelaparan	6	2	0	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	7	2	9

No	TPB	SS	SB	BB	TAD
4	Pendidikan berkualitas	6	5	1	1
5	Kesetaraan Gender	4	1	6	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	7	0	9
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	6	0	8
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	7	1	0	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	0	0	5
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	2	3	2	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	1	0	0	4
13	Penanganan dan Perubahan Iklim	1	0	1	0
15	Ekosistem Daratan	3	0	0	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang teguh	7	4	2	8
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	4	0	5
	Grand Total	77	51	17	66

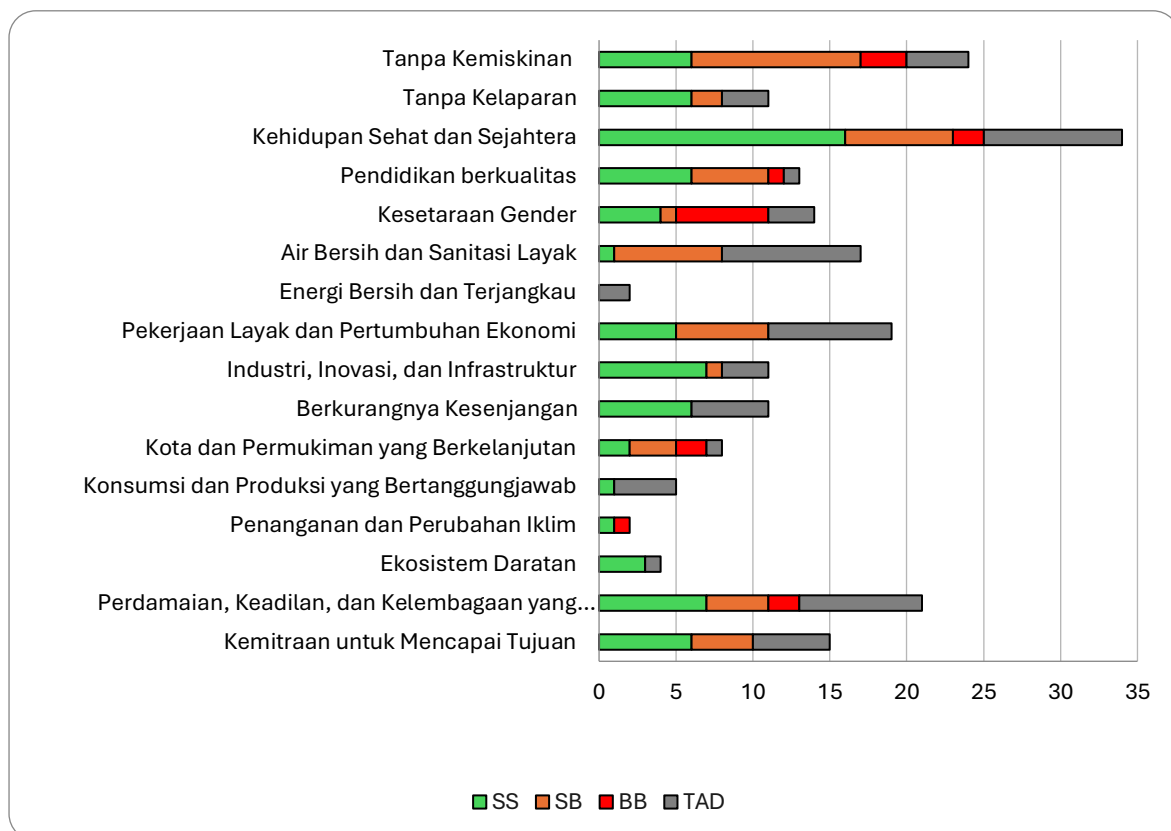
Ket: SS = Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

SB = Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target

BB = Belum dilaksanakan dan belum mencapai target

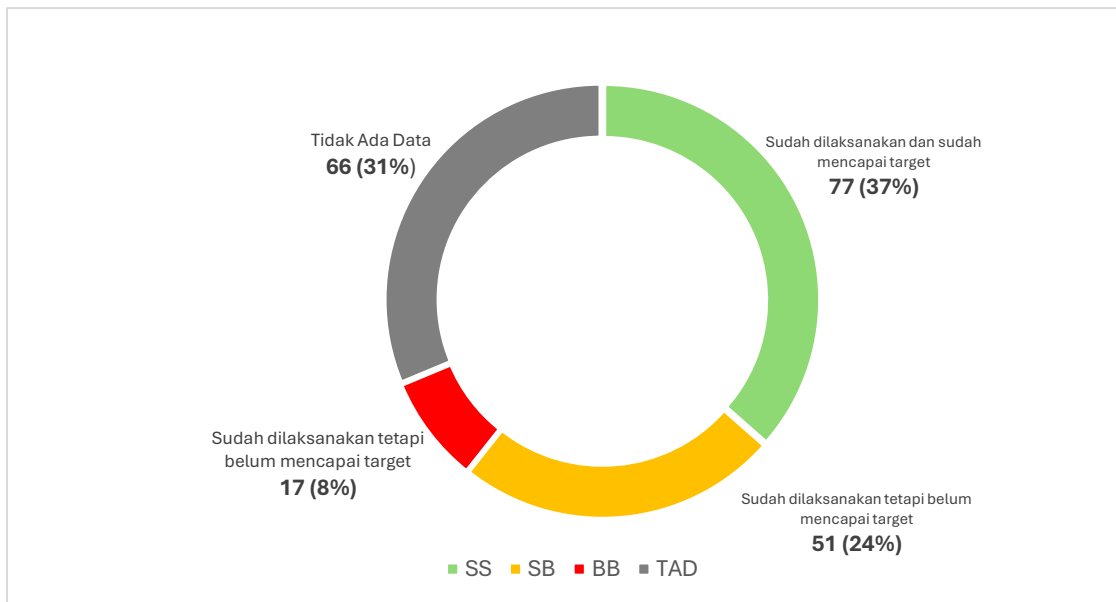
TAD = Tidak ada data

Sumber: Analisis. 2024



Gambar 4-1 Capaian TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2023

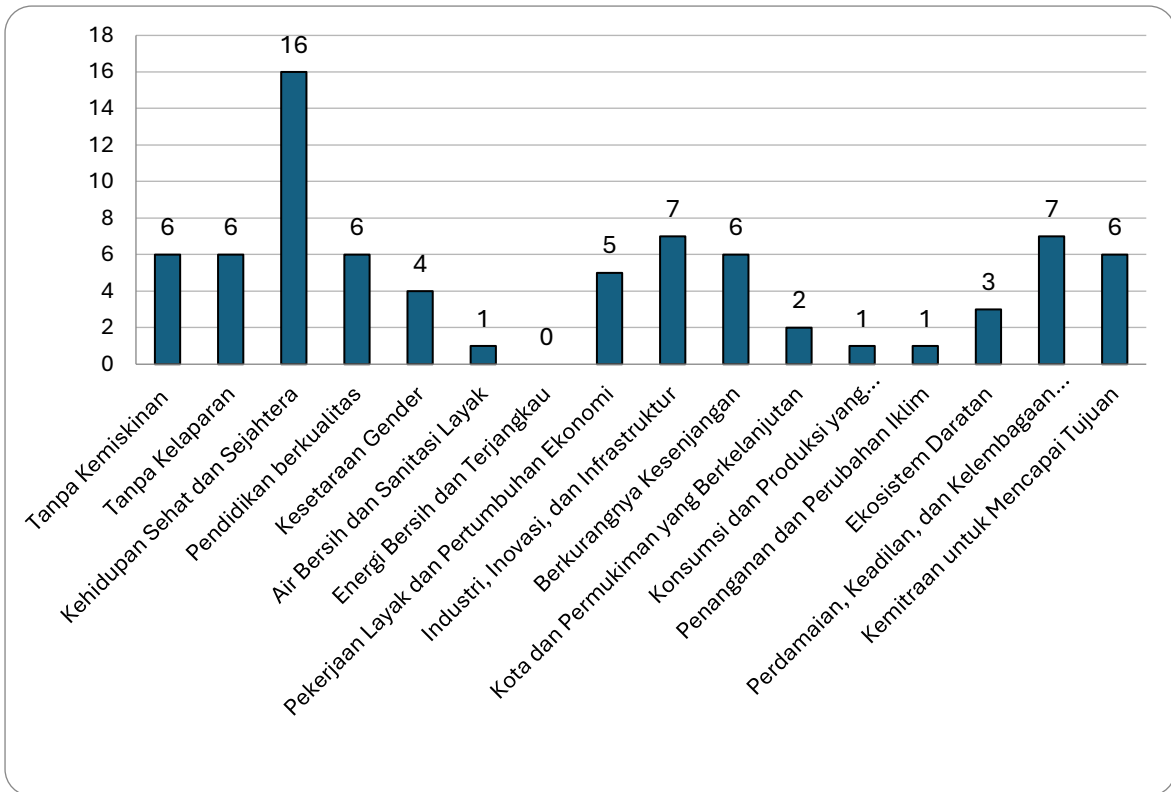
Sumber: Hasil Analisis 2024



Gambar 4-2 Capaian Umum TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2023
Sumber: Hasil Analisis 2024

4.1. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai Target Nasional

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dilambangkan dengan kode SS, merupakan indikator yang relevan dengan wilayah yang pencapaiannya telah sama dengan atau lebih dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Kabupaten Lamandau, pada tahun 2023 terdapat 77 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.



Gambar 4-3 Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB

Sumber: Hasil Analisis 2024

Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4-3 Tujuan Dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	1.2.1*	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	2019 : Menurun menjadi 7-8%	3,15 %	3,01	3,09	3,56	3,34	3,12	ss
SOSIAL	1.3.1.(c)	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	Meningkat menjadi 17,12%	NA	NA	NA	100	94,42	0	ss
SOSIAL	1.3.1.(b)	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94%	NA	NA	NA	16,31	12,31	44,67	ss
SOSIAL	1.4.1.(a)	1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 70%	84	84,89	90,11	96,53	99,99	0	ss
SOSIAL	1.5.1*	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	1500	0	14017	4331	17518	548	ss
SOSIAL	1.5.1.(e)	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	BPBD	Menurun menjadi 118,6	NA	93,2	93,2	93,2	93,2	83,87	ss
EKONOMI	10.1.1*	10.1.1* Koefisien Gini.	Bappedalitbang	Menurun menjadi 0,36 - 0,37	0,3	0,3	0,3	0,32	0,32	0,33	ss
EKONOMI	10.1.1.(c)	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan	Berkurang 5.000 desa (skala nasional)	32	22	NA	NA	NA	0	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Masyarakat Desa								
EKONOMI	10.1.1.(d)	10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkat 2.000 desa (skala nasional)	0	1	NA	NA	12	20	ss
EKONOMI	10.1.1.(e)	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkat	0,2	0,1	NA	NA	NA	0	ss
EKONOMI	10.1.1.(a)	10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	Menurun menjadi 6-7%	3,15	3,01	3,09	3,56	3,34	3,12	ss
EKONOMI	10.4.1.(b)	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	NA	NA	NA	16,31	12,31	44,67	ss
LINGKUNGAN	11.5.1*	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	NA	0	14017	4331	17518	548	ss
LINGKUNGAN	11.6.1.(a)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat menjadi 80%	65	61,5	69,3	70,58	76,4	79,7	ss
LINGKUNGAN	12.4.2.(a)	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (Sektor industri)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	150,63	na	na	75,0468	128,7019	172	ss
LINGKUNGAN	13.1.2*	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Menurun	15000	0	14017	4331	17518	548	ss
LINGKUNGAN	15.1.1.(a)	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat	49,6	68	75,15	75,53	76,8	76,58	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
LINGKUNGAN	15.3.1.(a)	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5,5 juta ha (skala nasional)	54750,6	54750,7	54750,8	54750,9	54750,1	NA	ss
LINGKUNGAN	15.9.1.(a)	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat	NA	1	1	1	1	1	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.2.(a)	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kesbangpol	Menurun	0	0	0	0	0	0	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.3.(a)	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Satpol PP	Menurun	10	3	3,33	1,83	0,33	0,029	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.2.3.(a)	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3AP2KB	Menurun	82	146,00	80,67	89,67	98,67	78,00	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(b)	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Bappedalitbang	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	55,09 (CC)	60,02	60,54	60,73	61,5	63,2	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(a)	16.6.1.(a) Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Inspektorat	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.7.1.(b)	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	DP3AP2KB	Meningkat	9,09	12,12	12,42	13,94	15,45	16,25	ss
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.9.1.(b)	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan	Meningkat menjadi 85%	83,00	82,7	83,6	93,9	97,47	97,23	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Pencatatan Sipil								
EKONOMI	17.1.1.(a)	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPS	Di atas 12%	1,74	16%	14%	14%	12%	13%	ss
EKONOMI	17.19.2.(b)	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ss
EKONOMI	17.19.2.(c)	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	NA	NA	60352	62160	50268	77820	ss
EKONOMI	17.6.2.(b)	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	NA	NA	5	7	10	15	ss
EKONOMI	17.6.2.(c)	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	NA	NA	4	6	8	10	ss
EKONOMI	17.8.1*	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	34,66	NA	20	30	40	80	ss
SOSIAL	2.1.1.(a)	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 17%	15,2	13,1	8,4	5,9	NA	0	ss
SOSIAL	2.1.2*	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Menurun	84,3%	25,6	21,11	3,33	13,33	3,41	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	2.1.2.(a)	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	Menurun menjadi 8,5 %	NA	8	7,4	6,8	6,2	5,6	ss
SOSIAL	2.2.2.(b)	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 50%	51,7	55,2	63,7	66,6	50	0	ss
SOSIAL	2.2.1*	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	menurun menjadi 19%	N/A	20,6	13,4	15,13	13,6	0	ss
SOSIAL	2.2.2*	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 7%	15,2	13,1	8,4	5,9	1,5	0	ss
SOSIAL	3.1.1*	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 183	7	5	NA	NA	3	0	ss
SOSIAL	3.2.2.(a)	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24	10	4	NA	NA	20	0	ss
SOSIAL	3.2.1*	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	4	7	NA	NA	4	0	ss
SOSIAL	3.2.2*	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	25	11	NA	NA	16	0	ss
SOSIAL	3.2.2.(b)	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	107,5	104,4	NA	NA	118,8	0	ss
SOSIAL	3.3.1.(a)	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi <0,5%	7	5	7	4	0,16	0	ss
SOSIAL	3.3.2.(a)	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 190	84	84,89	90,11	96,53	50,8	0	ss
SOSIAL	3.3.3.(a)	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 300	4	1	1	1	1	0	ss
SOSIAL	3.3.4.(a)	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Meningkat	25	11	100	100	100	0	ss
SOSIAL	3.4.1.(a)	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 5,4%	N/A	61	29,3	29,9	28,54	0	ss
SOSIAL	3.4.2*	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0	0	0	0	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	3.4.2.(a)	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 280	11	11	11	11	11	0	ss
SOSIAL	3.7.1*	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DP3AP2KB	Meningkat menjadi 66%	85,40 %	75,10	76,60	79,20	69,90	79,16	ss
SOSIAL	3.7.1.(a)	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DP3AP2KB	Meningkat menjadi 65%	85,4	75,10	76,60	79,20	69,90	65,90	ss
SOSIAL	3.7.1.(b)	3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DP3AP2KB	Meningkat menjadi 23,5%	14,75	16,05	16,88	18,34	70,32	68,34	ss
SOSIAL	3.a.1*	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	NA	29,77	30,43	32,75	28,54	0	ss
SOSIAL	4.1.1*	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat	SD: 100% SMP: 100%	100	100	100	100	100	ss
SOSIAL	4.2.2.(a)	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 77,2%	99	81,11	78,91	76,02	90	82,66	ss
SOSIAL	4.5.1*	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di: 1) SD/MI/ sederajat; 2) SMP/MTs/ sederajat; 3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di: Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat	SD: 99,81 % SMP: 86,27 %	SD: 99,91 % SMP: 86,26 %	SD: 99,16 % SMP: 88,15 %	SD: 98,61 % SMP: 88,55 %	SD: 99,44% SMP: 89,04%	SD: 99,51 % SMP: 90,01 %	ss
SOSIAL	4.6.1.(a)	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 96,1%	99,46	99,45	99,07	97,71	99,36	99,44	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	4.6.1.(b)	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat	99,55	100	99,82	100	100	100	ss
SOSIAL	4.c.1*	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat	NA	NA	Paud: 8.8 SD: 40.9 SMP: 27.7 SMA: 38.4 SMK: 43.7 SLB: 16.7	Paud: 4.9 SD: 41.6 SMP: 24.7 SMA: 32.2 SMK: 35.9 SLB: 0	Paud: 6.6 SD: 40.5 SMP: 24.9 SMA: 33.9 SMK: 64.2 SLB: 6	Paud: 6.8 SD: 41.8 SMP: 25.01 SMA: N/A SMK: N/A SLB: N/A	ss
SOSIAL	5.2.2.(a)	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3AP2KB	Meningkat menjadi 70%	95%	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	ss
SOSIAL	5.3.1.(a)	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	DP3AP2KB	Meningkat menjadi 21 tahun	NA	NA	NA	NA	20,22	20,31	ss
SOSIAL	5.5.1*	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3AP2KB	Meningkat	5%	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	ss
SOSIAL	5.b.1*	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	NA	NA	40	60	80	85	ss
LINGKUNGAN	6.2.1.(d)	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	Meningkat	NA	21	26	31	32	42	ss

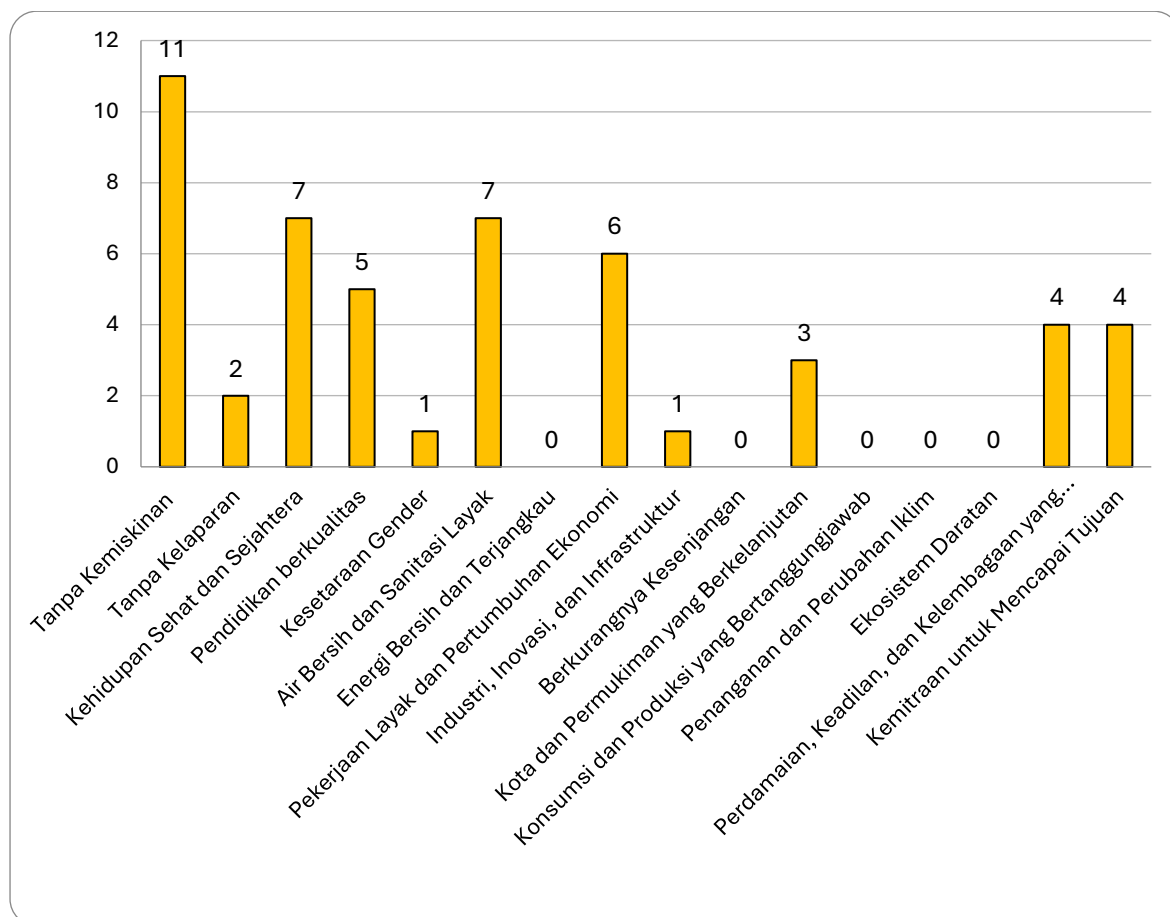
Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Permukiman dan Pertanahan								
EKONOMI	8.1.1.(a)	8.1.1.(a) PDB per kapita.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	62,17	68,93	59,67	65,32	70,34	69,39	ss
EKONOMI	8.3.1*	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkat	48,16	48,57	47,29	47,68	53,78	0	ss
EKONOMI	8.5.1*	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkat	15735	17308	NA	16302	16463	0	ss
EKONOMI	8.5.2*	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menurun 3,6 - 4,3 %	2,42	2,34	2,83	2,3	3,41	3,32	ss
EKONOMI	8.9.1.(b)	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Meningkat	29575	58432	4788	25359	50122	0	ss
EKONOMI	9.2.1.(b)	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	275	NA	NA	NA	NA	NA	1	ss
EKONOMI	9.2.1.(c)	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	24	NA	NA	NA	NA	NA	1	ss
EKONOMI	9.3.1*	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Meningkat	1,58	2,38	2,35	2,58	2,82	0	ss

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
EKONOMI	9.3.2*	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Meningkat	5,56	6,08	6,51	6,81	7,11	0	ss
EKONOMI	9.c.1*	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile <i>broadband</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	NA	NA	7	8	10	15	ss
EKONOMI	9.c.1.(a)	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	78,94	NA	20	30	40	60	ss
EKONOMI	9.c.1.(b)	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	34,66	NA	20	30	40	60	ss

Sumber: Analisis, 2024

4.2. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Tercapai Target Nasional

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dilambangkan dengan kode SB, merupakan indikator yang relevan dengan wilayah yang pencapaiannya belum sama dengan atau kurang dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Kabupaten Lamandau, pada tahun 2023 terdapat 51 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target.



Gambar 4-4 Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB

Sumber: Hasil Analisis 2024

Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam tabel berikut

Tabel 4-4 Tujuan Dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	1.3.1.(d)	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Menurun menjadi 2,8 juta	1,86% (374,325)	441,81	695,471	1719,149	871,63	0	SB
SOSIAL	1.4.1.(b)	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	2024 : Meningkat menjadi 90%	NA	60,72	49,26	53,63	71,66	0	SB
SOSIAL	1.4.1.(d)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 100%	100%	72,5	74,5	76,76	78,34	81,28	SB
SOSIAL	1.4.1.(e)	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 100%	45,18%	70,08	73,07	79,22	82,7	84,48	SB
SOSIAL	1.4.1.(g)	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 94,78%	95,2	95,4	97,92	95,52	93,11	93,73	SB
SOSIAL	1.4.1.(h)	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 82,2%	90,64	76,98	72,02	74,1	75,07	75,95	SB
SOSIAL	1.4.1.(j)	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat menjadi 77,4%.	92,37%	82,7	83,6	93,9	97,47	97,23	SB
SOSIAL	1.5.1.(a)	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	BPBD	Meningkat menjadi 39 daerah	0	NA	NA	NA	7	3	SB

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	1.5.2.(a)	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun menjadi 0,10%	NA	23.396.505.000	43.826.750.000	NA	311.471.095.750	0	SB
SOSIAL	1.a.1*	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial	Meningkat	Rp1.992.039.511	1,5	0,61	0,25	1,16	0,74	SB
SOSIAL	1.a.2*	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkat	NA	14	15	11	12	12	SB
SOSIAL	2.1.1*	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	Menurun menjadi 5%	NA	5,31	5,52	5,74	6,98	7,13	SB
SOSIAL	2.2.2.(c)	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Meningkat menjadi: skor PPH 95,2; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun 62 kg/kapita/tahun	92,9	91,3	92,1	91,1	90,9	55,34	SB
SOSIAL	3.1.2*	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	97,06	98,48	97,04	96,4	N/A	0	SB
SOSIAL	3.1.2.(a)	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 85 %	97,06	98,48	97,04	96,4	99,99	0	SB

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	3.3.5*	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Menurun	12	3	4	6	6	0	SB
SOSIAL	3.3.5.(b)	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 35	38	56	64	72	32	0	SB
SOSIAL	3.4.1.(b)	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24,3%	N/A	N/A	N/A	4,3	34,3	0	SB
SOSIAL	3.4.1.(c)	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0	0	21,6	0	SB
SOSIAL	3.c.1*	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat	421	432	442	470	465	0	SB
SOSIAL	4.1.1.(a)	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 84,2%	NA	33,6	31,8	31,53	32,14	33,21	SB
SOSIAL	4.1.1.(b)	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 81%	NA	26,9	26,2	30,95	30,95	32,15	SB
SOSIAL	4.1.1.(d)	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 114,09%	109,8	109,46	111,28	105,4	101,93	102	SB
SOSIAL	4.1.1.(e)	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106,94%	95,5	101,08	103,82	95,56	95,17	95,16	SB
SOSIAL	4.1.1.(g)	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,94	8,38	8,42	8,43	8,43	8,67	SB
SOSIAL	5.3.1.(b)	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DP3AP2KB	Menurun menjadi 38 tahun	NA	NA	NA	37,20	52,60	32,30	SB
LINGKUNGAN	6.1.1.(a)	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses	Dinas Pekerjaan Umum dan	Meningkat menjadi 100%	NA	72,5	74,5	76,76	78,34	81,28	SB

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		terhadap layanan sumber air minum layak.	Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
LINGKUNGAN	6.1.1.(b)	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	NA	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	SB
LINGKUNGAN	6.1.1.(c)	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 100%	NA	10,11	10,11	11,31	12	14,27	SB
LINGKUNGAN	6.2.1.(b)	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 100%	45,18%	70,08	73,07	79,22	82,7	84,48	SB
LINGKUNGAN	6.2.1.(f)	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat	NA	0,24	0,89	0,89	0,89	0,89	SB
LINGKUNGAN	6.3.1.(b)	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Meningkat	81,41	-	-	-	-	0	SB

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
LINGKUNGAN	6.3.2.(b)	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat (82)	NA	64.5	51.6	64	70	66.84	SB
EKONOMI	8.1.1*	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkat	6,85	10,88%	-13,43%	9,47%	7,69%	-1,35%	SB
EKONOMI	8.2.1*	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkat	13,69	3,55	-3,21	1,46	5,79	3,72	SB
EKONOMI	8.3.1.(a)	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkat mencapai 51%	44,19	49,38	43,73	41,84	52,27	0	SB
EKONOMI	8.3.1.(b)	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	Meningkat	51,26	50,72	52,71	52,32	46,22	0	SB
EKONOMI	8.9.1*	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	Meningkat menjadi 5,5%	6,77	8	-5,66	2,08	6,92	0	SB
EKONOMI	8.9.1.(a)	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Meningkat menjadi 26 juta (skala nasional)	226	350	0	0	5	0	SB
EKONOMI	9.5.1*	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappedalitbang	Meningkat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	SB
LINGKUNGAN	11.1.1.(a)	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3,7 juta rumah tangga	NA	77,95	77,95	77,95	77,95	85,95	SB
LINGKUNGAN	11.5.1.(a)	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD	Menurun mencapai 30%	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	83,87	SB

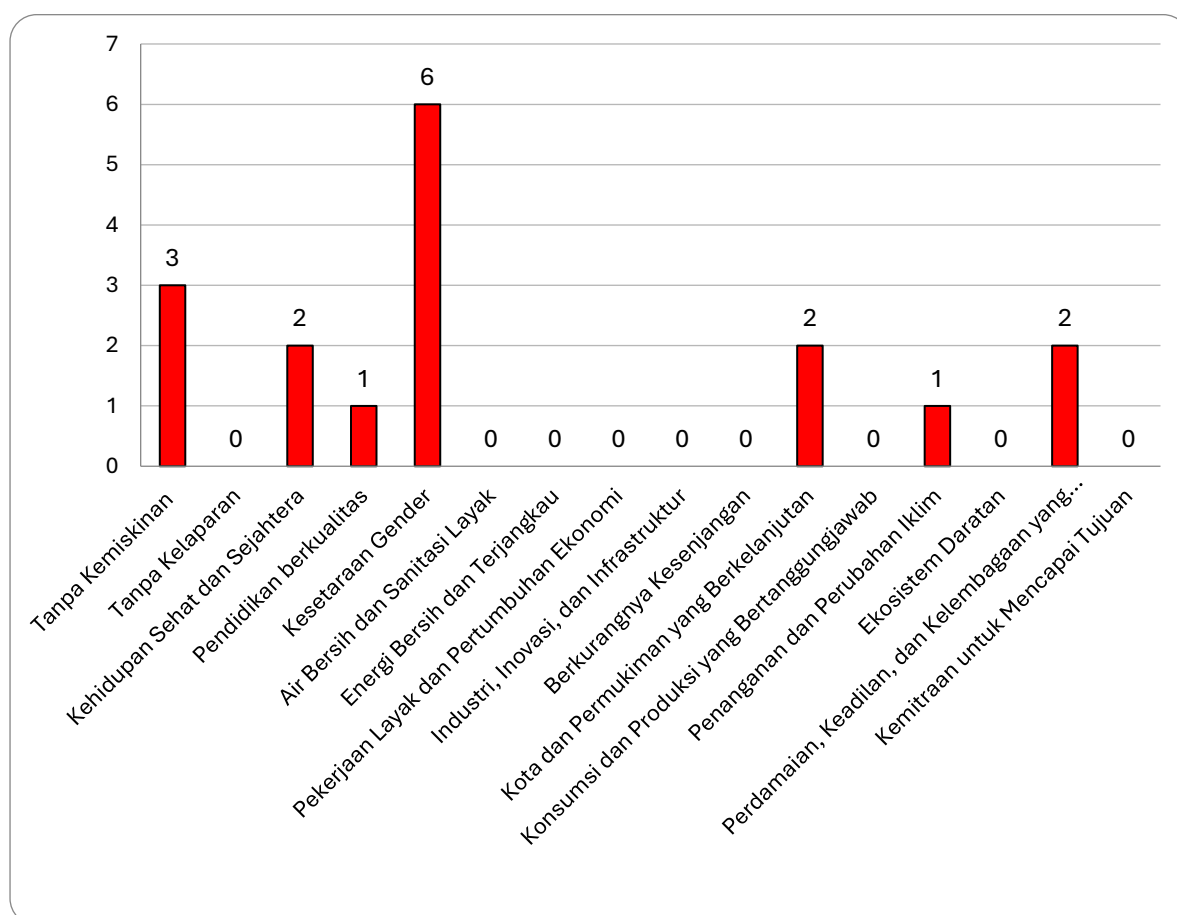
Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
LINGKUNGAN	11.5.2.(a)	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Menurun	NA	23396505000	43.826.750.000	NA	311.471.095.750,00	0	SB
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.1.(a)	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Satpol PP	Menurun	1	0	0	0	0	1	SB
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1*	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkat	27,85	90,89	88,55	87,24	92,43	92,21	SB
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.7.1.(a)	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DP3AP2KB	Meningkat	5	20,00	17,00	20,00	23,00	20,00	SB
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.9.1*	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat	81,16	82,1	84,49	99,79	97,84	96,56	SB
EKONOMI	17.1.1*	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	Meningkat	11,44	1	1	1	1	1	SB
EKONOMI	17.1.2*	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkat	7,22	2,53%	2,11	5,60	2,60	2,28	SB
EKONOMI	17.18.1.(a)	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	BPS	Meningkat	NA	100	96	96	100	0	SB
EKONOMI	17.19.2.(d)	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap	BPS	Meningkat	NA	NA	100	100	100	98,15	SB

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		akses data Badan Pusat Statistik (BPS)									

Sumber: Analisis, 2024

4.3. Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai Target Nasional

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dilambangkan dengan kode BB, merupakan indikator yang relevan dengan wilayah yang belum ada pencapaiannya dikarenakan belum ada pelaksanaan program yang mendukung indikator tersebut sehingga capaian belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Kabupaten Lamandau, pada tahun 2023 terdapat 17 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam tabel berikut



Gambar 4-5 Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 4-5 Tujuan Dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

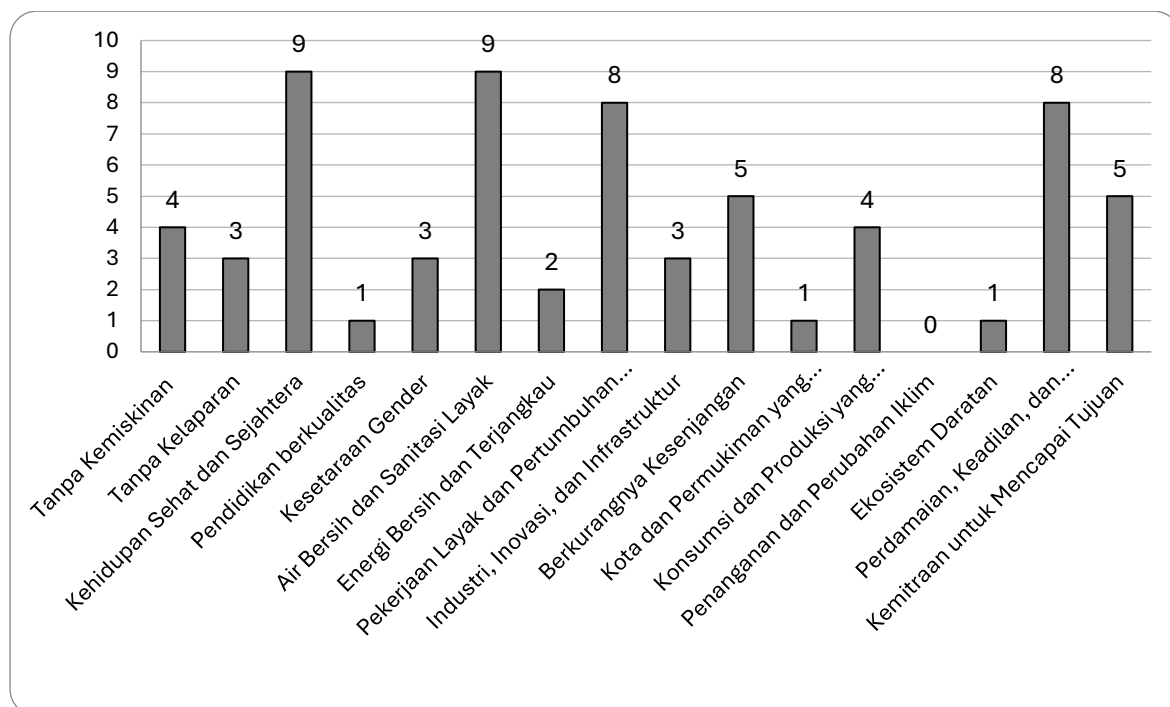
Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	1.5.1.(b)	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	BPBD	Meningkat menjadi 151 ribu	53	26	NA	5	NA	NA	BB
SOSIAL	1.5.3*	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	NA	NA	NA	NA	NA	Tidak ada	BB
SOSIAL	1.4.1.(c)	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 65%	85,40 %	75%	NA	NA	NA	0	BB
SOSIAL	3.5.2*	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan	Menurun	NA	9,20%	NA	NA	NA	0	BB
SOSIAL	3.8.2*	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	Dinas Kesehatan	Meningkat	20.537	18	NA	NA	NA	0	BB
SOSIAL	4.a.1*	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkat	NA	a. 54.94% b. 46.91% c. 6.17% d. 0% e. 22.22% f. 100% g. 66.67%	NA	NA	NA	NA	BB
SOSIAL	5.6.1.(a)	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 7,4%	8,8% %	12,10%	NA	NA	NA	0	BB
SOSIAL	5.6.1.(b)	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 85%	83%	85%	NA	NA	NA	0	BB
SOSIAL	5.1.1*	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	bertambah sebanyak 16	3	3,00	3,00	3,00	3,00	NA	BB
SOSIAL	5.2.1*	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Menurun	4	3,00	NA	NA	NA	NA	BB
SOSIAL	5.2.1.(a)	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3AP2KB	Menurun menjadi	2,5	1,81	NA	NA	NA	NA	BB

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				kurang dari 20,48%							
SOSIAL	5.2.2*	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Menurun	NA	33,30	26,70	23,30	11,40	NA	BB
LINGKUNGAN	11.5.1.(c)	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD	ada	NA	NA	NA	NA	NA	Tidak ada	BB
LINGKUNGAN	11.b.2*	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	ada	NA	NA	NA	1	NA	Tidak ada	BB
LINGKUNGAN	13.1.1*	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	ada	NA	NA	NA	1	0	Tidak ada	BB
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.2.1.(a)	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3AP2KB	Menurun	4	38,00	32,29	39,38	46,48	NA	BB
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.2.1.(b)	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DP3AP2KB	Menurun	1,54	1,73	1,51	1,40	1,29	NA	BB

Sumber: Analisis, 2024

4.4. Indikator TPB Yang Tidak/Belum Ada Data

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak ada data dilambangkan dengan kode TAD, merupakan indikator yang relevan dengan wilayah yang tidak ada data pencapaiannya. Salah satu penyebabnya adalah belum pernah dilaksanakannya program yang berkaitan dengan indikator sehingga tidak sesuai dengan target Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Kabupaten Lamandau, pada tahun 2023 terdapat 66 indikator yang tidak ada datanya.



Gambar 4-6 Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Tahun 2023 Berdasarkan TPB

Sumber: Hasil Analisis 2024

Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4-6 Tujuan Dan Target TPB yang Tidak Ada Data

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	1.3.1.(a)	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	2019:minimal 98%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	0	TAD
SOSIAL	1.4.1.(k)	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 100%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	1.5.1.(c)	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	BPBD	Meningkat menjadi 81,5 ribu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
SOSIAL	1.5.1.(d)	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD	Meningkat menjadi 450	NA	NA	NA	NA	0	NA	TAD
SOSIAL	2.2.1.(a)	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	TAD
SOSIAL	2.2.2.(a)	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	TAD
SOSIAL	2.3.1*	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian dan Perikanan	meningkat Rp 45,44 juta/tenaga kerja	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.3.3*	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Menurun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	TAD
SOSIAL	3.3.5.(a)	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 34 provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	TAD
SOSIAL	3.5.1.(e)	3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi angka 0,02%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.7.2.(a)	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 2,28	2,4	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.8.1.(a)	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 9,91%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.8.2.(a)	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi minimal 95%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.9.3.(a)	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.b.1.(a)	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	3.7.2*	3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	DP3AP2KB	Menurun menjadi 38	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	CAPAIAN							STATUS 2023
				Target Perpres 59 Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SOSIAL	4.4.1*	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
SOSIAL	5.3.1*	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	5.5.2*	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AP2KB	Meningkat	86,16 %	NA	NA	NA	NA	0	TAD
SOSIAL	5.6.1*	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15 - 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	DP3AP2KB	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.2.1.(a)	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.2.1.(c)	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.2.1.(e)	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.3.1.(a)	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.4.1.(b)	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.5.1.(a)	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.5.1.(c)	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8 Wilayah Sungai	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
LINGKUNGAN	6.5.1.(f)	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10 Wilayah Sungai (skala nasional)	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	6.5.1.(g)	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	7.2.1*	7.2.1* Bauran energi terbarukan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10-16%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	7.3.1*	7.3.1* Intensitas energi primer	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	8.10.1*	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bappedalitbang	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	8.10.1.(a)	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menurun (mendekat)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
EKONOMI	8.10.1.(b)	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total BPS kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	8.3.1.(c)	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	25%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	8.5.2.(a)	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
EKONOMI	8.6.1*	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menurun	5	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
EKONOMI	8.9.1.(c)	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	8.9.2*	8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata	Meningkat	NA	NA	NA	NA	16	0	TAD
EKONOMI	9.2.1*	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
EKONOMI	9.2.1.(a)	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	9.2.2*	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Meningkat 15,7%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	10.1.1.(b)	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terentaskan kabupaten (skala nasional) 80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
EKONOMI	10.1.1.(f)	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Menurun menjadi 14%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
EKONOMI	10.2.1*	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Dinas Sosial	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	10.3.1.(a)	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil	Sekretariat Daerah	Meningkat menjadi 87	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	10.3.1.(d)	10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekretariat Daerah	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	11.3.2.(b)	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	12.5.1.(a)	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20 ton per hari (skala nasional)	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	12.6.1.(a)	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	12.7.1.(a)	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	12.8.1.(a)	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
LINGKUNGAN	15.6.1*	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.4*	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan	Satpol PP	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.10.2.(c)	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.5.1.(a)	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Sekretariat Daerah	Meningkat menjadi 4,0	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(c)	16.6.1.(c) Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan	Sekretariat Daerah	Menjadi menjadi 80%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(d)	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Sekretariat Daerah	Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.2.(a)	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Sekretariat Daerah	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.9.1.(a)	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat menjadi 77,4%	85,78 %	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
HUKUM DAN TATA KELOLA	16.b.1.(a)	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Sekretariat Daerah	Tidak Ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	17.17.1.(a)	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Bappedalitbang	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	17.17.1.(b)	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Bappedalitbang	ada	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD

Pilar	No Indikator	INDIKATOR	OPD	Target Perpres 59 Tahun 2017	CAPAIAN						STATUS 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
EKONOMI	17.18.1.(d)	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Bappedalitbang	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	0	TAD
EKONOMI	17.18.1.(b)	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	BPS	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD
EKONOMI	17.18.1.(c)	17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TAD

Sumber: Analisis, 2024

4.5. Isu Strategis

Isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau diperoleh melalui telaah isu pada KLHS RPJPN Tahun 2025 - 2045, Rencana Strategis dinas, LAKIP dinas, Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018, D3TLH Kabupaten Lamandau Tahun 2019, hasil wawancara, konsultasi publik 1, serta capaian TPB (indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta tidak/belum ada data). Berikut merupakan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.

Tabel 4-7 Daftar Isu Panjang

No	Isu Panjang	Sumber	Pengelompokan Isu	Pilar
1	Bencana Hidrometeorologi	KLHS RPJPN Tahun 2025 - 2045	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
2	Terjadinya banjir tiap tahun karena hilangnya kawasan penyangga di hulu sungai	Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
3	pada kawasan bahaya bencana banjir tinggi seluas 114.193,25 Ha	InaRisk Tahun 2023 (Olah Data, 2023)	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
4	Terdapat kawasan bahaya kebakaran hutandan lahan tinggi seluas 60.025,05 Ha	InaRisk Tahun 2023 (Olah Data, 2023)	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
5	Kurang tingginya lingkungan bebas bencana	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
6	Besarnya risiko bencana banjir dan kekeringan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
7	Pentingnya kegawatdaruratan dan manajemen bencana	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2025	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
8	Peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2025	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
9	Kerawanan bencana	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
10	TPA over capacity	KLHS RPJPN Tahun 2025 - 2045	Degradasi lingkungan	Lingkungan
11	Belum optimalnya penanganan sampah	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
12	Kurangnya pengelolaan persampahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
13	Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
14	Kurang optimalnya kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018- 2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan

No	Isu Panjang	Sumber	Pengelompokan Isu	Pilar
15	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar permukiman penduduk	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
16	Adanya jalan yang memiliki kondisi rusak ringan sebesar 13,58% dan rusak berat sebesar 8,26%	Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
17	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018- 2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
18	Belum meratanya jaringan listrik dan telekomunikasi di seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Lamandau	Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
19	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan	LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
20	Masih rendahnya lahan pertanian yang dialiri oleh irigasi	Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
21	Sebagian jalan dalam kondisi kurang baik dan sebagian jalan yang sudah dibangun menjadi rusak	Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
22	Banyak bangunan infrastruktur sanitasi yang tidak dimanfaatkan	Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023	Degradasi lingkungan	Lingkungan
23	Belum memadainya prasarana sarana umum perumahan dan permukiman	Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
24	Jaringan internet belum terkoneksi ke kecamatan	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
25	Jarak tempuh antar desa dan antar kecamatan yang masih sulit dijangkau	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
26	Sarana dan prasarana bidang perkebunan yang masih terbatas	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2025	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
27	Terbatasnya infrastruktur yang mendukung sektor perikanan	Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
28	Teknik konservasi tanah dan air belum optimal	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
29	Penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
30	Penurunan kualitas air sungai	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
31	Penurunan kualitas air, udara, dan tanah akibat pembuangan limbah ke media lingkungan	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2025	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
32	Kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup	KLHS RPJPN Tahun 2025 - 2045	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan

No	Isu Panjang	Sumber	Pengelompokan Isu	Pilar
33	Belum adanya data daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai peruntukan	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2025	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
34	Belum terdapat manajemen sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
35	Terdapat permukiman lama yang masih menempati bantaran sungai	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
36	Sulitnya akses air pada kawasan transmigrasi SKP A SP 1 Kahingai, Belantikan Raya	Hasil Wawancara	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
37	Maraknya kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara berlebihan dan kurang tingginya lingkungan bebas bencana	Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau	Degradasi lingkungan	Lingkungan
38	Adanya alih fungsi hutan hujan tropis menjadi perkebunan sawit	Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
39	Pencemaran lingkungan akibat industri	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
40	Kerusakan hutan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
41	Penebangan hutan secara berlebihan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
42	Degradasi lahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
43	Menurunnya luas tanam, luas panen, dan relatif masih rendahnya produktivitas (tanaman pangan)	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
44	Produksi hortikultura masih rendah karena penerapan teknologi budidaya masih rendah dan pengendalian organisme pengganggu tanaman belum optimal	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
45	Kurangnya pencadangan lahan sebagai sumber pangan lokal masyarakat akibat alih fungsi lahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
46	Terdapat banyak keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Kabupaten Lamandau namun tidak semua spesies tersebut dilindungi sehingga terdapat kemungkinan kepunahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
47	Menurunnya luas tanam, luas panen, dan relatif masih rendahnya produktivitas tanaman pangan	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
48	Menurunnya luas tanam, luas panen, dan produktivitas perkebunan kecuali sawit	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
49	Kegiatan penganeekaragaman komoditi tanaman perkebunan masih rendah	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
50	Tingginya angka kematian ternak	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Lingkungan

No	Isu Panjang	Sumber	Pengelompokan Isu	Pilar
51	Pengelolaan perikanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Lingkungan
52	Masih rendahnya produktivitas bidang perikanan	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Lingkungan
53	Alih komoditi dari lahan tanaman pangan ke perkebunan	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
54	Semakin meluasnya degradasi lahan menjadi lahan perkebunan serta akibat penebangan liar di kawasan hutan lindung yang berdampak menurunnya ketersediaan sumber- sumber air	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
55	Luasnya lahan kritis yang ada di Kabupaten Lamandau	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Degradasi lingkungan	Lingkungan
56	Perubahan iklim yang mengancam kenyamanan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2025	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
57	Potensi kerusakan lingkungan yang semakin besar dengan adanya perkembangan industri yang semakin pesat	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2025	Degradasi lingkungan	Lingkungan
58	Menurunnya potensi sumber daya alam	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018	Degradasi lingkungan	Lingkungan
59	Perubahan tata guna lahan	KLHS RPJPN Tahun 2025 – 2045	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
60	Alih fungsi lahan	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
61	Adanya kerawanan pangan di sejumlah daerah	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023	Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat	Lingkungan
62	Penurunan kualitas dan kesuburan lahan	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
63	Capaian jumlah produksi padi, jagung, dan kedelai cenderung menurun periode lima tahun terakhir	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
64	Dampak perubahan iklim global yang mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
65	Pemanasan global	KLHS RPJPN Tahun 2025 – 2045	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
66	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
67	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
68	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
69	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Lingkungan
70	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Capaian TPB (Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan

No	Isu Panjang	Sumber	Pengelompokan Isu	Pilar
71	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
72	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
73	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
74	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
75	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
76	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Capaian TPB (Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
77	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
78	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Terjadinya alih fungsi lahan	Lingkungan
79	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
80	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Penurunan Kualitas Air	Lingkungan
81	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Lingkungan
82	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
83	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
84				
85	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
86	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
87	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Lingkungan
88	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan
89	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Degradasi lingkungan	Lingkungan
90	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Degradasi lingkungan	Lingkungan
91	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Degradasi lingkungan	Lingkungan
92	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
93	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Capaian TPB (Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target)	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan

No	Isu Panjang	Sumber	Pengelompokan Isu	Pilar
94	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Capaian TPB (Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target)	Degradasi lingkungan	Lingkungan
95	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	Capaian TPB (Tidak/Belum Ada Data)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan
96	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Capaian TPB (Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Penentuan isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 ditetapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9 Ayat (1). Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

- karakteristik wilayah;
- tingkat pentingnya potensi dampak;
- keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
- hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.

Penapisan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 9 ayat (1).

Tabel 4-8 Persandingan Isu dan Muatan Pasal 9 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2016

No	Isu PB	Karakteristik Wilayah	Luas Wilayah Terdampak	jumlah penduduk terdampak	Frekuensi (intensitas)	Aspek Terdampak (komponen)	Tingkat Penting tidak Penting	Keterkaitan Dengan Isu Lain	Keterkaitan Dengan Isu KLHS RPJPN	Isu PB Strategis
1	Penurunan Kuantitas Air	Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air terlampaui yakni Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Menthobi Raya, dan Kecamatan Sematu Jaya. Sungai Lamandau mempunyai fungsi pokok untuk kegiatan perikanan, peternakan, air baku, mengalir tanaman, keperluan rumah tangga, transportasi sungai dan sumber air baku PDAM.	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	Setiap tahun terjadi penurunan kualitas tahun	Berdampak pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi	Penting, memiliki sifat tidak berbalik, berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan alih fungsi lahan, bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim	Terkait	Strategis
		3	3	3	3	3	3	3	3	24
2	Terjadinya alih fungsi lahan	bagian hulu Kabupaten Lamandau atau di daerah utara seperti di Kecamatan Batangkawa, Bulik, dan Delang terjadi alih fungsi akibat aktivitas penebangan pohon, perkebunan dan pertambangan	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	Tinggi seiring perkembangan wilayah	Berdampak pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi	Penting, bersifat berbalik namun membutuhkan waktu yang lama, berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan penurunan kuantitas tanah, bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim	Terkait	Strategis

N o	Isu PB	Karakteristik Wilayah	Luas Wilayah Terdampak	jumlah penduduk terdampak	Frekuensi (intensitas)	Aspek Terdampak (komponen)	Tingkat Penting tidak Penting	Keterkaitan Dengan Isu Lain	Keterkaitan Dengan Isu KLHS RPJPN	Isu PB Strategis
		3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	Degradasi lingkungan	Ditinjau dari distribusi luasannya, jasa lingkungan pengolahan dan pengurai limbah Kabupaten Lamandau didominasi pada kelas sangat tinggi. Meskipun begitu terlihat beberapa spot memiliki kelas jasa lingkungan sangat rendah terutama pada kawasan permukiman	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	Tinggi seiring perkembangan wilayah	Berdampak pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi	Penting, memiliki sifat tidak berbalik, berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan penurunan kualitas air, dan infrastruktur wilayah	Terkait	Strategis
		3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	Masih terdapat kemiskinan	Di Kabupaten Lamandau terdapat penduduk miskin sebanyak 3,12% dari jumlah penduduk dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berurutan sebesar 0,33 dan 0,07.	Seluruh wilayah	masyarakat miskin di Lamandau	Sedang	Berdampak pada aspek ekonomi dan sosial	Penting, bersifat berbalik, berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM, serta infrastruktur wilayah	Tidak Terkait	Cukup Strategis
		3	3	2	2	3	2	3	1	19
5	Rendahnya kualitas pelayanan publik	terdapat sebanyak 66 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak ada data (TAD) atau sebesar 31,28% dari total indikator. Dari angka ini diketahui bahwa jumlah indikator TAD berada di	Seluruh wilayah	Seluruh Penduduk	Sedang	Berdampak pada aspek hukum dan tata kelola	Penting, bersifat tidak berbalik, tidak berdampak kumulatif dan jangka pendek	Memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Tidak Terkait	Strategis

N o	Isu PB	Karakteristik Wilayah	Luas Wilayah Terdampak	jumlah penduduk terdampak	Frekuensi (intensitas)	Aspek Terdampak (komponen)	Tingkat Penting tidak Penting	Keterkaitan Dengan Isu Lain	Keterkaitan Dengan Isu KLHS RPJPN	Isu PB Strategis
		posisi terbesar kedua indikator dominan di Kabupaten Lamandau. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Kabupaten Lamandau masih belum optimal dalam memenuhi keterlaksanaan maupun pendataan yang ada.								
		3	3	3	2	2	2	3	1	19
6	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pada tahun 2023, APM Kabupaten Lamandau mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/ MI Sederajat menjadi 98,28% dari angka 99,44% tahun 2022, dan jenjang SMP/ MTs Sederajat menjadi 82,47% dari angka 89,04%. Pada tahun 2022 persentase guru bersertifikat pendidik pada jenjang pendidikan dasar masih kurang dari 50%.	Seluruh wilayah	sebagian penduduk	Sedang	Berdampak pada aspek hukum dan tata kelola, sosial, lingkungan dan ekonomi	Penting, bersifat tidak berbalik, tidak berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Tidak Terkait	Strategis
		3	3	2	2	3	2	3	1	19
7	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Potensi bencana dan perubahan iklim terlihat dari distribusi persentase rawan bencana, di mana 32% dari luas wilayah kabupaten Rawan bencana	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	Tinggi	Berdampak pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi	Penting, memiliki sifat tidak berbalik, berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan penurunan kualitas dan kuantitas	Terkait	Strategis

N o	Isu PB	Karakteristik Wilayah	Luas Wilayah Terdampak	jumlah penduduk terdampak	Frekuensi (intensitas)	Aspek Terdampak (komponen)	Tingkat Penting tidak Penting	Keterkaitan Dengan Isu Lain	Keterkaitan Dengan Isu KLHS RPJPN	Isu PB Strategis
		tanah longsor menengah, 15% dari total luasan kabupaten memiliki Bahaya bencana banjir tinggi, dan 8% Bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi						lingkungan, serta alih fungsi lahan		
		3	3	3	3	3	3	3	3	24
8	Rendahnya tingkat Kesehatan masyarakat	Pembangunan SDM di sektor kesehatan yang belum optimal akan menyebabkan masyarakat yang kurang berdaya saing	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	rendah	Berdampak pada aspek sosial dan Hutakel	Penting, bersifat tidak berbalik, tidak berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Tidak Terkait	Cukup Strategis
		2	3	3	2	2	2	2	1	17
9	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Di Kabupaten Lamandau masih terdapat wilayah yang belum memiliki layanan infrastruktur yang prima, berdasarkan data indeks kepuasan layanan infrastruktur, diketahui bahwa pada tahun 2023 baru mencapai angka 58,38% dari target kinerja 70% pada RKPD 2023 dan tingkat capaian s.d 2023 RPJMD sebesar 83,40%.	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	Sedang	Berdampak pada aspek sosial dan ekonomi	Penting, bersifat tidak berbalik, tidak berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki kaitan dengan penurunan kualitas dan kuantitas air, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM, serta pengelolaan sampah	Tidak Terkait	Cukup Strategis
		2	3	3	2	2	2	3	1	18

N o	Isu PB	Karakteristik Wilayah	Luas Wilayah Terdampak	jumlah penduduk terdampak	Frekuensi (intensitas)	Aspek Terdampak (komponen)	Tingkat Penting tidak Penting	Keterkaitan Dengan Isu Lain	Keterkaitan Dengan Isu KLHS RPJPN	Isu PB Strategis
11	Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam penunjang pertumbuhan ekonomi	Pemanfaatan SDA yang tidak optimal memperlambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi merusak lingkungan	Seluruh wilayah	Seluruh penduduk terkena dampak	Rendah	Berdampak pada aspek sosial, ekonomi	Penting, bersifat tidak berbalik, tidak berdampak kumulatif dan jangka panjang	Memiliki kaitan dengan kualitas SDM dan Kaitan dengan penurunan kualitas air	Tidak Terkait	Strategis
		2	3	3	2	3	2	3	1	19

Sumber: Analisis, 2024

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) di mana identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dapat dilihat dari 10 muatan yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan (Kapasitas D3TLH)
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup (Dampak LH)
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem (Kinerja JE)
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana)
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Status SDA)
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (Keanekaragaman hayati)
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Adaptasi PI)
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (Kemiskinan)
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (Kesehatan)
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat (Hukum tradisional)

Unsur – unsur tersebut dinilai terhadap isu pembangunan berkelanjutan paling strategis untuk memperoleh isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dinilai isu prioritas jika pada penilaian isu pembangunan paling strategis yaitu “strategis” atau “cukup strategis” dan memiliki jumlah nilai sedang dan tinggi pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan prioritas, sedangkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dinilai bukan isu prioritas jika pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yaitu “cukup strategis” dan memiliki jumlah nilai rendah pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan prioritas.

Tabel 4-9 Persandingan Isu dan Muatan Pasal 9 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	D3TLH	Dampak Dan Risiko LH	Kinerja Layanan Ekosistem	Bencana Alam	Ketersediaan Kualitas SDA	Keanekaragaman Hayati	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Dan Keselamatan	Masyarakat dan Hukum Adat	Penilaian
1	Penurunan kualitas air	Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air terlampaui yakni Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Menthobi Raya, dan Kecamatan Sematu Jaya	IKA Kabupaten Lamandau tahun 2023 menurun dari 70 pada tahun 2022 menjadi 66,84. Penurunan ini menyebabkan kualitas air Kabupaten Lamandau termasuk dalam kategori sedang.	sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan hidup penyedia air bersih rendah, yaitu seluas 473.930,15 Ha.	Lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Lamandau memiliki tingkat bahaya kekeringan sedang . Penurunan kuantitas air akan menambah risiko bencana kekeringan	Penurunan kualitas dan kuantitas air berpengaruh terhadap kondisi SDA yang mana semakin rendah kualitas air maka tingkat keamanan SDA untuk dikonsumsi semakin rendah dan semakin menurunnya kuantitas air maka jumlah produksi juga semakin menurun	Penurunan kualitas dan kuantitas air berpengaruh terhadap kondisi kehati karena air sebagai sumber penghidupan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit dan atau kematian pada berbagai spesies flora dan fauna	Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas dan kuantitas air karena berkaitan dengan siklus air.	Penurunan kualitas dan kuantitas air dapat memperparah kondisi masyarakat miskin karena apabila terjadi kelangkaan air bersih maka masyarakat miskin perlu mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan air	Air dengan kualitas bersih dan kuantitas yang cukup diperlukan untuk berbagai kegiatan sehari – hari masyarakat seperti kebutuhan sanitasi, masak, minum, mandi, dsb. Kualitas air yang buruk dengan kuantitas yang terbatas dapat menurunkan tingkat kesehatan dan keselamatan masyarakat.	Penurunan kualitas air dapat menyebabkan hilangnya sumber air yang bersih dan aman untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat	Tinggi
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
2	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Kejadian bencana berkaitan dengan keparahan luasan dampak bencana terhadap ketersediaan dan kebutuhan air dan pangan.	Bencana salah satunya dapat dipicu oleh kerusakan lingkungan hidup.	sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan tata aliran air dan banjir tingkat sedang dengan luasan sebesar 423.841,56 Ha	Sebesar 14,87% wilayah Kabupaten Lamandau merupakan kawasan bahaya banjir tinggi dan 5,50% merupakan kawasan bahaya banjir menengah	Potensi bencana semakin meningkat karena berkurangnya kinerja fungsi alam yang ditandai sebagai akibat dari ketidakseimbangan pengelolaan SD	Bencana dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Bencana dapat mengakibatkan berkurangnya populasi dan keragaman spesies, spesies endemik terancam punah, hilangnya habitat satwa, perubahan interaksi antar spesies, serta kemungkinan kepunahan spesies.	Perubahan iklim mempengaruhi tingkat risiko bencana.	Kejadian bencana dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Semakin tingginya kerawanan bencana maka dapat meningkatkan jumlah masyarakat miskin sebagai akibat dari terjadinya bencana	Bencana dapat menyebabkan kerusakan fasilitas, lingkungan, dan akses terhadap fasum. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama masyarakat yang terdampak bencana secara langsung	: Masyarakat adat Lamandau memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan mereka. Perubahan iklim dapat mengganggu praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis adat, yang penting untuk menjaga kelestarian lingkungan	Tinggi
		5	5	4	3	3	3	5	3	3	5	39
3	Terjadinya alih fungsi lahan	Terjadi penurunan luas lahan sawah karena adanya alih fungsi lahan sawah irigasi yang dapat berpengaruh terhadap produksi pangan daerah. Kondisi ini akan menurunkan D3TLH pangan	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang meningkatkan kerusakan lahan.	Kondisi jasa penyedia pangan akan semakin menurun kelasnya dengan adanya alih fungsi lahan pertanian dan hijau menjadi terbangun	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang meningkatkan kerusakan lahan. Kondisi ini akan meningkatkan risiko bencana misal bencana banjir dan longsor	Alih fungsi lahan dapat terjadi karena peningkatan kebutuhan terhadap bahan baku kayu, kebutuhan pangan, dan kebutuhan tempat tinggal yang mana dapat berpengaruh terhadap kawasan pertanian, Suaka Margasatwa, dan hutan produksi. Semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan baku kayu, pangan, dan tempat tinggal kondisi ini sangat mengancam kelestarian sumberdaya alam.	Alih fungsi lahan terutama di kawasan hutan dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada	Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan berkurangnya daerah resapan air serta penurunan kualitas lahan dapat berpengaruh terhadap peningkatan suhu, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan banjir	Alih fungsi lahan dari pertanian atau kegiatan lain yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat miskin dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan	Alih fungsi lahan dari lahan pertanian atau hutan ke penggunaan lain dapat mengurangi ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan domestik, yang berdampak pada kesehatan masyarakat.	Alih fungsi lahan terutama hutan dapat mengancam kawasan adat	Tinggi
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	Degradasi lingkungan	Pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih untuk masyarakat	Pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal akan berpotensi besar menyebabkan penurunan kualitas air dan pencemaran air terutama air sungai dan air sumur.	Degradasi lingkungan akan berdampak langsung pada penurunan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai akan	Degradasi lingkungan, seperti penggundulan hutan untuk lahan pertanian atau industri, dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga meningkatkan aliran	Pengelolaan sampah yang belum optimal memicu pembuangan sampah sembarangan termasuk ke sungai yang memicu banjir, pembuangan limbah cair akan mengakibatkan pencemaran air permukaan yang merupakan sumber air baku	Pecemaran lingkungan yang berasal dari limbah padat, limbah cair maupun polusi udara dapat membahayakan kehidupan di ekosistem darat maupun perairan	Penurunan kualitas lingkungan dapat tertutup lahan dan peningkatan polusi udara akan mempercepat peningkatan emisi gas rumah kaca	Degradasi lingkungan seperti deforestasi, erosi tanah, dan kerusakan ekosistem dapat mengurangi sumber mata pencaharian masyarakat, seperti pertanian,	Lingkungan yang rusak dapat menyebabkan peningkatan penyakit dan masalah kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kapasitas kerja dan meningkatkan biaya kesehatan	Degradasi lingkungan dapat mengganggu struktur sosial dan budaya masyarakat, yang sering kali memiliki tradisi dan cara hidup yang terkait erat dengan lingkungan	Tinggi

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	D3TLH	Dampak Dan Risiko LH	Kinerja Layanan Ekosistem	Bencana Alam	Ketersediaan Kualitas SDA	Keanekaragaman Hayati	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Dan Keselamatan	Masyarakat dan Hukum Adat	Penilaian
				mencemari air dan menyebabkan berbagai penyakit.	permukaan air dan risiko banjir				perikanan, dan kehutanan			
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Pembangunan infrastruktural yang belum berkelanjutan dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan air. Kondisi ini akan menurunkan D3TLH pangan	Pembangunan infrastruktur yang belum berkelanjutan dapat meningkatkan alih fungsi	Semakin banyak kegiatan atau aktivitas maka secara teori akan menekan jasa lingkungan hidup termasuk infrastruktur	Kurangnya Infrastruktur akan meningkatkan risiko bencana misalnya kurangnya jaringan drainase meningkatkan risiko banjir, terutama di musim hujan.	Infrastruktur yang memadai, seperti sistem pengelolaan air, jaringan transportasi, fasilitas sanitasi, dan sistem pengelolaan limbah, sangat penting untuk mendukung pemanfaatan SDA secara berkelanjutan. Jika infrastruktur ini kurang optimal, dampaknya akan terlihat pada berkurangnya ketersediaan dan menurunnya kualitas SDA.	Penurunan Kualitas Tanah Akibat Kurangnya Pengelolaan Limbah dan Erosi Infrastruktur yang tidak optimal dalam pengelolaan limbah dan pengendalian erosi dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah. Tanah yang tercemar atau terdegradasi tidak dapat mendukung kehidupan flora dan fauna setempat dengan baik	Kurangnya infrastruktur yang mendukung transportasi dan energi berkelanjutan, seperti transportasi umum yang efisien atau sistem energi terbarukan, akan meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan sumber energi berbasis fosil.	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah memiliki dampak langsung pada tingkat kemiskinan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, sangat penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan peluang ekonomi.	Pemerataan infrastruktur dapat mempermudah akses terhadap fasilitas kesehatan	Masyarakat adat di Lamandau, yang umumnya hidup di kawasan pedalaman dan bergantung pada alam, sangat bergantung pada infrastruktur yang baik untuk mengakses layanan dasar, mendukung kegiatan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.	Sedang
		3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	28
6	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tingkat pendidikan yang rendah membatasi pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Lingkungan hidup yang sehat diperlukan untuk mencapai kualitas SDM yang diinginkan	Pembangunan SDM seperti kualitas pendidikan dapat dipengaruhi oleh terjadinya bencana.	Tingkat kerawanan bencana dapat mempengaruhi kegiatan belajar dan pelayanan pendidikan	Efisiensi pemanfaatan SDA diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi minimal masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan capaian pendidikan lebih optimal.	Capaian pendidikan belum optimal berpengaruh terhadap kualitas SDM dalam kemampuannya mengelola keanekaragaman hayati yang ada	Capaian pendidikan belum optimal berpengaruh terhadap kualitas SDM dalam kemampuannya melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas untuk memperoleh pendidikan sehingga berpengaruh terhadap capaian pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.	Kesehatan dan keselamatan masyarakat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Apabila penduduk dalam kondisi kurang sehat maka akan terhambat untuk menempuh pendidikan	Pendidikan yang rendah menghambat akses masyarakat adat terhadap pekerjaan yang lebih baik, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan	Sedang
		2	2	3	5	4	4	4	4	4	3	35
7	Rendahnya tingkat Kesehatan masyarakat	Kondisi D3TLH mempengaruhi pembangunan SDM. Ketersediaan air dan pangan berdampak pada kualitas kesehatan	Tidak berkaitan langsung	Tidak berkaitan langsung	Tidak berkaitan langsung	Ketika ketersediaan dan mutu SDA terjaga, hal ini dapat mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, bila SDA mengalami penurunan kualitas atau kelangkaan, kesehatan masyarakat pun akan terpengaruh.	Tidak berkaitan langsung	Layanan kesehatan belum optimal berpengaruh terhadap kualitas SDM dalam kemampuannya melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim	Masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas untuk memperoleh kesehatan sehingga berpengaruh terhadap capaian kesehatan yang belum optimal.	Kesehatan dan keselamatan masyarakat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Apabila penduduk tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, tingkat kesehatannya semakin rentan untuk mengalami penurunan	Tidak berkaitan langsung	Rendah
		3	1	1	1	2	1	3	4	4	1	21

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	D3TLH	Dampak Dan Risiko LH	Kinerja Layanan Ekosistem	Bencana Alam	Ketersediaan Kualitas SDA	Keanekaragaman Hayati	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Dan Keselamatan	Masyarakat dan Hukum Adat	Penilaian
8	Masih terdapat kemiskinan	Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan memerlukan daya dukung air dan pangan yang baik sebagai modal pemenuhan kebutuhan pokok individu.	Kerusakan lingkungan dapat menjadi penyebab awal kemiskinan karena terdapat kelangkaan sumber daya dasar, aksesibilitas terhadap sumber daya yang tidak merata akan mengakibatkan kesenjangan	Kondisi jasa lingkungan pemurnian air serta pengolahan dan pengurai limbah merupakan modal dasar untuk pengentasan kesenjangan Kondisi jasa lingkungan tata aliran air dan banjir serta perlindungan bencana yang baik dapat mendukung penurunan kesenjangan karena menurunkan risiko adanya kerugian ekonomi akibat bencana.	Terjadinya bencana dapat meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Pengelolaan sumber daya pertanian yang optimal dapat membuka lapangan pekerjaan yang memberikan dampak positif pada penurunan persentase kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, dan perubahan iklim yang berkelanjutan juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan	Kemiskinan menjadi kendala utama konservasi, sehingga tidak akan ada konservasi selama masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah akan menambah jumlah masyarakat miskin.	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah dapat menghambat akses masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan, mengadakan sanitasi dan hunian yang layak, serta keselamatan dari bencana, penyakit, dan wabah	Kemiskinan dapat menyebabkan disintegrasi sosial, hilangnya nilai-nilai tradisional, dan perubahan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur.	Tinggi
		4	4	3	3	4	4	3	5	4	4	38
9	Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam penunjang pertumbuhan ekonomi	Ketika pemanfaatan SDA belum optimal, terjadi eksploitasi berlebihan dengan metode yang tidak berkelanjutan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka pendek. . Aktivitas ini bisa mengurangi daya dukung air maupun pangan	Pemanfaatan SDA yang tidak terkelola dengan baik, seperti penggunaan pestisida atau bahan kimia berlebihan dalam pertanian, menyebabkan pencemaran air dan tanah.	Pemanfaatan SDA yang Tidak Berkelanjutan Menurunkan Fungsi Ekosistem. Pemanfaatan SDA yang belum optimal sering kali terjadi dalam bentuk eksploitasi berlebihan atau kurangnya pemanfaatan yang berkelanjutan, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.	Pengoptimalan SDA untuk pertumbuhan ekonomi tidak berkaitan langsung dengan bencana	Eksplorasi SDA yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang	Tidak berkaitan langsung	Pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan mempercepat perubahan iklim, dan perubahan iklim pada gilirannya semakin memperparah kondisi lingkungan dan mengurangi produktivitas SDA.	Pemanfaatan SDA yang tidak optimal menyebabkan pendapatan masyarakat rendah, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar.	Tidak berkaitan langsung	Tidak berkaitan langsung	Rendah
		3	3	2	2	2	1	2	3	1	1	20
10	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif. Tata kelola yang tidak baik seperti tumpang tindih kewenangan dapat mengancam D3TLH, seperti tidak konsistennya pemberian izin yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat layanan publik pemerintahan yang tidak baik terutama di bidang lingkungan	Kondisi jasa lingkungan dapat semakin menurun bila pelayanan pemerintahan tidak berjalan dengan baik	Kerentanan bencana akan semakin meningkat apabila tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik misalnya tidak dilakukan penganggaran terhadap mitigasi bencana.	Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang baik dapat membantu menjaga mutu SDA	Pelayanan publik yang baik dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati melalui pengawasan dan pemantauan pembangunan	Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif. Tata kelola dan layanan publik yang tidak berkelanjutan berpengaruh terhadap kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim	Pelayanan publik yang tidak berpihak pada masyarakat miskin akan menimbulkan kesenjangan dan memperdalam kemiskinan	Pelayanan publik yang tidak berjalan dengan akan menyebabkan pelayanan kesehatan yang universal tidak berjalan	Kualitas rendah pelayanan publik dapat mengurangi partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kesejahteraan mereka	Tinggi
		4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	40

Sumber: Analisis, 2024

Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang dinilai perlu dilakukan justifikasi pertimbangan dalam penentuan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Berikut merupakan tabel justifikasi pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan prioritas.

Tabel 4-10 Justifikasi Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	Penilaian Terhadap TPB	Penilaian Terhadap 10 Muatan	Penilaian Akhir	Justifikasi
1	Penurunan Kualitas Air	Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Terdapat pencemaran sungai di Sungai Lamandau yang melintasi wilayah Kabupaten Lamandau. Sungai Lamandau mempunyai fungsi pokok untuk kegiatan perikanan, peternakan, air baku, mengalir tanaman, keperluan rumah tangga, transportasi sungai dan sumber air baku PDAM. Masyarakat melakukan aktivitas di bantaran Sungai Lamandau untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK). Aktivitas tersebut dilakukan setiap hari sehingga sudah menjadi aktivitas rutin masyarakat. MCK (mandi, cuci, dan kakus) dilakukan dengan langsung membuang limbah ke badan air karena belum ada tempat pembuangan limbah. Kegiatan MCK dan membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai memberikan dampak terhadap kualitas air sungai.
2	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Kerawanan bencana alam yang sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamandau merupakan kawasan bahaya banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Lamandau sebagian besar memiliki jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir tingkat sedang dan jasa ekosistem pencegahan bencana tingkat tinggi.
3	Terjadinya alih fungsi lahan	Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Alih komoditi dari lahan tanaman pangan ke perkebunan dan degradasi lingkungan ditunjukkan dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, khususnya perkebunan sawit. Rusaknya daerah resapan air di bagian hulu Kabupaten Lamandau atau di daerah utara seperti di Kecamatan Batangkawa, Bulik, dan Delang akibat aktivitas penebangan pohon, perkebunan dan pertambangan. Kerusakan tersebut membuat lahan di daerah hulu menjadi lahan kritis, selain faktor tutupan lahan yang berkurang, juga berada pada kemiringan yang tinggi sehingga rawan longsor.

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	Penilaian Terhadap TPB	Penilaian Terhadap 10 Muatan	Penilaian Akhir	Justifikasi
4	Degradasi Lingkungan	Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Keberadaan sampah masih belum dapat tertangani secara optimal. Pembentukan unit Kerja yang khusus menangani sampah (Jakstrada) masih dalam tahap awal, sehingga belum dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Tumpukan sampah anorganik juga dapat menciptakan genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Sebagai vektor penyakit, nyamuk dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan cikungunya. Kondisi penanganan sampah yang belum terlaksana dengan optimal dapat berpengaruh terhadap Jasa Lingkungan Pengelolaan dan Pengurai Limbah. Apabila ditinjau dari distribusi luasannya terlihat bahwa dominasi dari kelas berada pada kelas sangat tinggi.
5	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Lamandau memiliki kondisi konstruksi yang rusak dan belum beraspal, terdapat beberapa ruas jalan yang belum memiliki jaringan drainase. Selain itu, di Kabupaten Lamandau masih terdapat wilayah yang merupakan blank spot area atau wilayah yang belum terjangkau sinyal internet.
6	Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah	Strategis	Sedang	Paling Strategis	Rendahnya kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Lamandau disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidik dan masih terdapat guru yang berkualifikasi sarjana. Selain itu, angka partisipasi murni di Kabupaten Lamandau masih tergolong rendah.
7	Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat	Strategis	Rendah	Strategis	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Lamandau salah satunya dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan yang ada. Fasilitas yang jumlahnya paling sedikit yaitu rumah sakit bersalin, rumah sakit umum, dan poliklinik masing-masing sebanyak 1 unit yang berada di Kabupaten Lamandau. Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Lamandau cukup lengkap, hanya saja lokasinya tidak cukup strategis dan kelengkapan peralatan masih relatif kurang. Permasalahan kesehatan ini dapat dikurangi dengan pengoptimalan infrastruktur wilayah dan peningkatan fasilitas kesehatan.

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	Penilaian Terhadap TPB	Penilaian Terhadap 10 Muatan	Penilaian Akhir	Justifikasi
8	Masih terdapat kemiskinan	Cukup Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Di Kabupaten Lamandau, persentase penduduk miskin cenderung menurun namun masih tetap ada. Pada tahun 2022, diketahui penduduk miskin di Kabupaten Lamandau sebesar 3,34% dari total penduduk keseluruhan dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berurutan sebesar 0,37 dan 0,06, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 3,12% dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berurutan sebesar 0,33 dan 0,07.
9	Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam penunjang pertumbuhan ekonomi	Cukup Strategis	Rendah	Strategis	Kabupaten Lamandau yang memiliki potensi SDA yang banyak antara lain pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Akan tetapi, pemanfaatan SDA tersebut belum optimal sehingga belum dapat menunjang perekonomian Kabupaten Lamandau secara maksimal. Kemiskinan, penurunan kualitas lingkungan merupakan dampak dari belum optimalnya pemanfaatan SDA yang menjadi isu strategis pembangunan lainnya.
10	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Strategis	Tinggi	Paling Strategis	Di Kabupaten Lamandau, isu rendahnya kualitas pelayanan publik ditinjau dari adanya indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang datanya tidak tersedia atau dapat pula dikatakan bahwa tidak dilakukan pendataan mengenai indikator tersebut. Hal ini menimbulkan munculnya gap antara target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah.

Sumber: Analisis, 2024

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator strategis, dan 8 indikator paling strategis. Isu yang menjadi isu pembangunan berkelanjutan prioritas yaitu isu yang memiliki penilaian akhir paling strategis, yaitu:

1. Penurunan kualitas air
2. Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
3. Terjadinya alih fungsi lahan
4. Degradasi lingkungan
5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
6. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
7. Masih terdapat kemiskinan
8. Rendahnya kualitas pelayanan publik

Isu paling strategis dalam KLHS RPJMD ini juga berkesinambungan dengan 8 Isu paling strategis dalam KLHS RPJPD. Namun begitu, mengingat RPJMD merupakan tahap 1

dari pelaksanaan RPJPD terdapat beberapa hal yang dilakukan penyesuaian. Persandingan dari isu paling strategis KLHS RPJPD dan RPJMD tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4-11 Persandingan Isu Paling Strategis Terhadap Isu Strategis KLHS RPJPD

Nomor	Isu Paling Strategis KLHS RPJPD	Isu Paling Strategis KLHS RPJMD
1	Penurunan kualitas air	Penurunan kualitas air
2	Tingginya kerawanan bencana	Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
3	Terjadinya alih fungsi lahan	Terjadinya alih fungsi lahan
4	Degradasi lingkungan	Degradasi lingkungan
5	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
6	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
7	Masih terdapat kemiskinan	Masih terdapat kemiskinan
8	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Rendahnya kualitas pelayanan publik

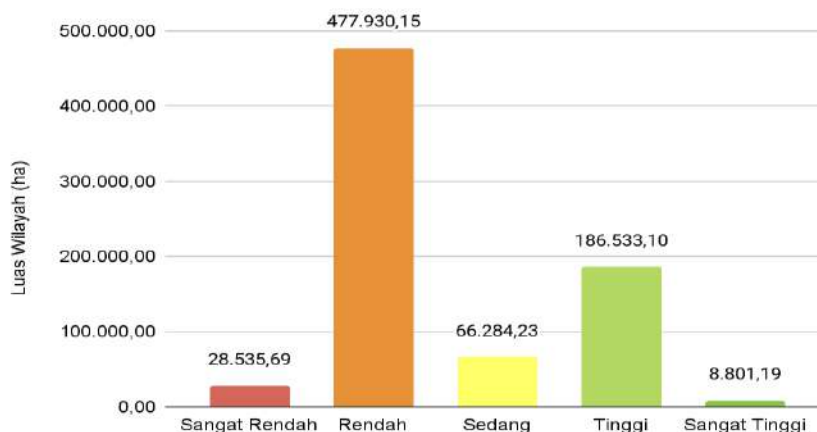
Sumber: KLHS RPJPD

Isu paling strategis tersebut dijelaskan secara lebih detail dengan menyesuaikan kondisi terkini daerah sebagai berikut.

1. Penurunan kualitas air

Penurunan kualitas air merupakan salah satu isu utama di Provinsi Kalimantan Tengah. Penurunan kualitas air disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya usaha/kegiatan industri pengolahan dan ekstraktif, rendahnya anggaran pengawasan serta masih minimnya sarana pengolahan limbah domestik dari rumah tangga di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu pada peningkatan volume limbah domestik dan menjadi penyebab peningkatan beban pencemaran di sungai.

Apabila ditinjau dari jasa lingkungan penyedia air bersih teridentifikasi bahwa dominasi kelas jasa lingkungan berada pada kelas rendah seluas 477.930,15 ha atau sebesar 62,22% dari total luasan sedangkan untuk kelas jasa lingkungan sangat tinggi hanya 8.801,19 ha atau sebesar 1,15% dari total luasan lahan.



Gambar 4-7 Distribusi Jasa Lingkungan Penyedia Air

Sumber: Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Pemicu lain dari penurunan kualitas air adalah tidak tersedianya pengelolaan air limbah domestik yang baik. Dari data RKPD pada tahun 2025 Sebanyak 25,63% rumah tangga masih memiliki pembuangan akhir tinja di Kolam/sawah/sungai/danau, lubang tanah, maupun tanah lapang/kebun. Hal tersebut terlihat dari walaupun terjadi peningkatan kepemilikan jamban namun tidak dibersamai dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri. Isu ini juga diperkuat dengan kondisi indeks kualitas air, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lamandau tahun 2023 adalah 66,84. Menurun dari angka 70,00 tahun 2022.

Tabel 4-12 Fasilitas Perumahan

Fasilitas Perumahan	2021	2022	2023
Sumber Air minum utama air kemasan, air isi ulang, dan ledeng	49,03	45,55	51,64
Memiliki akses air minum bersih	67,26	76,04	75,21
Jamban sendiri	86,33	80,63	88,39
Jamban sendiri dengan tangki septik	76,34	75,97	75,37

Sumber: RKPD 2025

Ditinjau dari kondisi daya dukung penyedia air walaupun persentase sudah terlampaui sangatlah kecil hanya 0,001% pada tahun 2023, namun tren proyeksi status sudah terlampaui mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hasil dari proyeksi menunjukkan adanya tren klasifikasi sudah terlampaui yang meningkat. Apabila dilakukan identifikasi pada tiap kecamatannya, kecamatan dengan daya dukung air terlampaui terbesar adalah di Kecamatan Belantikan Raya dan Bulik Timur. Apabila diakumulasi total daya dukung air terlampaui pada tahun 2029 adalah sebesar 0,05% dari luasan lahan Kabupaten Lamandau.

Selain berkaitan erat dengan daya dukung dan daya tampung serta kinerja layanan jasa ekosistem penyedia air bersih. Penurunan kualitas air ini dapat memicu penurunan mutu ketersediaan sumber daya alam. Hal tersebut dikarenakan air tidak hanya dikonsumsi oleh manusia melainkan juga hewan dan tumbuhan. Kondisi air yang tercemar dapat mengganggu kinerja dari sumber daya alam dan nantinya dapat berakibat pada penurunan produktivitas. Apabila penurunan kualitas air terjadi terus menerus ke depannya dapat berakibat pada penurunan kesehatan dan keselamatan dari individu berkaitan dengan sanitasi dan juga pada penurunan keanekaragaman hayati.

2. Potensi bencana dan Perubahan Iklim

Potensi bencana dan perubahan iklim terlihat dari distribusi persentase rawan bencana, di mana 32% dari luas wilayah kabupaten Rawan bencana tanah longsor menengah, 15% dari total luasan kabupaten memiliki Bahaya bencana banjir tinggi, dan 8% Bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi. Isu ini semakin diperkuat dengan terjadinya banjir tiap tahun karena hilangnya kawasan penyangga di hulu sungai, peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdampak pada kerentanan ekonomi masyarakat

Dilihat dari kejadian bencananya, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan karhutla bahkan di tahun 2022 terjadi 92 kali kejadian banjir yang

mengakibatkan 17,607 jiwa mengungsi dan tahun 2023 terjadi 46 kali kejadian banjir.

Tabel 4-13 Jumlah Kejadian Bencana

No	Bencana	Kejadian Bencana			Total
		2021	2022	2023	
1	Banjir	46	92	21	159
2	Banjir Bandang	0	0	0	0
3	Tanah Longsor	2	4	3	9
4	Karhutla	16	3	46	65
5	Cuaca Ekstrem	0	0	1	1
Jumlah Kejadian		64	99	71	234

Sumber: RKPD 2025

Kejadian bencana memiliki dampak yang besar terhadap aktivitas ekonomi, karena dengan terjadinya bencana masyarakat menjadi kesulitan untuk beraktivitas. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Lamandau kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir sangatlah besar dengan trend yang cenderung naik. Pada tahun 2020 dengan jumlah korban sebesar 13,680 kerugian ekonomi yang terjadi mencapai Rp 43,826,750,000. Dalam rentang lima tahun terakhir 2019-2023 kerugian terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan total kerugian Rp 311,471,095,750 yang diakibatkan oleh bencana banjir. Penyebab bencana banjir ini selain karena faktor morfologi tanahnya juga karena faktor manusia yakni karena hilangnya kawasan penyangga di hulu sungai dan Peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.



Gambar 4-8 Kejadian Bencana Banjir pada Tahun 2024

Sumber : [Lamandau Siaga Banjir, Ketinggian Air Capai 2 Meter | KaltengPos \(jawapos.com\)](https://www.jawapos.com)

Tabel 4-14 Jumlah Korban dan Kerugian Bencana Banjir

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Korban Mengungsi		13,680	4,241	17,607	59
Kerugian	23,396,505,000	43,826,750,000	NA	311,471,095,750	NA

Sumber: BPBD Kabupaten Lamandau

Dilihat dari indeks risiko bencana, memang tiap tahunnya mengalami penurunan namun apabila ditinjau dari persentase meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana masih jauh dari angka 100% yang mana pada tahun 2023 hanya sebesar 22,43%. Hal ini semakin mengkhawatirkan dengan melihat kondisi Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial hanya sebesar 0,33% (data RKPD 2025). Secara keseluruhan persentase kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani hanyalah sebesar 50% pada tahun 2023 sedangkan 50% belum teridentifikasi dan tertangani.

Tabel 4-15 Indikator Bencana

Indikator	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	76,55	71,8	48,4
Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	22%	21,25%	22,43%
Persentase kejadian bencana yang tertangani	84,06	90,44	90,63
Persentase kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani	48%	48%	50%

Sumber: RKPD 2025

3. Terjadinya alih fungsi lahan

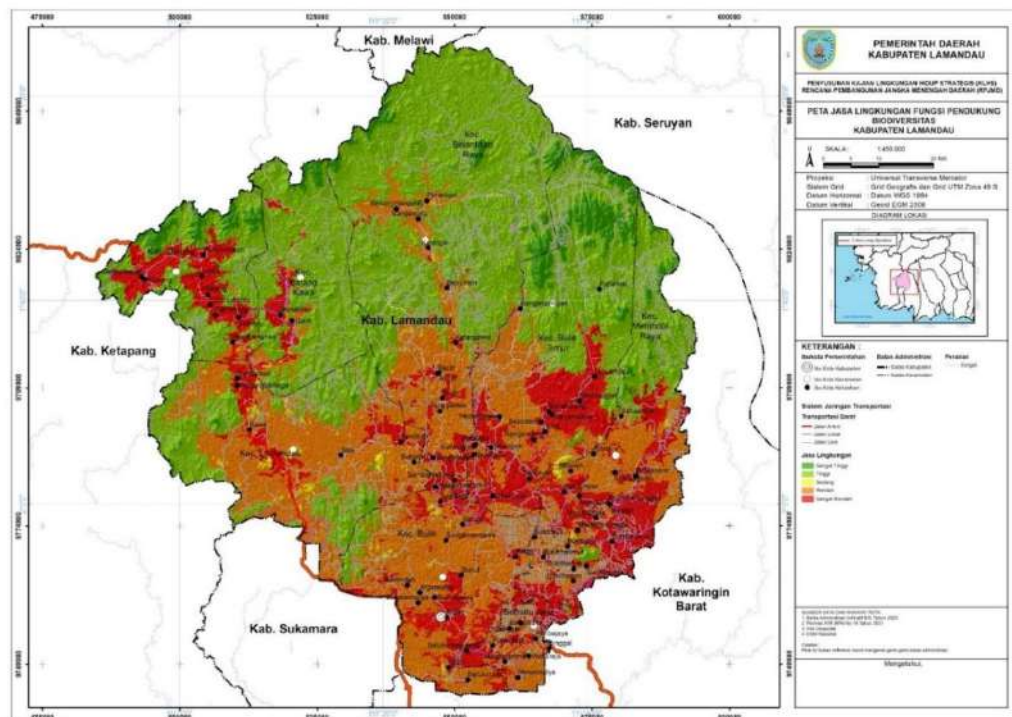
Tidak sedikit areal hutan dan lahan telah berubah menjadi areal perkebunan, pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan eksplorasi hutan dan lahan yang tidak terkendali otomatis akan menurunkan fungsi ekologis pada masing-masing kawasan, baik itu kawasan lindung, kawasan penyangga ataupun kawasan budidaya. Alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian tersendiri sebab dampak dan laju alih fungsi lahan tergolong mengkhawatirkan. Terlebih, Pulau Kalimantan merupakan salah satu daerah yang memiliki fungsi liputan lahan dan tutupan lahan yang sangat tinggi nilainya karena hutan-hutannya memiliki fungsi dalam pengaturan iklim, sumber air, dan keanekaragaman hayati. Salah satu isu alih fungsi lahan adalah gangguan pada fungsi hidrologisnya karena air merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.



Gambar 4-9 Alih Fungsi Lahan Kabupaten Lamandau

Sumber : Dokumentasi, 2024

Rusaknya daerah resapan air di bagian hulu Kabupaten Lamandau atau di daerah utara seperti di Kecamatan Batangkawa, Bulik, dan Delang akibat aktivitas penebangan pohon, perkebunan dan pertambangan. Kerusakan tersebut membuat lahan di daerah hulu menjadi lahan kritis, selain faktor tutupan lahan yang berkurang, juga berada pada kemiringan yang tinggi sehingga rawan longsor. Fenomena tersebut perlu direhabilitasi guna menjamin pasokan ketersediaan air tanah dan air permukaan. Selain itu, secara kelembagaan, pengawasan dan pengendalian kawasan SDA belum maksimal karena terhambat kepada ketersediaan personel dan data untuk pemantauan lingkungan. Selain terkait dengan aspek hidrologis, alih fungsi lahan produktif juga berpengaruh kepada sektor pangan. Agroindustri dan budaya monokultur juga berpengaruh kepada keanekaragaman hayati karena menghilangkan habitat satwa-satwa yang ada di daerah Pulau Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Lamandau pada khususnya.



Gambar 4-11 Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

Sumber : Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

4. Degradasi lingkungan

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh si empunya yang mengakibatkan timbulnya sampah. Sampah sebagai barang yang masih mempunyai nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainnya.

Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengolahnya terlebih dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan akhir juga merupakan pemborosan energi dan bahan baku yang sangat terbatas tersedia di alam. Sebaliknya mengolah sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku sekunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energi dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah hampir melanda seluruh wilayah di Indonesia. Demikian pula dengan Kabupaten Lamandau. Keberadaan sampah masih belum dapat tertangani secara optimal. Pembentukan unit Kerja yang khusus menangani sampah (Jakstrada) masih dalam tahap awal, sehingga belum dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Tumpukan sampah anorganik juga dapat menciptakan genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Sebagai vektor penyakit, nyamuk dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan chikungunya.



Gambar 4-12 Tumpukan Sampah

Sumber : Dokumentasi, 2024

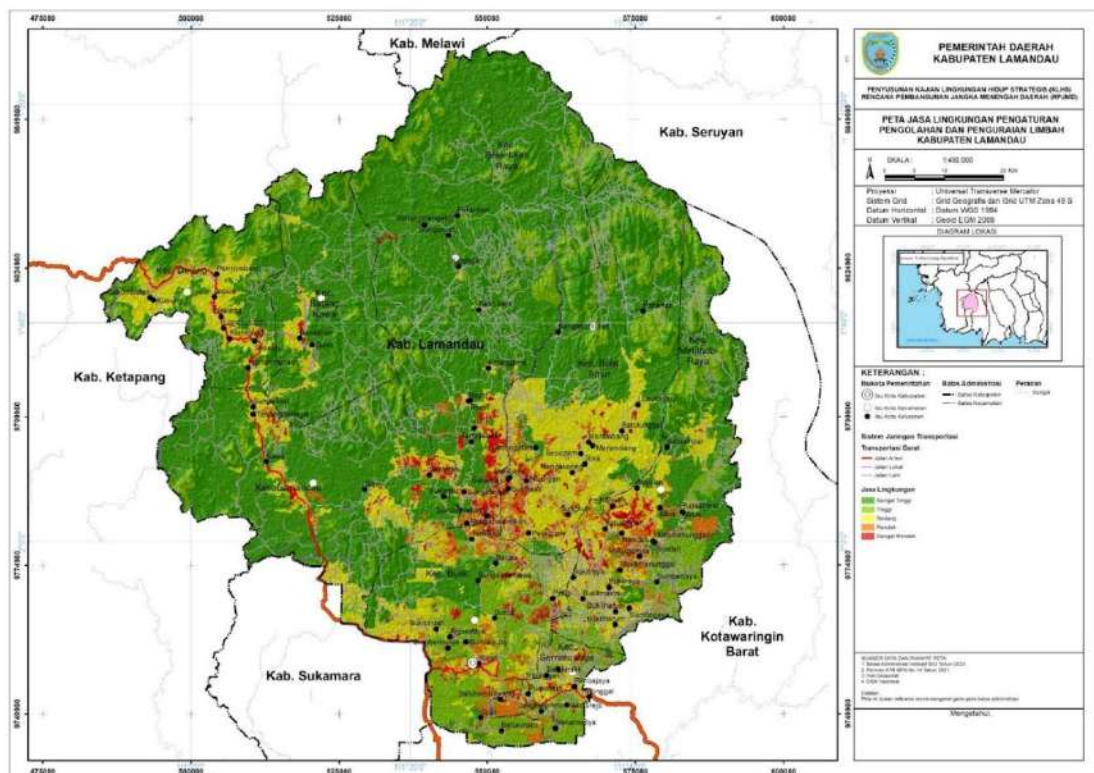
Apabila dilihat dari capaian penanganan sampah perkotaan terlihat bahwa persentase pada tahun 2023 hanya mencapai 79,7% yang mana masih terdapat 20,3% sampah yang belum tertangani

Tabel 4-16 Persentase Sampah Tertangani

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	61.5	69.3	70.58	76.4	79.7

Sumber: RKPD 2025

Kondisi penanganan sampah yang belum terlaksana dengan optimal dapat berpengaruh terhadap Jasa Lingkungan Pengelolaan dan Pengurai Limbah. Apabila ditinjau dari distribusi luasannya terlihat bahwa dominasi dari kelas berada pada kelas sangat tinggi. Meskipun begitu terlihat beberapa spot memiliki kelas jasa lingkungan sangat rendah. Sebaran dari kelas Jasa Lingkungan Pengelolaan dan Pengurai Limbah terlihat pada peta di bawah ini, dengan kelas sangat rendah ditunjukkan dengan warna merah.



Gambar 4-13 Jasa Lingkungan Pengelolaan dan Pengurai Limbah

Sumber : Dokumen D3TLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah

Infrastruktur layak dan memadai sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Manfaatnya dalam aspek sosial dan ekonomi menyebabkan infrastruktur termasuk dalam komponen penting penyusun suatu kawasan/wilayah. Dengan adanya infrastruktur, misalnya infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, air bersih, air limbah, drainase, persampahan hingga tempat evakuasi bencana, suatu wilayah akan dapat berkembang lebih optimal dan masyarakatnya akan lebih sejahtera. Salah satu pengaruh signifikan dari kebermanfaatan infrastruktur bagi masyarakat adalah tersedianya jaringan jalan dengan kondisi baik untuk mobilitas masyarakat. Dengan adanya jalan tersebut maka masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan lebih lancar, mengurangi biaya dan waktu yang terbuang sia-sia di jalan (*travel cost* dan *travel time*), bahkan hingga dapat menjaga kualitas bahan produksi karena perjalanan dilakukan secara efektif. Sayangnya, di Kabupaten Lamandau masih terdapat infrastruktur dengan kondisi yang belum optimal.

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur Kabupaten Lamandau ditandai dengan kondisi eksisting infrastruktur yang belum memadai, yakni masih ditemukan adanya jaringan jalan yang rusak dan belum beraspal, jaringan drainase yang belum diperkeras dan belum sepenuhnya tersedia di seluruh ruas jalan serta ada yang tersumbat semak belukar dan sampah, serta jaringan telekomunikasi berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) belum menjangkau seluruh kawasan di Kabupaten Lamandau sehingga masih terdapat area *blank spot*.

Adapun berdasarkan data indeks kepuasan layanan infrastruktur, diketahui bahwa pada tahun 2023 baru mencapai angka 58,38% dari target kinerja 70% pada RKPD 2023 dan tingkat capaian s.d 2023 RPJMD sebesar 83,40%. Isu ini perlu menjadi perhatian dalam RPJMD agar segera dapat dilakukan penanganan dan tindak lanjut karena jika dibiarkan akan berdampak negatif pada aktivitas ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, mendorong meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah, menurunnya kualitas hidup masyarakat mencakup penurunan tingkat kesehatan dan pendidikan. Berikut gambar kondisi eksisting infrastruktur di Kabupaten Lamandau.



Gambar 4-14 (a) Kondisi Jalan Rusak (b) Jaringan Drainase Tersumbat Semak dan Sampah

Sumber: Dokumentasi RPJPD Kab. Lamandau, 2023

6. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baik akan menciptakan SDM berkualitas yang berpotensi tinggi memajukan bangsa dan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan masuknya aspek pendidikan dalam komponen indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator penanda kualitas hidup masyarakat dan tingkat keberhasilan program pembangunan SDM pemerintah. Dalam hal ini, buruknya sistem pendidikan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan berdampak linier bagi rendahnya

pendapatan masyarakat, meningkatnya kesenjangan ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap ragam fasilitas misalnya sarana dan prasarana kesehatan.

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurun

Di Kabupaten Lamandau, masih terdapat isu dan permasalahan pendidikan. Beberapa masalah tersebut dapat terlihat dari angka partisipasi murni (APM), akreditasi sekolah dan jumlah guru yang bersertifikat pendidik. APM merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada tahun 2023, APM Kabupaten Lamandau mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/ MI Sederajat menjadi 98,28% dari angka 99,44% tahun 2022, dan jenjang SMP/ MTs Sederajat menjadi 82,47% dari angka 89,04% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah peserta didik yang menempuh pendidikan sesuai dengan usianya. Untuk jenjang SMA/ SMK/ MA Sederajat, APM tahun 2023 baru mencapai 59,57% atau dapat diartikan bahwa sebanyak kurang lebih 41,443% anak usia SMA/ SMK/ MA Sederajat tidak sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Tabel 4-17 Angka Partisipasi Murni

Tingkat Pendidikan	2021	2022	2023
SD/ MI Sederajat	98,61	99,44	98,28
SMP/ MTs Sederajat	88,55	89,04	82,47
SMA/ SMK/ MA Sederajat	50,37	50,89	59,57

Sumber: RKPD 2025

Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B Kecil

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, sekolah berakreditasi minimal B di Kabupaten Lamandau masih belum mencapai 50% dari total sekolah per jenjangnya. Sampai dengan tahun 2023 baru 33,21% dari total seluruh sekolah SD/ MI dan 32,15% dari total seluruh sekolah SMP/MTs yang sudah memenuhi kriteria minimal akreditasi B. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sarana pendidikan dengan mutu pendidikan terstandarisasi baik di Kabupaten Lamandau, yang mana berarti masih belum optimalnya mutu pendidikan anak.

Tabel 4-18 Angka Partisipasi Murni

Tingkat Pendidikan	Persentase
SD/ MI Sederajat	33.21
SMP/ MTs Sederajat	32.15

Sumber: Analisis, 2024

Persentase Guru Bersertifikat Pendidik Belum Maksimal

Selain faktor peserta didik dan sarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik juga mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Di Kabupaten Lamandau, persentase guru bersertifikat pendidik pada jenjang pendidikan dasar masih kurang dari 50%. Guru bersertifikat pendidik adalah guru yang telah melalui uji kompetensi dan kemampuan dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, persentase guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 untuk jenjang PAUD sebesar 6,8%, SD sebesar 41,8%, SMP sebesar 25,01%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB didapatkan data tahun 2022 secara berurutan

sebesar 33,9%, 64,2%, dan 6%. Dari data ini maka diketahui bahwa tenaga pendidik di Kabupaten dominan belum bersertifikat pendidik atau belum teruji kompetensi dan kemampuannya untuk mendidik dan mengajar. Hal ini menjadi salah satu faktor penting isu pendidikan di Kabupaten Lamandau agar dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik atau pelajar dilakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidik.

7. Masih terdapat kemiskinan

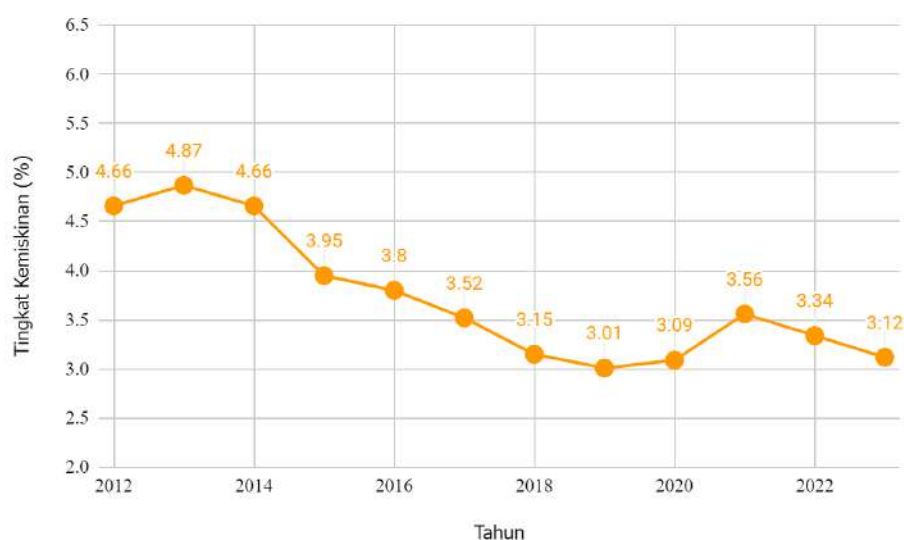
Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali menjadi tujuan utama program dan kegiatan pemerintah di setiap wilayah. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor budaya, struktural, hingga kondisi geografis. Besarnya pengaruh kemiskinan bagi perkembangan wilayah dan kesejahteraan sosial menyebabkan masalah kemiskinan harus segera diatasi.

Di Kabupaten Lamandau, persentase penduduk miskin cenderung menurun namun masih tetap ada. Pada tahun 2022, diketahui penduduk miskin di Kabupaten Lamandau sebesar 3,34% dari total penduduk keseluruhan dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berurutan sebesar 0,37 dan 0,06, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 3,12% dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berurutan sebesar 0,33 dan 0,07. Kondisi kemiskinan Kabupaten Lamandau dijabarkan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 4-19 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Lamandau

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	430,656	479,514	539,744	588,591	634,710
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,22	0,36	0,56	0,37	0,33
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,03	0,09	0,11	0,06	0,07

Sumber: Analisis, 2024



Gambar 4-15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamandau Tahun 2012-2023

Sumber: Analisis, 2024

Meskipun cenderung menurun, namun dilihat dari rasio gininya, Kabupaten Lamandau (0,330) memiliki tingkat kesenjangan lebih tinggi dibandingkan Provinsi

Kalimantan Tengah (0,371). Adapun kesenjangan wilayah, yang digambarkan melalui rasio gini, merupakan salah satu faktor meningkatnya kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karena itu, dengan kondisi rasio gini sedemikian, isu kemiskinan harus terus menjadi perhatian. Selain itu, masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Lamandau bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang pertama.

Tabel 4-20 Rasio Gini Kabupaten Lamandau

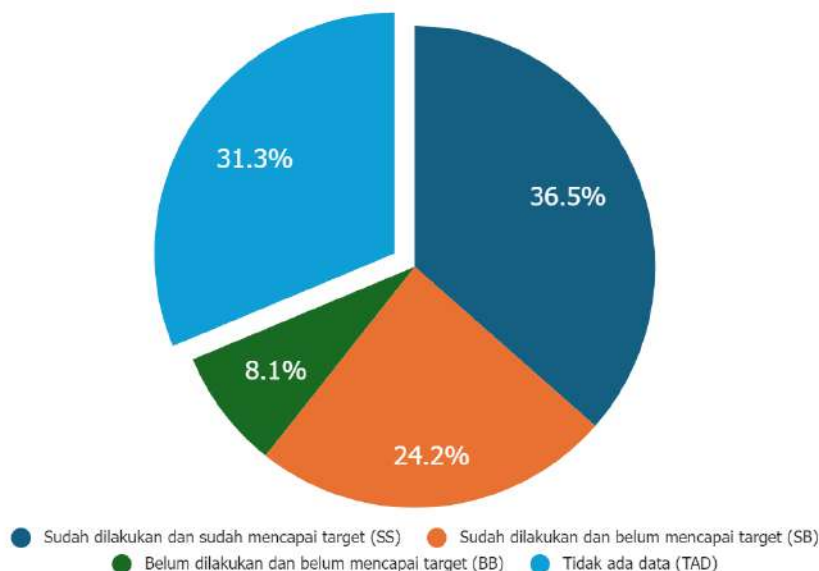
Rasio Gini	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lamandau	0,28	0,3	0,32	0,32	0,33
Provinsi Kalimantan Tengah	0,336	0,33	0,323	0,319	0,317

Sumber: Analisis, 2024

8. Rendahnya kualitas pelayanan publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, pelayanan publik berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat sehingga harus terus berkualitas dan tepat sasaran.

Di Kabupaten Lamandau, isu rendahnya kualitas pelayanan publik ditinjau dari adanya indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang datanya tidak tersedia atau dapat pula dikatakan bahwa tidak dilakukan pendataan mengenai indikator tersebut. Hal ini menimbulkan munculnya gap antara target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa secara keseluruhan terdapat sebanyak 66 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak ada data (TAD) atau sebesar 31,28% dari total indikator. Dari angka ini diketahui bahwa jumlah indikator TAD berada di posisi terbesar kedua indikator dominan di Kabupaten Lamandau. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Kabupaten Lamandau masih belum optimal dalam memenuhi keterlaksanaan maupun pendataan yang ada. Adapun perbandingan dengan indikator lain, yakni indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, dan belum dilaksanakan dan belum mencapai target digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 4-16 Capaian Indikator Tujuan Berkelanjutan

Sumber: Analisis, 2024

Sedangkan apabila ditinjau dari pilar Hukum dan Tata Kelola didapatkan sebesar 38,1% indikator yang tidak ada data, 19,0% indikator sudah dilakukan dan belum mencapai target, dan 9,5% indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Tidak adanya data maupun belum tercapainya target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan indikasi bahwa pelayanan publik yang ada saat ini tergolong masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan kembali. Berikut grafik perbandingan keempat kelompok indikator.



Gambar 4-17 Capaian Indikator Tujuan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sumber: Analisis, 2024

Tabel 4-21 Crossing Analysis Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
1. Penurunan kualitas air	Isu PB Strategis KLHS RPJPN Tahun 2025-2045: Polusi dan Kerusakan Lingkungan Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2049: Penurunan Kualitas Air	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	SB	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait potensi penurunan kualitas air sungai telah terakomodir pada KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu polusi dan Kerusakan Lingkungan sub isu pencemaran air, udara, dan tanah. - Seluruh indikator yang belum tercapai perlu ditingkatkan dan indikator yang tidak diketahui capaiannya perlu dilaksanakan sehingga dapat dibandingkan dengan target dan dapat diketahui gap capaian.
		6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB	
		6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	SB	
		6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	TAD	
		6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	SB	
		6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	TAD	
		6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	TAD	
		6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	TAD	
		6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	TAD	
		6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	SB	
		6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	TAD	
		6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	SB	
		6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	TAD	
		6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	TAD	
		6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	TAD	
		1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		
		6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		
		1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan		

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
		sumber air minum layak dan berkelanjutan.		
		6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		
2. Potensi Bencana Dan Perubahan Iklim	Isu PB Strategis KLHS RPJPN Tahun 2025-2045: Perubahan Iklim	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	SB	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait potensi penurunan kualitas air sungai telah terakomodir pada KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Perubahan iklim dan sub isu bencana hidrometeorologi. - Seluruh indikator yang belum tercapai perlu ditingkatkan dan indikator yang tidak diketahui capaiannya perlu dilaksanakan sehingga dapat dibandingkan dengan target dan dapat diketahui gap capaian.
		1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	BB	
		1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	TAD	
	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045: Tingginya Kerawanan Bencana	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	TAD	
		1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	SB	
		1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BB	
		11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	SB	
		11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BB	
		11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	SSSB	
		11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BB	
		13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BB	
3. Terjadinya alih fungsi lahan	Isu PB Strategis KLHS RPJPN Tahun 2025-2045: Hilangnya Keanekaragaman Hayati	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.	TAD	
	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045: Terjadinya Alih Fungsi Lahan			
4. Degradasi lingkungan	Isu PB Strategis Polusi dan Kerusakan Lingkungan	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.		<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait sampah masih belum dapat tertangani secara optimal telah terakomodir pada KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 dan KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau 2025 – 2045 - Seluruh indikator yang belum tercapai perlu
		12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	TAD	
	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045: Degradasi Lingkungan	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	TAD	
		12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	TAD	
		7.2.1* Bauran energi terbarukan.	TAD	
		7.3.1* Intensitas energi primer	TAD	

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
				ditingkatkan dan indikator yang tidak diketahui capaiannya perlu dilaksanakan sehingga dapat dibandingkan dengan target dan dapat diketahui gap capaian.
5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045: Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	TAD	<ul style="list-style-type: none"> - Isu telah terakomodir pada KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau 2025 – 2045 - Seluruh indikator yang belum tercapai perlu ditingkatkan dan indikator yang tidak diketahui capaiannya perlu dilaksanakan sehingga dapat dibandingkan dengan target dan dapat diketahui gap capaian.
		11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	TAD	
		12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	TAD	
		8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	TAD	
		9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	TAD	
6. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045: Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	SB	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait rendahnya kualitas pelayanan publik telah terakomodir pada KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau 2025 – 2045 - Terdapat indikator TPB yang belum mencapai target dan berkaitan dengan isu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dengan gap positif sehingga perlu adanya peningkatan angka capaian agar dapat mencapai target, sedangkan terdapat indikator TPB yang belum dilaksanakan dan tidak ada data sehingga perlu dilaksanakan guna mengetahui capaian dan gap dengan target.
		1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/ sederajat	SB	
		4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	SB	
		4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	SB	
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	SB	
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	SB	
		4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	SB	
		4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	BB	
		8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	TAD	
		4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	TAD	
7. Masih terdapat kemiskinan	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total BPS kredit.	TAD	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait rendahnya kualitas pelayanan publik telah
		9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	TAD	

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
	Tahun 2025-2045: Masih Terdapat Kemiskinan	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	TAD	terakomodir pada KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau 2025 – 2045 - Terdapat indikator TPB yang belum mencapai target dan berkaitan dengan isu masih terdapat kemiskinan dengan gap positif sehingga perlu adanya peningkatan angka capaian agar dapat mencapai target, sedangkan terdapat indikator TPB yang belum dilaksanakan dan tidak ada data sehingga perlu dilaksanakan guna mengetahui capaian dan gap dengan target.
		1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	BB	
		1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BB	
		10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	TAD	
		10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	TAD	
		10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	TAD	
		17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	SB	
		17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	SB	
		2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	SB	
		2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	SB	
		2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	TAD	
		8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	TAD	
		8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	SB	
		8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	SB	
		8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	SB	
		8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	TAD	
		8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	TAD	
		8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	SB	
		8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	SB	
		8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	TAD	
		8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	TAD	

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
		9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	SB	
8. Rendahnya kualitas pelayanan publik	Isu PB Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045: Rendahnya kualitas pelayanan publik	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	TAD	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait rendahnya kualitas pelayanan publik telah terakomodir pada KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau 2025 – 2045 - Terdapat indikator TPB yang belum mencapai target dan berkaitan dengan isu rendahnya kualitas pelayanan publik dengan gap positif sehingga perlu adanya peningkatan angka capaian agar dapat mencapai target, sedangkan terdapat indikator TPB yang belum dilaksanakan dan tidak ada data sehingga perlu dilaksanakan guna mengetahui capaian dan gap dengan target.
		1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	TAD	
		1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	SB	
		1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BB	
		1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	SB	
		10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil	TAD	
		10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	TAD	
		16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan	TAD	
		16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	TAD	
		16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	TAD	
		16.6.1.(c) Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan	TAD	
		16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	TAD	
		16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	TAD	
		16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	SB	
		16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	TAD	
		16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	TAD	

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
		17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	TAD	
		17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	TAD	
		17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	SB	
		17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	TAD	
		17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	TAD	
		17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	SB	
		2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	TAD	
		2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	TAD	
		3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	SB	
		3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	SB	
		3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	TAD	
		3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	SB	
		3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	TAD	
		3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	SB	
		3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	SB	
		3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	SB	
		3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	TAD	
		3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BB	
		3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per	TAD	

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tinjauan KLHS Lainnya	Indikator TPB	Capaian	Kesimpulan
		1000 perempuan di kelompok umur yang sama.		
		3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	TAD	
		3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.	TAD	
		3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	BB	
		3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	TAD	
		3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.	TAD	
		3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	TAD	
		3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	SB	
		5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	TAD	
		5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	TAD	
		5.6.1* Proporsi perempuan umur 15 - 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	TAD	
		5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BB	
		5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BB	
		1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	SB	

Sumber: Hasil Analisis 2024



BAB V

ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI

5.1. Analisis Proyeksi Capaian TPB

Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Tahapan proyeksi capaian TPB merupakan tahapan yang dilakukan untuk memprediksi pencapaian target TPB oleh Kabupaten Lamandau pada akhir periode RPJMD dan target akhir TPB. Capaian indikator TPB di Kabupaten Lamandau dengan data time series dilakukan analisis proyeksi untuk memperoleh angka pencapaian indikator TPB di periode akhir RPJMD/ target SDGs tahun 2030. Proyeksi dilakukan melalui pendekatan analisis trend linier dan analisis gap terhadap target pencapaian indikator pada periode akhir pencapaian SDGs yaitu sampai dengan tahun 2030 menggunakan dasar target dari Perpres 59 Tahun 2017.

Berdasarkan proyeksi ini diharapkan akan diperoleh gambaran target dan waktu pencapaian TPB. Selain itu proyeksi ini dapat dipergunakan untuk menentukan prioritas program kegiatan yang akan dilakukan selama periode RPJMD. Proses proyeksi dilakukan terhadap indikator yang belum tercapai dari target nasional. Hal ini untuk memprediksi capaian indikator pada akhir tahun RPJMD dan Perpres. Analisis ini melakukan proyeksi untuk seluruh indikator baik yang tercapai maupun yang belum tercapai.

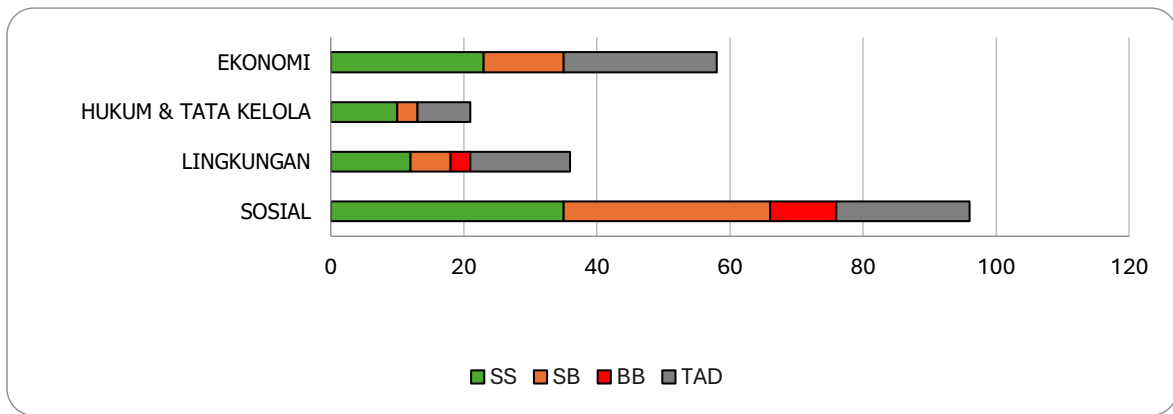
Perlu menjadi catatan bahwa hasil proyeksi menggunakan asumsi pertumbuhan secara normal berdasarkan angka pencapaian time series tanpa mempertimbangkan kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang, sehingga angka-angka hasil proyeksi ini masih bisa dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih komprehensif.

Selain itu pada beberapa indikator yang belum memiliki data juga diproyeksikan untuk dapat terdata atau tetap tidak terdata dengan merujuk pada ketersediaan penjelasan metadata edisi kesatu yang disusun oleh BAPPENAS. Berdasarkan analisis proyeksi yang dijelaskan dalam tabel maka berikut adalah rangkuman hasil proyeksi capaian sampai dengan tahun akhir RPJMD Kabupaten Lamandau yaitu tahun 2029.

Tabel 5-1 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB di Tahun 2029

No	TPB	SS	SB	BB	TAD
1	Tanpa Kemiskinan	7	10	3	4
2	Tanpa Kelaparan	5	3	0	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	9	2	9
4	Pendidikan berkualitas	S4	7	1	1
5	Kesetaraan Gender	5	2	4	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	4	0	9
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	4	0	8
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	7	1	0	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	4	2	0	5
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3	2	2	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	1	0	0	4
13	Penanganan dan Perubahan Iklim	1	0	1	0
15	Ekosistem Daratan	3	0	0	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh	10	3	0	8
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	5	5	0	5
	Grand Total	80	52	13	66

Sumber: Hasil Analisis 2024



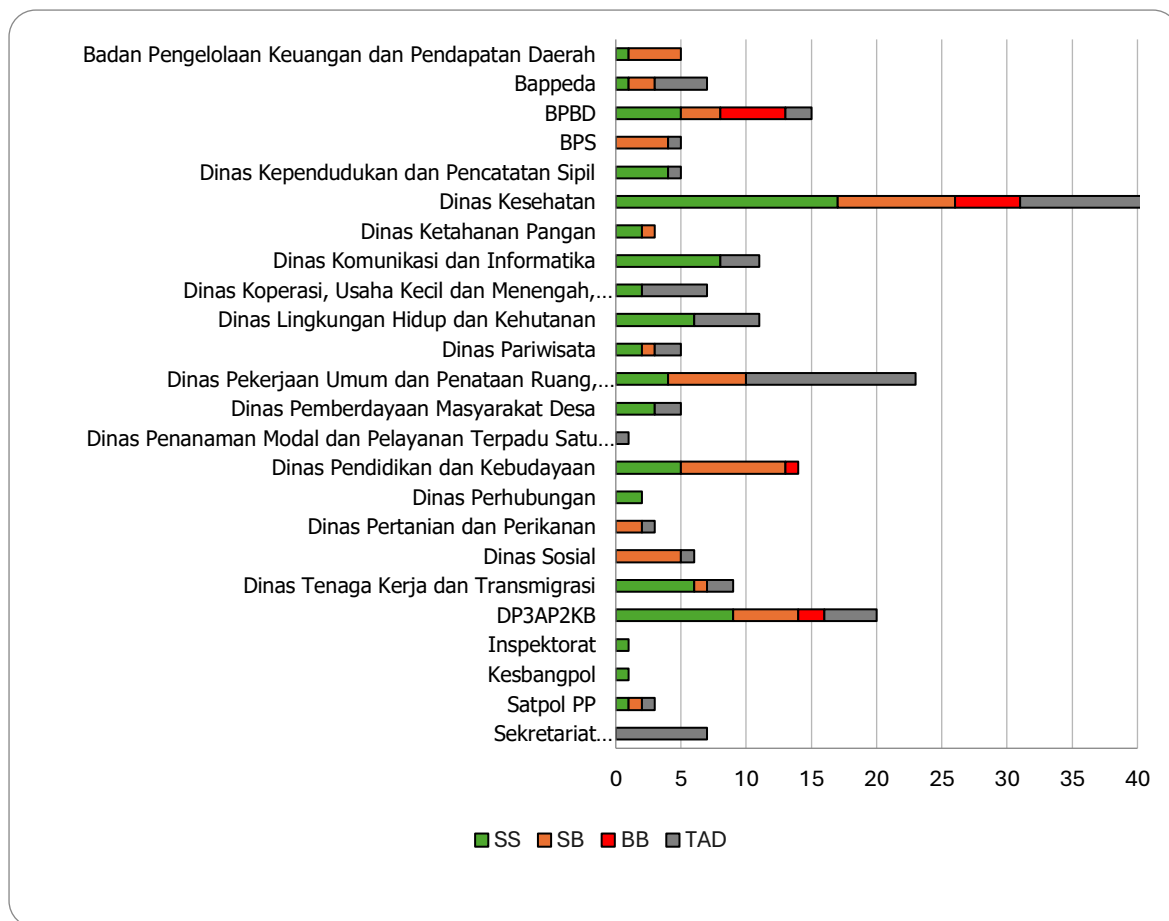
Gambar 5-1 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB di Tahun 2029

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 5-2 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD di Tahun 2029

TPB	SS	SB	BB	TAD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	4	0	0
Bappeda	1	2	0	4
BPBD	5	3	5	2
BPS	0	4	0	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	0	0	1
Dinas Kesehatan	17	9	5	11
Dinas Ketahanan Pangan	2	1	0	0
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	8	0	0	3
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2	0	0	5
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6	0	0	5
Dinas Pariwisata	2	1	0	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	5	0	13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	0	0	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	9	1	0
Dinas Perhubungan	2	0	0	0
Dinas Pertanian dan Perikanan	0	2	0	1
Dinas Sosial	0	5	0	1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	1	0	2
DP3AP2KB	9	5	2	4
Inspektorat	1	0	0	0
Kesbangpol	1	0	0	0
Satpol PP	1	1	0	1
Sekretariat Daerah	0	0	0	7
Total	80	52	13	66

Sumber: Hasil Analisis 2024



Gambar 5-2 Rekapitulasi Proyeksi Capaian Indikator TPB di Tahun 2029 Berdasarkan OPD

Sumber: Hasil Analisis 2024

5.2. Analisis Capaian Indikator TPB pada OPD

5.2.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 5 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 1 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dan 4 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai.

Tabel 5-3 Capaian Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.a.2*	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat	Meningkat	12	10.70	10.00	9.30	8.60	7.90	7.20	Perlu ditingkatkan	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat - Rendahnya kualitas pelayanan publik
8	EKONOMI	8.1.1.(a)	8.1.1.(a) PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Meningkat	69.392	70.21	71.37	72.53	73.69	74.85	76.01	Tidak ada gap	SS	- Masih Terdapat Kemiskinan
8	EKONOMI	8.1.1*	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	100.00%	-1.35%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	Perlu ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1*	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	100.00%	92.21%	92.22%	92.87%	93.52%	94.18%	94.83%	95.48%	4.52%	SB	
17	EKONOMI	17.1.2*	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	Meningkat	2.28%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	Perlu ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.2. Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki 7 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 1 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 2 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, dan 4 indikator tidak ada data.

Tabel 5-4 Capaian Indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	EKONOMI	8.10.1*	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih Terdapat Kemiskinan
9	EKONOMI	9.5.1*	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Meningkat	Meningkat	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan
10	EKONOMI	10.1.1*	10.1.1* Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36 - 0,37	Menurun	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36	0.37	Perlu Diturunkan	SB	- Masih Terdapat Kemiskinan
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(b)	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Meningkat	63.2	63.39	64.13	64.86	65.59	66.32	67.05	Tidak Ada Gap	SS	
17	EKONOMI	17.17.1.(a)	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ada	ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.17.1.(b)	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah	ada	ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)												
17	EKONOMI	17.18.1.(d)	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih Terdapat Kemiskinan - Rendahnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Analisis, 2024

5.2.3. BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki 15 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 5 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 3 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 5 indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai, dan 2 indikator tidak ada data.

Tabel 5-5 Capaian Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.5.1*	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Menurun	548	2297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada Gap	SS	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STAT US 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.5.1.(b)	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkatkan menja di 151 ribu	Meningkatkan	NA	0	0	0	0	0	0	Perlu Ditingkatkan	BB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
1	SOSIAL	1.5.2.(a)	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun menja di 0,10%	menurun menja di 0,10%	NA	498,121,207,304	599,545,686,500	700,970,165,696	802,394,644,893	903,819,124,089	1,005,243,603,286	Perlu Diturunkan	SB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
1	SOSIAL	1.5.3*	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Perlu diadakan	BB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
1	SOSIAL	1.5.1.(a)	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkatkan menja di 39 daerah	Meningkatkan	3	6	7	8	9	10	11	Tidak Ada Gap	SS	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
1	SOSIAL	1.5.1.(c)	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Meningkatkan menja di 81,5 ribu	Meningkatkan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
1	SOSIAL	1.5.1.(d)	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana	Meningkatkan menja di 450	Meningkatkan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STAT US 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.												
1	SOSIAL	1.5.1.(e)	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurun menjadi 118,6	Menurun	83.87	85.74	83.87	82.00	80.14	78.27	76.41	Tidak Ada Gap	SS	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
11	LINGKUNGAN	11.5.1*	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Menurun	548	2297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
11	LINGKUNGAN	11.5.1.(a)	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Menurun mencapai 30%	Menurun	83.87	85.74	83.87	82.00	80.14	78.27	76.41	Perlu Diturunkan	SB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
11	LINGKUNGAN	11.5.1.(c)	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Perlu diadakan	BB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
11	LINGKUNGAN	11.5.2.(a)	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi	Menurun	Menurun	NA	498,121,207,303.56	599,545,686,500.00	700,970,165,696.41	802,394,644,892.84	903,819,124,089.25	1,005,243,603,285.69	Perlu Diturunkan	SB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STAT US 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			langsung akibat bencana												
11	LINGKUNGAN	11.b.2*	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Perlu diadakan	BB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
13	LINGKUNGAN	13.1.2*	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	Menurun	548	3769.85	1734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
13	LINGKUNGAN	13.1.1*	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	ada	ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Perlu diadakan	BB	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Analisis, 2024

5.2.4. BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki 5 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 4 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 1 indikator tidak ada data.

Tabel 5-6 Capaian Indikator Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17	EKONOMI	17.18.1.(b)	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.1.1*	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Meningkat	1%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan
17	EKONOMI	17.1.1.(a)	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	Meningkat	13%	11.40%	10.60%	9.80%	9.00%	8.20%	7.40%	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih Terdapat Kemiskinan
17	EKONOMI	17.18.1.(a)	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	Meningkat	NA	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.19.2.(d)	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	Meningkat	98.15	98.15	97.59	97.04	96.48	95.93	95.38	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Analisis, 2024

5.2.5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 5 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 4 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, dan 1 indikator tidak ada data.

Tabel 5-7 Capaian Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.4.1.(j)	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	100%	97.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.9.1*	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	Meningkat	96.56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.9.1.(a)	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Meningkat menjadi 77,4%	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.9.1.(b)	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkat menjadi 85%	Meningkat	97.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.19.2.(b)	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Analisis, 2024

5.2.6. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki 42 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 17 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 9 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 5 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 11 indikator tidak ada data.

Tabel 5-8 Capaian Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.4.1.(b)	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	2024 : Meningkatkan menjadi 90%	100.00%	NA	71.83%	75.55%	79.27%	82.99%	86.71%	90.43%	9.57%	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
1	SOSIAL	1.4.1.(c)	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	100.00%	NA	23.00%	12.60%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	BB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
1	SOSIAL	1.3.1.(a)	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	2019: minimal 98%	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
1	SOSIAL	1.4.1.(a)	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	100.00%	NA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
2	SOSIAL	2.2.2.(b)	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	100.00%	NA	54.43%	53.16%	51.89%	50.62%	49.35%	48.08%	51.92%	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
2	SOSIAL	2.1.1.(a)	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	0.00%	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
2	SOSIAL	2.2.1*	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	menurun menjadi 19%	0.00%	NA	8.94	7.01	5.08	3.16	1.23	0.00	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
															pelayanan publik
2	SOSIAL	2.2.1.(a)	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	0.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
2	SOSIAL	2.2.2*	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	Menurun menjadi 7%	0.00%	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
2	SOSIAL	2.2.2.(a)	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.1.2*	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	100.00%	NA	93.15%	92.11%	91.07%	90.03%	88.99%	87.95%	12.05%	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.1.1*	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurun menjadi 183	69	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.2.2.(a)	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Menurun	NA	25.00	28.15	31.31	34.46	37.62	40.77	Perlu Diturunkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.1.2.(a)	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	100.00%	NA	99.34%	99.73%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3	SOSIAL	3.2.1*	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	25 per 1000	NA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.2.2*	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	12 per 10000	NA	11.50	10.15	8.81	7.46	6.12	4.77	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.5*	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Menurun	NA	2.60	4.19	3.44	2.46	1.90	2.76	Perlu Diturunkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.2.2.(b)	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	100.00%	NA	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.1.(a)	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0.00%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.2.(a)	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 190	0.00	NA	59.36	53.89	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.3*	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3	SOSIAL	3.3.3.(a)	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	meningkat	NA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.4.(a)	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	meningkat	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.5.(b)	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35	meningkat	NA	54.00	54.40	54.80	55.20	55.60	56.00	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.3.5.(a)	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.4.1.(b)	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	Menurun	NA	94.30	124.30	154.30	184.30	214.30	244.30	Perlu Diturunkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.4.1.(a)	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	menurun	NA	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.4.1.(c)	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	Menurun	NA	21.60	25.92	30.24	34.56	38.88	43.20	Perlu Diturunkan	SB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.5.2*	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Diturunkan	BB	- Rendahnya

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.												a kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.4.2*	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Menurun	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.4.2.(a)	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	Meningkat	NA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.5.1.(e)	3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.8.2*	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	Meningkat	meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Ditingkatkan	BB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.7.2.(a)	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.8.1.(a)	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	0.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.a.1*	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	0.00	NA	29.89	29.76	29.62	29.48	29.35	29.21	29.21	SB	- Rendahnya kualitas

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
															elayanan publik
3	SOSIAL	3.8.2.(a)	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	100.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.9.3.(a)	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.b.1.(a)	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
3	SOSIAL	3.c.1*	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	100.00	NA	496.40	509.00	521.60	534.20	546.80	559.40	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
5	SOSIAL	5.6.1.(a)	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 7,4%	0.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Diturunkan	BB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
5	SOSIAL	5.6.1.(b)	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	100.00%	NA	95.00%	97.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	BB	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Analisis, 2024

5.2.7. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan memiliki 3 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 2 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, dan 1 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

Tabel 5-9 Capaian Indikator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATU S 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	SOSIAL	2.1.1*	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Menurun menjadi 5%	0.00%	7.13%	7.67%	8.18%	8.69%	9.20%	9.71%	10.22%	10.22%	SB	- Masih terdapat kemiskinan
2	SOSIAL	2.1.2*	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	Menurun	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Masih Terdapat Kemiskinan - Rendahnya kualitas pelayanan publik
2	SOSIAL	2.1.2.(a)	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	0	5.6	5.00	4.40	3.80	3.20	2.60	2.00	Tidak Ada Gap	SS	- Masih Terdapat Kemiskinan - Rendahnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Analisis, 2024

5.2.8. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian memiliki 11 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 8 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, dan 3 indikator tidak ada data.

Tabel 5-10 Capaian Indikator Dinas Komunikasi Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	SOSIAL	4.4.1*	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															- Masih Terdapat Kemiskinan
5	SOSIAL	5.b.1*	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Meningkat	85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat - Masih Terdapat Kemiskinan
9	EKONOMI	9.c.1*	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Meningkat	Meningkat	15	17	19	22	24	27	30	Tidak Ada Gap	SS	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
9	EKONOMI	9.c.1.(a)	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Meningkat	60	70.00	83.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
9	EKONOMI	9.c.1.(b)	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Meningkat	60	70.00	83.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.10.2.(c)	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17	EKONOMI	17.6.2.(b)	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Meningkat	15	17.50	20.80	24.10	27.40	30.70	34.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.6.2.(c)	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Meningkat	10	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.8.1*	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Meningkat	80	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik
17	EKONOMI	17.18.1.(c)	17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya kualitas

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)												pelayanan publik
17	EKONOMI	17.19.2.(c)	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	Meningkat	77820	72,778.00	76,829.20	80,880.40	84,931.60	88,982.80	93,034.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Analisis, 2024

5.2.9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian memiliki 7 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 2 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, dan 5 indikator tidak ada data.

Tabel 5-11 Capaian Indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	EKONOMI	8.10.1.(b)	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total BPS kredit.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah - Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.3.1.(c)	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih terdapat kemiskinan
9	EKONOMI	9.2.1*	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
9	EKONOMI	9.2.1.(a)	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah - Masih terdapat kemiskinan
9	EKONOMI	9.2.2*	9.2.2* Proporsi tenaga	Meningkat 15,7%	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih terdapat kemiskinan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			kerja pada sektor industri manufaktur												
9	EKONOMI	9.3.1*	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	Meningkat	NA	3.07	3.23	3.38	3.54	3.69	3.85	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan
9	EKONOMI	9.3.2*	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkat	Meningkat	NA	7.81	8.15	8.49	8.83	9.17	9.51	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 11 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 6 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, dan 5 indikator tidak ada data.

Tabel 5-12 Capaian Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	LINGKUNGAN	6.3.2.(b)	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat (82)	meningkat	66.84	82.00	88.00	94.00	100.00	106.00	112.00	Tidak Ada Gap	SS	- Penurunan Kualitas Air
6	LINGKUNGAN	6.4.1.(b)	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi Lingkungan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
11	LINGKUNGAN	11.6.1.(a)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Meningkat menjadi 80%		79.7	84.55	88.90	93.25	97.60	100.00	100.00	0%	SS	- Degradasi Lingkungan
12	LINGKUNGAN	12.4.2.(a)	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (Sektor industri)	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	meningkat	172	135.98	137.45	138.92	140.39	141.86	143.33	Tidak Ada Gap	SS	- Degradasi Lingkungan
12	LINGKUNGAN	12.5.1.(a)	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton per hari (skala nasional)	meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Degradasi Lingkungan
12	LINGKUNGAN	12.6.1.(a)	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Meningkat	meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Degradasi Lingkungan
12	LINGKUNGAN	12.7.1.(a)	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Meningkat	meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Degradasi Lingkungan
15	LINGKUNGAN	15.1.1.(a)	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	Meningkat	76.58	86.44	91.06	95.68	100.30	104.92	109.54	Tidak Ada Gap	SS	- Terjadinya Alih Fungsi Lahan
15	LINGKUNGAN	15.3.1.(a)	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	5,5 juta ha (skala nasional)	Meningkat	NA	54,750.30	54,750.22	54,750.14	54,750.06	54,749.98	54,749.90	Tidak Ada Gap	SS	- Terjadinya Alih Fungsi Lahan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	LINGKUNGAN	15.6.1*	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.	ada	ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Terjadinya Alih Fungsi Lahan
15	LINGKUNGAN	15.9.1.(a)	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	Meningkat	1	1	1	1	1	1	1	Tidak Ada Gap	SS	- Terjadinya Alih Fungsi Lahan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.11. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata memiliki 5 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 2 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 1 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 2 indikator tidak ada data.

Tabel 5-13 Capaian Indikator Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	EKONOMI	8.9.1.(a)	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 26 juta (skala nasional)	Meningkat	NA	0	0	0	0	0	0	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.9.1*	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Meningkat menjadi 5,5%	Meningkat	NA	4.41	4.86	5.31	5.76	6.21	6.66	Tidak Ada Gap	SS	- - Masih terdapat

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															kemiskinan
8	EKONOMI	8.9.1.(b)	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	Meningkat	NA	36863.60	37665.70	38467.80	39269.90	40072.00	40874.10	Tidak Ada Gap	SS	- - Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.9.1.(c)	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- - Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.9.2*	8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- - Masih terdapat kemiskinan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 23 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 5 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 4 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, dan 14 indikator tidak ada data.

Tabel 5-14 Capaian Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.4.1.(d)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100.00%	81.28	83.10	85.24	87.38	89.52	91.66	93.80	6.20	SB	- Penurunan Kualitas Air - Masih terdapat kemiskinan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	SOSIAL	1.4.1.(e)	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100.00%	84.48	89.44	93.28	97.13	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan - Masih terdapat kemiskinan
1	SOSIAL	1.4.1.(k)	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(a)	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	100%	81.28	83.10	85.24	87.38	89.52	91.66	93.80	6.20	SB	- Penurunan Kualitas Air
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(b)	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik		0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	Perlu Ditingkatkan	SB	- Penurunan Kualitas Air
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(c)	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100%	14.27	14.62	15.64	16.67	17.69	18.71	19.73	80.27	SB	- Penurunan Kualitas Air - Masih terdapat kemiskinan
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(a)	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(b)	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang	Meningkat menjadi 100%	100%	84.48	89.44	93.28	97.13	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Penurunan Kualitas Air

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.												- Degradasi lingkungan - Masih terdapat kemiskinan
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(c)	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(d)	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Meningkat	42	44.80	49.60	54.40	59.20	64.00	68.80	Tidak Ada Gap	SS	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(e)	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(f)	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Meningkat	0.89	1.15	1.28	1.41	1.54	1.67	1.80	Tidak Ada Gap	SS	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.3.1.(a)	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(a)	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(c)	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	8 Wilayah Sungai	Ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(f)	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 Wilayah Sungai (skala nasional)	Ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air
6	LINGKUNGAN	6.3.1.(b)	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(g)	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	ada	Ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Penurunan Kualitas Air
7	EKONOMI	7.2.1*	7.2.1* Bauran energi terbarukan.	10-16%	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Degradasi lingkungan
7	EKONOMI	7.3.1*	7.3.1* Intensitas energi primer	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Degradasi lingkungan
11	LINGKUNGAN	11.1.1.(a)	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Meningkat	85.95	84.35	85.95	87.55	89.15	90.75	92.35	Tidak Ada Gap	SS	- Penurunan Kualitas Air

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
11	LINGKUNGAN	11.3.2.(b)	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	ada	ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
12	LINGKUNGAN	12.8.1.(a)	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Meningkat	meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah

Sumber: Analisis, 2024

5.2.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki 5 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 3 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, dan 2 indikator tidak ada data.

Tabel 5-15 Capaian Indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	EKONOMI	10.1.1.(b)	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Terentaskan 80 kabupaten (skala nasional)	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih terdapat kemiskinan
10	EKONOMI	10.1.1.(c)	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal	Berkurang 5.000 desa (skala nasional)	Menurun	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan
10	EKONOMI	10.1.1.(d)	10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri	Meningkat 2.000 desa (skala nasional)	Meningkat	20	18.00	21.15	24.31	27.46	30.62	33.77	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan
10	EKONOMI	10.1.1.(e)	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	Meningkat	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
10	EKONOMI	10.1.1.(f)	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Menurun menjadi 14%	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih terdapat kemiskinan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 1 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut diketahui bahwa indikator tidak ada data.

Tabel 5-16 Capaian Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	EKONOMI	8.10.1.(a)	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Menurun (mendekat)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah

Sumber: Analisis, 2024

5.2.15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 14 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 5 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 8 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, dan 1 indikator tidak ada data.

Tabel 5-17 Capaian Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	SOSIAL	1.4.1.(g)	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Meningkat menjadi 94,78%	100	93.73	92.69	91.88	91.06	90.25	89.43	88.62	11.38	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
1	SOSIAL	1.4.1.(h)	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 82,2%	100	75.95	75.12	75.22	75.32	75.42	75.52	75.62	24.38	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.1.1.(a)	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	100.00%	33.21	32.32	32.28	32.24	32.19	32.15	32.10	67.90	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.1.1*	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Meningkat	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.1.1.(b)	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	100.00%	32.15	34.01	35.53	37.05	38.58	40.11	41.63	58.37	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.1.1.(d)	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Meningkat	102	98.73	96.31	93.88	91.45	89.03	86.60	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.1.1.(e)	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	106.94%	Meningkat	95.16	94.95	94.15	93.36	92.57	91.78	90.99	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.2.2.(a)	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK)	Meningkat menjadi 77,2%	Meningkat	82.66	78.82	77.17	75.51	73.86	72.21	70.55	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya tingkat

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).												pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.6.1.(a)	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	100.00%	99.44	98.91	98.86	98.81	98.76	98.71	98.66	1.34	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.a.1*	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.c.1*	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Meningkat	Paud: 6.8 SD: 41.8 SMP: 25.01 SMA: N/A SMK: N/A SLB: N/A	Paud: 8 SD: 41.6 SMP: 23.61 SMA: 31.65 SMK: 74.45 SLB: 0.65	Paud: 8.53 SD: 41.7 SMP: 23.77 SMA: 32.5 SMK: 88.6 SLB: 3.65	Paud: 9.51 SD: 42.25 SMP: 23.12 SMA: 31.38 SMK: 93.72 SLB: 0.98	Paud: 10.19 SD: 42.2 SMP: 22.5 SMA: 30.68 SMK: 100 SLB: 0	Paud: 11.07 SD: 42.53 SMP: 22.25 SMA: 30.54 SMK: 100 SLB: 0	Paud: 11.82 SD: 42.78 SMP: 21.62 SMA: 29.63 SMK: 100 SLB: 0	Perlu Ditingkatkan	SB	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4	SOSIAL	4.1.1.(g)	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Meningkat	8.67	8.76	8.87	8.98	9.09	9.19	9.30	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.5.1*	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di: 1) SD/MI/ sederajat; 2) SMP/MTs/ sederajat; 3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di: Perguruan Tinggi.	Meningkat	Meningkat	SD: 99.51% SMP: 90.01%	SD: 99.17% SMP: 90.92%	SD: 99.45% SMP: 91.43%	SD: 99.66% SMP: 92.28%	SD: 99.56% SMP: 93.11%	SD: 99.65% SMP: 93.82%	SD: 99.82% SMP: 94.56%	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4	SOSIAL	4.6.1.(b)	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	Meningkat	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Sumber: Analisis, 2024

5.2.16. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki 2 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 2 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Tabel 5-18 Capaian Indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9	EKONOMI	9.2.1.(b)	9.1.2.(b) Jumlah dermaga	275	Meningkat	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Tidak Ada Gap	SS	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah

			penyeberangan												
9	EKONOMI	9.2.1.(c)	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	24	Meningkat	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Tidak Ada Gap	SS	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah

Sumber: Analisis, 2024

5.2.17. Dinas Pertanian dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki 3 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 2 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, dan 1 indikator tidak ada data.

Tabel 5-19 Capaian Indikator Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	SOSIAL	2.2.2.(c)	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 95,2; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun 62 kg/kapita/ tahun	Meningkat	55.34	62.21	54.90	47.59	40.28	32.96	25.65	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan
2	SOSIAL	2.3.1*	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumla tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	meningkat Rp 45,44 juta/tenaga kerja	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.3.1.(b)	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat		NA	45.63	44.24	42.85	41.46	40.07	38.69	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.18. Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki 6 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 5 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, dan 1 indikator tidak ada data.

Tabel 5-20 Capaian Indikator Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.2.1*	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2019 : Menurun menjadi 7-8%	0	3.12	2.90	2.68	2.46	2.24	2.02	1.80	1.80	SB	- Masih Terdapat Kemiskinan
1	SOSIAL	1.3.1.(c)	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	Meningkat	NA	83.26	77.68	72.10	66.52	60.94	55.36	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih Terdapat Kemiskinan
1	SOSIAL	1.3.1.(d)	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	Menurun	NA	1741.61	1972.93	2204.24	2435.55	2666.87	2898.18	Perlu Diturunkan	SB	- Masih Terdapat Kemiskinan
1	SOSIAL	1.a.1*	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	Meningkat	0.74	0.56	0.46	0.37	0.27	0.17	0.08	Perlu Ditingkatkan	SB	- Masih terdapat kemiskinan
10	EKONOMI	10.1.1.(a)	10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun menjadi 6-7%	0	3.12	3.60	3.69	3.79	3.88	3.97	4.07	4.07	SB	- Masih terdapat kemiskinan
10	EKONOMI	10.2.1*	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih terdapat kemiskinan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			jenis kelamin dan penyandang disabilitas.												

Sumber: Analisis, 2024

5.2.19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 9 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 6 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 1 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, dan 2 indikator tidak ada data.

Tabel 5-21 Capaian Indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SOSIAL	1.3.1.(b)	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94%	Meningkat	44.67	52.79	66.97	81.15	95.33	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Masih Terdapat Kemiskinan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
8	EKONOMI	8.2.1*	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat		3.72	5.06	6.00	6.93	7.87	8.80	9.73	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.3.1*	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat		NA	54.94	56.54	58.14	59.74	61.34	62.95	Tidak Ada Gap	SS	- Masih Terdapat Kemiskinan
8	EKONOMI	8.3.1.(a)	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Meningkat mencapai 51%		NA	49.18	49.86	50.53	51.21	51.89	52.57	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.5.1*	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Meningkat	NA	16,632.00	16,677.00	16,722.00	16,767.00	16,812.00	16,857.00	Tidak Ada Gap	SS	- Masih terdapat kemiskinan
8	EKONOMI	8.5.2*	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun 3,6 - 4,3 %	0	3.32	3.60	3.86	4.11	4.36	4.62	4.87	4.87	SB	- Masih Terdapat Kemiskinan

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
8	EKONOMI	8.5.2.(a)	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih Terdapat Kemiskinan
8	EKONOMI	8.6.1*	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	- Masih Terdapat Kemiskinan - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
10	EKONOMI	10.4.1.(b)	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Meningkat	44.67	52.79	66.97	81.15	95.33	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	- Masih Terdapat Kemiskinan

Sumber: Analisis, 2024

5.2.20. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

DP3AP2KB memiliki 20 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 9 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 5 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, 2 indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai, dan 4 indikator tidak ada data.

Tabel 5-22 Capaian Indikator DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	SOSIAL	3.7.1*	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	100.00%	79.16	76.42	76.56	76.7	76.84	76.99	77.13	22.87	SB	
3	SOSIAL	3.7.1.(a)	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	100.00%	65.9	65.81	63.30	60.79	58.28	55.77	53.26	46.74	SB	
3	SOSIAL	3.7.1.(b)	3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	meningkat	68.34	77.34	89.68	100.00	100.00	100.00	100.00	Tidak Ada Gap	SS	
3	SOSIAL	3.7.2*	3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Menurun menjadi 38	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
5	SOSIAL	5.1.1*	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	meningkat	NA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Perlu Ditingkatkan	SB	
5	SOSIAL	5.2.1*	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Diturunkan	BB	
5	SOSIAL	5.2.1.(a)	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Diturunkan	BB	
5	SOSIAL	5.2.2.(a)	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	100.00%	100	100	100	100	100	100	100	Tidak Ada Gap	SS	
5	SOSIAL	5.2.2*	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	Menurun	Menurun	NA	13.10	9.70	6.30	2.90	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.												
5	SOSIAL	5.3.1*	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
5	SOSIAL	5.3.1.(a)	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	meningkat	20.31	20.40	20.49	20.58	20.67	20.76	20.85	Tidak Ada Gap	SS	
5	SOSIAL	5.3.1.(b)	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	meningkat	32.3	35.80	33.35	30.90	28.45	26.00	23.55	Perlu Ditingkatkan	SB	
5	SOSIAL	5.5.1*	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	Meningkat	24	29.32	32.74	36.16	39.58	43.00	46.42	Tidak Ada Gap	SS	
5	SOSIAL	5.5.2*	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
5	SOSIAL	5.6.1*	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15 - 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.2.1.(a)	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	Menurun	NA	39.32	40.01	40.70	41.39	42.08	42.77	Perlu Diturunkan	SB	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.2.1.(b)	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Menurun	Menurun	NA	0.98	0.84	0.70	0.55	0.41	0.27	Tidak Ada Gap	SS	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.2.3.(a)	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Menurun	Menurun	78	80.54	76.16	71.79	67.42	63.05	58.68	Tidak Ada Gap	SS	

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.7.1.(a)	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	Meningkat	20	26.20	28.69	31.17	33.66	36.14	38.63	Tidak Ada Gap	SS	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.7.1.(b)	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Meningkat	Meningkat	16.25	17.42	18.55	19.68	20.81	21.94	23.07	Tidak Ada Gap	SS	

Sumber: Analisis, 2024

5.2.21. Inspektorat

Inspektorat memiliki 1 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut diketahui bahwa indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Tabel 5-23 Capaian Indikator Inspektorat Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(a)	16.6.1.(a) Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Meningkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tidak Ada Gap	SS	

Sumber: Analisis, 2024

5.2.22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kesbangpol memiliki 1 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut diketahui bahwa indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Tabel 5-24 Capaian Indikator Kesbangpol Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.2.(a)	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Menurun	Menurun	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	

Sumber: Analisis, 2024

5.2.23. Satpol PP/Satpoldam

Satpol PP/Satpoldam memiliki 3 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 1 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 1 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 1 indikator tidak ada data

Tabel 5-25 Capaian Indikator Satpol PP/Satpoldam Kabupaten Lamandau

NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.3.(a)	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	Menurun	0.029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Ada Gap	SS	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.4*	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan	Meningkat	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.1.(a)	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Menurun	Menurun	1	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	Perlu Diturunkan	SB	

Sumber: Analisis, 2024

5.2.24. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki 7 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil analisis dari capaian tersebut didapatkan bahwa keseluruhan indikator tidak ada data.

Tabel 5-26 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

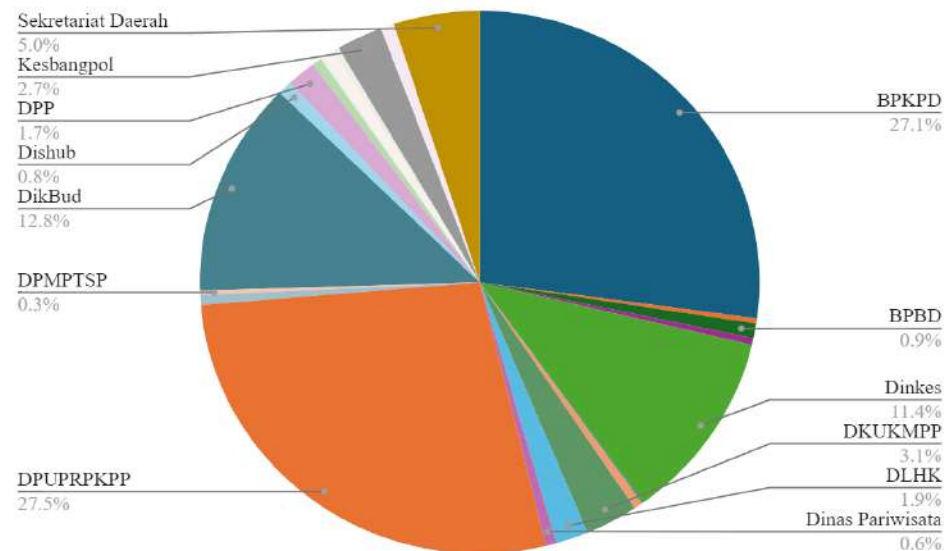
NO TPB	Pilar	No Indikator	INDIKATOR	Target Perpres 59 Tahun 2017	Target 2030	Capaian 2023	PROYEKSI						Gap terhadap Target 2030	STATUS 2029	Isu Strategis
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	EKONOMI	10.3.1.(a)	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil	Meningkat menjadi 87	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
10	EKONOMI	10.3.1.(d)	10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Tidak Ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.5.1.(a)	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Meningkat menjadi 4,0	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(c)	16.6.1.(c) Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan	Menjadi menjadi 80%	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(d)	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.2.(a)	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	
16	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.b.1.(a)	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perlu Pendataan	TAD	

Sumber: Analisis, 2024

5.3. Analisis Capaian Indikator pada OPD berdasarkan Proporsi Anggaran

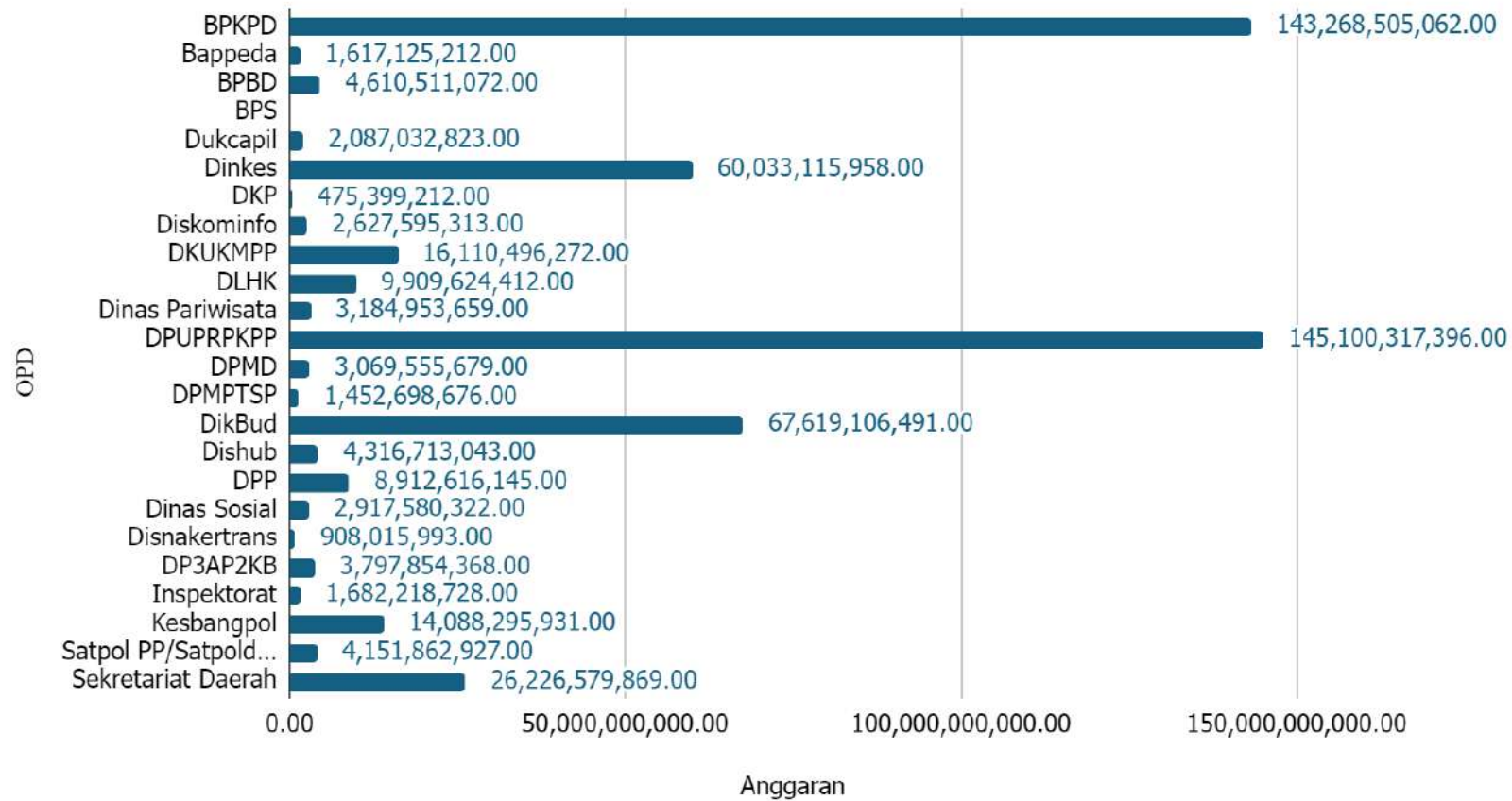
Berdasarkan distribusi anggaran dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD dengan anggaran terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusul oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 5 Dinas yang memiliki distribusi terbesar adalah

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (27,47%)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (27,13%)
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (12,80%)
4. Dinas Kesehatan (11,37%)
5. Sekretariat Daerah (4,97%)



Gambar 5-3 Distribusi Anggaran TPB di Tahun 2023 berdasarkan OPD

Sumber: Hasil Analisis 2024



Gambar 5-4 Rekapitulasi Anggaran TPB di Tahun 2023 berdasarkan OPD

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 5-27 Capaian Indikator OPD Berdasarkan Proporsi Anggaran

No	Nama OPD	Keterkaitan TPB	STATUS 2023				Anggaran 2023	Proyeksi Anggaran 2029	Distribusi Anggaran 2023
			SS	SB	BB	TAD			
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1, 8, 16, 17	2	5	0	0	143,268,505,062.00	430,427,794,598.88	27.13%
2	Bappeda	8, 9, 10, 11, 16, 17	2	1	0	5	1,617,125,212.00	-81,472,017.20	0.31%
3	BPBD	1, 11, 13	4	4	5	2	4,610,511,072.00	5,316,250,455.54	0.87%
4	BPS	17	0	2	0	1			0.00%
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1, 16, 17	2	2	0	1	2,087,032,823.00	1,678,631,784.35	0.40%
6	Dinas Kesehatan	1, 2, 3, 5	17	9	5	11	60,033,115,958.00	88,781,526,356.70	11.37%
7	Dinas Ketahanan Pangan	2	2	1	0	0	475,399,212.00	817,207,226.00	0.09%
8	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	4, 5, 9, 16, 17	8	0	0	4	2,627,595,313.00	4,524,605,488.62	0.50%
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	8, 9	2	0	0	5	16,110,496,272.00	26,893,561,964.95	3.05%
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6, 11, 12, 15	2	5	0	7	9,909,624,412.00	14,188,069,257.48	1.88%
11	Dinas Pariwisata	8	2	1	0	2	3,184,953,659.00	9,883,202,669.31	0.60%
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1, 6, 7, 9, 11, 12	0	1	0	26	145,100,317,396.00	210,354,980,783.76	27.47%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10	3	0	0	2	3,069,555,679.00	3,661,120,778.52	0.58%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	0	0	0	1	1,452,698,676.00	2,991,486,473.70	0.28%
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1, 4	6	7	1	0	67,619,106,491.00	100,050,809,138.60	12.80%
16	Dinas Perhubungan	9	0	2	0	0	4,316,713,043.00	8,018,682,658.05	0.82%
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	2, 8	0	2	0	1	8,912,616,145.00	11,283,104,953.46	1.69%
18	Dinas Sosial	1, 10	3	2	0	1	2,917,580,322.00	5,523,627,257.93	0.55%
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1, 8, 10	4	3	0	2	908,015,993.00	-78,763,345.00	0.17%
20	DP3AP2KB	3, 5, 16	10	4	2	4	3,797,854,368.00	2,351,069,559.03	0.72%
21	Inspektorat	16	1	0	0	0	1,682,218,728.00	594,725,858.96	0.32%
22	Kesbangpol	16	1	0	0	0	14,088,295,931.00	31,006,011,754.57	2.67%
23	Satpol PP/Satpoldam	16	1	1	0	1	4,151,862,927.00	6,401,434,583.84	0.79%
24	Sekretariat Daerah	10, 16	0	0	0	7	26,226,579,869.00	54,405,360,604.41	4.97%

No	Nama OPD	Keterkaitan TPB	STATUS 2023				Anggaran 2023	Proyeksi Anggaran 2029	Distribusi Anggaran 2023
			SS	SB	BB	TAD			
Total			72	52	13	83	528,167,774,563.00	1,018,605,322,119.86	100.00%

Sumber: LRA Tahun 2019-2023, Analisis, 2024

Selain distribusi anggaran berdasarkan OPD berikut juga disajikan distribusi anggaran berdasarkan urusan dan capaian indikator. Dengan 5 urusan yang memiliki distribusi terbesar adalah,

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (25,65%)
2. Keuangan (25,62%)
3. Kesehatan (18,83%)
4. Pendidikan (11,95%)
5. Administrasi Pemerintahan (4,89%)

Tabel 5-28 Capaian Indikator OPD Berdasarkan Kelompok Urusan

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.											
	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah											
	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	2,961,633,453.00	607,277,000.00	1,096,528,000.00	98,773,975.00	2,087,032,823.00	692,937,764.70	1,265,057,818.26	1,327,433,104.06	1,584,850,073.02	1,280,501,268.42	1,678,631,784.35
	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											
	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)											
	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
Administrasi Pemerintahan	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	14,543,863,957.00	8,588,967,009.00	19,164,891,232.00	25,229,911,058.00	27,679,278,545.00	31,914,914,327.70	39,065,477,019.46	42,556,746,889.82	47,101,226,609.42	52,509,247,285.57	57,396,847,078.10
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											
	7.2.1* Bauran energi terbarukan.											
	7.3.1* Intensitas energi primer											
Kesehatan	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan											
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.											
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	45,410,469,493.00	107,705,807,503.00	104,765,729,403.00	129,787,180,721.00	106,539,491,222.00	142,143,560,671.20	139,383,134,350.66	149,001,176,227.23	154,752,398,880.75	169,348,981,532.43	171,859,882,208.22
	1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.											
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.											
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.											
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.											
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.											
	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)											
	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.											
	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.											
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											
	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.											
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.											
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.											
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang											
	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.											
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.											
	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).											
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).											
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.											
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.											
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											
	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.											
	3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.											
	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											
	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).											
	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.											
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.											
	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.											
	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.											
	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah											
	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	10,342,494,437.00	10,097,144,288.00	40,534,211,642.00	29,589,728,337.00	22,850,669,930.00	36,035,530,237.30	38,079,425,942.84	33,878,782,368.42	39,228,886,585.82	43,194,564,645.71	42,723,696,793.96
	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.											
	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.											
	10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)											
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan											
	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana											
	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.											
	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah											
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir											
	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan											
	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional											
Keuangan	16.6.1.(a) Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan	6,966,652,287.00	6,523,827,541.00	6,301,258,174.00	135,923,149,361.00	144,950,723,790.00	181,743,361,678.39	241,815,024,276.11	297,201,026,812.38	326,152,673,800.23	381,731,031,617.77	431,022,520,457.83
	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui											
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.											
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)											
	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)											
	8.1.1.(a) PDB per kapita.											
	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)											
	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
Komunikasi & Informatika	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan											
	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	1,362,172,297.00	1,507,343,157.00	1,720,981,570.00	1,952,251,380.00	2,627,595,313.00	2,726,795,019.90	3,110,648,528.62	3,493,817,629.45	3,852,077,288.55	4,126,982,724.09	4,524,605,488.62
	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama											
	17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website											
	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)											
	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.											
	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband											
	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet											
	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.											
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam											
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet											
	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband											
Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total BPS kredit.											
	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	8,012,441,263.00	13,663,747,737.00	4,354,283,883.00	12,733,422,374.00	16,110,496,272.00	15,554,613,702.30	17,144,696,089.54	21,700,107,186.58	22,338,937,957.70	24,150,483,298.32	26,893,561,964.95

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur											
	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita											
	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri											
	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit											
Lingkungan Hidup	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani											
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (Sektor industri)											
	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang											
	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001											
	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	2,647,320,354.00	10,607,616,725.00	13,234,399,412.00	10,576,868,369.00	9,909,624,412.00	13,743,323,782.40	12,498,358,274.52	12,500,826,791.52	13,776,795,538.15	14,433,339,338.14	14,188,069,257.48
	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister											
	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan											
	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.											
	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati											
	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku											
	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.											
	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.											
	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air											
Pangan	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.											
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	1,864,900,000.00	435,435,000.00	1,022,906,038.00	1,011,032,215.00	475,399,212.00	300,913,184.70	404,171,992.96	58,608,392.42	142,797,459.85	224,350,376.35	399,939,825.69
	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.											
Pariwisata	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3,946,584,600.00	368,464,000.00	2,625,571,899.00	9,131,069,604.00	3,184,953,659.00	6,023,131,869.00	7,827,253,455.60	7,947,023,710.78	7,504,948,862.72	9,666,626,986.19	9,883,202,669.31
	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.											
	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB											
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.											
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.											
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.											
	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	112,355,507,631.00	113,282,715,716.00	122,177,950,649.00	145,976,345,300.00	145,100,317,396.00	157,233,542,072.60	170,001,380,064.78	180,169,123,777.72	187,682,127,609.48	200,467,058,823.74	210,354,980,783.76
	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur											
	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.											
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.											
	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.											
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.											
	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).											
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.											
	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.											
	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).											
	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).											
	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk											
Pemberdayaan Masyarakat & Desa	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan											
	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal	4,517,026,252.00	1,808,407,617.00	3,012,139,338.00	3,267,252,189.00	3,069,555,679.00	2,704,047,242.80	3,326,889,090.94	3,095,865,075.85	3,067,089,611.21	3,168,755,049.20	3,273,414,053.92
	10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri											
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan											
	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	921,986,300.00	692,139,252.00	950,914,243.00	1,125,500,887.00	1,019,524,248.00	1,130,544,245.30	1,267,350,572.54	1,290,141,644.38	1,339,744,671.24	1,449,472,549.96	1,508,525,949.09
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)											
	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.											
	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.											
	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.											
	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.											
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											
	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15 - 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
Pendidikan	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat											
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/ sederajat											
	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.											
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.											
	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.											
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.											
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	40,327,733,658.00	52,785,639,000.00	36,590,399,020.00	47,319,830,124.00	67,619,106,491.00	63,663,622,695.60	69,431,121,924.78	81,532,387,565.42	86,984,352,855.15	90,825,895,585.83	100,050,809,138.60
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.											
	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).											
	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di: 1) SD/MI/ sederajat; 2) SMP/MTs/ sederajat; 3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di: Perguruan Tinggi.											
	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											
	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.											
	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).											
	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.											
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.											
	3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	4,085,047,000.00	3,891,247,957.00	3,258,041,596.00	3,211,839,277.00	2,778,330,120.00	2,457,048,458.00	2,114,868,339.40	1,851,684,358.42	1,467,622,625.24	1,165,877,053.48	842,543,609.94
	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.											
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).											
	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).											
	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.											
Perencanaan	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	3,139,498,450.00	2,067,407,640.00	1,146,196,587.00	1,269,017,012.00	1,617,125,212.00	694,907,849.00	676,709,572.90	626,866,289.22	309,510,061.63	19,957,761.21	81,472,017.20
	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB											
Perhubungan	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	3,213,177,726.00	2,256,522,061.00	2,836,136,819.00	4,749,660,934.00	4,316,713,043.00	4,884,504,968.70	5,829,670,176.96	6,359,910,413.52	6,648,128,735.13	7,449,256,516.19	8,018,682,658.05
	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis											
Sosial	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	2,551,955,382.00	1,770,943,274.00	3,610,809,381.00	4,947,738,472.00	2,917,580,322.00	4,332,218,889.60	4,844,654,719.38	4,686,251,685.10	4,766,919,064.69	5,525,338,020.42	5,523,627,257.93
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial											
	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial											
	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah											
	10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal											
	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal											
	10.1.1* Koefisien Gini.											
	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											
	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil											
Tenaga Kerja	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	8,046,415,213.00	337,696,086.00	1,669,459,179.00	1,072,479,216.00	908,015,993.00						

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						- 1,655,79 1,455.60	- 958,153, 677.08	- 2,187,84 7,064.06	- 3,080,30 6,066.61	- 3,947,42 6,372.38	- 4,377,53 1,594.07
	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumla tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).											
	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.											
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.											
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian											
	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.											
	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.											
	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.											
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.											
	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
	8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.											

Jenis Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)					Proyeksi Anggaran (Rp)					
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur											

Sumber: LRA Tahun 2019-2023, Analisis

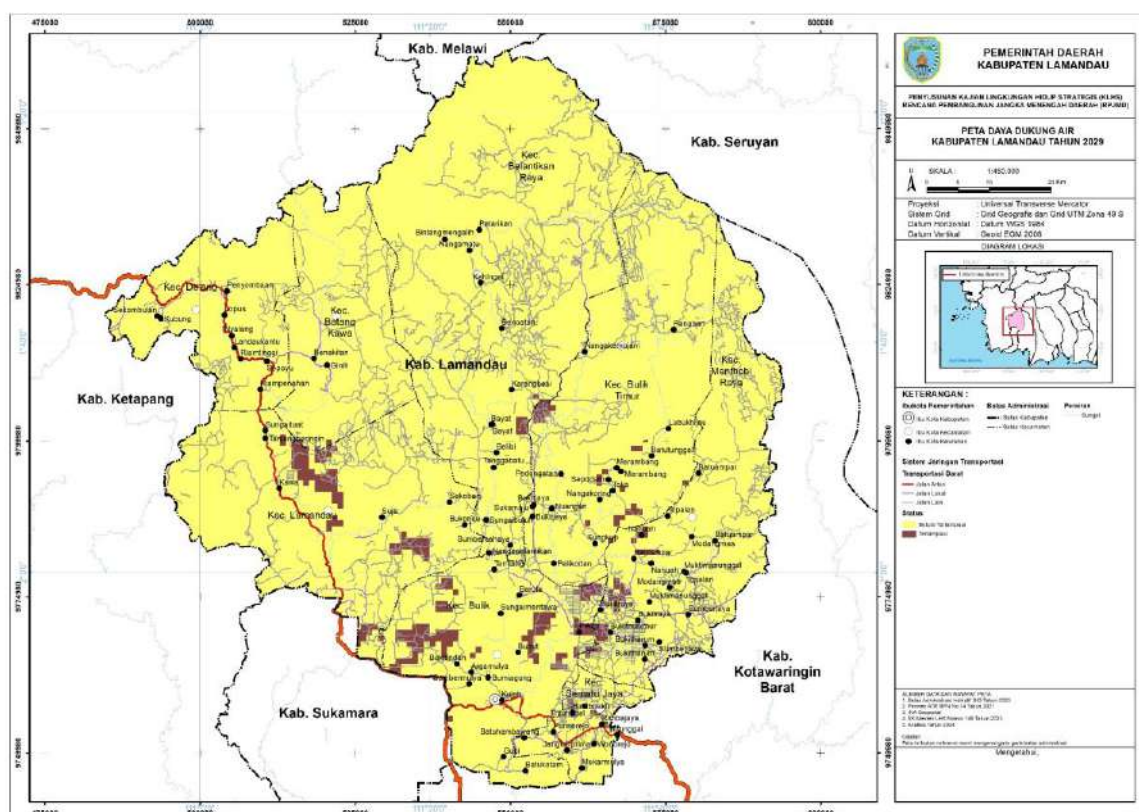
5.4. Analisis Proyeksi 6 Muatan KLHS

5.4.1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Analisis Muatan Lingkungan hidup yang menjadi fokus amatan dalam KLHS RPJMD kabupaten Lamandau ada dua aspek yaitu daya dukung dan daya tampung air, dan daya dukung dan daya tampung pangan.

Seluruh aspek kehidupan membutuhkan air bersih, terutama dalam pencapaian Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua, Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun, Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua. Hasil proyeksi kebutuhan air tahun 2029 bila dibandingkan dengan ketersediaan air maka daya dukung dan daya tampung air di tahun 2029 belum terlampaui.



Gambar 5-5 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Lamandau Tahun 2029

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 5-29 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Air di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air									
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Batang Kawa	66.573,35	244,20	66.573,35	244,20	66.573,35	244,20	66.573,35	244,20	66.573,35	244,20
2	Belantikan Raya	201.662,09	691,20	201.662,09	691,20	201.662,09	691,20	201.662,09	691,20	201.662,09	691,20
3	Bulik	73.501,03	8.724,84	73.501,03	8.724,84	73.501,03	8.724,84	73.415,67	8.810,20	73.412,70	8.813,17
4	Bulik Timur	125.028,19	2.226,66	125.028,19	2.226,66	125.043,53	2.211,32	125.003,98	2.250,87	125.003,98	2.250,87
5	Delang	55.523,73		55.523,73		55.523,73		55.523,73		55.523,73	
6	Lamandau	110.199,88	6.925,12	110.199,88	6.925,12	110.199,88	6.925,12	110.199,88	6.925,12	110.199,87	6.925,14
7	Menthobi Raya	94.604,74	2.591,29	94.604,74	2.591,29	94.623,14	2.572,90	94.623,14	2.572,90	94.623,14	2.572,90
8	Sematu Jaya	18.428,45	597,51	18.428,45	597,51	18.428,45	597,51	18.428,45	597,51	18.428,45	597,51
Total Keseluruhan		745.521,47	22.000,82	745.521,47	22.000,82	745.555,20	21.967,09	745.430,29	22.092,00	745.427,30	22.094,99

Sumber: Analisis 2024

Tabel 5-30 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Lamandau Tahun 2044

No	Kecamatan	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan							
		Tahun 2024		Tahun 2044		Selisih		Laju	
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Batang Kawa	66.563,65	253,89	60.769,75	6.100,39	-5.793,91	5.846,50	-0,45%	17,23%
2	Belantikan Raya	201.358,92	994,37	186.910,93	15.592,16	-14.447,99	14.597,79	-0,37%	14,75%
3	Bulik	79.732,26	2.493,61	65.069,87	17.217,05	-14.662,39	14.723,44	-1,01%	10,14%
4	Bulik Timur	126.479,68	775,18	94.315,47	33.026,08	-32.164,20	32.250,90	-1,46%	20,63%
5	Delang	54.862,75	660,98	53.292,01	2.276,07	-1.570,74	1.615,09	-0,15%	6,38%
6	Lamandau	115.725,20	1.399,81	80.502,44	36.714,61	-35.222,75	35.314,80	-1,80%	17,74%
7	Menthobi Raya	94.903,82	2.292,21	75.738,68	21.519,47	-19.165,14	19.227,26	-1,12%	11,85%
8	Sematu Jaya	18.048,70	977,26	18.990,13	49,24	941,43	-928,01	0,25%	-13,88%
Total Keseluruhan		757.674,98	9.847,31	635.589,29	132.495,07	-122.085,69	122.647,76	-0,87%	13,88%

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 5-31 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Lamandau Tahun 2029

No	Kecamatan	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan									
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Batang Kawa	66.519,91075	297,63504	66.468,63	348,91	66.408,52	409,03	66.338,04	479,50	66.255,43	562,12
2	Belantikan Raya	201.212,21160	1.141,07810	201.043,86	1.309,43	200.850,66	1.502,63	200.628,96	1.724,33	200.374,56	1.978,73
3	Bulik	79.479,33990	2.746,53088	79.200,76	3.025,11	78.893,93	3.331,94	78.555,97	3.669,90	78.183,74	4.042,13
4	Bulik Timur	126.319,72029	935,13681	126.126,76	1.128,10	125.893,97	1.360,88	125.613,16	1.641,70	125.274,40	1.980,46
5	Delang	54.820,59658	703,13711	54.775,75	747,98	54.728,05	795,68	54.677,31	846,43	54.623,33	900,41

No	Kecamatan	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan									
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Lamandau	115.476,81395	1.648,19375	115.184,36	1.940,65	114.840,01	2.284,99	114.434,57	2.690,44	113.957,18	3.167,83
7	Menthobi Raya	94.632,23372	2.563,79803	94.328,47	2.867,56	93.988,72	3.207,31	93.608,71	3.587,32	93.183,68	4.012,35
8	Sematu Jaya	18.184,31939	841,63761	18.301,12	724,84	18.401,71	624,25	18.488,34	537,62	18.562,95	463,01
Total Keseluruhan		756.645,14617	10.877,14734	755.429,71	12.092,59	754.005,57	13.516,72	752.345,06	15.177,23	750.415,25	17.107,04

Sumber: Hasil Analisis

5.4.2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Muatan KLHS yang kedua adalah perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Terdapat dua indikator utama yang digunakan dalam analisis ini yaitu kerawanan bencana serta kualitas air. Harapannya kondisi kerawanan bencana serta kualitas air dapat mendukung pembangunan serta upaya perwujudan target TPB nantinya tidak meningkatkan paparan penduduk terhadap bencana serta tidak menurunkan kualitas air. Hasil dari identifikasi bahaya bencana di Kabupaten Lamandau tersaji pada tabel berikut

Tabel 5-32 Kondisi Kebencanaan Kabupaten Lamandau

Bencana	Tidak Ada Potensi	Rendah	Sedang	Tinggi
Banjir	610.427,97	1.216,54	42.246,60	114.193,25
Longsor	403.595,43	39.725,04	241.559,72	83.204,17
Karhutla	35.357,59	402.666,70	270.035,03	60.025,05

Sumber: Analisis, 2024

Dalam rumus risiko bencana terdapat 3 komponen yakni bahaya, kerentanan, dan kapasitas. **Hazard (bahaya)** merupakan unsur berbasis hidrometeorologis, geofisika, atau akibat ulah manusia yang menimbulkan tingkat ancaman terhadap kehidupan, properti, atau lingkungan. **Vulnerability (kerentanan)** merujuk pada kondisi yang berpengaruh buruk terhadap upaya penanggulangan bencana. Sedangkan **Kapasitas** merupakan kemampuan subjek terpapar dalam menghadapi bahaya baik berupa kemampuan mitigasi non-fisik dan fisik.

Tabel di atas merupakan kondisi bahaya yang mana sifatnya lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit untuk mengalami perubahan dan sulit dilakukan intervensi. Komponen risiko bencana yang paling mudah diintervensi adalah kapasitas. Asumsinya adalah meningkatkan kapasitas penduduk dalam menghadapi bencana maka dapat menurunkan jumlah penduduk terdampak bencana. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah penduduk yang terdampak banjir per 100.000 penduduk. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Lamandau selama 4 tahun terakhir (ketersediaan data 4 tahun terakhir) bencana yang terjadi di Kabupaten Lamandau terdiri dari dua yakni Covid-19 dan Bencana Banjir. Dengan mengesampingkan bencana Covid-19 karena sifatnya yang bukan merupakan bencana rutin dan berada di luar kendali pemerintah kabupaten maka jumlah penduduk yang terdampak bencana yang digunakan hanya data penduduk terdampak bencana banjir sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5-33 Penduduk Terdampak Bencana Banjir

Jumlah penduduk terdampak banjir per 100.000 penduduk (mengungsi)									
Eksisting (jiwa)				Proyeksi (jiwa)					
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.017	4.331	17.518	548	2298	0	0	0	0	0

Sumber: Analisis, 2024

Setiap tahunnya jumlah pengungsi bencana cenderung fluktuatif. Saat dilakukan proyeksi dengan menggunakan data *tren* 4 (empat) tahun terakhir tersebut didapatkan hasil bahwa pada tahun 2029 jumlah penduduk yang terdampak bencana adalah 0 (nol)

jiwa. Hasil proyeksi ini menunjukkan tren yang berkesesuaian dengan target yang diinginkan di mana tidak terdapat penduduk yang terdampak bencana.

Indikator selanjutnya adalah mengenai kondisi persampahan. Tidak dapat dipungkiri adanya kegiatan pasti akan menimbulkan bahan sisa kegiatan yakni sampah dan limbah. Umumnya semakin meningkatnya penduduk maka akan diikuti oleh peningkatan sampah yang ditimbulkan. Namun dengan adanya pengelolaan yang baik maka dampak negatif dari pertambahan produksi sampah tersebut dapat ditekan.

Tabel di bawah merupakan hasil analisis proyeksi persentase sampah tertangani di Kabupaten Lamandau. Terlihat dari kecenderungannya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 persentase sampah yang tertangani terus meningkat dan diproyeksikan pada tahun 2029 keseluruhan sampah di Kabupaten Lamandau dapat tertangani.

Tabel 5-34 Persentase Sampah Tertangani Kabupaten Lamandau

Indikator	Persentase Sampah Tertangani										
	Capaian					Proyeksi					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	61,5	69,3	70,58	76,4	79,7	84,55	88,90	93,25	97,60	100,00	100,00

Sumber: Analisis, 2024

5.4.3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem

Terkait muatan kinerja layanan/jasa ekosistem dilakukan proyeksi dengan menggunakan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044 sebagai pendekatan untuk melihat tren dari jasa lingkungan yang ada. Beberapa jasa lingkungan yang digunakan dalam analisis enam muatan adalah jasa lingkungan hidup penyedia air, jasa lingkungan hidup pemurnian air, jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah, jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana, jasa lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata.

Tabel 5-35 Proyeksi Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (P2)

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	3,72%	62,22%	8,63%	24,29%	1,15%	100,00%
2044	0,09%	21,68%	66,40%	10,21%	1,55%	100,00%
Selisih	-3,62%	-40,54%	57,77%	-14,08%	0,40%	

Sumber: Analisis, 2024

Dari hasil proyeksi jasa lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Lamandau didapatkan hasil bahwa selama 20 tahun kedepan terjadi penurunan pada kelas tinggi sebesar 14,08%. Namun begitu terlihat adanya peningkatan pada kelas sangat tinggi dan sedang serta terdapat penurunan dari kelas sangat rendah dan kelas rendah yang menunjukkan adanya tren positif pada jasa lingkungan hidup penyedia air.

Tabel 5-36 Proyeksi Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (R2)

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	2,99%	19,08%	55,18%	16,91%	5,83%	100%
2044	1,42%	0,22%	96,28%	1,95%	0,06%	100%
Selisih	-1,57%	-18,86%	41,10%	-14,96%	-5,77%	

Sumber: Analisis, 2024

Hasil analisis menunjukkan adanya tren positif pada kelas sangat rendah dengan penurunan sebesar 1,57% dan kelas rendah sebesar terjadi penurunan sebesar 18,86%. Namun begitu pada kelas sangat tinggi terjadi penurunan hingga 5,77% yang menyebabkan pada tahun 2044 Kabupaten Lamandau tidak memiliki kelas sangat tinggi untuk Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana. Penurunan juga terjadi pada kelas tinggi dengan persentase mencapai 14,96%.

Tabel 5-37 Proyeksi Jasa lingkungan hidup pemurnian air (R4)

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	3,38%	13,17%	70,65%	7,52%	5,28%	100,00%
2044	1,42%	8,16%	19,82%	70,38%	0,15%	99,93%
Selisih	-1,96%	-5,01%	-50,83%	62,86%	-5,13%	

Sumber: Analisis, 2024

Dari hasil proyeksi jasa lingkungan hidup pemurnian air di Kabupaten Lamandau didapatkan hasil bahwa selama 20 tahun kedepan terjadi penurunan pada kelas sangat tinggi sebesar -5,13%. Namun begitu terlihat adanya peningkatan pada kelas tinggi serta terdapat penurunan dari kelas sangat rendah dan kelas rendah yang menunjukkan adanya tren positif pada jasa lingkungan hidup pemurnian air.

Dalam upaya perlindungan terhadap jasa lingkungan pemurnian air perlu diupayakan adanya penjagaan terhadap lahan-lahan hijau dan meminimalisir alih fungsi lahan menjadi terbangun.

Tabel 5-38 Proyeksi Jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah (R5)

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	2,59%	4,24%	17,97%	18,24%	56,96%	100%
2044	0,31%	69,01%	24,32%	6,16%	0,13%	100%
Selisih	-2,28%	64,77%	6,35%	-12,08%	-56,83%	

Sumber: Analisis, 2024

Dari hasil identifikasi jasa lingkungan pengelolaan dan pengurai limbah terjadi penurunan kelas sangat tinggi secara signifikan sebesar 56,83% dan kelas tinggi menurun sebesar 12,08%. Peningkatan signifikan terjadi pada kelas rendah dengan persentase mencapai 64,77%. Hal ini menunjukkan bahwasanya diperlukan upaya-upaya perlindungan lingkungan untuk mencegah penurunan kinerja jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah.

Tabel 5-39 Proyeksi Jasa lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata (C2)

Jasa Lingkungan Hidup Budaya Rekreasi dan Ekowisata (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	1,30%	18,05%	13,44%	16,42%	50,79%	100,00%
2044	21,50%	1,25%	18,85%	52,57%	5,76%	100,00%
Selisih	20,21%	-16,80%	5,41%	36,14%	-45,03%	

Sumber: Analisis, 2024

Dari hasil analisis proyeksi terjadi penurunan sangat signifikan pada kelas sangat tinggi dengan penurunan mencapai 45,03%. Kemudian apabila ditinjau dari kelas sangat rendah terjadi peningkatan signifikan sebesar 20,21% yang semula pada tahun 2024 kelas sangat rendah hanya sebesar 1,30% diproyeksikan akan meningkat menjadi 21,50%.

5.4.4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Indikator dalam menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah menggunakan indeks kualitas air. Kualitas air yang baik dapat mendukung pencapaian target pencapaian pembangunan dan sebaliknya kualitas air yang rendah dapat menghambat pencapaian target. Selain itu, harapannya pembangunan yang dilakukan tidak menurunkan kualitas air di Kabupaten Lamandau.

Dari hasil identifikasi indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2023 adalah sebesar 66,84. Trend IKA setiap tahunnya cenderung meningkat dan saat dilakukan proyeksi untuk tahun 2029 didapatkan nilai sebesar 85,89.

Tabel 5-40 Proyeksi Indeks Kualitas Air Kabupaten Lamandau

JENIS DATA	SATUAN	TAHUN											
		Capaian						Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Air	Nilai	52,45	64,8	51,6	64	70	66,84	71,61	74,47	77,32	80,18	83,03	85,89

Sumber: Analisis, 2024

Selain itu dengan menggunakan pendekatan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah apabila ditinjau dari jasa lingkungan hidup pendukung produksi primer diproyeksikan terjadi penurunan pada kelas sangat tinggi sebesar 48,38% serta penurunan pada kelas tinggi sebesar 11,02%.

Tabel 5-41 Proyeksi Jasa lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer

Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	3,49%	8,88%	15,60%	21,54%	50,48%	100%
2044	1,42%	22,43%	63,46%	10,52%	2,10%	100%
Selisih	-2,07%	13,54%	47,86%	-11,02%	-48,38%	

Sumber: Analisis, 2024

5.4.5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Indikator selanjutnya dalam mengevaluasi Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Harapannya kualitas udara di Kabupaten Lamandau dapat mendukung dalam upaya pencapaian target tujuan pembangunan dan sebaliknya dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tidak akan memberikan eksternalitas negatif terhadap kualitas udara.

Pada tahun 2023 nilai IKU dari Kabupaten Lamandau adalah 91,02 yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang bernilai 85,87. Dengan berdasarkan tren IKU selama 6 (enam) tahun terakhir didapatkan hasil bahwa pada tahun 2029 besar nilai IKU Kabupaten Lamandau adalah 99,50.

Tabel 5-42 Proyeksi Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lamandau

JENIS DATA	SATUAN	TAHUN											
		Capaian						Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Udara	Nilai	85,87	85,87	88,65	89,69	91,64	91,02	93,20	94,46	95,72	96,98	98,24	99,50

Sumber: Analisis, 2024

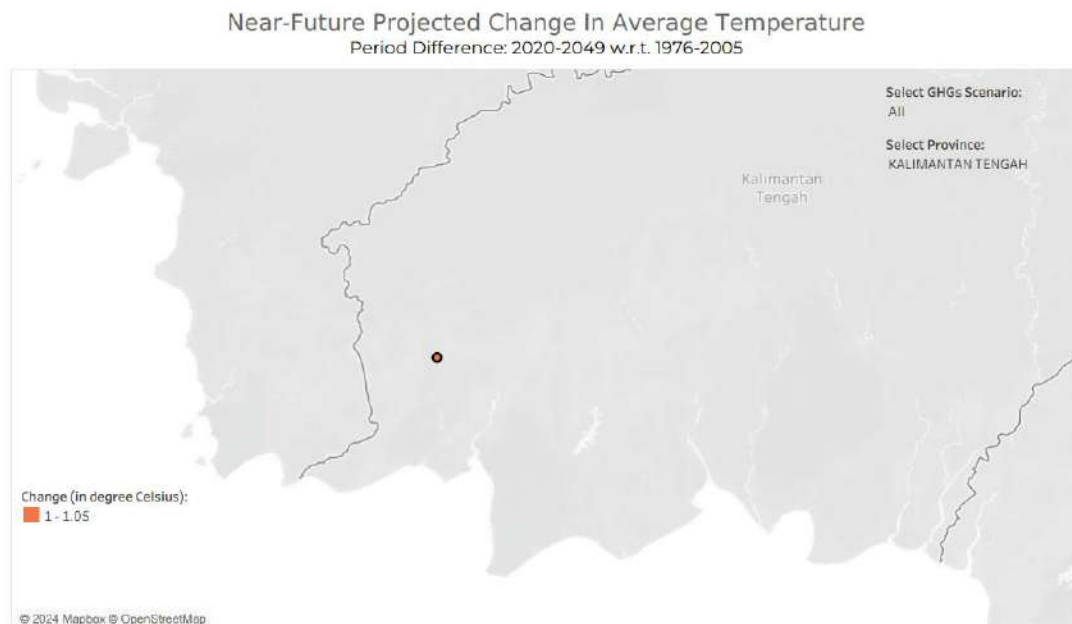
Apabila ditinjau dari jasa lingkungan hidup pengaturan iklim teridentifikasi adanya penurunan pada kelas sangat tinggi sebesar 10,56% sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5-43 Proyeksi Jasa lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

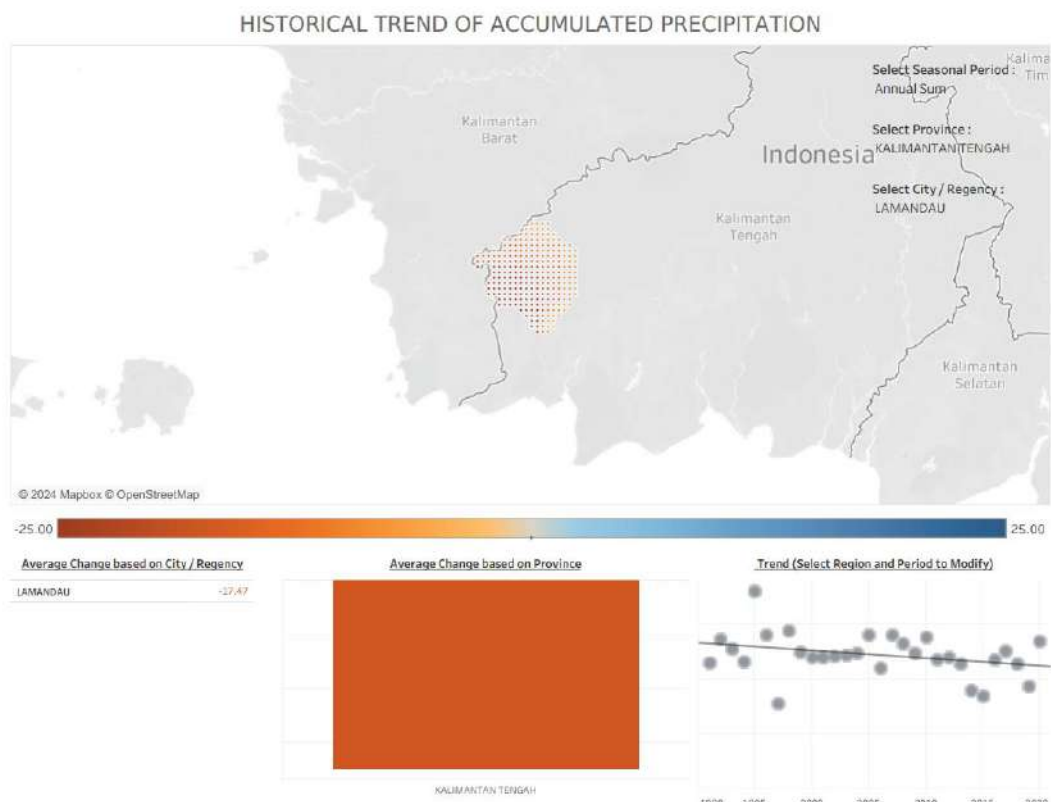
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim (ha)						
Tahun	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
2024	12,86%	1,30%	24,58%	46,33%	14,92%	100,00%
2044	1,42%	2,43%	26,32%	65,39%	4,36%	100,00%
Selisih	-11,44%	1,12%	1,74%	19,06%	-10,56%	

Sumber: Analisis, 2024

Selain itu berkaitan dengan perubahan iklim, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis proyeksi perubahan suhu rata-rata dan hari hujan. Data tersebut disajikan dalam bentuk peta perubahan rata-rata normal / rata-rata komposit dari dua periode yang dibandingkan untuk parameter-parameter iklim terkait curah hujan dan suhu. Periode yang dibandingkan adalah periode hasil simulasi historis model (1976-2005) dengan periode proyeksi dengan skenario kenaikan gas rumah kaca dalam jangka waktu *near-future* (2020-2049).



Gambar 5-7 Proyeksi Perubahan Suhu Rata-Rata Udara Tahunan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005
Sumber: BMKG, 2024



Gambar 5-8 Proyeksi Perubahan Curah Hujan Periode Tahun 2020-2049 Terhadap 1976-2005
Sumber: BMKG, 2024

Dari identifikasi dengan menggunakan data pada tahun 1976-2005 didapatkan hasil bahwa Proyeksi periode 2020-2049 akan terjadi kenaikan suhu rata-rata di Kabupaten Lamandau sebesar 1-1,05 derajat celcius yang mana berupa peningkatan suhu. Adanya peningkatan suhu ini dapat berpengaruh terhadap produksi pangan dan kesehatan masyarakat terutama dalam pencapaian TPB Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan dan Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Sedangkan untuk proyeksi perubahan curah hujan tahunan pada periode tahun 2020-2049 terjadi penurunan curah hujan sebesar 17,47%. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap penyediaan pangan karena keterbatasan air serta berpotensi pada sanitasi masyarakat dan keberlangsungan ekosistem karena adanya kekeringan. Kondisi ini mempengaruhi pencapaian Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua, dan Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

5.4.6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sangat dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan yang berada pada suatu daerah. Oleh karenanya indikator yang digunakan dalam mengevaluasi Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dalam KLHS ini adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Tutupan lahan dapat berupa hutan dan non hutan. Tutupan lahan berupa hutan memiliki peran penting dalam ekosistem karena selain berfungsi sebagai penjaga tata air, pencegah erosi, dan pengatur iklim hutan juga merupakan ruang tempat berbagai plasma nutfah.

Pada tahun 2023 besaran IKTL di Kabupaten Lamandau adalah 76,58 dan apabila dicermati kecenderungannya mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023, trend IKTL cenderung positif. Hasil dari proyeksi nilai IKTL tahun 2029 adalah sebesar 90,27.

Tabel 5-44 Proyeksi Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lamandau

JENIS DATA	SATUAN	TAHUN											
		Capaian						Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	68,00	68,00	75,15	75,53	76,80	76,58	80,31	82,30	84,29	86,28	88,27	90,27

Sumber: Analisis, 2024



BAB VI

ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

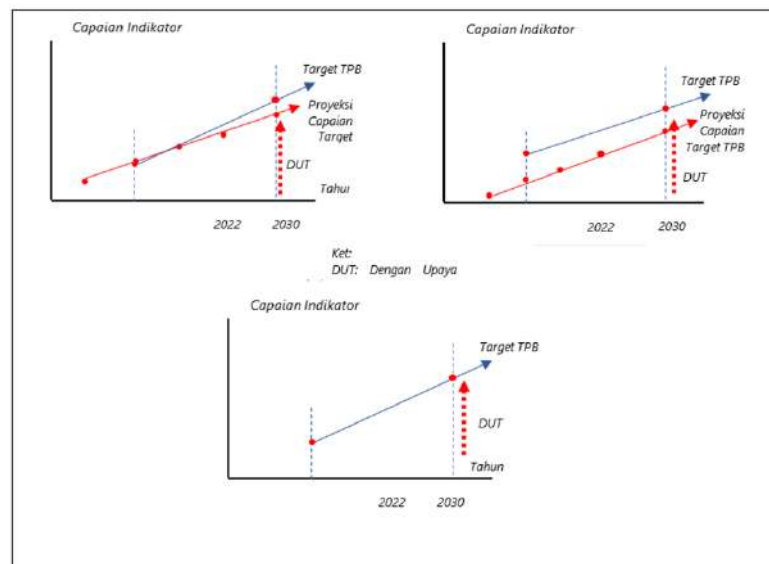
6.1. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan

Alternatif skenario dengan upaya tambahan merupakan alternatif skenario yang diperlukan bagi indikator-indikator TPB yang belum mencapai target nasional 2030, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan.

Perumusan skenario dengan upaya tambahan merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business As Usual (BAU)* terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2030 tidak dapat mencapai target dalam Perpres 59 tahun 2017. Selain itu juga adanya permasalahan terhadap kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, jasa ekosistem, potensi, daya saing dan inovasi daerah di Kabupaten Lamandau yang menjadikan tantangan dalam pencapaian TPB. Skenario ini dilakukan dengan membagi peran dan menambah program dan kegiatan untuk mencapai target nasional serta alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan TPB. Asumsi yang digunakan untuk skenario ini adalah

pencapaian indikator yang belum mencapai target nasional dapat dilakukan dengan pembagian peranan untuk melaksanakan penambahan program dan kegiatan serta penambahan alokasi penganggaran. Terdapat tiga jenis skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan yaitu:

- a. jika capaian TPB pada tahun 2029 sudah tercapai tetapi trennya tidak mampu mencapai target TPB nasional pada tahun 2029.
- b. jika capaian TPB pada 2023 belum tercapai dan tetap tidak akan tercapai pada tahun 2029 berdasarkan laju perubahan atau tren.
- c. jika data capaian TPB tahun 2029 tidak memiliki data tetapi tersedia penjelasan dalam metadata dan data dapat diakses atau disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.



Gambar 6-1 Skenario Pencapaian TPB dengan Upaya Tambahan

Sumber: Analisis, 2024

Skenario dengan upaya tambahan juga memperhatikan kondisi lingkungan yang dapat menjadi faktor pembatas terhadap rencana percepatan pencapaian indikator TPB yang belum mencapai target seperti diamanatkan dalam Permendagri No 7 Tahun 2018. Indikator yang ada kaitannya dengan enam muatan lingkungan hidup dikaji keterkaitan dan risiko dampaknya. Terhadap indikator TPB yang perlu upaya tambahan dan berkaitan dengan enam muatan lingkungan hidup dirumuskan arahan penyesuaian upaya tambahan sebagaimana disajikan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 6-1 Keterkaitan Skenario Dengan Upaya Tambahan Terhadap Muatan Lingkungan

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
1.2.1*	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	- Masih Terdapat Kemiskinan	Terdapat spot-spot yang termasuk dalam daya dukung pangan terlampaui, yang mana dapat menghambat pengentasan kemiskinan	14,87% dari luasan Kabupaten Lamandau termasuk dalam kawasan bahaya banjir tinggi dengan sebaran berada pada area perkotaan yang merupakan pusat aktivitas dan kegiatan ekonomi, Kerawanan terhadap bencana meningkatkan risiko kerugian ekonomi yang mengarah kepada kemiskinan	Pada jasa lingkungan penyedia air 62,22% dari total luasan kabupaten lamandau masuk dalam kelas rendah, di lain sisi air dan sanitasi merupakan sumber daya dasar kehidupan	50,48% dari kabupaten lamandau memiliki kelas jasa lingkungan produksi primer pada kelas sangat tinggi, hal ini memungkinkan adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dengan mengoptimalkan SDA yang ada	12,86% luasan Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim kelas sangat rendah, dilain sisi Kerusakan lingkungan dapat menjadi penyebab awal kemiskinan karena terdapat kelangkaan sumber daya dasar	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	- Pembukaan lapangan pekerjaan -Peningkatan upaya penanganan kemiskinan	Dalam upaya penanganan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan dapat mengancam daya dukung lingkungan (terkait eksploitasi) dan daya tampung (berkaitan dengan limbah yang diproduksi) Sehingga diperlukan upaya perlindungan lingkungan melalui kontrol dan penyediaan sarana prasarana limbah yang cukup	
1.3.1.(c)	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	- Masih Terdapat Kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	1. Penyediaan layanan logistik, kesehatan, pendidikan dan fasilitasi kesempatan kerja bagi warga dengan disabilitas 2. Membangun mekanisme pengaman sosial bagi warga disabilitas dari program program pembangunan	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.3.1.(d)	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	- Masih Terdapat Kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan layanan logistik, kesehatan, pendidikan dan fasilitasi kesempatan kerja bagi kelompok miskin	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.4.1.(b)	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.4.1.(c)	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.4.1.(d)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	- Penurunan Kualitas Air - Masih terdapat kemiskinan	Daya dukung air dibutuhkan dalam meningkatkan persentase akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan. Daya dukung air Kabupaten Lamandau masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (terlampaui <3%)	Peningkatan persentase akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan membutuhkan sumber air dengan indeks kualitas air baik. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah dan jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan jaringan air minum yang menyalurkan air berkualitas yang memenuhi standar kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Penurunan kapasitas sumber air	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
1.4.1.(e)	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan - Masih terdapat kemiskinan	Daya dukung dan daya tampung air dibutuhkan untuk menjamin peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Lamandau masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (<3%)	Peningkatan persentase akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan membutuhkan pengolahan air buangan sehingga kualitas air tetap terjaga. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah, jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang, dan jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah yang eksistingnya 56,96% berada pada tingkat sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi dan cakupan akses sanitasi berbasis lingkungan	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.4.1.(g)	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan akses universal terhadap pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.4.1.(h)	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.5.1.(b)	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	20.53% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki risiko terjadi banjir yang mana sebarannya berada di daerah perkotaannya dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya sehingga apabila terjadi bencana banjir memiliki potensi penduduk terdampak bencana yang tinggi	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi dan penanganan bencana terutama banjir termasuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban sosial	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan satgas khusus penanganan bencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.5.2.(a)	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	20.53% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki risiko terjadi banjir yang mana sebarannya berada di daerah perkotaannya dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya sehingga apabila terjadi bencana banjir memiliki tingkat kerugian yang tinggi. Hal ini juga terlihat dari tren bencana 5 tahun terakhir yang banjir merupakan bencana alam dengan kerugian terbesar	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi bencana terutama banjir	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan informasi dasar kebencanaan, perumusan upaya mitigasi bencana dan rencana penanggulangan bencana. Pengurangan Risiko Bencana harus selalu memperhatikan Jasa Lingkungan Hidup yang terkait dengan Pencegahan 3 jenis Bencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
1.5.3*	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	20.53% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki risiko terjadi banjir yang mana sebarannya berada di daerah perkotaannya dengan kepadatan penduduk yang lebih	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan informasi dasar kebencanaan, perumusan upaya mitigasi bencana dan rencana penanggulangan bencana. Pengurangan Risiko Bencana harus	Tidak ada potensi dampak negatif	Upaya penyaluran dan pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan mekanisme efektif dan efisien dengan mengurangi air yang terbuang pada proses distribusi, pelestarian lingkungan

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
				tinggi dibandingkan daerah sekitarnya sehingga perlu upaya pengurangan risiko bencana			mendukung mitigasi bencana terutama banjir			selalu memperhatikan Jasa Lingkungan Hidup yang terkait dengan Pencegahan 3 jenis Bencana		untuk restorasi jasa lingkungan hidup penyediaan dan pemurnian air, serta melindungi area sempadan sekitar sumber air
1.a.1*	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	- Masih terdapat kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Evaluasi kinerja dan restrukturisasi pembiayaan kegiatan untuk layanan dasar bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial)	Tidak ada potensi dampak negatif	-
1.a.2*	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat - Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan fokus anggaran pada 3 layanan pokok	Tidak ada potensi dampak negatif	
10.1.1.(a)	10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	- Masih terdapat kemiskinan	Terdapat spot-spot yang termasuk dalam daya dukung pangan terlampaui, yang mana dapat menghambat pengentasan kemiskinan	14,87% dari luasan Kabupaten Lamandau termasuk dalam kawasan bahaya banjir tinggi dengan sebaran berada pada area perkotaan yang merupakan pusat aktivitas dan kegiatan ekonomi, Kerawanan terhadap bencana meningkatkan risiko kerugian ekonomi yang mengarah kepada kemiskinan	Pada jasa lingkungan penyedia air 62,22% dari total luasan kabupaten lamandau masuk dalam kelas rendah, di lain sisi air dan sanitasi merupakan sumber daya dasar kehidupan	50,48% dari kabupaten lamandau memiliki kelas jasa lingkungan produksi primer pada kelas sangat tinggi, hal ini memungkinkan adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dengan mengoptimalkan SDA yang ada	12,86% luasan Kabupaten Lamandau memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim kelas sangat rendah, dilain sisi Kerusakan lingkungan dapat menjadi penyebab awal kemiskinan karena terdapat kelangkaan sumber daya dasar	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	- Pembukaan lapangan pekerjaan -Peningkatan upaya penanganan kemiskinan	Dalam upaya penanganan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan dapat mengancam daya dukung lingkungan (terkait eksploitasi) dan daya tampung (berkaitan dengan limbah yang diproduksi) Sehingga diperlukan upaya perlindungan lingkungan melalui kontrol dan penyediaan sarana prasarana limbah yang cukup	
10.1.1*	10.1.1* Koefisien Gini.	- Masih Terdapat Kemiskinan	Peningkatan kegiatan ekonomi memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan pangan, pada kondisi eksisting terdapat beberapa lokasi yang memiliki daya dukung pangan terlampaui	20,53% dari luasan wilayah Kabupaten Lamandau memiliki risiko terhadap bencana banjir yang mana sebarannya berada pada bagian perkotaan sebagai pusat aktivitas. Sedangkan daerah yang tidak berisiko banjir bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi	50,48% dari kabupaten lamandau memiliki kelas jasa lingkungan produksi primer pada kelas sangat tinggi, hal ini memungkinkan adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dengan mengoptimalkan SDA yang ada 50,79% kelas jasa lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata berada pada kelas sangat tinggi yang memungkinkan adanya peningkatan PDRB pada sektor pariwisata alam	Kabupaten Lamandau masih bertumpu pada sektor primer dan sekunder pengolahan SDA, apabila ditinjau dari sebaran SDA yang tidak merata memungkinkan terjadi ketimpangan wilayah	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Pemerataan infrastruktur daerah dan pengupayaan klaster kemandirian ekonomi daerah	Dampak risiko lingkungan dimitigasi oleh indikator lain (11.6.1.(a), 12.4.2.(a))	
11.5.1.(a)	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	14,87% dari luasan Kabupaten Lamandau termasuk dalam kawasan bahaya banjir sangat	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan kapasitas baik secara fisik infrastruktur maupun non-fisik masyarakat	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
				tinggi dan 55,18% berada pada kelas sedang, dengan lokasi yang menyebar baik di perkotaan maupun kawasan perkebunan.	Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi		pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi bencana terutama banjir			dalam menghadapi bencana		
11.5.1.(c)	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	14,87% dari luasan Kabupaten Lamandau termasuk dalam kawasan bahaya banjir sangat tinggi dan 55,18% berada pada kelas sedang, dengan lokasi yang menyebar baik di perkotaan maupun kawasan perkebunan sehingga perlu penyediaan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi bencana terutama banjir	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan Early warning system tiap bencana yang merata dengan prioritas berada pada pusat permukiman	Tidak ada potensi dampak negatif	
11.5.2.(a)	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	20,53% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki risiko terjadi banjir yang mana sebarannya berada didaerah perkotaannya dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya sehingga apabila terjadi bencana banjir memiliki tingkat kerugian yang tinggi. Hal ini juga terlihat dari tren bencana 5 tahun terakhir yang banjir merupakan bencana alam dengan kerugian terbesar	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi bencana terutama banjir	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan informasi dasar kebencanaan, perumusan upaya mitigasi bencana dan rencana penanggulangan bencana. Pengurangan Risiko Bencana harus selalu memperhatikan Jasa Lingkungan Hidup yang terkait dengan Pencegahan 3 jenis Bencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
11.6.1.(a)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	- Degradasi Lingkungan	-	-	Dalam penanganan sampah perkotaan akan menimbulkan residu yang dapat membebani lingkungan, 75,20% dari luasan Kabupaten Lamandau berada pada kelas jasa lingkungan pengaturan pengolahan limbah kelas tinggi dan sangat tinggi yang mana harus dilakukan preservasi	-	-	-	Dengan Upaya Tambahan	Pengembangan fasilitas daur ulang sampah	Limbah dari Operasional Tempat Daur Ulang, terutama apabila ada peningkatan kegiatan ekonomi akibat pencapaian indikator lain	
11.b.2*	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	20,53% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki risiko terjadi banjir yang mana sebarannya berada di daerah perkotaannya dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya sehingga perlu upaya pengurangan risiko bencana	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi bencana terutama banjir	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyusunan strategi PRB tingkat Kabupaten	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
12.4.2.(a)	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (Sektor industri)	- Degradasi Lingkungan	-	-	Dalam penanganan sampah perkotaan akan menimbulkan residu yang dapat membebani lingkungan, 75,20% dari luasan Kabupaten Lamandau berada pada kelas jasa lingkungan pengaturan pengolahan limbah kelas tinggi dan sangat tinggi yang mana harus dilakukan preservasi	-	-	-	Dengan Upaya Tambahan	Pengembangan fasilitas daur ulang sampah	Limbah dari Operasional Tempat Daur Ulang, terutama apabila ada peningkatan kegiatan ekonomi akibat pencapaian indikator lain	
13.1.1*	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Tidak berkaitan dengan D3TLH	20.53% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki risiko terjadi banjir yang mana sebarannya berada di daerah perkotaannya dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya sehingga perlu upaya pengurangan risiko bencana	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	85,84% dari luasan Kabupaten Lamandau memiliki kelas jasa lingkungan pengaturan iklim rendah-sangat tinggi, hal ini perlu di preservasi untuk mendukung mitigasi bencana terutama banjir	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyusunan strategi PRB tingkat Kabupaten	Tidak ada potensi dampak negatif	
16.1.1.(a)	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan upaya penertiban dan penjagaan keamanan lingkungan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian	Tidak ada potensi dampak negatif	
16.2.1.(a)	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada potensi dampak negatif	
16.6.1*	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran berdasarkan prioritas	Tidak ada potensi dampak negatif	
17.1.1.(a)	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	- Masih Terdapat Kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Tidak ada potensi dampak negatif	
17.1.1*	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	- Masih terdapat kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan upaya pemungutan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Tidak ada potensi dampak negatif	
17.1.2*	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	- Masih terdapat kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Tidak ada potensi dampak negatif	
17.18.1.(a)	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan publisitas dan layanan BPS	Tidak ada potensi dampak negatif	
17.19.2.(d)	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas	- Rendahnya kualitas	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan publisitas dan layanan BPS	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
	terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	pelayanan publik										
2.1.1*	2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	- Masih terdapat kemiskinan	Pada kondisi eksisting terdapat beberapa lokasi yang memiliki daya dukung pangan terlampaui	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang	Tidak ada potensi dampak negatif	
2.2.2.(b)	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang	Tidak ada potensi dampak negatif	
2.2.2.(c)	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	- Masih terdapat kemiskinan	Terdapat spot-spot yang termasuk dalam daya dukung pangan terlampaui, yang mana dapat menghambat pengentasan kemiskinan	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mempengaruhi akses masyarakat ke sumber pangan	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.1.2*	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan pada unit terkecil administrasi	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.2.2.(a)	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.3.5.(b)	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Dalam 5 tahun terakhir bencana banjir beberapa kali terjadi. risiko banjir tidak hanya berakibat pada kerugian ekonomi namun juga pada penyebaran penyakit filariasis	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi karena genangan air menjadi tempat hidup nyamuk yang merupakan perantara penyebaran filariasis	-	Perubahan iklim secara global dapat meningkatkan infeksi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk karena menyebabkan peningkatan jumlah nyamuk dan patogen	-	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan layanan kesehatan pada lingkup administrasi terkecil Edukasi mengenai kebersihan lingkungan dan penyakit	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.3.5*	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Dalam 5 tahun terakhir bencana banjir beberapa kali terjadi. risiko banjir tidak hanya berakibat pada kerugian ekonomi namun juga pada penyebaran penyakit filariasis	Perlunya preservasi terhadap jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Pengaturan Pencegahan Bencana yang masih didominasi oleh kelas sedang hingga sangat tinggi karena genangan air menjadi tempat hidup nyamuk yang merupakan perantara penyebaran filariasis	Tidak berkaitan dengan SDA	Perubahan iklim secara global dapat meningkatkan infeksi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk karena menyebabkan peningkatan jumlah nyamuk dan patogen	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Penyediaan layanan kesehatan pada lingkup administrasi terkecil Edukasi mengenai kebersihan lingkungan dan penyakit	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.4.1.(b)	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.4.1.(c)	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Edukasi dari fasilitas kesehatan terdekat mengenai pentingnya pola hidup sehat	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
3.5.2*	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Edukasi dari fasilitas kesehatan terdekat mengenai pentingnya pola hidup sehat	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.7.1.(a)	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
3.7.1*	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	Upaya penyaluran dan pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan mekanisme efektif dan efisien dengan mengurangi air yang terbuang pada proses distribusi, pelestarian lingkungan untuk restorasi jasa lingkungan hidup penyediaan dan pemurnian air, serta melindungi area sempadan sekitar sumber air
3.8.2*	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan kemudahan akses dalam mendapatkan asuransi kesehatan	Tidak ada potensi dampak negatif	Upaya penyaluran dan pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan mekanisme efektif dan efisien dengan mengurangi air yang terbuang pada proses distribusi, pelestarian lingkungan untuk restorasi jasa lingkungan hidup penyediaan dan pemurnian air, serta melindungi area sempadan sekitar sumber air
3.a.1*	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	Upaya penyaluran dan pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan mekanisme efektif dan efisien dengan mengurangi air yang terbuang pada proses distribusi, pelestarian lingkungan untuk restorasi jasa lingkungan hidup penyediaan dan pemurnian air, serta melindungi area sempadan sekitar sumber air
4.1.1.(a)	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	-
4.1.1.(b)	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	-
4.1.1.(d)	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	- Memastikan adanya implementasi regulasi pengelolaan lumpur tinja dan diaplikasikan di pemerintah daerah

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
												termasuk alokasi dana untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk pelayanan sanitasi, mekanisme insentif, denda, subsidi, dan kewajiban rumah tangga untuk mendapatkan akses sanitasi yang dikelola dengan aman
4.1.1.(e)	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	Mengembangkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan
4.2.2.(a)	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	
4.6.1.(a)	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	
4.a.1*	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	Peningkatan jumlah pengunjung tujuan wisata juga harus selalu memperhatikan daya tampung tujuan wisata dan disertai dengan penyusunan rencana induk pengelolaan lingkungan di masing-masing tujuan wisata
4.c.1*	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Tidak ada potensi dampak negatif	-
5.1.1*	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Perancangan dan penyusunan kebijakan responsif gender yang secara substansi mendukung hak asasi dan mengatur perlindungan perempuan	Tidak ada potensi dampak negatif	Pengembangan industri manufaktur harus dengan cermat memperhatikan Jasa Lingkungan, status daya dukung penyedia air di lokasi pengembangannya, serta mencermati proses pengolahan limbah operasional industri
5.2.1.(a)	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan kualitas dan intensitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tidak ada potensi dampak negatif	
5.2.1*	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan kualitas dan intensitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
5.3.1.(b)	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan kualitas dan intensitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tidak ada potensi dampak negatif	
5.6.1.(a)	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
5.6.1.(b)	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Tidak ada potensi dampak negatif	
6.1.1.(a)	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	- Penurunan Kualitas Air	Daya dukung air dibutuhkan dalam meningkatkan persentase akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan. Daya dukung air Kabupaten Lamandau masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (terlampaui <3%)	Peningkatan persentase akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan membutuhkan sumber air dengan indeks kualitas air baik. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah dan jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan jaringan air minum yang menyalurkan air berkualitas yang memenuhi standar kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Penurunan kapasitas sumber air	
6.1.1.(b)	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	- Penurunan Kualitas Air	Daya dukung air dibutuhkan dalam meningkatkan persentase akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan. Daya dukung air Kabupaten Lamandau masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (terlampaui <3%)	Peningkatan kapasitas prasarana air baku untuk melayani masyarakat membutuhkan sumber air dengan indeks kualitas air baik. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan kapasitas prasarana air baku untuk melayani ragam sektor membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah dan jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang	Tidak berkaitan dengan SDA	Perubahan iklim global ekstrem berpotensi mempengaruhi ketersediaan air baku	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan jaringan air minum yang menyalurkan air berkualitas yang memenuhi standar kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Penurunan kapasitas sumber air	
6.1.1.(c)	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	- Penurunan Kualitas Air - Masih terdapat kemiskinan	Daya dukung air dibutuhkan dalam meningkatkan persentase akses terhadap layanan air minum aman dan berkelanjutan. Daya dukung air Kabupaten Lamandau masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (terlampaui <3%)	Peningkatan persentase akses terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan membutuhkan sumber air dengan indeks kualitas air baik. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan akses terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah dan jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan jaringan air minum yang menyalurkan air berkualitas yang memenuhi aspek 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan)	Penurunan kapasitas sumber air	
6.2.1.(b)	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan - Masih terdapat kemiskinan	Daya dukung dan daya tampung air dibutuhkan untuk menjamin peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Lamandau	Peningkatan persentase akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan membutuhkan pengolahan air buangan sehingga kualitas air tetap terjaga. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah, jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang, dan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi dan cakupan akses sanitasi berbasis lingkungan	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
			masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (terlampaui <3%)		jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah yang eksistingnya 56,96% berada pada tingkat sangat tinggi							
6.2.1.(f)	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Daya dukung dan daya tampung air dibutuhkan sebagai sumber untuk meningkatkan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah. Daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Lamandau masih dapat mendukung indikator karena dominan belum terlampaui (<3%)	Peningkatan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah membutuhkan pengolahan air buangan sehingga kualitas air tetap terjaga. IKA Kabupaten Lamandau termasuk kategori sedang dengan angka indeks 66,84	Peningkatan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah membutuhkan preservasi jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah, jasa lingkungan hidup pemurnian air yang eksistingnya 70,65% berada pada tingkat sedang, dan jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah yang eksistingnya 56,96% berada pada tingkat sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah berbasis lingkungan	Tidak ada potensi dampak negatif	Upaya pengembangan fasilitas daur ulang sampah harus mempertimbangkan area dengan jasa lingkungan hidup Penyedia Air (P1), Pengatur Air (R4) dan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah (R5), juga mencermati proses pengolahan limbah operasional tempat daur ulang
6.3.1.(b)	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Sanitasi layak mengurangi dampak risiko lingkungan hidup dengan mencegah penyebaran penyakit terkait air dan limbah.	Akses sanitasi layak dapat dianggap sebagai penyedia jasa lingkungan hidup yang kritis. Dengan memberikan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman, program ini membantu mencegah penurunan kualitas air dan tanah, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan memberikan manfaat ekologis jangka panjang.	Program akses sanitasi layak meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dengan mengurangi pemborosan dan pencemaran lingkungan.	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Upaya Tambahan Penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Bila sarana tidak berfungsi optimal dapat menyebabkan dampak terhadap Kesehatan lingkungan dan Pencemaran air	Upaya pengembangan fasilitas daur ulang sampah harus mempertimbangkan area dengan jasa lingkungan hidup Penyedia Air (P1), Pengatur Air (R4) dan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah (R5), juga mencermati proses pengolahan limbah operasional tempat daur ulang
8.1.1*	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	- Masih terdapat kemiskinan - Degradasi Lingkungan	Peningkatan kegiatan ekonomi memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan pangan, pada kondisi eksisting terdapat beberapa lokasi yang memiliki daya dukung pangan terlampaui	14,87% dari luasan Kabupaten Lamandau termasuk dalam kawasan bahaya banjir sangat tinggi dan 55,18% berada pada kelas sedang, dengan lokasi yang menyebar baik di perkotaan maupun kawasan perkebunan. Apabila melihat dari distribusi PDRB sektor, 2 sektor tertinggi adalah pertanian kehutanan serta industri pengolahan yang apabila terdapat bencana banjir dapat menghentikan aktivitasnya karena akomodasi darat yang tertutup	50,48% dari kabupaten lamandau memiliki kelas jasa lingkungan produksi primer pada kelas sangat tinggi, hal ini memungkinkan adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dengan mengoptimalkan SDA yang ada 50,79% kelas jasa lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata berada pada kelas sangat tinggi yang memungkinkan adanya peningkatan PDRB pada sektor pariwisata alam	Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat meningkatkan PDRB Per Kapita	Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi perkebunan	Investasi masih yang berpotensi menyebabkan alih fungsi lahan akan mengancam hayati daerah	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan investasi	Dampak risiko lingkungan dimitigasi oleh indikator lain (11.6.1.(a), 12.4.2.(a)) Investasi perkebunan berpotensi menimbulkan konflik sosial	Upaya pengembangan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan
8.3.1.(b)	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	- Masih terdapat kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Pada jasa lingkungan penyedia air 62,22% dari total luasan kabupaten lamandau masuk dalam kelas rendah, di lain sisi air merupakan sfaktor penting dalam sektor pertanian	Tidak berkaitan dengan SDA	Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi perkebunan	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Pelatihan tenaga sektor pertanian terkait pola tanam berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan seperti pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia dalam pertanian	Tidak ada potensi dampak negatif	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
8.5.2*	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	- Masih Terdapat Kemiskinan	Peningkatan ekonomi masyarakat memerlukan ketersediaan pangan dan air yang cukup untuk mendukung kehidupan dan menjadi sumber daya lapangan pekerjaan. Namun, terdapat beberapa lokasi yang memiliki daya dukung pangan terlampaui sehingga perlu menjadi perhatian	Seluas 14,87% kawasan merupakan area rawan banjir tinggi dan seluas 10,83% merupakan area rawan longsor tinggi dengan sebaran berada pada area pusat ekonomi, Kerawanan terhadap bencana meningkatkan risiko kerugian ekonomi dan hilangnya lapangan kerja	Diperlukan adanya konservasi lingkungan yang mampu melestarikan dan mempertahankan jasa lingkungan hidup pencegahan dan perlindungan bencana yang pada kondisi eksisting 40,94% berada pada tingkat tinggi, dan jasa lingkungan hidup tata aliran air dan banjir yang pada kondisi eksistingnya 55,18% berada pada tingkat sedang	50,48% dari kabupaten lamandau memiliki kelas jasa lingkungan produksi primer pada kelas sangat tinggi, hal ini memungkinkan adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dengan mengoptimalkan SDA yang ada	Perubahan iklim global berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya kelangkaan sumber daya. Terdapat 12,86% area di wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan iklim kelas sangat rendah sehingga berisiko berdampak lebih besar	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing	Tidak ada potensi dampak negatif	
8.9.1.(a)	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	- Masih terdapat kemiskinan	Sektor pariwisata memerlukan kesediaan air dan pangan untuk mendukung pemenuhan fasilitas pendukung wisata	Seluas 14,87% kawasan merupakan area rawan banjir tinggi, seluas 10,83% merupakan area rawan longsor tinggi. dan seluas 35,16% kawasan merupakan area rawan kebakaran hutan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang	Sektor pariwisata memerlukan adanya upaya pelestarian jasa lingkungan hidup budaya rekreasi dan ekowisata yang eksistingnya 50,79% berada pada tingkat sangat tinggi, jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah, dan jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah yang eksistingnya 56,96% berada pada tingkat sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Pengembangan potensi wisata dan peningkatan infrastruktur pendukung wisata	Potensi peningkatan timbulan sampah dan pencemaran lingkungan	
8.9.1.(b)	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	- Masih terdapat kemiskinan	Sektor pariwisata memerlukan kesediaan air dan pangan untuk mendukung pemenuhan fasilitas pendukung wisata	Seluas 14,87% kawasan merupakan area rawan banjir tinggi, seluas 10,83% merupakan area rawan longsor tinggi. dan seluas 35,16% kawasan merupakan area rawan kebakaran hutan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang	Sektor pariwisata memerlukan adanya upaya pelestarian jasa lingkungan hidup budaya rekreasi dan ekowisata yang eksistingnya 50,79% berada pada tingkat sangat tinggi, jasa lingkungan hidup penyedia air yang eksistingnya 62,22% berada pada tingkat rendah, dan jasa lingkungan hidup pengelolaan dan pengurai limbah yang eksistingnya 56,96% berada pada tingkat sangat tinggi	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan potensi wisata yang mengoptimalkan preservasi lingkungan		
9.2.1.(b)	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan		Tidak ada potensi dampak negatif	
9.2.1.(c)	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan		Tidak ada potensi dampak negatif	
9.3.1*	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah - Masih	-	-	-	-	-	-	Dengan Upaya Tambahan	Pengelolaan limbah hasil industri yang berkelanjutan	Limbah dari Operasional Industri	

No Indikator	INDIKATOR	Isu Strategis	Muatan Lingkungan						Skenario	Usulan Upaya Tambahan	Dampak upaya Tambahan	Mitigasi Dampak Tambahan
			D3TLH	Risiko	Jasa Lingkungan	SDA	Perubahan Iklim	Kehati				
		terdapat kemiskinan										
9.5.1*	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	- Masih terdapat kemiskinan	Tidak berkaitan dengan D3TLH	Tidak berkaitan dengan Risiko Lingkungan	Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan	Tidak berkaitan dengan SDA	Tidak berkaitan dengan perubahan iklim	Tidak berkaitan dengan kehati	Dengan Upaya Tambahan	Peningkatan proporsi anggaran riset diawali dengan penyusunan riset utama berbasis permasalahan yang mendesak di berbagai sektor	Tidak ada potensi dampak negatif	

Sumber : Analisis, 2024

Dengan mempertimbangkan kajian lingkungan dan analisis anggaran dan pembiayaan pembangunan yang telah dibahas sebelumnya, berikut disajikan skenario pencapaian TPB bagi indikator yang sudah dilakukan tapi belum mencapai target (SB), indikator yang belum dilakukan dan belum mencapai target (BB), dan indikator yang memerlukan upaya tambahan kaitannya dengan risiko lingkungan yang mungkin dihasilkan baik dari pencapaian indikator itu sendiri maupun merupakan dampak turunan dari pencapaian indikator lain.

Tabel 6-2 Rekomendasi Pencapaian TPB Dengan Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
1	1.a.2*	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat	12	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat - Rendahnya kualitas pelayanan publik	12	14	16	18	20	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Tersedianya anggaran yang memadai dalam pemenuhan kegiatan, sarana, dan prasarana yang berkaitan dengan layanan pokok	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	1.4.1.(b)	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100,00%	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	75	80	85	90	95	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Terlaksananya upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan	- - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
3	1.4.1.(c)	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	100,00%	0%	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	75	80	85	90	95	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Terlaksananya upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan	- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Kesehatan, DP3AP 2KB
4	1.4.1.(g)	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	100	93,73	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	95	96	97	98	99	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	Pemerataan akses pendidikan	- Peningkatan kesadaran masyarakat melanjutkan pendidikan ke SD/MI/Sederajat - Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan SD/MI Sederajat	- Penyediaan fasilitas asrama untuk peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari Ibukota Kecamatan - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Swasta
5	1.5.1.(b)	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat	NA	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	50	100	150	200	250	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
														Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana	Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Sosial
6	1.5.2.(a)	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	menurun menjadi 0,10%	0	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	150.000.000.000	100.000.000.000	75.000.000.000	50.000.000.000	25.000.000.000	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulanga n Bencana - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Sosial	

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
															Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030	
7	1.5.3*	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Tidak ada	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanggulangan Kebakaran - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Bencana - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Sosial

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
															Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	
8	1.3.1.(c)	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat	0	- Masih Terdapat Kemiskinan	95	96	97	98	100	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	1. Tercapainya SDM Difabel yang dapat bersaing 2. Tersedianya pelayanan yang memadai bagi difabel 3. Tersedianya infrastruktur, utilitas dan pelayanan yang inklusif	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Dinsos, Bappedalitbang, Disnakertrans
9	1.3.1.(d)	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurun	0	- Masih Terdapat Kemiskinan	700	441,81	300	200	100	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	1. Menurunnya kemiskinan 2. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Dinsos, Bappedalitbang, Disnakertrans
10	1.a.1*	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,74	- Masih terdapat kemiskinan	0,75	1	1,25	1,5	1,75	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Penurunan kemiskinan	- Program penanggulangan kemiskinan	- perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan akses terhadap sumber daya	- Dinas Sosial - Swasta
11	1.4.1.(h)	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/ sederajat	100	75,95	- Rendahnya tingkat pendidikan	78,03	79,08	80,12	81,16	82,2	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Sederajat	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
					masyarakat						Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
12	1.4.1.(d)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	100,00%	81,28	- Penurunan Kualitas Air - Masih terdapat kemiskinan	87,52	90,64	93,76	96,88	100	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Air minum yang aman dan terjangkau - Tingkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih - Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu	- Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air/Minum - Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - PDAM
13	1.4.1.(e)	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100,00%	84,48	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan - Masih terdapat kemiskinan	95	100	100	100	100	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan - Meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah dan penggunaan kembali yang aman - Melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup
14	1.2.1*	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	0	3,12	- Masih Terdapat Kemiskinan	2,5	2	1,5	1	0,5	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	1. Menurunnya kemiskinan 2. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Tercapainya SDM yang memadai dalam pembangunan	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat	- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - Penelitian dan	- Dinsos, Bappedalitbang, Disnakertrans

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
														Hukum Adat - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
15	2.2.2.(b)	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	100,00%	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	70	75	85	90	95	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Mengakhiri segala bentuk malnutrisi	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	- Dinas Kesehatan, DP3AP 2KB

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
16	2.1.1*	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	.	7,13	- Masih terdapat kemiskinan	6	5	3	2	1	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	- Harga bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat - Tercapainya pemerataan distribusi bahan pangan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan - Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah	- Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan
17	2.2.2.(c)	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat	55,34	- Masih terdapat kemiskinan	75	85	90	95	100	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Akses universal terhadap makanan yang aman dan bergizi	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Perikanan
18	3.1.2*	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100,00%	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	93	94	96	98	100	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Pemerataan akses fasilitas dan tenaga kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Dinas Kesehatan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
19	3.2.2.(a)	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	10	5	0	0	0	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menurunnya angka kematian ibu, bayi dan balita	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Dinas Kesehatan
20	3.4.1.(b)	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	35	25	15	5	0	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Peningkatan kesehatan masyarakat	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Rehabilitasi Sosial - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	- Dinas Kesehatan
21	3.4.1.(c)	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	10	7	5	3	0	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Peningkatan kesehatan masyarakat	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Rehabilitasi Sosial - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	- Dinas Kesehatan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
22	3.3.5*	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	1	0	0	0	0	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Pemerataan akses fasilitas dan tenaga kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	- Dinas Kesehatan
23	3.3.5.(b)	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	meningkat	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	60	70	80	90	100	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	Pemerataan akses fasilitas dan tenaga kesehatan	- \ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	- Dinas Kesehatan
24	3.5.2*	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	8	5	3	2	0	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	- Tercapainya peningkatan cakupan asuransi kesehatan - Tersedianya data yang valid mengenai jumlah penduduk sehingga capaian asuransi kesehatan dapat sesuai target	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Rehabilitasi Sosial	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	- Dinas Kesehatan
25	3.8.2*	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi	meningkat	0	- Rendahnya kualitas	20000	25000	30000	35000	40000	Menjamin Kehidupan yang Sehat	Menjamin Kehidupan yang Sehat	Terfasilitasinya seluruh masyarakat	- Program Pemenuhan Upaya	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,	- Dinas Kesehatan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
		kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.			pelayanan publik						dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	terhadap asuransi kesehatan	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pengelolaan Profil Kependudukan	UKM dan UMKM Rujukan - Penyediaan Profil kependudukan	
26	3.a.1*	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	0	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	25	20	15	10	5	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mengurangi penyakit dan kematian akibat bahan kimia berbahaya dan polusi	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - Peningkatan Upaya Advokasi kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	- Dinas Kesehatan
27	3.7.1*	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	100,00%	79,16		50,00%	60,00%	75,00%	85,00%	100,00%	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Akses universal terhadap perawatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana dan pendidikan	- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	- Dinas Kesehatan, DP3AP2KB
28	3.7.1.(a)	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	100,00%	65,9	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	100,00%	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Akses universal terhadap perawatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana dan pendidikan	- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Dinas Kesehatan, DP3AP2KB - Swasta - Akademisi

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
29	4.1.1.(a)	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100,00%	33,21	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	35	40	45	50	55	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	4.1.1.(b)	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	100,00%	32,15	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	45	50	55	60	65	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Tersedianya fasilitas pendidikan yang berkualitas	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	4.1.1.(d)	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat	102	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	104	106	108	110	112	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Sederajat	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	4.1.1.(e)	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat	95,16	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	98	100	102	104	106	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Sederajat	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	4.2.2.(a)	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat	82,66	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	86	88	90	92	94	Menjamin tersedianya akses terhadap perkembangan dan pengusahaan anak usia dini,	Menjamin tersedianya akses terhadap perkembangan dan pengusahaan anak usia dini,	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan PAUD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
											pendidikan pra sekolah bagi semua anak	pendidikan pra sekolah bagi semua anak				
34	4.6.1.(a)	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100,00%	99,44	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	99,5	99,6	99,7	99,8	100	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	- Terentaskannya buta aksara pada generasi lansia - Tersedianya generasi muda yang memiliki tingkat literasi lebih tinggi	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - Pengelolaan Pendidikan Khusus	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	4.a.1*	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	NA	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	a. 58% b. 50% c. 8% d. 2% e. 25% f. 100% g.70%	a. 60% b. 52% c. 12% d. 5% e. 30% f. 100% g.80%	a. 70% b. 60% c. 12% d. 8% e. 40% f. 100% g.90%	a. 80% b. 70% c. 15% d. 12% e. 50% f. 100% g.95%	a. 90% b. 75% c. 20% d. 15% e. 60% f. 100% g.100%	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CSR Swasta
36	4.c.1*	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Paud: 6.8 SD: 41.8 SMP: 25.01 SMA: N/A SMK: N/A SLB: N/A	- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Paud: 8 SD: 41.6 SMP: 23.61 SMA:32 SMK: 74.45 SLB: 0.65	Paud: 8.53 SD: 41.7 SMP: 23.77 SMA:34 SMK: 88.6 SLB: 3.65	Paud: 9.51 SD: 42.25 SMP: 24 SMA:36 SMK: 93.72 SLB: 0.98	Paud: 10.19 SD: 42.2 SMP: 28 SMA: 40 SMK: 100 SLB: 0	Paud: 11.07 SD: 42.53 SMP: 30 SMA:42 SMK: 100 SLB: 0	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatnya presentase guru yang bersertifikat pendidik	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	- -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	5.6.1.(a)	5.6.1.(a) Unmet need KB	0,00%	0	- Rendahnya	10	8	6	4	2	Mencapai Kesetaraan	Mencapai Kesetaraan	Menurunnya prosentase	- Program Perlindungan	- Program Kependudukan	- Dinas Kesehatan DP3AP2KB

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
		(Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).			a kualitas pelayanan publik						Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Perempuan dan Anak Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
38	5.6.1.(b)	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	100,00%	0%	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	80	85	90	95	100	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah	- Program Perlindungan perempuan dan anak	- Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	- Dinas Kesehatan DP3AP2KB
39	5.1.1*	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	meningkat	NA		4	4	4	5	5	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial - Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender	- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan kewenangan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	- Peningkatan kebijakan dan Program yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	- DP3AP2KB
40	5.2.1*	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64)	Menurun	NA		0	0	0	0	0	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial - Menciptakan	- Program Pengembangan Kurikulum - Program Pembinaan dan	- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	- DP3AP2KB

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
		tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender	Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya - Program Pengawasan Ketenagakerjaan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Perlindungan Perempuan - Program Perlindungan Khusus Anak	Kewenangan Provinsi - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
41	5.2.1.(a)	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,00%	NA		1,5	1	0,75	5	0	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial - Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender	- Program Perlindungan Perempuan	- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	- DP3AP2KB
42	5.3.1.(b)	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	meningkat	32,3							Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial - Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender	- Program Perlindungan Perempuan	- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	- DP3AP2KB
43	6.1.1.(a)	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	81,28	- Penurunan Kualitas Air	87,52	90,64	93,76	96,88	100	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Air minum yang aman dan terjangkau - Tingkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih - Menerapkan pengelolaan	- Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air/Minum - Pembangunan Jaringan Air Bersih	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - PDAM

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
													sumber daya air terpadu		Perkotaan - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten	
44	6.1.1.(b)	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	100%	0,08	- Penurunan Kualitas Air						Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Air minum yang aman dan terjangkau - Tingkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih - Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu	- - Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air/Minum - Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - PDAM
45	6.1.1.(c)	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	14,27	- Penurunan Kualitas Air - Masih terdapat kemiskinan	42,85	57,14	71,42	85,71	100	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Air minum yang aman dan terjangkau - Tingkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih - Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu	- Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air/Minum - Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - PDAM
46	6.2.1.(b)	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	84,48	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan - Masih terdapat kemiskinan						Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan - Meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah dan penggunaan kembali yang aman	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
													- Melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air			
47	6.2.1.(f)	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0,89	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan						Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah dan penggunaan kembali yang aman - Melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air	- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ; Dinas Lingkungan Hidup
48	6.3.1.(b)	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	-	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	80	85	87	90	92	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan - Meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah dan penggunaan kembali yang aman	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
49	8.1.1*	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	100,00%	- 1,35%	- Masih terdapat kemiskinan - Degradasi lingkungan	6,5	8	9	10	11	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatnya kegiatan ekonomi berkelanjutan melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi penduduk asli	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; - Program Hubungan Industrial - Program	- Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan	- BPKPD; DPMPSP; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bapedalitbang Dinas Pertanian dan Perikanan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
														<ul style="list-style-type: none"> pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah; - Program pemberdayaan industri; - Program pengembangan kemitraan usaha; - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; - Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; - Program pengembangan dan penyediaan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan 	
50	8.9.1.(b)	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	0	- Masih terdapat kemiskinan						Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempromosikan Pariwisata Yang Bermanfaat Dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 	- Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup
51	8.3.1.(b)	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian		0	- Masih terdapat kemiskinan	48	50	52	55	58	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	- Mempromosikan Kebijakan untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Perusahaan	- Program penempatan tenaga kerja	- Pengelolaan informasi pasar kerja	- Dinas Pertanian dan Perikanan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
52	8.9.1.(a)	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat	NA	- Masih terdapat kemiskinan	10	10	15	15	20	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempromosikan Pariwisata Yang Bermanfaat dan Berkelanjutan	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	- Dinas Pariwisata
53	8.5.2*	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	0	3,32	- Masih Terdapat Kemiskinan	2,5	2	1,5	1	0,5	Menurunkan angka kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan pekerja yang terampil untuk kompetisi sumber daya manusia	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
54	9.3.1*	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	0	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah - Masih terdapat kemiskinan	5	10	15	20	25	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	- Program Pengelolaan Persampahan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pengelolaan Sampah - Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
55	9.5.1*	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Meningkat	0,02	- Masih terdapat kemiskinan	0,025	0,025	0,03	0,035	0,04	Meningkatnya proporsi anggaran riset	Meningkatnya proporsi anggaran riset	Peningkatan jumlah riset yang berkualitas	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Bappedalitbang

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
											pemerintah terhadap PDB	pemerintah terhadap PDB				
56	9.2.1.(b)	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Meningkat	1	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	1	1	1	1	1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh	Peningkatan jumlah dermaga penyeberangan	- Program Pengelolaan Pelayaran	- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	- Dinas Perhubungan
57	9.2.1.(c)	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	Meningkat	1	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	1	1	1	1	1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh	Peningkatan jumlah pelabuhan strategis	- Program Pengelolaan Pelayaran	- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	- Dinas Perhubungan
58	10.1.1*	10.1.1* Koefisien Gini.	Menurun	0,33	- Masih Terdapat Kemiskinan	0,32	0,3	0,28	0,26	0,24	Mengurangi kesenjangan intra daerah	Mengurangi kesenjangan intra daerah	Menjaga Stabilitas Pertumbuhan yang Memihak Masyarakat Miskin dan Rentan serta Menstimulasi Pertumbuhan Masyarakat Kelompok Menengah	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	- - Dinas Sosial
59	10.1.1.(a)	10.1.1.(a) Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	0	3,12	- Masih terdapat kemiskinan	2,5	2	1,5	1	0,5	Mengakhiri Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan	1. Menurunnya kemiskinan 2. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Tercapainya SDM yang memadai dalam pembangunan	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Pengembangan	- Dinsos, Bappedalitbang, Disnakertrans

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
															Inovasi dan Teknologi - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK) - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
60	11.5.1.(a)	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Menurun	83,87	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	80	75	70	65	60	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanggulangan Kebakaran - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Bencana - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 - Perlindungan	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Sosial

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
															Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	
61	11.5.1.(c)	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	Tidak ada	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanggulangan Kebakaran - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Bencana - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial - Swasta
62	11.5.2.(a)	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	0	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	300.000.000.000,00	250.000.000.000,00	200.000.000.000,00	175.000.000.000,00	150.000.000.000,00	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Perlindungan	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
														- Program Penanganan Bencana	Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030	
63	11.b.2*	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	Tidak ada	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanggulangan Kebakaran - Program Penanganan Bencana - Program Komunikasi, Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Bencana - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
															<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 	
64	11.6.1.(a)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani		79,7	- Degradasi Lingkungan						Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Persampahan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah - Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
65	12.4.2.(a)	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (Sektor industri)	meningkat	172	- Degradasi Lingkungan						Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
													manusia dan lingkungan	Kerusakan Lingkungan Hidup		
66	13.1.1*	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	ada	Tidak ada	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjadikan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Bencana	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Implementasi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030	- Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
67	16.6.1*	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap	100,00%	92,21 %		66%	97%	98%	99%	100%	Mewujudkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan	Mewujudkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan	Peningkatan pengeluaran anggaran yang disetujui	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
		anggaran yang disetujui														
68	16.1.1.(a)	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Menurun	1		0	0	0	0	0	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan , Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan , Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Tercapainya ketertiban dan keamanan wilayah	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan - Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak	- Satpol PP

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
															Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
69	16.2.1.(a)	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	NA		45	40	35	30	25	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	- Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial - Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender	- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan upaya perlindungan anak dan perempuan (Edukasi terkait kekerasan seksual, KDRT, bullying)	- DP3AP2KB
70	17.1.2*	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	2,28%	- Masih terdapat kemiskinan	3	3,5	4	4,5	5	Meningkatnya rasio penerimaan pajak	Meningkatnya rasio penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan daerah melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
71	17.1.1*	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	1%	- Masih terdapat kemiskinan	1,25%	1,50%	1,75%	2%	2,50%	Meningkatnya rasio penerimaan pajak	Meningkatnya rasio penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan daerah melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
72	17.1.1.(a)	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Meningkat	13%	- Masih Terdapat Kemiskinan	14%	15%	16%	18%	20%	Meningkatnya rasio penerimaan pajak	Meningkatnya rasio penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan daerah melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
73	17.18.1.(a)	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas	Meningkat	0	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	100	100	100	100	100	Peningkatan kepuasan penyediaan informasi statistik	Peningkatan kepuasan penyediaan informasi statistik	Peningkatan keragaman data dan aktualitas data statistik	- Program Peningkatan kepuasan penyediaan informasi statistik	- Pengumpulan data Survei Kebutuhan Data (SKD)=	- BPS

No	No Indikator	Indikator	Target Nasional Tahun 2030	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis	Target					Skenario Alternatif	Rekomendasi				
						2025	2026	2027	2028	2029		Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pelaksana
		dengan kualitas data statistik														
74	17.19.2.(d)	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	98,15	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	98,25	98,5	99	99,5	100	Peningkatan kepuasan penyediaan informasi statistik	Peningkatan kepuasan penyediaan informasi statistik	Peningkatan keragaman data dan aktualitas data statistik	- Program Peningkatan kepuasan penyediaan informasi statistik	- Pengumpulan data Survei Kebutuhan Data (SKD)=	- BPS

Sumber : Analisis, 2024

6.2 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk TPB yang Tidak Memiliki Data

Alternatif skenario dan rekomendasi TPB yang tidak memiliki data adalah jika data capaian TPB tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 tidak memiliki data tetapi tersedia penjelasan dalam metadata dan data dapat diakses atau disusun oleh Pemerintah Kabupaten. Rekomendasi utama dari TPB yang tidak memiliki data adalah dilakukan pendataan sesuai dengan metadata indikator TPB yang sudah ditetapkan. Rekomendasi tambahan berupa program kebijakan yang terkait yang dapat membantu mempercepat capaian TPB yang ada.

Tabel 6-3 Rekomendasi Pencapaian TPB Yang Tidak Ada Data

No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
1.5.1.(c)	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	BPBD	Tidak Ada Data	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
1.5.1.(d)	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD	Tidak Ada Data	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
1.3.1.(a)	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
1.4.1.(d)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
1.4.1.(e)	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
1.4.1.(k)	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
2.2.1.(a)	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
2.2.2.(a)	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
2.3.1*	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian dan Perikanan	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.3.3*	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.3.5.(a)	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.5.1.(e)	3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.7.2.(a)	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.8.1.(a)	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
3.8.2.(a)	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.9.3.(a)	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.b.1.(a)	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
3.7.2*	3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	DP3AP2KB	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
4.4.1*	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
5.3.1*	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
5.3.1.(a)	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	DP3AP2KB	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
5.3.1.(b)	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DP3AP2KB	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
5.5.2*	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AP2KB	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
5.6.1*	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15 - 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	DP3AP2KB	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.4.1.(b)	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi Lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.1.1.(b)	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
6.1.1.(c)	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.2.1.(a)	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.2.1.(b)	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.2.1.(c)	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.2.1.(d)	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.2.1.(e)	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.2.1.(f)	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.3.1.(a)	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air - Degradasi lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.5.1.(a)	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.5.1.(c)	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.5.1.(f)	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
6.5.1.(g)	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
7.2.1*	7.2.1* Bauran energi terbarukan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
7.3.1*	7.3.1* Intensitas energi primer	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.10.1*	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bappedalitbang	Tidak Ada Data	- Masih Terdapat Kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.10.1.(b)	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total BPS kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah - Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.3.1.(c)	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.9.1.(c)	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.9.2*	8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.10.1.(a)	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.5.2.(a)	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Ada Data	- Masih Terdapat Kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
8.6.1*	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Ada Data	- Masih Terdapat Kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
9.2.1*	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
9.2.1.(a)	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
				wilayah - Masih terdapat kemiskinan	
9.2.2*	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
10.1.1.(b)	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
10.1.1.(f)	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
10.2.1*	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Dinas Sosial	Tidak Ada Data	- Masih terdapat kemiskinan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
10.3.1.(a)	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
10.3.1.(d)	10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
11.1.1.(a)	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
11.3.2.(b)	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
12.5.1.(a)	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada Data	-Degradasi Lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
12.6.1.(a)	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada Data	-Degradasi Lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
12.7.1.(a)	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada Data	-Degradasi Lingkungan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
12.8.1.(a)	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
15.6.1*	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada Data	-Terjadinya Alih Fungsi Lahan	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
	memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.				
16.9.1.(a)	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.10.2.(c)	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.1.4*	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan	Satpol PP	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.5.1.(a)	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.6.1.(c)	16.6.1.(c) Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.6.1.(d)	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.6.2.(a)	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
16.b.1.(a)	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data	-	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
17.17.1.(a)	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Bappedalitbang	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
17.17.1.(b)	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam	Bappedalitbang	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

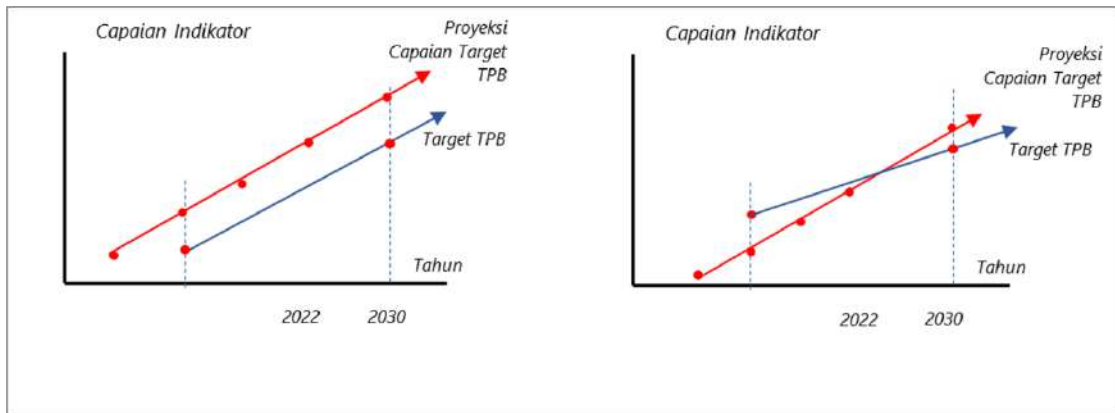
No Indikator	Indikator	OPD	STATUS CAPAIAN 2029	Isu Strategis Terkait	Skenario
	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)				
17.18.1.(d)	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Bappedalitbang	Tidak Ada Data	- Masih Terdapat Kemiskinan - Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
17.18.1.(b)	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	BPS	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
17.18.1.(c)	17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada Data	- Rendahnya kualitas pelayanan publik	Perlu Pendataan/Pengadaan Data
6.1.1.(a)	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data	- Penurunan Kualitas Air	Perlu Pendataan/Pengadaan Data

Sumber : Analisis, 2024

6.3 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah bentuk-bentuk skenario pilihan yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Lamandau untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Dari total 211 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamandau, 71 indikator di antaranya telah mencapai target nasional tahun 2030 ketika diproyeksikan hingga tahun 2029. Berikut adalah beberapa alternatif skenario tanpa upaya tambahan.

- jika capaian TPB pada tahun 2023 sudah tercapai dan terus akan tercapai sampai dengan tahun 2029 sebagai akhir tahun RPJMD Kabupaten Lamandau dan tidak berpengaruh terhadap muatan lingkungan.
- Skenario 2 adalah jika capaian TPB pada tahun 2023 belum tercapai tetapi akan tercapai pada tahun 2029 berdasarkan laju perubahan atau tren dan tidak berpengaruh terhadap muatan lingkungan.



Gambar 6-2 Skenario Pencapaian TPB Tanpa Upaya Tambahan

Sumber: Analisis, 2023

Tabel 6-4 Rekomendasi Pencapaian TPB Tanpa Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	OPD	Proyeksi					Status 2029	Skenario
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	8.1.1.(a)	8.1.1.(a) PDB per kapita.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	71,37	72,53	73,69	74,85	76,01	SS	Tanpa Upaya Tambahan
2	16.6.1.(b)	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Bappedalitbang	64,13	64,86	65,59	66,32	67,05	SS	Tanpa Upaya Tambahan
3	1.5.1*	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
4	1.5.1.(a)	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	BPBD	7	8	9	10	11	SS	Tanpa Upaya Tambahan
5	1.5.1.(e)	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	BPBD	83,87	82,00	80,14	78,27	76,41	SS	Tanpa Upaya Tambahan
6	11.5.1*	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
7	13.1.2*	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	4789,45	3949,59	3109,72	2269,86	1429,99	SS	Tanpa Upaya Tambahan
8	1.4.1.(j)	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
9	16.9.1*	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
10	16.9.1.(b)	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
11	17.19.2.(b)	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS	Tanpa Upaya Tambahan
12	1.4.1.(a)	1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	Dinas Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	OPD	Proyeksi					Status 2029	Skenario
				2025	2026	2027	2028	2029		
		melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.								
13	2.1.1.(a)	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
14	2.2.1*	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	-3,85	-7,95	-12,05	-16,15	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
15	2.2.2*	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
16	3.1.1*	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
17	3.1.2.(a)	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	99,73	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
18	3.2.1*	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
19	3.2.2*	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	10,15	8,81	7,46	6,12	4,77	SS	Tanpa Upaya Tambahan
20	3.2.2.(b)	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
21	3.3.1.(a)	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
22	3.3.2.(a)	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
23	3.3.3.(a)	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
24	3.3.4.(a)	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
25	3.4.1.(a)	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
26	3.4.2*	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	OPD	Proyeksi					Status 2029	Skenario
				2025	2026	2027	2028	2029		
27	3.4.2.(a)	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
28	3.c.1*	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	509,00	521,60	534,20	546,80	559,40	SS	Tanpa Upaya Tambahan
29	3.7.1.(b)	3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DP3AP2KB	89,68	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
30	2.1.2*	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
31	2.1.2.(a)	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	4,40	3,80	3,20	2,60	2,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
32	5.b.1*	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
33	9.c.1*	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile <i>broadband</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	22	24	27	30	SS	Tanpa Upaya Tambahan
34	9.c.1.(a)	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,00	96,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
35	9.c.1.(b)	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,00	96,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
36	17.6.2.(b)	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20,80	24,10	27,40	30,70	34,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
37	17.6.2.(c)	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile <i>broadband</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
38	17.8.1*	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
39	17.19.2.(c)	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.829,20	80.880,40	84.931,60	88.982,80	93.034,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
40	9.3.2*	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	8,15	8,49	8,83	9,17	9,51	SS	Tanpa Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	OPD	Proyeksi					Status 2029	Skenario
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Perdagangan dan Perindustrian							
41	6.3.2.(b)	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	88,00	94,00	100,00	106,00	112,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
42	15.1.1.(a)	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	91,06	95,68	100,30	104,92	109,54	SS	Tanpa Upaya Tambahan
43	15.3.1.(a)	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.750,22	54.750,14	54.750,06	54.749,98	54.749,90	SS	Tanpa Upaya Tambahan
44	15.9.1.(a)	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	SS	Tanpa Upaya Tambahan
45	8.9.1*	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	4,86	5,31	5,76	6,21	6,66	SS	Tanpa Upaya Tambahan
46	6.2.1.(d)	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	49,60	54,40	59,20	64,00	68,80	SS	Tanpa Upaya Tambahan
47	11.1.1.(a)	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	85,95	87,55	89,15	90,75	92,35	SS	Tanpa Upaya Tambahan
48	10.1.1.(c)	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
49	10.1.1.(d)	10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	21,15	24,31	27,46	30,62	33,77	SS	Tanpa Upaya Tambahan
50	10.1.1.(e)	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	NA	NA	NA	NA	NA	SS	Tanpa Upaya Tambahan
51	4.1.1*	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	OPD	Proyeksi					Status 2029	Skenario
				2025	2026	2027	2028	2029		
		minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.								
52	4.1.1.(g)	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,87	8,98	9,09	9,19	9,30	SS	Tanpa Upaya Tambahan
53	4.5.1*	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di: 1) SD/MI/ sederajat; 2) SMP/MTs/ sederajat; 3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di: Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SD: 99.45% SMP: 91.43%	SD: 99.66% SMP: 92.28%	SD: 99.56% SMP: 93.11%	SD: 99.65% SMP: 93.82%	SD: 99.82% SMP: 94.56%	SS	Tanpa Upaya Tambahan
54	4.6.1.(b)	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
55	1.3.1.(b)	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66,97	81,15	95,33	109,51	123,69	SS	Tanpa Upaya Tambahan
56	8.5.1*	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.677,00	16.722,00	16.767,00	16.812,00	16.857,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
57	8.2.1*	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,00	6,93	7,87	8,80	9,73	SS	Tanpa Upaya Tambahan
58	8.3.1*	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56,54	58,14	59,74	61,34	62,95	SS	Tanpa Upaya Tambahan
59	8.3.1.(a)	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49,86	50,53	51,21	51,89	52,57	SS	Tanpa Upaya Tambahan
60	10.4.1.(b)	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66,97	81,15	95,33	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
61	5.2.2.(a)	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3AP2KB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
62	5.2.2*	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	9,70	6,30	2,90	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan

No	No Indikator	Indikator	OPD	Proyeksi					Status 2029	Skenario
				2025	2026	2027	2028	2029		
63	5.3.1.(a)	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	DP3AP2KB	20,49	20,58	20,67	20,76	20,85	SS	Tanpa Upaya Tambahan
64	5.5.1*	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3AP2KB	32,74	36,16	39,58	43,00	46,42	SS	Tanpa Upaya Tambahan
65	16.2.1.(b)	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DP3AP2KB	0,84	0,70	0,55	0,41	0,27	SS	Tanpa Upaya Tambahan
66	16.2.3.(a)	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3AP2KB	76,16	71,79	67,42	63,05	58,68	SS	Tanpa Upaya Tambahan
67	16.7.1.(a)	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DP3AP2KB	28,69	31,17	33,66	36,14	38,63	SS	Tanpa Upaya Tambahan
68	16.7.1.(b)	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	DP3AP2KB	18,55	19,68	20,81	21,94	23,07	SS	Tanpa Upaya Tambahan
69	16.6.1.(a)	16.6.1.(a) Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Inspektorat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SS	Tanpa Upaya Tambahan
70	16.1.2.(a)	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan
71	16.1.3.(a)	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SS	Tanpa Upaya Tambahan

Sumber : Analisis, 2024

BAB 7. KESIMPULAN

Kesimpulan dan beberapa poin penting dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 – 2029 antara lain adalah:

1. Kondisi daya dukung dan daya tampung Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:
 - Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Lamandau berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung pangan didominasi status aman atau belum terlampaunya kebutuhan terhadap ketersediaan.
 - Ketersediaan air juga sangat penting untuk diperhatikan karena Air yang bersih, aman dan jumlah yang cukup merupakan salah satu komponen yang penting untuk dijaga guna keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup serta menunjang keberlangsungan ekosistem, komunitas dan ekonomi. Perhitungan daya dukung air dengan membandingkan ketersediaan (SA) dan kebutuhan air (DA). Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, dominasi daya dukung dan daya tampung air berada pada kelas aman.
 - Faktor demografi utamanya jumlah penduduk memiliki peranan terpenting dalam menilai daya dukung permukiman. Daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Pada Kabupaten Lamandau Hasil analisis daya dukung lahan permukiman menunjukkan bahwa pada akhir tahun perencanaan, daya dukung permukiman di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamandau tergolong aman.
2. Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) sampai target SDGs berakhir (2030) dan tahun akhir RPJMD 2029 menurut masing-masing pilar adalah:
 - Pilar Sosial pada tahun 2023 telah mencapai target nasional RPJMN 2019 sebanyak 38 indikator, namun diproyeksikan menurun pada tahun 2029 menjadi 35 indikator bila dibandingkan dengan target nasional 2030.
 - Pilar Ekonomi pada tahun 2022 telah mencapai target nasional RPJMN 2019 sebanyak 24 indikator, namun diproyeksikan menurun pada tahun 2029 menjadi 23 indikator bila dibandingkan dengan target nasional 2030
 - Pilar Lingkungan pada tahun 2022 telah mencapai target nasional RPJMN 2019 sebanyak 8 indikator, dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2029 menjadi 12 indikator bila dibandingkan dengan target nasional 2030
 - Pilar Hukum dan Tata Kelola pada tahun 2022 telah mencapai target nasional RPJMN 2019 sebanyak 7 indikator, dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2030 menjadi 8 indikator bila dibandingkan dengan target nasional 2030
3. Permasalahan dalam pencapaian TPB, apabila dilihat dari kacamata isu strategis pembangunan berkelanjutan terbagi menjadi delapan permasalahan utama. Permasalahan strategis pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian TPB adalah sebagai berikut:
 - a) Penurunan Kualitas Air

- b) Potensi Bencana dan Perubahan Iklim
 - c) Terjadinya Alih Fungsi Lahan
 - d) Degradasi Lingkungan
 - e) Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Wilayah
 - f) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - g) Masih Terdapat Kemiskinan
 - h) Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Dalam poin 3 disebutkan bahwasannya dengan proyeksi *Business As Usual* terdapat beberapa indikator yang memiliki kinerja menurun. Sehingga untuk memastikan bahwa pada tahun 2029 keseluruhan indikator dapat mencapai target maka dirumuskanlah skenario pencapaian target pada tiap indikatornya. Perumusan skenario KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (mempertimbangkan risiko dampak turunan dari pencapaian indikator lain) dan aspek pembagian peran (pemerintah dan non-pemerintah). Perumusan skenario digunakan untuk mengelompokkan indikator TPB ke dalam kelompok dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan
5. Terdapat Rekomendasi indikator TPB dengan upaya tambahan sebanyak 74 indikator dan rekomendasi indikator TPB untuk pendataan sebanyak 66 indikator. Rekomendasi berupa program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, A.S. dan Murniningtyas, E. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*. Unpad Press. Bandung
- Asdak, Chay. 2022. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Edisi Revisi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2023. Rancangan Akhir RPJPN 2025 2045. Jakarta
- DEAT. 2004. Strategic Environmental Assessment, Integrated Environmental Management Series, Pretoria.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018, Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019. Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Gd. Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6 Wing C Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270
- R, Belinda & Bidoglio, Giovanni & F, Schutyser & Uppeandra, Dhar & Gundimeda, Haripriya & Gomez-Prieto, Oscar. (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity: The Ecological and Economic Foundations (TEEB D0).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU



● ● ● **2024**

Laporan Akhir

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD Kabupaten Lamandau

Tahun 2025-2029